PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO

LPPD

KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2025



Riyanda Putra, S.IP
Wali Kota Sawahlunto

H. Jeffry Hibatullah
Wakil Wali Kota Sawahlunto







Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kota Sawahlunto
Tahun Angaran 2025

- Perencanaan Pembangunan
- Capaian Kinerja
- Penerapan & Pencapaian
- Tugas Umum Pemerintahan

Jl. Soekarno Hatta No.2 Sawahlunto
Bagian Pemerintahan Sekterariat Daerah

Visit us:
https://sawahluntokota.go.id

DAFTAR ISI

PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1. Latar Belakang 1

1.1.1. Penjelasan Umum 1

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 21

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 283

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **289**

2.1. Capaian Kinerja Makro 289

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 317

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 770

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN **797**

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL **798**

4.1. Urusan Pendidikan 798

4.2. Urusan Kesehatan 808

4.3. Urusan Pekerjaan Umum 872

4.4. Urusan Perumahan Rakyat 878

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 883

4.6. Urusan Sosial 909

BAB V PENUTUP **935**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 dapat tersusun tepat pada waktunya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto merupakan salah satu agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Sistematika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sawahlunto Tahun 2025 memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Capaian Kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian kinerja makro yang meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, dan ketimpangan pendapatan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Serta capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Sawahlunto dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam laporan ini masih belum sempurna terkait masalah data, analisis informasi, metode penyajian, kesimpulan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami sebagai Wali Kota Sawahlunto mengharapkan masukan, saran, serta koreksi yang konstruktif dari Pemerintah demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan semua pihak yang telah membantu penyusunan LPPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahannya, serta kemajuan yang dicapai Pemerintah Kota Sawahlunto selama tahun anggaran 2025.

Sawahlunto, 30 Maret 2026
Wali Kota Sawahlunto,



Riyanda Putra

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

1.1. Penjelasan Umum

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah, dan mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 serta menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/989/OTDA tanggal 12 Februari 2026 Hal Penyampian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025, maka setiap Pemerintah Daerah pada akhir tahun wajib menyampaikan laporan Capaian Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Kunci per Kategori Urusan.

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembentukan Daerah sebagaimana tertulis pada Bab I Pasal 1 ayat (3) “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Bab II Pasal 2 ayat (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Pasal 4 ayat (2) Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administrastif yang menjadi Wilayah kerja bagi Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten/Kota”. Bab IV Urusan Pemerintahan, Bagian Ketiga, Urusan Pemerintahan Konkuren, Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan kokuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar”.

Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

1) Pendidikan;

2) Kesehatan;
3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6) Sosial

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1) Tenaga kerja ;
2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3) Pangan;
4) Pertanahan,
5) Lingkungan hidup
6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9) Perhubungan
10) Komunikasi dan informatika;
11) Koperasi, usaha kecil dan menengah
12) Penanaman modal
13) Kepemudaan dan olah raga
14) Statistik
15) Persandian;
16) Kebudayaan;
17) Perpustakaan; dan
18) Kearsipan

Pasal 12 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1) Kelautan Dan Perikanan;
2) Pariwisata;
3) Pertanian;
4) Kehutanan;
5) Energi dan Sumber Daya Miniral
6) Perdagangan;
7) Perindustrian;
8) Transmigrasi

Selanjutnya berdasaarkan prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi kewenangan Daerah/ Kabupaten Kota adalah:

1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/kota

2) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabuapten /Kota dan atau;
4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efesien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, terkait pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 70 ayat (3) Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 70 ayat (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada ayat (5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai bahan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

b. Data Geografis Wilayah

Kondisi geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan bukit barisan dengan posisi $0^{o}33^{o}$-$0^{o}43^{o}$ Lintang Selatan,100° $43°1$$00°$-$^{o}50°$’ Bujur Timur. Ketinggian dari Permukaan Laut: 250 – 785 mdpl/m.a.s.l, dengan batas-batas administratif daerah:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Kabupaten Solok
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Kabupaten Solok

Kota Sawahlunto dikenal sebagai Kota Tambang memiliki luas wilayah 27.345 Ha (273.45km ^{2}) atau sekitar 0,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Secara administrasi Kota Sawahlunto terdiri dari 4 kecamatan, 10 kelurahan dan 27 desa. Kecamatan Silungkang menjadi kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 32,93 km^2 atau sebesar 12,04 persen sedangkan kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas 99,39 km^2 atau sekitar 36,35 persen keseluruhan Kota Sawahlunto.

Tabel : 1.b
Luas wilayah Kota Sawahlunto perkecamatan (km^2)

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)
(1)	(2)	(3)
1.	Kecamatan Silungkang	32,93
2.	Kecamatan Lembah Segar	52,58
3.	Kecamatan Barangin	88,55
4.	Kecamatan Talawi	99,39
	Jumlah	**273,45**

Sumber: Kantor Camat di Kota Sawahlunto

Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah Kota di Sumatera Barat khususnya di Indonesia. Sebagai salah satu kota, Kota Sawahlunto lebih didominasi oleh Desa yang merupakan karakter sebuah Kabupaten. Hal ini menyebabkan Kota Sawahlunto memperoleh dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu dana desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Kota Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya dengan anggaran dana desa yang mendekatkan pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk sangat menentukan dalam proses pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut sesuai data kependudukan bahwa penduduk Kota Sawahlunto tahun 2010 berjumlah 56.866 jiwa, tahun 2020 berjumlah 64.817 jiwa, tahun 2023 berjumlah 67.758 jiwa,tahun 2024 berjumlah 68.738 jiwa dan tahun 2025 berjumlah 69.700 Jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Barangin dan terbanyak kedua di Kecamatan Talawi.

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto dan laju pertumbuhan Penduduk pertahun 2024-2025 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Kota Sawahlunto perkecamatan (jiwa)

No	Kecamatan	Populasi 2024	Populasi 2025	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2024-2025
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Silungkang	11.960	12.110	1,29
2.	Lembah Segar	13.860	14.000	1,05
3.	Barangin	21.780	22.180	1,91
4.	Talawi	21.130	21.410	1,38
	Kota Sawahlunto	**68.730**	**69.700**	**1,46**

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Laju pertumbuhan penduduk paling besar berada di Kecamatan Barangin yaitu 1,91 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang paling kecil adalah di Kecamatan Lembah Segar yang hanya 1,05 persen.

Tabel 1.2
Kepadatan penduduk Kota Sawahlunto perkecamatan

Kecamatan	Kepadatan Penduduk Pupulasi/ Luas Wilayah		Kepadatan Penduduk
	Populasi	Luas Wilayah	
(1)	(2)	(3)	(5)
Silungkang	12.110	32,93	367,6
Lembah Segar	14.000	52,58	266,62
Barangin	22.180	88,55	250,51
Talawi	21.410	99,39	215.38
Kota Sawahlunto	**69.700**	**273,45**	**254,87**

Sumber: *BPS Kota Sawahlunto*

Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap satu kilometer persegi. Kepadatan penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2025 tercatat sebanyak 254,87 jiwa/km2 , artinya dalam setiap luas daerah 1 km2 terdapat penduduk sebanyak 254 sampai 255 jiwa. Dari empat kecamatan di Kota Sawahlunto, Kecamatan Silungkang tercatat sebagai kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebanyak 367,6 jiwa/km2. Berikutnya Kecamatan Lembah Segar 266,62 jiwa/km2, Kecamatan Barangin 250,51 jiwa/km2 dan kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Talawi yang hanya 215,38 jiwa/km2 . Jenis kelamin merujuk pada jumlah laki-laki per 100 perempuan dalam suatu populasi tertentu. Biasanya dinyatakan sebagai rasio kelahiran laki-laki terhadap kelahiran perempuan, atau rasio jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan

dalam populasi total. Jumlah Penduduk perkecamatan berdasarkan jenis kelamin dan rasio jenis kelamin/ s*ex ratio* (SR) sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rasio jenis kelamin/*sex ratio* Kota Sawahlunto perkecamatan

Kecamatan	***Sex Ratio* (SR)**
(1)	(5)
Silungkang	102,19
Lembah Segar	101,38
Barangin	99,70
Talawi	102,01
Kota Sawahlunto	**101,17**

Sumber: *BPS Kota Sawahlunto*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa SR Kota Sawahlunto 2025 sebesar 101,17 yang artinya setiap 100 orang perempuan di Kota Sawahlunto terdapat 101-102 orang laki-laki. Keadaan serupa terjadi juga di Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Talawi yang memiliki SR melebihi 100. Di Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Barangin SR mendekati 100 yang mengindikasikan distribusi penduduk laki-laki dan perempuan yang lebih seimbang.

d. Jumlah Kecamatan

Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) kecamatan, 27 desa dan 10 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kecamatan Talawi
2) Kecamatan Barangin
3) Kecamatan Lembah Segar
4) Kecamatan Silungkang

Masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa desa/kelurahan, dengan rincian sebagai beikut:

Kecamatan Talawi:

1) Desa Sikalang
2) Desa Rantih
3) Desa Salak
4) Desa Sijantang Koto
5) Desa Talawi Hilir
6) Desa Talawi Mudik
7) Desa Bukit Gadang
8) Desa Batu Tanjung

9) Desa Kumbayau
10) Desa Datar Mansiang
11) Desa Tumpuk Tangah

Kecamatan Barangin:

1) Desa Lumindai
2) Desa Balai Batu Sandaran
3) Desa Talago Gunung
4) Desa Santur
5) Desa Kolok Mudik
6) Desa Kolok Nan Tuo
7) Kelurahan Saringan
8) Kelurahan Lubang Panjang
9) Kelurahan Durian I
10) Kelurahan Durian II

Kecamatan Lembah Segar:

1) Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan
2) Kelurahan Kubang Sirakuk Utara
3) Kelurahan Air Dingin
4) Kelurahan Aur Mulyo
5) Kelurahan Pasar
6) Kelurahan Tanah Lapang
7) Desa Lunto Barat
8) Desa Lunto Timur
9) Desa Pasar Kubang
10) Desa Kubang Tangah
11) Desa Kubang Utara Sikabu

Kecamatan Silungkang:

1) Desa Taratak Bancah
2) Desa Muaro Kalaban
3) Desa Silungkang Tigo
4) Desa Silungkang Duo
5) Desa Silungkang Oso

e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah

Seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah diberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

e.1. Jumlah Perangkat Daerah

Jumlah perangkat daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari 27 Organisasi Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1) Sekretariat Daerah
2) Sekretariat DPRD
3) Inspektorat Daerah
4) Dinas Pendidikan
5) Dinas Kebudayaan
6) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
7) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
9) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
10) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
12) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15) Dinas Perhubungan.
16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
18) Dinas Komunikasi dan Informatika
19) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
20) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24) Kecamatan Talawi
25) Kecamatan Barangin
26) Kecamatan Lembah Segar
27) Kecamatan Silungkang

e.2. Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah

Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto sebanyak 9 (Sembilan) unit dengan rincian sebagai berikut:

1) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sawahlunto yang juga menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kota Sawahlunto menjadi Satuan Pendidikan Formal.
2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Kota Sawahlunto berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 43 Tahun 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksna Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto menjadi Satuan Pendidikan Formal.
3) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 45 Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto.
4) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 46 Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto.
5) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 47 Tahun 2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto.
6) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas

Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

7) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto.
8) Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto.
9) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto, berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto.

e.3. Pegawai Pemerintah

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto kondisi 31 Desember 2025 berjumlah 3.600 orang yang terdiri dari 1.835 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 1765 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). PNS Kota Sawahlunto didominasi oleh Guru sedangkan PPPK didominasi oleh tenaga pelaksana. yang didominasi oleh tenaga kesehatan. Perbandingan ASN per jenis kelamin dapat dilihat melalui tabel di bawah:

Tabel 1.4

Data ASN Pemko Sawahlunto Berdasarkan Jenis Kelamin
Kondisi 31 Desember 2025

No	ASN		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PNS	Guru	93	411	**1.835**
2.		Non Guru	489	842	
3.		Instansi Vertikal	0	0	
4.	PPPK	Tenaga Guru	34	203	**1765**
5.		Tenaga Kesehatan	38	238	
6.		Tenaga Teknis	143	186	
		Tenaga Umum	492	431	
Jumlah			**1.289**	**2.311**	**3.600**

Sumber: BKPSDM Kota Sawahlunto Tahun 2025

Perincian Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dapat dibagi menjadi PNS dan PPPK berdasarkan golongannya. PNS terbagi atas Golongan I sebanyak 1 orang, Golongan II sebanyak 182 orang, Golongan III sebanyak 1.312 orang, dan Golongan IV sebanyak 340 orang. Sedangkan, PPPK penuh waktu dapat dibagi menjadi PPPK Golongan I sebanyak 1 orang Golongan V sebanyak 108 orang, Golongan VII sebanyak 245 orang, Golongan IX sebanyak 490 orang, dan Golongan X sebanyak 50 orang. Dari data di atas dapat dilihat bahwa persentase PNS terbanyak di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto adalah PNS Golongan III dengan persentase sebesar 71,5 persen. Sedangkan untuk PPPK, persentase terbesar berada pada PPPK Golongan IX sebesar 53,87 persen. Sebaran PNS dan PPPK per Golongan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.5

Data ASN Pemko Sawahlunto Berdasarkan Golongan
Kondisi 31 Desember 2025

No	PNS			PPPK		
	Gol.	Jumlah	%	Gol.	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	I	1	0.05	I	11	1.23
2.	II	182	9.92	V	108	12.09
3.	III	1312	71.50	VII	245	27.44
4.	IV	340	18.53	IX	490	54.87
				X	50	5.60
1,835			**100.00**		**893**	**100.00**

Sumber: BKPSDM Kota Sawahlunto Tahun 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, ASN Pemko Sawahlunto didominasi lulusan pendidikan tinggi sebesar 58,31 persen yang merupakan pegawai dengan tingkat pendidika dari D4/S1 hingga S3. Lulusan pendidikan tinggi tersebut berjumlah 2.107 orang yang terdiri dari 1.404 orang PNS dan 703 orang PPPK. Sebarannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.6
Data ASN Pemko Sawahlunto
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kondisi 31 Desember 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SD	3	38	41	1.14
2.	SLTP	7	43	50	1.39
3.	SLTA	147	705	852	23.67
4.	Diploma I dan II	7		7	0.19
5	Diploma III	267	276	543	15.08
6.	D4/S1, Profesi, S2/S3	1404	703	2107	58.53
Jumlah		**1.876**	**1765**	**3600**	**100**

Sumber: BKPSDM Kota Sawahlunto Tahun 2025

Sejumlah 3.600 orang ASN Pemko Sawahlunto yang berstatus PNS didominasi oleh jabatan fungsional sebanyak 1.551 orang yang terdiri dari 387 orang dengan jabatan fungsional umum, 235 orang dengan jabatan fungsional tertentu, 504 orang fungsional guru, dan 425 orang fungsional medis. Kemudian pada jabatan Eselon, Eselon II terdiri dari 24 orang, Eselon III 94 orang, dan Eselon IV 166 orang. Sebarannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 1.7
Data ASN Pemko Sawahlunto Berdasarkan Eselon
Kondisi 31 Desember 2025

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Eselon II	19	5	24
2.	Eselon III	55	39	94
3.	Eselon IV	76	90	166
4.	Fungsional Tertentu	98	137	235
5.	Fungsional Umum	183	204	387
6.	Fungsional Guru	93	411	504
7.	Fungsional Medis	58	367	425
8.	PPPK	707	1058	1765
Jumlah		**1289**	**2311**	**3600**

Sumber: BKPSDM Kota Sawahlunto Tahun 2025

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

f.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara Alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan realisasinya. yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto pada tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.584.143.521.921,20 dengan realisasi Rp.586.868.481.637,71 atau 100,46 % yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan target Rp.72.126.034.897.- terealisasi Rp.72.439.372.835,71atau 100.43 %.Pendapatan Transfer dengan target Rp.511.867.637.015,20 terealisasi Rp.514.279.258.802.00 atau 100,47 % serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan target Rp.149.850.000.-terealisasi Rp.149.850.000.00 atau 100 %.Adapun rincian jenis-jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
   a) Pajak Daerah target Rp.15.641.347.548 dengan realisasi Rp.18.234.622.786.00 atau 116,5 %.
   b) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.34.810.753.253 dengan realisasi Rp.32.278.093.418.00 atau 93 %.
   c) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan target Rp.17.289.759.395.- dengan realisasi Rp.17.289.759.395.00 atau 100 %.
   d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah target Rp.4.384.174.701.00 terealisasi Rp.4.636.897.236.71 atau 106 %.

2) Pendapatan Transfer terdiri atas :
   a) Pendapatan transfer pemerintah pusat ditargetkan Rp.496.711.759.000.00 dengan realisasi Rp.488.033.120.993.00 atau 98,3 %.
   b) Pendapatan Transfer antar daerah target Rp.15.155.878.015,20 terealisasi Rp.26.246.137.809.00 atau 173,2 %.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
   Untuk tahun 2025 Kota Sawahlunto memiliki target Pendapatan Hibah Rp.149.850.000.00 yang terealisasi 100 %.

f.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025dianggarkan Rp.610.026.422.904 dengan realisasi Rp.562.910.010.607,28 atau 92,3 % yang terdiri dari Belanja Operasi dianggarkan Rp.523.139.013.276 terealisasi Rp.482.193.499.633.88 atau 92,2 %. Belanja Modal dianggarkan Rp.23.281.159.098.- dengan realisasi Rp.22.109.067.014.40 atau 95 %. Belanja Tidak Terduga dengan anggaran Rp.1.967.435.630.-tidak terealisasi .Belanja Transfer dengan anggaran Rp.61.638.814.900.- terealisasi Rp.58.607.443.959.00 atau 95 %. Adapun rincian jenis- jenis belanja sebagai berikut:

1) Belanja Operasi terdiri atas:
   a) Belanja Pegawai dianggarkan Rp.315.314.578.922.- dengan realisasi Rp.296.864.707.300.00 atau 94 %.
   b) Belanja barang dan jasa dianggarkan Rp.196.685.170.464.- terealisasi Rp.174.717.529.772,88 atau 89 %.
   c) Belanja Bunga anggaran Rp.1.150.000.000.00 terealisasi Rp.821.173.862.00 atau 71.40 %.
   d) Belanja Hibah dianggarkan Rp.7.300.118.890.- terealisasi Rp.7.110.638.699.00 atau 97.40 %.
   e) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp.2.689.145.000.- terealisasi Rp.2.679.450.000.00 atau 99,6 %.
2) Belanja Modal terdiri atas:
   a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan Rp.5.561.572.402.- terealisasi Rp.4.865.927.682.00 atau 87,49 %.
   b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan Rp.1.048.650.000.- terealisasi Rp.1.021.739.850.00 atau 97,43 %.

c) Belanja Modal Jalan jaringan dan Irigasi dianggarkan sebesar Rp.15.048.022.630.- terealisasi Rp.14.608.431.816,40 atau 97,07 %.
d) Belanja Modal Aset tetap lainnya dianggarkan Rp.1.238.914.066.00.- terealisasi Rp.1.238.914.066.00 atau 99.99 %.
e) Belanja Modal aset lainnya dianggarkan Rp.384.000.000.00 dan terealisasi Rp.374.070.000.00 atau 97.41 %.

f.3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan daerah dianggarkan Rp.25.882.900.991.80 dengan realisasi Rp.25.141.591.702,96 atau 97,13 % terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dengan target Rp.27.549.567.660.80terealisasi Rp.26.308.258.370,96 atau 95,5 %.Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.1.666.666.669.00 terealisasi Rp.1.166.666.668,00 Adapun rincian jenis pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan terdiri atas:
   a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya ditargetkan Rp.26.308.138.370,96 dengan realisasi Rp.26.308.138.370,96 atau 100 %.
   b) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dengan anggaran Rp.1.241.429.289,84 terealisasi Rp.120.000,00.
2) Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:
   a) Pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo dianggarkan Rp.1.166.666.669 terealisasi Rp.1.166.666.668 atau 99.99 %.
   b) Pemberian Pinjaman Derah dianggarkan Rp.500.000.000.00 namun pada tahun 2025 tidak terealisasi.

Secara rinci realisasi APBD Kota Sawahlunto dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.8
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	APBD 2025	
		Anggaran (Rp)	***Realisasi (Rp)***
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	**PENDAPATAN**	**584.143.521.912,20**	**586.868.481.637,71**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	***72.126.034.897,00***	***72.439.372.835,71***
	Pendapatan Pajak Daerah	15.641.347.548,00	18.234.622.786,00
	PendapatanRetribusi Daerah	34.810.753.253,00	32.278.093.418,00
	Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.289.759.395,00	17.289.759.395,00
	Lain-lain PAD yang Sah	4.384.174.701,00	4.636.897.236,71
	PENDAPATAN TRANSFER	***511.867.637.015,20***	***514.279.258.802,00***
	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	28.359.234.000,00	27.720.770.000,00
	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum (DAU)	382.035.642.000,00	380.638.530.103,00
	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.355.359.000,00	6.316.876.346,00
	Dana Transfer khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	49.596.483.000,00	45.248.864.616,00

No	URAIAN	APBD 2025	
		Anggaran (Rp)	***Realisasi (Rp)***
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	Dana Desa	21.612.927.000,00	19.355.965.928,00
	Insentif Fiskal	8.752.114.000,00	8.752.114.000,00
	PendapatanTransfer Antar Daerah	15.155.878.015,20	26.246.137.809,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	149.850.000,00	149.850.000,00
	Pendapatan Hibah	149.850.000,00	149.850.000,00
	Dana Darurat	0.00	0.00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00
2	**BELANJA**	**610.026.422.904,00**	**562.910.010.607,28**
	BELANJA OPERASI	**523.139.013.276,00**	**482.193.499.633,88**

No	URAIAN	APBD 2025	
		Anggaran (Rp)	***Realisasi (Rp)***
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	BelanjaPegawai	315.314.578.922,00	296.864.707.300,00
	Belanja Barang dan Jasa	196.685.170.464,00	174.717.529.772,88
	Belanja Bunga	1.150.000.000,00	821.173.862,00
	Belanja Hibah	7.300.118.890,00	7.110.638.699,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.689.145.000,00	2.679.450.000,00
	BELANJA MODAL	**23.281.159.098,00**	**22.109.067.014,40**
	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.561.572.402,00	4.865.927.682,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.048.650.000,00	1.021.739.850,00
	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	15.048.022.630,00	14.608.431.816,40

No	URAIAN	APBD 2025	
		Anggaran (Rp)	*Realisasi (Rp)*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.238.914.066,00	1.238.897.666,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.967.435.630,00**	**0**
	Belanja Tidak Terduga	1.967.435.630,00	0
	BELANJA TRANSFER	**61.638.814.900,00**	**58.607.443.959,00**
	Belanja Bagi Hasil	1.892.817.000,00	1.118.407.131,00
	BelanjaBantuanKeuangan	59.745.997.900,00	57.489.036.828,00
	SURPLUS / DEFISIT	**(25.882.900.991,80)**	**23.958.471.030,43**
3	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**27.549.567.660,80**	**26.308.258.370,96**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.308.138.370,96	26.308.138.370,96
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.241.429.289,84	120.000,00

No	URAIAN	APBD 2025	
		Anggaran (Rp)	***Realisasi (Rp)***
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**1.666.666.669,00**	**1.166.666.668,00**
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	1.166.666.668,00
	PemberianPinjaman Daerah	500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**25.882.900.991,80**	**25.141.591.702,96**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	**49.100.062.733,39**

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan permasalahan yang ada serta analisis terhadap isu-isu strategis yang ada pada tingkat global, nasional, regional maupun lokal dengan pendekatan analisis keterkaitan, maka permasalahan strategis yang harus ditangani oleh Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan Manusia
   a) Peningkatan derajat kesehatan;
   b) Penurunan prevalensi stunting;
   c) Peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan karakter;
   d) Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan.
2) Pembangunan Insfrastruktur dan Lingkungan Hidup
   a) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur;
   b) Peningkatan konektivitas antar wilayah potensial;
   c) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   d) Peningkatan pengendalian dan pemanfaatan ruang;
   e) Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman;
   f) Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah.
3) Pembangunan Ekonomi
   a) Peningkatan stabilitas harga;
   b) Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan status OCMHS dan Geopark nasional;
   c) Peningkatan nilai tambah untuk sektor industri dan pertanian;
   d) Peningkatan investasi daerah;
   e) Peningkatan pendapatan asli daerah;
   f) Penghapusan kemiskinan ekstrem.
4) Tata Kelola Pemerintahan
   a) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
   b) Peningkatan pelayanan publik menuju pelayanan publik prima;
   c) Penguatan Inovasi Daerah.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Masa jabatan Wali Kota Sawahlunto periode 2018-2023 berakhir Tahun 2023. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Wali

Kota diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang akan digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pj. Kepala Daerah tidak mempunyai visi dan misi, sehingga penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025.

Visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 adalah “Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

1) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat ditengah-tengah masyarakat;
2) Meningkatkan fasilitas pelayanan umum;
3) Mengembangkan objek wisata tambang;
4) Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Untuk mencapai Visi dan Misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 tersebut di atas, maka disusunlah Program Pembangunan Daerah sebagaimana Tabel 1.9 di bawah ini:

Tabel 1.9
Program Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Defenisi Operasional	Target Kinerja Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1 : Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia**	**75,24**	
Sasaran 1.1 : Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	**Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)**	**Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur**	**70,75**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**
	Prevalensi Stunting	**(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak baita pada waktu yang sama) x 100 %**	**12,5**	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Rumah sakit yang tersedia/Jumlah Penduduk x 100	0,16	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi (%)	Jumlah RS Rujukan tingkat yang terkreditasi/jumlah RS di kab/ Kota Sawahlunto x 100	100	
	Persentase Puskesmas terakreditasi	Jumlah puskesmas terakreditasi / jumlah seluruh puskesmas x 100	100	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan Penduduk	Jumlah dokter dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000	0,39	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya	Jumlah SDM kesehatan yang terlatih sesuai dengan kompetensinya dibagi dengan jumlah tenaga kesehatan seluruhnya x 100	100	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar dan persyaratan peizinan	Jumlah Sarana yang memenuhi standar dan pelayanan perizinan/Jumlah Sarana Pelayanan Kefarmasian x 100	85	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
	Persentase sarana pengelolaan makanan minuman sesuai standar berizin	Jumlah Sarana pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi standar perizinan/Jumlah Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman x 100	85	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan	Persentase Posyandu Prima yang ditetapkan dibagi dengan jumlah poskesdes dan poskeskel yang ada x 100	75	
Program Pengendalian Penduduk	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contrasepsi Prevalence Rate /MCPR)	Jumlah AkseptorAktif Moder/ Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	68	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	Jumlah PUS yang ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jumlah Pasangan Usia Subur)x 100	12,0	
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Kegiatan yang aktif dalam melaksanakan pembinaan 8 fungsi keluarga	Jumlah semua kelompok ketahanan keluarga yang mendapatkan informasi Bangga /Semua Jumlah Ketahanan Kelompok yang ada x 100	87	
Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	**Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)**	**lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.**	**13,75**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	**Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)**	**10,64**	
Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/Paket A %	Jumlah siswa SD atau jumlah seluruh anak yang berusia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto x 100%	111,21	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	APM SD/MI/Paket A %	Jumlah murid SD/sederajat usia 7-12 tahun/ jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kota Sawahlunto	99,8	
	Rata rata kemampuan literasi SMP berdasarkan assesmen nasional	Capaian kompetensi Literasi SMP adalah persentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	2,27	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

	Rata rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan assesmen nasional	Capaian kompetensi Numerasi SMP adalah persentase capaian satuan pendidikan setiap tingkatan kompetensi mahir, kompetensi cakap, kompetensi dasar dan kompetensi perlu intervensi khusus dikalikan bobot setiap kompetensinya	2,03	
	APK PAUD	Jumlah siswa PAUD/ jumlah seluruh anak yang berusia 3-6 tahun di Kota Sawahlunto x 100%	90,25	
Program Pengembangan Kurikulum	Pesentase Kurikulum Muatan Lokal Yang Dikembangkan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Dibagi Dengan Satuan Pendidikan Yang Ada Di Kota Sawahlunto	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Perizinan Pendidikan Yang Diselengarakan Oleh Masyarakat Jenjang PAUD/SD/SMP)	Jumlah Rekomendasi Usulan Yang Dikeluarkan/ Seluruh Usulan Yang Masuk X 100 %	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Memiliki Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Sesuai Standar Baik Kuantitas Maupun Kualitas Disetiap Jenjang Pendidikan Dibagi Dengan Jumlah Satuan Pendidikan Semua Jenjang Di Kota Sawahlunto	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tujuan 2 : Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	**Indeks infrastruktur Wilayah**	**[40 %{50%(50 % kualitas jalan + 50 % kualitas jembatan)} + {40 % (50 % kualitas SDA + 50 % kualitas drainase kondisi baik)} + (10 % bangunan Gedung Pemerintah kondisi baik)] + 20 % {60 %(50 % Pengurangan sampah + 50 % Pungutan sampah) + (40 % IKLH)] + [20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni][20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni)] + [10 % {(50 % kinerja Lalu lintas + (50 % kinerja PJU)} + [10 % {(50 % kampung +20 % rehabilitasi rekonstruksi tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + {30 % ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30 % edukasi proteksi kebakaran + 40 % Response Time}]/2**	**74**	
Sasaran 2.1 : Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi baik	**Persentase infrastruktur dalam kondisi baik**	**(Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, , Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5**	**71,74**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketersediaan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang saluran irigasi dikali seratus persen	51,72	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah Sarana prasarana air minum dalam kondisi baik/ Jumlah sarana prasarana Air minum yg terpasang) x 100	99,5	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik x 100%	(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD / Jumlah Rumah) x 100 %	92,25	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam kondisi baik (%)	Panjang Drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total panjang drainase x 100 %	48,66	

Sasaran 2.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)**	**Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5 % IKU, 21,9 % IKTL)**	**67,52**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
	Indeks Pengelolaan Persampahan	**Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah**	**68,66**	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen perencanaan yang memilliki dokumen kajian lingkungan hidup (%)	Jumlah Dokumen perencanaan yang memiliki dokumen kajian lingkungan hidup / Jumlah Dokumen Perencanaan yangmembutuhkan kajian lingkungan hidup x 100%	54,55	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Ketaatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan	(Jumlah Kegiatan yang melakukan pengelolan dan pemantauan / Jumlah Kegiatan Usaha) x 100 %	79	
Program pengelolaaan Kenanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase Wilayah yang dilaksanakan konservasi SDA (%)	(Luas RTH / Luas Wilayah Kota) x 100 %	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan/usaha yang memiliki izin PLB3 (%)	jumlah Kegiatan usaha yang memiliki izin PLB3/ Jumlah kegiatan Usahax 100%	77	
Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	jumlah usaha yang taat lingkungan/seluruh usaha yang berizin x 100	78	
Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	persentase masyarakat yang mendapat akses Diklat/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup(%)	Jumlah Masyarakat yang di diklat/Jumlah Masyarakat x 100%	100	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penghargaan bidang LH yang diperoleh	Jumlah penghargaan LH yg diberikan/ Jumlah seluruh penghargaanLH x 100%	100	

Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan (%)	Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan/Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang dilaporkan x100%	100	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang terkelola (%)	Total volume sampah ditangani/total volume timbunan sampah x 100 %	98	
Sasaran 2.3 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	**Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang**	**perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang**	**87**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa Konstruksi terampil (%)	Jumlah Pelaku Jasa Konstruksi yang bersetifikat dibagi jumlah pelaku jasa konstruksi X 100	15	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen dan informasi tata ruang	(Jumlah dokumen tata ruang yang tersedia / jumlah dokumen kebutuhan Penataan Ruang x 100%	50	
	Persentase kesesuaian dan keteraturan mendirikan bangunan	Jumlah bangunan sesuai tata ruang/ jumlah bangunan X 100		
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	Jumlah gedung pemerintah kondisi baik/ jumlah gedung pemerintahX100	86,89	
	Persentase bangunan dan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi	Jumlah bangunan yg direkomendasi : jumlah bangunan x 100%	65,11	
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/ kota (%)	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap/jumlah panjang jalan x 100 %	76,23	
	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	(Panjang Jembatan dalam kondisi mantap dibagi total panjang Jembatan) x 100 %	95,21	
Sasaran 2.4 : Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)**	**Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %**	**84**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**
	Persentase RTLH (%)	**(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %**	**7,16**	
Program Pengembangan Permukiman	Persentase luas permukiman yang tertata (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100	81,9	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Yang Direhabilitasi (%)	Jumlah Rumah terkena bencana yang direhab/ Jumlah rumah yang terkena bencana) x 100%	93	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Pemukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Ha)	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sesuai SK Walikota (Ha)	19,08	
Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Kawasan permukiman (%)	(luas permukiman yang tertata/luas permukiman) x 100 %	84	
Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	Jumlah unit yang sedang dibangun terfasilitasi PSU/ jumlah unit rumah x 100%	85	
	Persentase Tanah pemerintah yang tertib administrasi (%)	Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat/jumlah bidang tanah pemerintah x 100	26,69	
	Jumlah dokumen pertanahan	jumlah dokumen pertanahan yang tersedia	25	
Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian	**Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)**	**((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%**	**4,73**	
	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	**PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)**	**74,35**	
	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	**(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%**	**2,18**	
	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	**Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)**	**11,37**	
Sasaran 3.1 : Menurunnya Tingkat Pengganggguran	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)**	**Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%**	**4,83**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja (%)	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan x 100%	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Berwirausaha (%)	Jumlah lulusan pelatihan yang berwirausaha / Jumlah peserta pelatihan keseluruhan x 100%	7	

Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja (%)	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / Jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	25	
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/Jumlah total perusahaan x 100%	89	
Sasaran 3.2 : Meningkatnya Kontribusi Pariwisata	**Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)**	**Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran**	**2,3**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI (%)	Jumlah produk ekonomi kreatif yang bersertifikat HKI/ Jumlah produk ekonomi kreatif x 100%	2	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang profesional	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang profesional/ Jumlah pelaku ekonomi kreatif x 100%	25	
Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat kepuasan pengunjung (%)	Jumlah pengunjung yang mengatakan puas / jumlah seluruh pengunjung x 100%	75	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Objek Wisata Unggul (%)	Jumlah Objek Wisata Unggul/ jumlah objek wisata x 100%	55	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	Jumlah pemuda berprestasi yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (orang)	17	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (%)	Jumlah organisasi kepramukaan yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional/Jumlah organisasi kepramukaan x 100%	77	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional (atlit)	Jumlah atlit yang berprestasi tingkat provinsi/regional/nasional/internasional (atlit)	155	
Sasaran 3.3 : Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan	**Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)**	**Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri**	**10,95**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**
	Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	**Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan**	**14,98**	

perdagangan				
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian	Jumlah koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian/jumlah koperasi x 100%	77	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang meningkat volume usahanya	Jumlah UMKM yang meningkat volume usahanya/ Jumlah UMKM x 100%	4	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Persentase Koperasi yang dinilai kesehatannya (%)	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya/total koperasi x 100%	52	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola koperasi yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya	Jumlah pengelola koperasi bersertifikat / Total pengelola koperasi x100%	0,07	
	Persentase pengelola UMKM yang bersertifikat sesuai dengan bidang usahanya	Jumlah pengelola UMKM bersertifikat / Total UMKM x100%	52	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki izin usaha (%)	Jumlah UMKM yang memiliki izin usaha/Jumlah UMKM X 100%	47	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dengan minimal tipe C (%)	Jumlah pasar rakyat dengan minmal tipe C / jumlah pasar x 100%	14	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional	Jumlah bahan pokok yang stabil/Total kebutuhan bahan pokok x 100%	80	
Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk unggulan yang diekspor (%)	Jumlah produk unggulan yang diekspor/Jumlah Produk unggulan x 100%	50	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pesentase pasar tradisional tertib ukur (%)	Jumlah pasar tradisional tertib ukur/ jumlah pasar tradisional x 100%	28	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk dalam negeri yang dipromosikan (%)	Jumlah produk dalam negeri dipromosikan/Total Produk dalam negeri x100%	60	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang meningkat skala usahanya (%)	Jumlah IKM yang meningkat skala usahanya/ Total IKM x100%	2	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang mempunyai izin (%)	Jumlah Indsutri kecil menengah yang mempunyai izin/jumlah industri kecil dan menengah x 100%	50	

Program Pengelola Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terpublis di SIINAS(%)	Jumlah IKM yang terpublis di SIINAS /jumlah IKM X 100%	40	
Sasaran 3.4 : Terwujudnya Ketahanan Pangan	**Indeks Ketahanan Pangan (%)**	**Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.**	**73,88**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Kecukupan Kebutuhan Beras	Jumlah Produksi/Jumlah Kebutuhan Beras X 100 %	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	Survey indek rata-rata konsumsi pangan masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok	86,5	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	Jumlah penurunan produk rawan pangan/jumlah penduduk rawan pangan x 100%	6	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar dan Produk Pangan Olahan yang terdeteksi dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida	Perbandingan produk pangan segar yang terdeteksi dari cemaran mikroba bagi total bahan pangan yang menjadi sampel	93	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan	Jumlah Produksi perairan umum dan Budidaya	202	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	Jumlah kg ikan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia selama 1 tahun dslsm brntuk konfersi	39	
Sasaran 3.5 : Meningkatnya produksi pertanian	**Persentase kontribusi PDRB sektor Pertanian pada PDRB (%)**	**Kontribusi PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan**	**9,04**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Produktivitas x luas panen	15850	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Karet	Produktivitas x luas panen TM	1735	
	Jumlah Produksi Kakao	Produktivitas x luas panen TM	570	
	Jumlah Produksi :			

	Daging Sapi	Pemotongan tercatat + 5% (pemotongan tercatat) x 173,5	320	
	Daging Ayam	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	900,26	
	Telur	150% x populasi x 0,715 daging ayam ras pedaging	135,86	
	Rasio Serangan OPT terhadap Luas Tanam		01:10	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penambahan atau perbaikan jaringan irigasi	Jaringan irigasi yang ditambah atau diperbaiki/luas baku sawah x 100%	2,5	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari MHS dan zoonosis	Jumlah wilayah yang terkendali/jumlah wilayah yang terjangkit x 100%	90	
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pengendalian Serangan OPT terhadap Luas Tanaman pangan dan perkebunan	Luas lahan yang dikendalikan/luas lahan yang terserang x 100%	100	
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluh yang berprestasi	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang berprestasi	1	
	Jumlah Ketenagaan Penyuluh yang berprestasi	Jumlah Ketenagaan Penyuluh yang berprestasi	1	
Sasaran 3.6 : Meningkatnya nilai investasi	**Persentase peningkatan nilai investasi (%)**	**(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%**	**8,83**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	Jumlah realisasi investasi (PMDN dan PMA)	51	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	(Jumlah investor tahun n - jumlah investor tahun n-1) / Jumlah investor tahun n-1 x 100%	29	
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Dokumen Perizinan Dan Non Perizinan Sesuai SOP (%)	Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP/jumlah total perizinan dan non perizinan yang diterbitkan x 100%	100	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Peluang Investasi Yang Telah Divalidasi (%)	Jumlah perusahaan yang telah divalidasi/jumlah total perusahaan x 100%	50	

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terakses Publik (%)	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terakses publik/ jumlah total data dan informasi perizinan dan non perizinan x 100%	100	
Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB**	**57,32**	
Sasaran 4.1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	**Nilai SAKIP**	**Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB**	**62,5**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah**
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti/ Jumlah Kerjasama yang direncanakan x 100%	100	
	Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi	Jumlah Bantuan Hukum yang Difasilitasi/ Jumlah Permohonan Bantuan Hukum yang masuk x 100%	100	
	Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)	Jumlah Hafidz Al Quran pada Tahun n	650	
	Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto	Jumlah Zakat yang Terkumpul pada Tahun n (Milyar)	6,17	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%)	Jumlah kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi/jumlah kebijakan Perekonomian x 100%	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%)	Jumlah dana pembangunan yang terserap/ jumlah total dana pembangunan x 100%	94%	
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangai pada kuartal pertama Tahun / Jumlah kontrak keseluruhan Tahun n x 100%	0	
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif x 100%	66%	
	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan/ total belanja langsung x 100%	0,36	
Sasaran 4.2 : Meningkatnya Kualitas	**IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)**	**penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah**	**77**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan,**

Pengelolaan Keuangan				**Unsur Keuangan**
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Penilaian terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	77	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Keuangan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD Dengan Laporan BMD Yang Akurat Dan Akuntabel (%)	jumlah OPD dengan laporan BMD yang akurat dan akuntabel/jumlah total OPD X 100%	95	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%)	Total nilai PAD / total Pendapatan Daerah x 100%	12,35	
Sasaran 4.3 : Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	**Indeks Inovasi Daerah**	**Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)**	**63,01**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Perencanaan**
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD/RPD Kedalam RKPD (%)	Jumlah Program pada RKPD/ Jumlah Program pada RPJMD x 100%	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Perencanaan
	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	Jumlah Capaian Program/ Jumlah Target Program yang ada x 100%	100	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Bidang Mitra (%)	60% capaian sasaran pemkot + 20 % capaian sasaran PD + 20% capaian program X 100% (Bidang Mitra)	100	
	Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Kebijakan/Perencanaan Pembangunan (%)	Jumlah Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan/jumlah data perencanaan pembangunan x 100%	100	
Sasaran 4.4 : Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat	**Indeks kepuasan Masyarakat**	**Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik**	**85,82**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Unsur Kewilayahan**
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan KTP (%)	Jumlah pemilik KTP/ jumlah wajib KTP X 100%	99,8	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan KK (%)	Jumlah kepala keluarga yang memiliki KK/ jumlah kepala keluarga wajib KK X 100%	94	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (%)	Jumlah anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg sudah memiliki KIA x 100% Jumlah anak usia 0-17 th	80	

	Persentase keluarga yang tertib administrasi kependudukan (%)	Jumlah keluarga yang tertib administrasi kependudukan x 100 % Jumlah KK	90	
Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akte kelahiran (%)	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir /Jumlah anak usia 0-18 tahun x 100%	68	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan akte kematian (%)	Jumlah penerbitan akte kematian/ jumlah kematian yang dilaporkan x 100%	100	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	ValidItas Data Kependudukan (%)	Pelaksanaan validasi data kependudukan	100	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyediaan Profil Kependudukan (Buku)	Jumlah jenis buku profil yang tersedia	3	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana/jumlah kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik x 100%	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec.Barangin)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana/jumlah kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik x 100%	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kec. Lembah Segar)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Silungkang)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Kewilayahan (Kecamatan Talawi)
Sasaran 4.5 : Meningkatnya Kualitas ASN	**Indeks Profesionalitas ASN**	**Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya**	**80**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kepegawaian**
Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi & menengah / dasar (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas : jumlah pegawai dg pendidikan SMA kebawah	2.95	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kepegawaian

	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yg memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	0.39	
	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru & tenaga kesehatan) : seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan	0.25	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemenuhan Penataan ASN (NSPK) Pemerintah Kota Sawahlunto	Nilai NSPK BKN	80	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	% pengawasan terlaksana sesuai PKPT	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan / Jumlah Rencana Pengawasan di PKPT x 100	100%	Perangkat Daerah Yang Menangani Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	IPAK tahun N - IPAK TAHUN n-1 / IPAK TAHUN n-1 x 100%	3,75	
	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang disusun	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan/Target x 100%	5 Rekomendasi	
Sasaran 4.6 Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi	**Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**	**Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah**	**3,15**	**Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Permendagri 86/2017	Ada	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
	Ketersediaan Buku "Kota Sawahlunto Dalam Angka"		Ada	
	Ketersediaan Buku " PDRB Kota Sawahlunto "		Ada	
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota	(Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota/jumlah penduduk) x 100%	100	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Program Aplikasi Informatika	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan Publik) x 100%	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75	

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Titik yang Diamankan Dibandingkan dengan Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan	Jumlah Titik yang Diamankan/ jumlah Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan x 100%	65	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah / Jumlah Total Perangkat Daerah x 100 % (Permendagri 86/2017)	100	

Sumber Data: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Secara lengkap, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran Tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah yang bersumber dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1.10
PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	7	8	9	10	11	19
						DINAS PENDIDIKAN				84.673.769.254	124.558.350.122	124.001.596.745	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				84.673.769.254	124.558.350.122	124.001.596.745	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				84.673.769.254	124.558.350.122	124.001.596.745	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	78.977.058.450	106.630.684.860	106.375.660.428	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	40.000.000	20.345.800	20.345.800	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	40.000.000	20.345.800	10.403.300	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	72.680.308.904	100.988.588.744	100.988.588.744	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	637 Orang/ bulan	637 Orang/ bulan	72.680.308.904	100.988.588.744	100.887.133.857	DINAS PENDIDIKAN
	1					NON URUSAN				84.673.769.254	124.558.350.122	124.001.596.745	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				84.673.769.254	124.558.350.122	124.001.596.745	

2	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	78.977.058.450	106.630.684.860	106.375.660.428	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	72.680.308.904	100.988.588.744	100.988.588.744	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				84.673.769.254	124.558.350.122	124.001.596.745	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				84.673.769.254	124.558.350.122	124.001.596.745	
3	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	78.977.058.450	106.630.684.860	106.375.660.428	
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	265.000.000	26.033.600	26.033.600	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	9.173.600	6.081.600	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	100 Orang	250.000.000	16.860.000	9.985.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	868.899.750	575.724.820	575.724.820	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.999.250	9.999.250	9.999.250	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	110.262.000	208.635.170	98.367.510	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24.990.000	8.190.000	8.190.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	250.000.000	216.928.000	216.928.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	164.965.500	131.972.400	98.979.575	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	308.683.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	100.000.000	100.000.000	94.600.440	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	4.745.624.796	4.701.586.896	4.701.586.896	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	92.557.584	92.557.584	92.557.584	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	17.000.000	17.000.000	17.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.631.067.212	4.587.029.312	4.587.029.312	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	277.225.000	218.405.000	218.405.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63 Unit	63 Unit	215.750.000	156.930.000	171.930.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149 Unit	149 Unit	61.475.000	61.475.000	61.475.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
4	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	5.396.710.804	17.742.711.062	17.565.876.317	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	1.760.327.360	8.517.119.888	8.517.119.888	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	0 Unit	0	100.000.000	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN

	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah							
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	50.000.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU							
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah							
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah							

							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	-	1 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah							
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	1 Paket	0	30.000.000	30.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	1 Paket	0	0	165.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	544 Peserta Didik	544 Peserta Didik	342.719.800	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	544 Peserta Didik	0	339.285.600	327.125.600	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150 Orang	150 Orang	25.599.800	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	150 Orang	0	14.541.100	13.781.100	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	278 Orang	278 Orang	215.320.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	278 Orang	0	171.452.400	164.884.400	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	116.699.700	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	63 Satuan Pendidikan	0	106.458.700	99.881.200	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	10.436.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	55 Satuan Pendidikan	0	5.571.470.879	5.571.470.879	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar							
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	63 Dokumen	63 Dokumen	25.000.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	63 Dokumen	0	15.719.800	15.619.900	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							

							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	273.000.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	-	1 Paket	0	270.000.000	140.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	120.000.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Unit	0	50.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	74.552.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	63 Satuan Pendidikan	0	74.061.400	73.668.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	65.000.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar							
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6058 Peserta Didik	6058 Peserta Didik	442.000.060	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	6058 Peserta Didik	0	1.425.977.709	1.373.477.709	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik							
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	1 Paket	0	348.152.300	348.152.300	DINAS PENDIDIKAN

	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	1.078.621.720	4.981.758.441	4.981.758.441	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)							
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	50.000.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah							
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium							
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah							
							Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	0	400.000.000	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah							
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah							
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	75.000.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah							
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	40.000.000	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama							
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2185 Peserta Didik	2185 Peserta Didik	204.200.000	604.020.000	631.020.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							

							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	488 Peserta Didik	488 Peserta Didik	347.105.200	344.672.920	310.472.920	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	50 Orang	50 Orang	30.239.900	21.925.700	20.155.700	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	153 Orang	153 Orang	18.735.800	10.147.680	9.820.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	188.990.780	165.553.880	149.204.780	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	29.542.200	3.363.837.921	3.363.837.921	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	4 Dokumen	44.999.840	26.834.040	25.388.140	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	2185 Satuan Pendidikan	2185 Satuan Pendidikan	49.808.000	44.766.300	44.267.300	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-	2.003.151.166	3.468.622.871	3.468.622.871	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	90.000.000	250.000.000	225.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD							

							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	370.000.000	696.884.930	696.884.930	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	51 Orang	51 Orang	548.772.616	548.069.941	546.770.191	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	51 Orang	51 Orang	360.000.000	360.000.000	359.794.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD							
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	199.999.750	123.843.500	99.590.375	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD							
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	0	1.278.000.000	1.278.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD							
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	115 Orang	115 Orang	63.130.600	52.035.100	46.349.900	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen	5 Dokumen	125.000.000	71.500.800	47.712.800	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD							
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	115 Satuan Pendidikan	115 Satuan Pendidikan	246.248.200	88.288.600	65.360.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	554.610.558	775.209.862	775.209.862	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7 Orang	7 Orang	151.900.000	120.640.000	120.580.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	37 Orang	37 Orang	127.710.860	115.461.260	115.254.760	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0	305.440.000	305.440.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik							
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	125.000.000	125.000.000	125.000.000	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik							
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	79.999.798	69.069.802	67.315.412	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	1 Unit	69.999.900	39.598.800	39.596.100	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1 unit	1 unit	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
5	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	-	-	50.000.000	45.301.800	34.125.200	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	-	-	50.000.000	45.301.800	45.301.800	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							

							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	25 Orang	25 Orang	50.000.000	45.301.800	34.125.200	DINAS PENDIDIKAN
6	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	-	250.000.000	139.652.400	25.934.800	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	250.000.000	139.652.400	139.652.400	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Dokumen	10 Dokumen	250.000.000	139.652.400	25.934.800	DINAS PENDIDIKAN
						DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				54.231.657.146	59.057.771.367	61.658.788.179	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				54.186.274.966	57.532.066.947	60.136.728.459	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				54.186.274.966	57.532.066.947	60.136.728.459	
7	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	39.652.225.045	41.970.269.487	44.651.569.849	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	36.399.701.517	38.829.863.511	38.829.863.511	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	438 Orang/ bulan	438 Orang/ bulan	36.395.785.917	38.825.944.911	41.686.778.981	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1					NON URUSAN				54.186.274.966	57.532.066.947	60.136.728.459	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				54.186.274.966	57.532.066.947	60.136.728.459	
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	39.652.225.045	41.970.269.487	44.651.569.849	

	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	36.399.701.517	38.829.863.511	38.829.863.511	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				54.186.274.966	57.532.066.947	60.136.728.459	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				54.186.274.966	57.532.066.947	60.136.728.459	
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	39.652.225.045	41.970.269.487	44.651.569.849	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	36.399.701.517	38.829.863.511	38.829.863.511	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	3.915.600	3.918.600	3.918.600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	135.215.600	272.028.070	272.028.070	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4.395.500	4.997.250	4.997.250	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.621.000	227.494.920	47.961.860	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.900.000	21.296.000	21.296.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.942.000	18.239.900	18.239.900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	79.357.100	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	59.000.000	224.880.670	224.880.670	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	59.000.000	224.880.670	224.880.670	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.282.097.928	1.833.357.236	1.833.357.236	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	213.157.928	213.157.476	213.156.828	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.067.940.000	1.619.199.760	1.619.199.760	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	776.210.000	810.140.000	810.140.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	184 Unit	184 Unit	771.720.000	756.650.000	756.650.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	4.490.000	53.490.000	53.490.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	14.456.610.121	14.533.744.605	14.464.783.455	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	554.462.600	3.527.448.329	3.527.448.329	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	57.026.200	38.766.200	475.200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	20 Unit	66.036.400	311.208.300	311.208.100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga							
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	16000 Keluarga	16000 Keluarga	0	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	13.878.693.341	10.985.896.386	10.985.896.386	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1392 Orang	1392 Orang	28.551.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	828 Orang	0	26.391.000	22.211.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin							
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1688 Orang	1688 Orang	66.874.700	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	894 Orang	0	12.523.880	12.523.880	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir							
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1213 Orang	1213 Orang	71.664.200	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	873 Orang	0	32.525.000	32.525.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita							
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4384 Orang	4384 Orang	79.996.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	3945 Orang	0	18.129.780	15.599.780	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9957 Orang	9957 Orang	22.078.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	9675 Orang	0	18.674.100	14.010.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif							
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41435 Orang	41435 Orang	96.701.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	16464 Orang	0	10.719.980	9.069.980	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4695 Orang	4695 Orang	60.269.867	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	5062 Orang	0	30.669.867	30.669.867	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16341 Orang	16341 Orang	48.963.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	3776 Orang	0	21.159.800	21.159.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus							
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	932 Orang	932 Orang	76.709.200	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	932 Orang	0	28.965.740	25.165.740	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	139 Orang	139 Orang	49.541.200	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	188 Orang	0	39.200.000	39.200.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1528 Orang	1528 Orang	88.867.190	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	763 Orang	0	68.757.900	68.757.900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV							
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1550 Orang	1550 Orang	70.801.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1052 Orang	0	39.099.432	39.099.432	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	6.937.440	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	-	1 Dokumen	0	7.227.340	7.227.340	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1.895.476	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	-	1 Dokumen	0	3.872.700	2.790.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.993.200	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0	5.000.000	5.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	3.290.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	14.065.980	14.065.980	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0	3.500.000	3.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	2 Dokumen	0	140.338.800	140.338.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.599.800	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0	7.519.800	7.519.600	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	13.753.400	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0	69.868.900	69.868.900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	12.790.537.680	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	1 Dokumen	0	9.994.255.442	9.992.920.042	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	48.589.780	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	-	1 Dokumen	0	12.380.780	8.542.180	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	39.188.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0	81.717.400	79.767.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	2 Dokumen	9.749.900	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-	1 Dokumen	0	11.419.900	11.419.900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)							
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	126.790.018	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	1 Unit	0	110.436.570	109.720.220	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	7.820.900	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0	118.989.205	118.989.205	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	19.632.080	17.999.990	17.999.990	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	19.632.080	17.999.990	15.712.990	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.822.100	2.399.900	2.399.900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	6 Unit	6 Unit	3.822.100	2.399.900	1.559.900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	48.929.000	567.718.775	566.363.975	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.041.200	2.239.800	2.239.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.041.200	2.239.800	1.539.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	25.033.800	18.654.800	18.654.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.033.800	18.654.800	18.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	20.854.000	546.824.175	546.824.175	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1 Orang	20 Orang	20.854.000	546.824.175	546.824.175	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-	17.289.800	406.754.200	405.093.380	
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	1.000.000	55.108.420	55.108.420	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	55.108.420	54.900.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-	-	1.720.000	165.775.200	165.775.200	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	2 Dokumen	1.720.000	165.775.200	165.775.050	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	3.009.800	1.109.700	1.109.700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	3.009.800	1.109.700	1.109.700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-	-	9.440.000	6.163.700	6.163.700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.440.000	6.163.700	4.711.700	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-	-	2.120.000	178.597.180	178.597.180	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	70 Unit	70 Unit	2.120.000	178.597.180	178.596.930	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	11.221.000	53.579.880	48.917.800	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.610.000	2.850.000	2.850.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	3.610.000	2.850.000	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.641.000	2.321.000	2.321.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	3.641.000	2.321.000	1.244.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.970.000	48.408.880	48.408.880	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	3.970.000	48.408.880	47.673.800	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				45.382.180	1.525.704.420	1.522.059.720	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				45.382.180	1.525.704.420	1.522.059.720	
14	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	-	0	128.698.950	128.698.950	
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	128.698.950	128.698.950	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga							
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	12 Laporan	0	59.998.950	59.998.950	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	12 Laporan	0	20.700.000	20.700.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

													BERENCANA
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-	2 Dokumen	0	48.000.000	48.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	-	0	862.686.900	862.686.900	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	0	425.200.000	425.200.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	12 Laporan	0	152.800.000	152.800.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	12 Laporan	0	69.040.000	69.040.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang							

							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	-	2 Dokumen	0	124.960.000	124.960.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	9 Organisasi	0	78.400.000	78.400.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	-	0	148.000.000	148.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-	111 Orang	0	148.000.000	148.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	82.656.900	82.656.900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	-	12 Laporan	0	6.885.900	6.885.900	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

							Jejaringnya						
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-	138 Orang	0	59.689.000	59.689.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	12 Laporan	0	16.082.000	16.082.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	0	206.830.000	206.830.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas							
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	-	37 Kampung	0	206.830.000	206.830.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	-	45.382.180	534.318.570	530.673.870	

	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	0	166.624.000	166.624.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)							
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	12 Laporan / Dokumen	0	36.624.000	36.624.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)							
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	10 Unit	0	130.000.000	130.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	45.382.180	367.694.570	367.694.570	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
							Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	45.382.180	37.694.570	34.049.870	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	12 laporan	0	150.000.000	150.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)							
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	12 laporan	0	180.000.000	180.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				70.390.078.357	70.843.530.085	72.748.706.902	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				70.390.078.357	70.843.530.085	72.748.706.902	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				70.390.078.357	70.843.530.085	72.748.706.902	
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	68.389.131.081	66.714.703.345	68.635.689.802	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	40.673.538.793	39.155.068.811	39.155.068.811	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	372 Orang/ bulan	372 Orang/ bulan	40.673.538.793	39.155.068.811	41.076.055.268	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1					NON URUSAN				70.390.078.357	70.843.530.085	72.748.706.902	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				70.390.078.357	70.843.530.085	72.748.706.902	
18	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	68.389.131.081	66.714.703.345	68.635.689.802	

	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	40.673.538.793	39.155.068.811	39.155.068.811	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				70.390.078.357	70.843.530.085	72.748.706.902	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				70.390.078.357	70.843.530.085	72.748.706.902	
19	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	68.389.131.081	66.714.703.345	68.635.689.802	
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	16.389.999	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	16.389.999	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.303.622.289	1.170.574.534	1.170.574.534	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.025.763.456	904.808.736	904.808.736	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	0	265.765.798	265.765.798	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1					NON URUSAN				70.390.078.357	70.843.530.085	72.748.706.902	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				70.390.078.357	70.843.530.085	72.748.706.902	
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	68.389.131.081	66.714.703.345	68.635.689.802	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.303.622.289	1.170.574.534	1.170.574.534	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				70.390.078.357	70.843.530.085	72.748.706.902	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				70.390.078.357	70.843.530.085	72.748.706.902	
21	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	68.389.131.081	66.714.703.345	68.635.689.802	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	395.580.000	389.060.000	389.060.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit	395.580.000	389.060.000	389.060.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	-	-	-	447.947.276	2.575.826.740	2.560.017.100	

						MASYARAKAT							
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	348.007.276	2.575.826.740	2.575.826.740	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit							
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	113.000.000	2.475.000.000	2.475.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	50.000.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	99.990.176	15.809.640	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	193 Unit	193 Unit	85.017.100	85.017.100	85.017.100	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	99.940.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	99.940.000	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

23	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	1.553.000.000	1.553.000.000	1.553.000.000	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.553.000.000	1.553.000.000	1.553.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar							
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Orang	7 Orang	1.553.000.000	1.553.000.000	1.553.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS KOLOK				369.347.221	869.173.221	869.173.221	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				369.347.221	869.173.221	869.173.221	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				369.347.221	869.173.221	869.173.221	
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	369.347.221	419.347.221	419.347.221	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	369.347.221	419.347.221	419.347.221	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	369.347.221	419.347.221	419.347.221	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	0	444.548.000	444.548.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	444.548.000	444.548.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	102 Orang	0	54.880.000	54.880.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	963 Orang	0	8.295.000	8.295.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	34 Orang	0	15.000.000	15.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	200 Orang	0	19.600.000	19.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0	90.570.000	90.570.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0	750.000	750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0	10.000.000	10.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0	6.950.000	6.950.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	40 Orang	0	4.000.000	4.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0	68.826.000	68.826.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0	159.997.000	159.997.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0	3.280.000	3.280.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0	600.000	600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0	1.800.000	1.800.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
26	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0	5.278.000	5.278.000	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	5.278.000	5.278.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0	5.278.000	5.278.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN				650.594.024	1.086.729.024	1.086.729.024	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				650.594.024	1.086.729.024	1.086.729.024	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				650.594.024	1.086.729.024	1.086.729.024	
27	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	650.594.024	660.594.024	660.594.024	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	650.594.024	660.594.024	660.594.024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	650.594.024	660.594.024	660.594.024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
28	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	0	419.232.000	419.232.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	419.232.000	419.232.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	235 Orang	0	23.520.000	23.520.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1760 Orang	0	17.600.000	17.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	26 Orang	0	8.800.000	8.800.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	291 Orang	0	7.350.000	7.350.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0	82.091.000	82.091.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	8 Dokumen	0	8.750.000	8.750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	95 Dokumen	0	17.800.000	17.800.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0	5.250.000	5.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	26 Orang	0	5.600.000	5.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	18 Dokumen	0	74.978.000	74.978.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0	142.553.000	142.553.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0	2.840.000	2.840.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	2 Dokumen	0	2.000.000	2.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	3 Dokumen	0	300.000	300.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	11 Dokumen	0	19.800.000	19.800.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
29	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0	6.903.000	6.903.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	6.903.000	6.903.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	4 Dokumen	0	6.903.000	6.903.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG				696.542.236	1.247.727.236	1.247.727.236	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				696.542.236	1.247.727.236	1.247.727.236	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				696.542.236	1.247.727.236	1.247.727.236	
30	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	696.542.236	712.542.236	712.542.236	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	696.542.236	712.542.236	712.542.236	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	696.542.236	712.542.236	712.542.236	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
31	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	-	-	-	0	529.615.000	529.615.000	

						MASYARAKAT							
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	529.615.000	529.615.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	210 Orang	0	72.240.000	72.240.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1723 Orang	0	20.035.000	20.035.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	24 Orang	0	21.000.000	21.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	268 Orang	0	11.400.000	11.400.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0	118.962.000	118.962.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	4.250.000	4.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0	17.700.000	17.700.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0	11.050.000	11.050.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	639 Orang	0	7.600.000	7.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0	85.000.000	85.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	1 Dokumen	0	150.858.000	150.858.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0	3.220.000	3.220.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0	600.000	600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	5.700.000	5.700.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
32	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0	5.570.000	5.570.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	5.570.000	5.570.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	5.570.000	5.570.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS TALAWI				1.228.192.593	2.008.046.593	2.008.046.593	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.228.192.593	2.008.046.593	2.008.046.593	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.228.192.593	2.008.046.593	2.008.046.593	
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	1.228.192.593	1.318.192.593	1.318.192.593	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	1.228.192.593	1.318.192.593	1.318.192.593	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.228.192.593	1.318.192.593	1.318.192.593	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	0	665.604.000	665.604.000	

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	665.604.000	665.604.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	389 Orang	0	118.240.000	118.240.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	3009 Orang	0	23.299.000	23.299.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	42 Orang	0	15.000.000	15.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	471 Orang	0	15.150.000	15.150.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0	100.903.000	100.903.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0	750.000	750.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0	13.800.000	13.800.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0	16.800.000	16.800.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	42 Orang	0	11.000.000	11.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0	132.698.000	132.698.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0	212.664.000	212.664.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0	2.500.000	2.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0	1.000.000	1.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0	1.800.000	1.800.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
35	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0	24.250.000	24.250.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	24.250.000	24.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0	24.250.000	24.250.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG				551.154.833	1.098.132.833	1.098.132.833	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				551.154.833	1.098.132.833	1.098.132.833	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				551.154.833	1.098.132.833	1.098.132.833	
36	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	551.154.833	551.154.833	551.154.833	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	551.154.833	551.154.833	551.154.833	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	551.154.833	551.154.833	551.154.833	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
37	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	0	533.606.000	533.606.000	

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	533.606.000	533.606.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	130 Orang	0	52.836.000	52.836.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1298 Orang	0	9.000.000	9.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	17 0	0	12.000.000	12.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	187 Orang	0	4.500.000	4.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0	194.866.000	194.866.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen	0	4.200.000	4.200.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0	10.329.000	10.329.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0	8.200.000	8.200.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	17 Orang	0	4.200.000	4.200.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0	71.478.000	71.478.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	1 Dokumen	0	146.729.000	146.729.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0	6.355.000	6.355.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0	4.813.000	4.813.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0	600.000	600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 Dokumen	0	3.500.000	3.500.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
38	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0	13.372.000	13.372.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	13.372.000	13.372.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0	13.372.000	13.372.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD PUSKESMAS LUNTO				338.169.042	753.301.042	753.301.042	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				338.169.042	753.301.042	753.301.042	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				338.169.042	753.301.042	753.301.042	
39	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	338.169.042	338.169.042	338.169.042	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	338.169.042	338.169.042	338.169.042	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD							

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	338.169.042	338.169.042	338.169.042	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
40	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	0	409.716.000	409.716.000	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	409.716.000	409.716.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil							
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	92 Orang	0	38.100.000	38.100.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar							
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	767 Orang	0	4.495.000	4.495.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	12 Orang	0	2.400.000	2.400.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis							
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	126 Orang	0	5.100.000	5.100.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	2 Dokumen	0	146.710.000	146.710.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	12 Dokumen	0	2.900.000	2.900.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0	12.600.000	12.600.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0	5.000.000	5.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)							
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	12 Orang	0	1.400.000	1.400.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0	54.159.000	54.159.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0	126.284.000	126.284.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	2 Dokumen	0	3.568.000	3.568.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak							

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	10 Dokumen	0	1.000.000	1.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan							
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	12 Dokumen	0	6.000.000	6.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
41	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	0	5.416.000	5.416.000	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	5.416.000	5.416.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0	5.416.000	5.416.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						UPTD INSTALASI FARMASI KOTA				54.231.657.146	59.057.771.367	61.658.788.179	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				54.186.274.966	57.532.066.947	60.136.728.459	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				54.186.274.966	57.532.066.947	60.136.728.459	
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	14.456.610.121	14.533.744.605	14.464.783.455	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	554.462.600	3.527.448.329	3.527.448.329	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan	2 Paket	4 Paket	431.400.000	3.103.143.069	3.103.143.069	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

							Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan						BERENCANA
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan							
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	12 Paket	0	74.330.760	74.330.760	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	13.878.693.341	10.985.896.386	10.985.896.386	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	61.031.390	58.487.090	56.691.090	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				26.858.143.776	66.178.482.527	37.338.719.456	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				26.858.143.776	66.178.482.527	37.338.719.456	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				26.858.143.776	66.178.482.527	37.338.719.456	
43	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.906.209.556	10.871.512.007	10.792.447.146	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	7.000.000	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	3.500.000	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	9.115.618.076	8.372.035.757	8.372.035.757	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/ bulan	143 Orang/ bulan	9.115.618.076	8.372.035.757	8.301.874.896	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1					NON URUSAN				26.858.143.776	66.178.482.527	37.338.719.456	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				26.858.143.776	66.178.482.527	37.338.719.456	
44	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.906.209.556	10.871.512.007	10.792.447.146	
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	9.115.618.076	8.372.035.757	8.372.035.757	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				26.858.143.776	66.178.482.527	37.338.719.456	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				26.858.143.776	66.178.482.527	37.338.719.456	
45	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.906.209.556	10.871.512.007	10.792.447.146	
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	37.600.000	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	37.600.000	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	276.215.810	120.636.430	120.636.430	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.996.700	16.996.700	16.996.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	63.193.110	57.347.730	55.172.630	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.732.000	21.732.000	21.732.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.750.000	24.560.000	18.424.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0 Laporan	155.544.000	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	24.676.875	71.979.875	71.979.875	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13 Unit	3.795.000	51.098.000	51.098.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.455.334.692	1.339.866.092	1.339.866.092	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	246.334.692	246.331.700	246.331.700	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	3.410.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000	1.084.534.392	1.084.534.392	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	989.764.103	966.993.853	966.993.853	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	34 Unit	400.000.000	389.589.500	389.586.600	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	36.400.000	36.400.000	36.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	8.300.000	8.260.000	8.260.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
46	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-	-	1.823.000.000	2.545.856.800	1.853.546.500	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.103.000.000	1.698.688.800	1.698.688.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai							
							Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.100 KM	0.100 KM	300.000.000	298.688.800	298.077.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai							
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0 KM	0,35 KM	703.000.000	1.300.000.000	949.900.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai							
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya							
							Jumlah Embung dan	0 Unit	0 Unit	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM

							Penampung Air Lainnya yang Dibangun						DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya							
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	720.000.000	847.168.000	847.168.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan							
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0 KM	0 KM	30.000.000	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi							
							Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	0 Bendung	1 Bendung	100.000.000	100.000.000	3.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	0 KM	190.000.000	150.000.000	6.725.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi							
							Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0 Bendung	0 Bendung	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.150 KM	0.150 KM	300.000.000	497.168.000	495.544.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa							
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

47	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-	834.520.000	1.194.040.000	954.040.000	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	834.520.000	1.194.040.000	1.194.040.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	12 Liter/Detik	12 Liter/Detik	594.040.000	634.040.000	594.040.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	7 Liter/Detik	7 Liter/Detik	240.480.000	560.000.000	360.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
48	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-	-	740.480.000	4.063.946.850	4.063.946.850	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	740.480.000	4.063.946.850	4.063.946.850	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman							
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0.17 M^3/Hari	0.17 M^3/Hari	740.480.000	4.063.946.850	4.063.946.850	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
49	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-	-	1.573.000.000	2.163.011.200	1.295.177.400	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.573.000.000	2.163.011.200	2.163.011.200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan							

							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	1.173.000.000	1.590.000.000	824.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan							
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan							
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000	473.011.200	470.377.400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
50	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	1.309.000.000	3.273.480.800	2.928.750.300	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-	-	1.309.000.000	3.273.480.800	3.273.480.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	200.000.000	597.664.200	595.344.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	29 Dokumen	29 Dokumen	1.049.000.000	2.620.200.000	2.281.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG							

							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	60 Dokumen	60 Dokumen	60.000.000	55.616.600	51.605.500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	-	1.947.000.000	2.873.680.000	1.905.330.000	
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.947.000.000	2.873.680.000	2.873.680.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya							
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	2 Kawasan	1.947.000.000	2.873.680.000	1.905.330.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-	-	6.409.056.000	39.054.757.090	13.454.577.590	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	6.409.056.000	39.054.757.090	39.054.757.090	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	108.056.000	106.772.400	105.978.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan							
							Panjang Jalan yang Dibangun	0 KM	1 KM	1.318.000.000	1.385.000.000	777.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan							
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	0.05 KM	0.05 KM	2.726.000.000	33.664.115.630	8.061.967.630	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan							
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan	1 Jembatan	200.000.000	196.753.760	196.078.160	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan							
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembatan	0 Jembatan	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan							
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	4 Jembatan	260.000.000	470.000.000	495.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan							
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	441,42 KM	441,42 KM	50.000.000	50.000.000	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan							
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	2 KM	1.047.000.000	915.000.000	501.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan							
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0.5 KM	0.5 KM	700.000.000	2.267.115.300	3.266.153.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-	-	149.891.000	18.380.800	17.519.800	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	-	50.000.000	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi							
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga	0 Lembaga	50.000.000	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	99.891.000	18.380.800	18.380.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi							
							Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	10 Perangkat Pendukung	0 Perangkat Pendukung	49.891.000	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota							

							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	18.380.800	17.519.800	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-	-	165.987.220	119.816.980	73.383.870	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-	-	85.663.100	46.209.060	46.209.060	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota							
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang							
							Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	1 Publikasi	22.200.000	21.781.700	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota							
							dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota							
							Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	38.463.100	2.136.200	2.106.200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang							
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	22.291.160	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota							
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang							

							Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	0 Orang	0 Orang	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	13.969.450	11.848.650	11.848.650	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang							
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	12 Layanan	12 Layanan	13.969.450	11.848.650	11.245.650	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	66.354.670	61.759.270	61.759.270	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR							
							Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	10 Kasus	10 Kasus	5.000.000	4.084.400	3.787.100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK							
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	19.654.670	16.572.870	15.142.920	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	12 Laporan	12 Laporan	41.700.000	41.102.000	41.102.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang							
							Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal							

							Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	0 Berita Acara	0 Berita Acara	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						UPTD ALAT BERAT				26.858.143.776	66.178.482.527	37.338.719.456	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				26.858.143.776	66.178.482.527	37.338.719.456	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				26.858.143.776	66.178.482.527	37.338.719.456	
55	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.906.209.556	10.871.512.007	10.792.447.146	
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	24.676.875	71.979.875	71.979.875	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	20.881.875	20.881.875	20.881.875	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	989.764.103	966.993.853	966.993.853	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	545.064.103	532.744.353	532.744.353	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				13.850.660.668	16.685.904.239	16.638.930.926	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.571.457.117	14.232.985.368	14.423.135.835	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				11.571.457.117	14.232.985.368	14.423.135.835	
56	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	10.292.321.452	10.633.053.943	10.850.289.210	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.489.853.380	5.156.096.493	5.156.096.493	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40/14 Orang/ bulan	40/14 Orang/ bulan	5.489.853.380	5.156.096.493	5.466.418.338	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	208.066.820	63.864.920	63.864.920	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	750.000	750.000	750.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.826.720	39.166.820	37.950.560	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.205.300	7.785.300	7.785.200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.162.800	16.162.800	16.162.800	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	140.122.000	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	3.888.161.252	4.823.852.530	4.823.852.530	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	550.000	550.000	550.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	242.798.936	242.798.936	242.798.118	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.405.000	104.265.000	2.400.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.642.407.316	4.476.238.594	4.476.238.594	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	706.240.000	589.240.000	589.240.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	60 Unit	696.860.000	579.860.000	589.855.600	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	9.380.000	9.380.000	9.380.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
57	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	-	498.760.665	494.556.425	492.230.125	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	11.308.520	10.100.630	10.100.630	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	10 Dokumen	10 Dokumen	11.308.520	10.100.630	9.423.430	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	10.080.000	9.270.000	9.270.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana							
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	60 Orang	60 Orang	10.080.000	9.270.000	8.130.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	202.895.300	202.528.300	202.528.300	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana							
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	202.895.300	202.528.300	202.096.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota							
							Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	-	363.000	363.000	363.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota							

							Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	363.000	363.000	286.200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
58	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	600.375.000	1.095.375.000	1.077.056.500	
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP							
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	-	600.375.000	1.095.375.000	1.095.375.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni							
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	45 Unit Rumah	600.375.000	1.095.375.000	1.077.056.500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU							
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
59	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN	-	-	-	50.000.000	70.000.000	70.000.000	

						PERMUKIMAN KUMUH							
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	50.000.000	70.000.000	70.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	17 Unit Rumah	50.000.000	70.000.000	70.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
60	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-	-	130.000.000	1.940.000.000	1.933.560.000	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	-	130.000.000	1.940.000.000	1.940.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian							
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Lokasi	21 Lokasi	130.000.000	1.940.000.000	1.933.560.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.279.203.551	2.452.918.871	2.215.795.091	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				50.399.200	47.243.600	44.203.500	
61	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH	-	-	-	36.716.900	34.493.700	32.157.600	

						ABSENTEE							
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	36.716.900	34.493.700	34.493.700	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah							
							Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	36.716.900	34.493.700	32.157.600	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
62	2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	-	-	-	0	0	0	
	2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	07	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							

							Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
63	2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-	-	13.682.300	12.749.900	12.045.900	
	2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	13.682.300	12.749.900	12.749.900	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong							
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	1 Laporan	13.682.300	12.749.900	12.045.900	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
64	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	-	-	-	0	0	0	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah							
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				2.228.804.351	2.405.675.271	2.171.591.591	
65	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	0	0	0	

	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota							
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD							
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
66	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	110.104.686	108.486.706	108.486.706	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	110.104.686	108.486.706	108.486.706	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut							
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.600.000	5.040.000	5.040.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi							
							luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Ha	0 Ha	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
67	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-	-	759.009.165	717.016.065	697.263.985	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	-	759.009.165	717.016.065	717.016.065	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	6.4 Ha	6.4 Ha	703.356.815	661.923.715	642.171.635	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	41.039.150	41.039.150	41.039.150	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan							
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	14.613.200	14.053.200	14.053.200	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
68	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	-	0	0	0	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3							
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
69	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	-	5.040.000	4.536.000	4.536.000	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5.040.000	4.536.000	4.536.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH							

							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	5.040.000	4.536.000	4.536.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
70	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	0	0	0	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup							
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat							
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	0 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

71	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	17.749.400	57.235.400	37.337.400	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	17.749.400	57.235.400	57.235.400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	4 Entitas	17.749.400	57.235.400	37.337.400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
72	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	0	0	0	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota							
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	0 Pengaduan	0 Pengaduan	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
73	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	-	-	1.336.901.100	1.518.401.100	1.323.967.500	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-	-	-	1.336.901.100	1.518.401.100	1.518.401.100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan							

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	1 Unit	431.967.500	423.467.500	397.967.500	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota							
							Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan							
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6950 Ton	6950 Ton	874.933.600	1.064.933.600	896.000.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						UPTD RUSUNAWA			13.850.660.668	16.685.904.239	16.638.930.926	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.571.457.117	14.232.985.368	14.423.135.835	

	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				11.571.457.117	14.232.985.368	14.423.135.835	
74	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	-	498.760.665	494.556.425	492.230.125	
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	-	274.113.845	272.294.495	272.294.495	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun							
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	4 Laporan	4 Laporan	149.521.400	149.521.400	149.521.400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	124.592.445	122.773.095	122.773.095	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
						UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				13.850.660.668	16.685.904.239	16.638.930.926	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.279.203.551	2.452.918.871	2.215.795.091	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				2.228.804.351	2.405.675.271	2.171.591.591	
75	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	110.104.686	108.486.706	108.486.706	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	110.104.686	108.486.706	108.486.706	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota							
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	104.504.686	103.446.706	103.446.706	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				11.514.208.129	10.118.064.987	10.389.799.890	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.514.208.129	10.118.064.987	10.389.799.890	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.514.208.129	10.118.064.987	10.389.799.890	
76	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	11.035.784.129	9.602.346.616	9.902.985.519	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	9.247.755.002	7.962.197.301	7.962.197.301	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131/14 Orang/ bulan	116/14 Orang/ bulan	9.247.755.002	7.962.197.301	8.365.292.344	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	162.647.995	194.055.395	194.055.395	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.576.625	6.576.625	6.576.625	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.787.370	142.191.570	30.185.430	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.920.000	45.287.200	45.287.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	70.364.000	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	15.900.000	15.900.000	15.900.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	15.900.000	15.900.000	15.900.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.319.439.132	1.115.180.120	1.115.180.120	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4 Laporan	1.200.000	1.200.000	750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	91.290.812	91.290.812	91.290.812	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.226.948.320	1.022.689.308	1.022.689.308	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	290.042.000	315.013.800	315.013.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	285.402.000	273.197.800	283.197.800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	4.640.000	4.640.000	4.640.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	37.176.000	37.176.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
77	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	177.146.000	115.524.000	115.524.000	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	73.280.000	52.840.000	52.840.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan							
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan	12 laporan	56.960.000	43.000.000	43.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa							
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	16.320.000	9.840.000	9.840.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	24.638.000	23.070.000	23.070.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	3 Laporan	11.475.000	10.355.000	10.355.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	13.163.000	12.715.000	12.715.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	-	79.228.000	39.614.000	39.614.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS							
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	1 Laporan	79.228.000	39.614.000	39.614.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
78	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	-	301.278.000	400.194.371	371.290.371	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	274.013.000	381.702.872	381.702.872	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	35.220.000	28.500.000	28.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	14.712.000	10.500.000	10.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran							
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	11 Orang	82.784.000	161.650.000	132.746.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	19 Unit	141.297.000	181.052.872	181.052.872	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-	-	3.000.000	1.500.000	1.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran							
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000	1.500.000	1.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-	-	11.088.000	2.800.000	2.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat							

							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	111 Orang	111 Orang	11.088.000	2.800.000	2.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-	-	13.177.000	14.191.499	14.191.499	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi							
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	8 Unit	13.177.000	14.191.499	14.191.499	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4.780.216.221	4.953.506.527	4.753.264.302	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.780.216.221	4.953.506.527	4.753.264.302	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.780.216.221	4.953.506.527	4.753.264.302	
79	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.957.189.571	4.181.859.877	4.091.733.652	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	15.066.540	15.066.540	15.066.540	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.066.540	15.066.540	15.066.540	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.763.497.255	3.065.349.268	3.065.349.268	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23/14 Orang/ bulan	23/14 Orang/ bulan	2.763.497.255	3.065.349.268	3.071.172.043	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

	1					NON URUSAN				4.780.216.221	4.953.506.527	4.753.264.302	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.780.216.221	4.953.506.527	4.753.264.302	
80	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.957.189.571	4.181.859.877	4.091.733.652	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.763.497.255	3.065.349.268	3.065.349.268	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.780.216.221	4.953.506.527	4.753.264.302	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.780.216.221	4.953.506.527	4.753.264.302	
81	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.957.189.571	4.181.859.877	4.091.733.652	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.660.000	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	10.660.000	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	139.230.700	170.458.300	170.458.300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.282.000	3.282.000	3.282.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	37.338.700	136.544.300	30.595.300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.040.000	15.040.000	15.040.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.050.000	9.472.000	9.472.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	360 Dokumen	2.520.000	2.520.000	2.520.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	70.000.000	3.600.000	3.600.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	38.706.120	38.706.120	38.706.120	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	38.706.120	38.706.120	38.706.120	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	820.190.956	745.677.649	745.677.649	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.064.300	50.064.300	50.064.300	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	769.126.656	694.613.349	694.613.349	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	169.838.000	146.602.000	146.602.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	167.066.000	143.830.000	153.830.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.772.000	2.772.000	2.772.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	0	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
82	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	823.026.650	771.646.650	661.530.650	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	50.037.800	43.577.800	43.577.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)							
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	7065 Orang	7065 Orang	50.037.800	43.577.800	43.577.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-	409.512.200	409.512.200	409.512.200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di	10 Unit	10 Unit	74.995.200	74.995.200	27.115.200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

							kawasan tempat tinggalnya						
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	60.003.800	60.003.800	60.003.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan	233.353.200	233.353.200	233.353.200	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	41.160.000	41.160.000	18.924.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	284.785.000	284.785.000	284.785.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

							Cepat						
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang	250 Orang	74.785.000	74.785.000	74.785.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800 Orang	60.000.000	60.000.000	60.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000	50.000.000	10.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	78.691.650	33.771.650	33.771.650	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	78.691.650	33.771.650	33.771.650	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8.201.507.176	9.113.321.822	8.753.053.479	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.854.654.299	6.800.291.421	6.890.892.828	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.854.654.299	6.800.291.421	6.890.892.828	
83	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.688.078.999	5.413.154.921	5.612.869.528	

	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.221.696.317	4.209.993.690	4.209.993.690	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	35 Orang/ bulan	4.221.696.317	4.209.993.690	4.505.471.730	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1					NON URUSAN				6.854.654.299	6.800.291.421	6.890.892.828	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				6.854.654.299	6.800.291.421	6.890.892.828	
84	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.688.078.999	5.413.154.921	5.612.869.528	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.221.696.317	4.209.993.690	4.209.993.690	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.854.654.299	6.800.291.421	6.890.892.828	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				6.854.654.299	6.800.291.421	6.890.892.828	
85	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.688.078.999	5.413.154.921	5.612.869.528	

	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	20.000.000	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	0 Orang	20.000.000	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	407.828.314	286.851.754	286.851.754	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.997.404	6.997.404	6.997.404	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	102.450.910	167.006.350	61.562.990	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	71.748.000	67.348.000	94.322.200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45.500.000	45.500.000	45.500.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	181.132.000	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	733.916.368	711.991.477	711.991.477	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.350.000	4.350.000	4.350.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	99.998.344	99.998.344	99.998.344	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	629.568.024	607.643.133	580.353.660	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	304.638.000	204.318.000	204.318.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	235.140.000	134.820.000	144.815.200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	69.498.000	69.498.000	69.498.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
86	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-	-	61.980.000	299.989.500	217.229.500	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	61.980.000	299.989.500	299.989.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang	45.340.000	44.568.000	41.808.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang	12.000.000	12.000.000	12.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lembaga	2 Lembaga	3.020.000	242.013.500	162.013.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)							
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Sertifikat	31 Sertifikat	1.620.000	1.408.000	1.408.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
87	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	-	971.404.660	955.739.460	935.636.260	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	-	951.404.660	935.739.460	935.739.460	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang	352 Orang	262.229.200	251.899.200	231.796.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	10.400.000	10.400.000	10.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat							
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	250 Orang	240 Orang	192.275.460	187.042.660	187.042.660	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

							Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	198.500.000	198.397.600	198.397.600	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	120 Orang	288.000.000	288.000.000	288.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
88	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	-	28.225.600	27.575.400	23.825.400	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	28.225.600	27.575.400	27.575.400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							

							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	6181 Keluarga	3194 Keluarga	8.730.000	8.606.000	4.856.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Keluarga	900 Keluarga	19.495.600	18.969.400	18.969.400	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
89	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-	-	69.606.900	68.854.000	66.354.000	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	29.966.900	29.966.900	29.966.900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	29.966.900	29.966.900	29.966.900	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	39.640.000	38.887.100	38.887.100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	25 Orang	39.640.000	38.887.100	36.387.100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

90	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-	-	35.358.140	34.978.140	34.978.140	
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	-	35.358.140	34.978.140	34.978.140	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4 Makam	4 Makam	35.358.140	34.978.140	34.978.140	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.346.852.877	2.313.030.401	1.862.160.651	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				434.631.400	1.277.951.780	990.677.560	
91	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	127.112.600	440.846.980	393.407.760	
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	39.465.000	39.105.000	39.105.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota							
							Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Orang	50 Orang	39.465.000	39.105.000	39.105.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	-	-	-	35.457.600	199.999.980	199.999.980	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

						Kabupaten/Kota							
	2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi							
							Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1 Lembaga	1 Lembaga	35.457.600	199.999.980	175.085.760	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	52.190.000	201.742.000	201.742.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	52.190.000	201.742.000	179.217.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
92	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	-	500.000	87.104.200	87.104.200	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	500.000	54.246.000	54.246.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5 Dokumen	500.000	54.246.000	54.246.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	0	32.858.200	32.858.200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0 Layanan	0	32.858.200	32.858.200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
93	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-	272.033.800	276.800.800	45.623.800	
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	248.649.000	248.649.000	248.649.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Perangkat Daerah	26 Perangkat Daerah	15.100.000	15.100.000	15.100.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							

							Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	0 Dokumen	223.949.000	223.949.000	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000	9.600.000	9.600.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	22.885.000	27.652.000	27.652.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	9.570.000	9.406.000	8.256.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang	13.315.000	18.246.000	12.168.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	499.800	499.800	499.800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	2 Layanan	499.800	499.800	499.800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
94	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	-	26.945.000	46.081.000	37.429.000	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	22.215.000	46.081.000	46.081.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 Organisasi	1 Organisasi	11.215.000	11.081.000	10.131.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000	35.000.000	27.298.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	4.730.000	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							

							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0 Dokumen	4.730.000	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
95	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-	8.040.000	427.118.800	427.112.800	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.040.000	79.290.000	79.290.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA							
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	30 Orang	150 Orang	3.040.000	79.290.000	79.290.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	254.428.800	254.428.800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK							
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	-	55 Layanan	0	254.428.800	254.428.800	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5.000.000	93.400.000	93.400.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/							
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	52 Orang	5.000.000	93.400.000	93.394.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				912.221.477	1.035.078.621	871.483.091	
96	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	492.554.362	478.578.956	471.833.956	
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	492.554.362	478.578.956	478.578.956	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	13.640.000	11.276.000	11.276.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen	27 Dokumen	3.813.606	428.920.256	428.920.256	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa							
							Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	314 Orang	314 Orang	425.199.456	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa							

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	23 Dokumen	23 Dokumen	35.691.400	25.516.700	21.424.700	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa							
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	37 Dokumen	37 Dokumen	14.209.900	12.866.000	10.213.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
97	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	-	-	-	419.667.115	556.499.665	399.649.135	
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	419.667.115	556.499.665	556.499.665	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	195 Lembaga	195 Lembaga	167.387.150	321.556.400	146.537.870	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga							

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	37 Dokumen	37 Dokumen	252.279.965	234.943.265	253.111.265	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN				12.194.090.334	14.503.144.879	15.491.897.271	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.816.814.719	11.208.581.029	12.541.523.141	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				10.816.814.719	11.208.581.029	12.541.523.141	
98	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	10.749.974.619	11.113.507.329	11.956.025.591	
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	5.196.000	5.196.000	5.196.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen	5.196.000	5.196.000	3.346.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	9.112.313.234	9.718.356.801	9.718.356.801	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ bulan	96 Orang/ bulan	9.112.313.234	9.718.356.801	10.430.556.084	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2					NON URUSAN				10.816.814.719	11.208.581.029	12.541.523.141	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				10.816.814.719	11.208.581.029	12.541.523.141	
99	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	10.749.974.619	11.113.507.329	11.956.025.591	
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	9.112.313.234	9.718.356.801	9.718.356.801	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.816.814.719	11.208.581.029	12.541.523.141	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				10.816.814.719	11.208.581.029	12.541.523.141	
100	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	10.749.974.619	11.113.507.329	11.956.025.591	
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	34.994.000	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	0 Orang	34.994.000	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	437.512.303	205.226.445	205.226.445	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.987.781	9.987.781	9.987.781	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	87.699.712	108.152.424	95.818.073	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	48.539.200	44.739.200	42.181.700	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	43.235.610	35.147.040	27.116.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	12 Laporan	248.050.000	7.200.000	3.600.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	751.989.082	846.680.483	846.680.483	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	1.745.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.999.368	74.999.368	74.999.368	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan	24.999.475	101.860.000	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	649.990.239	667.821.115	918.454.385	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	407.970.000	338.047.600	338.047.600	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	90 Unit	91 Unit	337.584.000	267.661.600	277.835.200	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	20 Unit	3.000.000	3.000.000	3.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	67.386.000	67.386.000	67.386.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
101	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	-	2.999.800	2.439.800	2.439.800	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.999.800	2.439.800	2.439.800	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik							
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	4 Laporan	4 Laporan	2.999.800	2.439.800	2.439.800	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
102	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	-	31.356.000	30.796.000	521.495.850	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-	-	1.500.000	940.000	940.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis							
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	3 Laporan	3 Laporan	1.500.000	940.000	940.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota							

							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	-	27 Ton	0	0	499.999.850	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-	-	29.856.000	29.856.000	29.856.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	3 Laporan	26.860.000	26.860.000	17.560.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun							
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	2.996.000	2.996.000	2.996.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
103	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	-	-	15.000.000	44.360.000	44.084.000	
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	15.000.000	44.360.000	44.360.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota							
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	44.360.000	44.084.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
104	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	-	17.484.300	17.477.900	17.477.900	
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	17.484.300	17.477.900	17.477.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.988.000	1.988.000	1.988.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota							

							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5 Dokumen	2 Dokumen	15.496.300	15.489.900	15.489.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.377.275.615	3.294.563.850	2.950.374.130	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				100.638.400	100.638.400	45.022.400	
105	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	-	80.998.400	80.998.400	25.382.400	
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	-	80.998.400	80.998.400	80.998.400	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	0 Unit	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	80.998.400	80.998.400	25.382.400	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat							
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Unit	0 Unit	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
106	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	-	19.640.000	19.640.000	19.640.000	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	-	19.640.000	19.640.000	19.640.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko							
							Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	19.640.000	19.640.000	19.640.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.276.637.215	3.193.925.450	2.905.351.730	
107	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-	534.295.470	1.357.536.820	1.052.553.620	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-	-	34.499.800	49.724.950	49.724.950	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi							
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	12 Laporan	4.499.950	4.499.950	4.031.950	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian							
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	29.999.850	45.225.000	60.159.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	208.039.970	386.983.470	386.983.470	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman							
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	184.623.550	184.225.550	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman							
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	195.039.970	194.359.920	57.660.020	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman							
							Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	8.000.000	8.000.000	7.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	65.795.900	65.795.900	65.795.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil							
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2 Laporan	2 Laporan	65.795.900	65.795.900	61.805.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	14.640.000	14.620.000	14.620.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak							
							Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	4 Laporan	4 Laporan	14.640.000	14.620.000	14.620.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	211.319.800	840.412.500	840.412.500	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain							
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	9 Ekor	1013 Ekor	211.319.800	840.412.500	663.051.200	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
108	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-	-	479.090.770	1.527.265.400	1.472.193.180	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	33.679.720	29.355.560	29.355.560	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya							
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Laporan	3 Laporan	33.679.720	29.355.560	25.598.760	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota							
							Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-	-	445.411.050	1.497.909.840	1.497.909.840	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani							
							Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	5 Unit	166.533.700	776.533.700	775.342.020	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya							
							Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	18.999.900	68.999.740	18.876.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya							
							Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	10 Unit	124.877.550	221.259.850	221.259.850	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani							
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	104.999.900	101.120.000	101.120.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan							
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	30.000.000	329.996.550	329.996.550	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
109	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-	-	141.382.225	190.530.330	189.502.630	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	60.051.600	60.051.600	60.051.600	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan	4 Laporan	4 Laporan	60.051.600	60.051.600	60.051.600	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

							zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota						
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	52.350.725	101.498.830	101.498.830	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium							
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	1 Laporan	2.999.225	2.999.225	2.999.225	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner							
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	49.351.500	98.499.605	97.769.805	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	28.979.900	28.979.900	28.979.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan							
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	23.979.900	23.979.900	23.682.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan							
							Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	5.000.000	5.000.000	5.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
110	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	-	-	75.000.000	74.862.000	12.381.600	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-	-	75.000.000	74.862.000	74.862.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan							
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	30 Ha	30 Ha	75.000.000	74.862.000	12.381.600	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

							Dikendalikan						
111	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-	-	46.868.750	43.730.900	178.720.700	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-	-	46.868.750	43.730.900	43.730.900	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa							
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	4 Unit	36.868.750	35.214.900	33.404.700	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa							
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	170 Unit	150 Unit	10.000.000	8.516.000	8.516.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian							
							Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	30 Orang	0	0	136.800.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.088.444.330	4.210.104.162	4.228.992.858	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.088.444.330	4.210.104.162	4.228.992.858	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.088.444.330	4.210.104.162	4.228.992.858	
112	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.965.070.210	3.914.797.492	3.955.785.008	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.328.428.952	3.167.631.435	3.167.631.435	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	4.328.428.952	3.167.631.435	3.378.895.201	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					NON URUSAN				5.088.444.330	4.210.104.162	4.228.992.858	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				5.088.444.330	4.210.104.162	4.228.992.858	

113	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.965.070.210	3.914.797.492	3.955.785.008	
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.328.428.952	3.167.631.435	3.167.631.435	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.088.444.330	4.210.104.162	4.228.992.858	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				5.088.444.330	4.210.104.162	4.228.992.858	
114	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.965.070.210	3.914.797.492	3.955.785.008	
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	18.950.000	10.000.000	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	8.950.000	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	131.032.775	218.056.055	218.056.055	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	865.600	1.425.600	1.425.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	32.256.175	168.450.755	51.302.205	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.862.000	24.089.500	24.089.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.071.000	24.090.200	19.616.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	70.978.000	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	15.910.600	66.546.200	66.546.200	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	15.910.600	66.546.200	9.812.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	334.412.883	343.783.802	343.783.802	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	500.000	1.000.000	1.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	96.865.751	96.865.751	96.865.751	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	237.047.132	245.918.051	245.918.051	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	136.335.000	108.780.000	108.780.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	101.335.000	66.580.000	74.660.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	15.000.000	15.730.000	15.730.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	20.000.000	26.470.000	26.470.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
115	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	-	86.291.720	257.895.170	245.746.950	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	10.725.600	10.674.600	10.674.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	10.725.600	10.674.600	8.845.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	56.685.720	228.165.170	228.165.170	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan							

							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	56.685.720	228.165.170	221.585.750	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	18.880.400	19.055.400	19.055.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10 Dokumen	10 Dokumen	18.880.400	19.055.400	15.315.400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
116	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	-	17.738.600	18.068.700	8.118.100	
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-	17.738.600	18.068.700	18.068.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam							
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	1 Laporan	8.309.000	8.305.100	2.918.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil							
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	1 Laporan	1 Laporan	4.118.000	4.458.000	2.544.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

							Penting Terkait Pencatatan Sipil						
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil							
							Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	5.311.600	5.305.600	2.655.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
117	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-	3.568.800	3.572.800	3.572.800	
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	-	3.568.800	3.572.800	3.572.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan							
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.568.800	3.572.800	3.572.800	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
118	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	-	15.775.000	15.770.000	15.770.000	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	-	15.775.000	15.770.000	15.770.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	15.775.000	15.770.000	15.770.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PERHUBUNGAN				9.379.856.122	8.942.021.741	9.284.326.853	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.379.856.122	8.942.021.741	9.284.326.853	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.379.856.122	8.942.021.741	9.284.326.853	
119	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.762.412.022	7.600.802.416	7.705.120.483	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.891.011.729	3.804.771.099	3.804.771.099	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/14 Orang/ bulan	30/14 Orang/ bulan	3.891.011.729	3.804.771.099	3.998.993.326	DINAS PERHUBUNGAN

	2					NON URUSAN				9.379.856.122	8.942.021.741	9.284.326.853	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.379.856.122	8.942.021.741	9.284.326.853	
120	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.762.412.022	7.600.802.416	7.705.120.483	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.891.011.729	3.804.771.099	3.804.771.099	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.379.856.122	8.942.021.741	9.284.326.853	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.379.856.122	8.942.021.741	9.284.326.853	
121	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.762.412.022	7.600.802.416	7.705.120.483	
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	5.100.000	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	5.100.000	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	32.042.025	122.392.025	122.392.025	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.599.525	113.459.525	13.387.525	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.987.500	1.987.500	1.987.500	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.945.000	3.945.000	3.945.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	3.000.000	3.000.000	3.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

							yang Disediakan						
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	11.510.000	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	4.791.758.268	3.640.859.292	3.640.859.292	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	500.000	500.000	500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.067.788.000	2.983.080.540	2.983.080.540	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0	657.278.752	657.278.752	DINAS PERHUBUNGAN
	2					NON URUSAN				9.379.856.122	8.942.021.741	9.284.326.853	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.379.856.122	8.942.021.741	9.284.326.853	
122	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.762.412.022	7.600.802.416	7.705.120.483	
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	4.791.758.268	3.640.859.292	3.640.859.292	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.379.856.122	8.942.021.741	9.284.326.853	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				9.379.856.122	8.942.021.741	9.284.326.853	

123	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.762.412.022	7.600.802.416	7.705.120.483	
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	42.500.000	32.780.000	32.780.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	40.000.000	30.280.000	40.457.600	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	500.000	500.000	500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.000.000	2.000.000	1.990.240	DINAS PERHUBUNGAN
124	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	-	579.444.100	1.341.119.325	1.579.106.370	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	520.844.100	1.291.339.325	1.291.339.325	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	210.097.500	504.688.860	412.688.860	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan							
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit	12 Unit	48.195.400	45.122.000	45.122.000	DINAS PERHUBUNGAN

	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit	12 Unit	262.551.200	741.528.465	1.041.526.710	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	-	25.000.000	22.500.000	22.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor							
							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1500 Unit	1500 Unit	25.000.000	22.500.000	42.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	33.600.000	27.280.000	27.280.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	33.600.000	27.280.000	37.268.800	DINAS PERHUBUNGAN
125	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-	-	-	38.000.000	100.000	100.000	
	2	15	05	2.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	38.000.000	100.000	100.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	05	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	38.000.000	100.000	100.000	DINAS PERHUBUNGAN
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.329.670.434	4.945.480.320	5.532.885.047	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.329.670.434	4.945.480.320	5.532.885.047	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.252.261.734	4.886.376.520	5.482.981.247	

126	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Transparasi dan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	4.038.818.434	3.848.103.740	3.765.310.407	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persen	1.723.000	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	1.723.000	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	3.423.634.688	3.199.898.381	3.199.898.381	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/ bulan	501 Orang/ bulan	3.423.634.688	3.199.898.381	3.223.124.948	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					NON URUSAN				5.329.670.434	4.945.480.320	5.532.885.047	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				5.252.261.734	4.886.376.520	5.482.981.247	
127	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Transparasi dan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	4.038.818.434	3.848.103.740	3.765.310.407	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persen	3.423.634.688	3.199.898.381	3.199.898.381	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.329.670.434	4.945.480.320	5.532.885.047	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.252.261.734	4.886.376.520	5.482.981.247	
128	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Transparasi dan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	100 %	4.038.818.434	3.848.103.740	3.765.310.407	

	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 Persen	14.320.000	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0 Orang	14.320.000	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	148.944.405	187.548.400	187.548.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.748.500	2.748.500	2.748.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	35.844.105	126.544.500	23.684.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.508.000	38.494.500	38.494.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	10.999.800	19.760.900	14.851.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	0 Laporan	84.844.000	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	378.298.341	380.237.776	380.237.776	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	54.994.181	80.683.584	77.713.584	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	322.804.160	299.054.192	293.774.192	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persen	71.898.000	80.419.183	80.419.183	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	3 Unit	58.998.000	28.031.500	38.031.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	17 Unit	7.980.000	47.467.683	47.467.683	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	4.920.000	4.920.000	4.920.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
129	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan premerintah daerah Kab/Kota	-	80 %	268.119.700	409.795.480	564.193.940	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Diseminasi Dan Layanan Informasi Publik Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) Dan SOP Yang Ditetapkan	-	85 Persen	268.119.700	409.795.480	409.795.480	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media							

							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	25 Laporan	12 Laporan	193.490.000	349.558.000	349.558.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat							
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	37 Komunitas	37 Komunitas	4.550.200	5.166.800	4.166.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik							
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permo honan	3 Permo honan	3.159.600	1.114.800	1.114.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik							
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3.345.950	2.126.950	2.126.950	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik							
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	3 Media	45.630.550	39.096.530	194.494.990	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik							
							Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten							
							Jumlah Konten Informasi Publik	5 Konten	5 Konten	17.943.400	12.732.400	12.732.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik							

							Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	1 Orang	0 Orang	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
130	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	-	75 Persen	945.323.600	628.477.300	1.153.476.900	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal dan Situs Web Yang Sesuai Standar	-	80 Persen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa							
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE (Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan) Yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik	-	80 Persen	945.323.600	628.477.300	628.477.300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda							
							Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	1 Laporan	3.699.400	3.631.900	3.631.800	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah							
							Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.668.800	1.628.300	1.628.300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah							
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2.390.700	2.256.900	2.256.900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota							

							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	4.100.000	1.000.000	999.900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas							
							Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program	1 Program	3.829.400	3.644.800	3.644.700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE							
							Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3.346.300	3.264.100	3.264.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE							
							Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	926.289.000	613.051.300	1.138.051.300	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				61.115.150	47.326.450	38.126.450	
131	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	-	61.115.150	47.326.450	38.126.450	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Buku Profil Daerah	-	3 Buku	61.115.150	47.326.450	47.326.450	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral							
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2 Orang	27 Orang	7.326.250	5.619.400	3.619.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional							
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase	100 Persentase	46.306.000	34.966.150	29.766.150	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia							
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	1 Dokumen	7.482.900	6.740.900	4.740.900	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				16.293.550	11.777.350	11.777.350	

132	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Titik yang Diamankan Dibandingkan dengan Seluruh Titik Pemerintahan Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Sandi (PHKS) yang Ditetapkan Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	- 	65 100 % %	16.293.550	11.777.350	11.777.350	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik Yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Yang Telah Menerapkan Prinsip-Prinsip Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) Dan Atau Aplikasi Persandian Dibanding Jumlah Sistem Elektronik Yang Ada Pada Pemerintah Daerah	-	40 Persen	13.838.700	9.646.500	9.646.500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.112.500	1.095.400	1.095.400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	8.080.500	4.261.000	4.261.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	1.712.000	1.540.000	1.540.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							

							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	2.933.700	2.750.100	2.750.100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Strategis Yang Telah DIamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal Dibanding Banyaknya Jumlah Kegiatan Strategis Yang Harus Diamankan	-	40 Persen	2.454.850	2.130.850	2.130.850	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	2.454.850	2.130.850	2.130.850	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				9.296.328.859	9.779.680.539	8.576.667.300	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.990.342.184	9.157.887.689	7.942.867.825	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.990.342.184	9.157.887.689	7.942.867.825	
133	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.769.502.184	8.550.721.689	7.198.333.825	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.805.151.469	6.355.257.770	6.355.257.770	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/ bulan	42 Orang/ bulan	6.805.151.469	6.355.257.770	5.126.777.212	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2					NON URUSAN				8.990.342.184	9.157.887.689	7.942.867.825	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				8.990.342.184	9.157.887.689	7.942.867.825	
134	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.769.502.184	8.550.721.689	7.198.333.825	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.805.151.469	6.355.257.770	6.355.257.770	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN

													PERDAGANGAN
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.990.342.184	9.157.887.689	7.942.867.825	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.990.342.184	9.157.887.689	7.942.867.825	
135	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.769.502.184	8.550.721.689	7.198.333.825	
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	1.300.000	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	1.300.000	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	358.384.315	349.931.175	349.931.175	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	2.400.000	4.871.250	4.871.250	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	245.451.515	321.787.125	66.238.125	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.700.000	13.700.000	13.696.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.572.800	9.572.800	9.572.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	87.260.000	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.482.366.800	1.660.974.644	1.660.974.644	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100.000	100.000	100.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	292.816.800	292.816.800	292.816.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.189.450.000	1.368.057.844	1.368.057.844	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	122.299.600	184.558.100	184.558.100	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	118.080.000	148.200.500	148.200.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	249.600	27.197.600	158.843.294	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	22 Unit	3.970.000	9.160.000	9.160.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
136	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	-	19.940.000	19.940.000	19.940.000	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	19.940.000	19.940.000	19.940.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							

							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	19.940.000	19.940.000	19.940.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
137	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	-	200.900.000	587.226.000	724.594.000	
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-	200.900.000	587.226.000	587.226.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	200.900.000	587.226.000	724.594.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				305.986.675	621.792.850	633.799.475	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				143.126.100	159.248.675	185.707.300	
138	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	-	110.399.800	132.522.500	58.990.500	
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	110.399.800	132.522.500	132.522.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50 Unit	50 Unit	110.399.800	132.522.500	58.990.500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
139	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	-	13.126.300	7.126.175	107.116.800	

	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	-	13.126.300	7.126.175	7.126.175	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	13.126.300	7.126.175	107.116.800	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
140	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	-	19.600.000	19.600.000	19.600.000	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	19.600.000	19.600.000	19.600.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal							
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	19.600.000	19.600.000	19.600.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				162.860.575	462.544.175	448.092.175	
141	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	-	162.860.575	462.544.175	448.092.175	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	-	162.860.575	462.544.175	462.544.175	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dokumen	6 Dokumen	106.300.000	315.983.600	315.679.600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	56.560.575	146.560.575	132.412.575	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				5.829.663.447	5.497.244.381	5.748.407.076	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.829.663.447	5.497.244.381	5.748.407.076	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.669.707.247	5.257.288.221	5.513.843.316	
142	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	-	15.410.980	15.410.860	0	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	-	15.410.980	15.410.860	15.410.860	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro							
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	- Dokumen	15.410.980	15.410.860	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
143	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	-	199.300.000	80.305.600	65.305.500	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	-	199.300.000	80.305.600	80.305.600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	32 Orang	32 Orang	194.300.000	79.105.600	64.105.500	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja							

							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	4 Lembaga	4 Lembaga	5.000.000	1.200.000	1.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
144	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	235.999.900	435.999.600	435.999.600	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	235.999.900	435.999.600	435.999.600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan							
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	4 Laporan	235.999.900	435.999.600	435.999.600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
145	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.218.996.367	4.725.572.161	5.012.538.216	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.282.038.967	3.615.343.458	3.615.343.458	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ bulan	32 Orang/ bulan	4.282.038.967	3.615.343.458	3.953.001.315	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	125.659.692	157.422.797	157.422.797	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

	2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	15.618.692	15.618.692	30.617.692	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.040.000	121.805.105	19.939.105	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.999.000	9.999.000	9.999.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	70.002.000	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	761.358.108	907.052.306	907.052.306	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	288.250.416	288.250.416	288.250.416	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	471.107.692	616.801.890	617.202.688	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	49.939.600	45.753.600	45.753.600	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	20.009.600	21.829.600	57.604.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	10.010.000	4.004.000	4.004.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	19.920.000	19.920.000	19.920.000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2					NON URUSAN				5.829.663.447	5.497.244.381	5.748.407.076	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				159.956.200	239.956.160	234.563.760	
146	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.218.996.367	4.725.572.161	5.012.538.216	
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.282.038.967	3.615.343.458	3.615.343.458	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.829.663.447	5.497.244.381	5.748.407.076	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				159.956.200	239.956.160	234.563.760	

147	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	-	0	0	74.666.560	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	18 Kegiatan Usaha.	0	0	9.848.980	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha							
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	-	200 Pelaku Usaha	0	0	45.783.660	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal							
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-	40 Kegiatan Usaha	0	0	19.033.920	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
148	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	159.956.200	239.956.160	159.897.200	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	159.956.200	239.956.160	239.956.160	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	159.956.200	239.956.160	159.897.200	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
						DINAS KEBUDAYAAN				5.352.848.230	7.429.041.321	7.226.511.522	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.352.848.230	7.429.041.321	7.226.511.522	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5.352.848.230	7.429.041.321	7.226.511.522	
149	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.863.892.230	4.560.085.321	4.474.884.522	
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.578.529.363	3.455.482.958	3.455.482.958	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35/14 Orang/ bulan	35/14 Orang/ bulan	3.578.529.363	3.455.482.958	3.462.206.108	DINAS KEBUDAYAAN
	2					NON URUSAN				5.352.848.230	7.429.041.321	7.226.511.522	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				5.352.848.230	7.429.041.321	7.226.511.522	
150	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.863.892.230	4.560.085.321	4.474.884.522	
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.578.529.363	3.455.482.958	3.455.482.958	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.352.848.230	7.429.041.321	7.226.511.522	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				5.352.848.230	7.429.041.321	7.226.511.522	
151	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.863.892.230	4.560.085.321	4.474.884.522	
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	80.669.800	10.650.800	10.650.800	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	4.650.800	4.650.800	7.759.300	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.000.000	6.000.000	6.800.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	70.019.000	0	0	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.147.671.067	1.002.929.563	1.002.929.563	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	235.996.849	235.996.849	235.995.808	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	14.999.650	136.185.350	35.869.490	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	896.674.568	630.747.364	613.887.016	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	57.022.000	91.022.000	91.022.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	47.922.000	31.922.000	51.926.800	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	6.100.000	56.100.000	53.390.000	DINAS KEBUDAYAAN

	2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	3.000.000	3.000.000	7.050.000	DINAS KEBUDAYAAN
152	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-	75.000.000	20.000.000	20.000.000	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	75.000.000	20.000.000	20.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan							
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	75.000.000	20.000.000	20.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
153	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	-	334.000.000	484.000.000	394.037.000	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	334.000.000	484.000.000	484.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional							
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	334.000.000	484.000.000	394.037.000	DINAS KEBUDAYAAN
154	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya							
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek	2 Objek	30.000.000	30.000.000	30.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
155	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-	-	49.956.000	2.334.956.000	2.307.590.000	
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-	-	49.956.000	2.334.956.000	2.334.956.000	DINAS KEBUDAYAAN

	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu							
							Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	-	21 Unit	0	652.500.000	652.500.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum							
							Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	-	3 Unit	0	1.087.500.000	1.087.500.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	-	3 Unit	0	435.000.000	435.000.000	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5 Unit	5 Unit	49.956.000	159.956.000	132.590.000	DINAS KEBUDAYAAN
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				4.432.652.286	5.267.065.769	5.181.934.627	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.432.652.286	5.267.065.769	5.181.934.627	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.376.663.486	5.211.433.069	5.137.764.477	
156	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.816.903.586	3.801.673.204	4.028.031.612	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.248.345.137	3.122.795.858	3.122.795.858	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	26 Orang/ bulan	3.248.345.137	3.122.795.858	3.441.014.266	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2					NON URUSAN				4.432.652.286	5.267.065.769	5.181.934.627	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.376.663.486	5.211.433.069	5.137.764.477	
157	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.816.903.586	3.801.673.204	4.028.031.612	
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.248.345.137	3.122.795.858	3.122.795.858	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.432.652.286	5.267.065.769	5.181.934.627	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.376.663.486	5.211.433.069	5.137.764.477	
158	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.816.903.586	3.801.673.204	4.028.031.612	
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	9.960.000	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	9.960.000	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	104.234.120	158.162.120	158.162.120	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.150.000	2.150.000	2.150.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	33.671.620	135.531.620	33.671.620	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.837.000	6.837.000	6.837.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.643.500	13.643.500	13.643.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	47.932.000	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	341.749.529	423.100.426	423.100.426	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	137.743.776	137.743.776	137.743.776	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	202.505.753	283.856.650	283.856.650	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	112.614.800	97.614.800	97.614.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	105.764.800	90.764.800	100.764.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	19 Unit	6.850.000	6.850.000	6.850.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
159	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	559.759.900	1.397.633.565	1.097.606.565	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	20.834.300	307.089.500	307.089.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan							

							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	2.508.000	2.508.000	2.508.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	4.326.300	4.326.300	4.326.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan							
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	-	1 Dokumen	0	9.965.700	9.965.700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan							
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	500 Eksemplar	14.000.000	14.000.000	14.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota							
							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	-	180 Eksemplar	0	271.589.500	271.589.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik							
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	-	2 Perpustakaan	0	4.700.000	4.700.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	538.925.600	1.090.544.065	1.090.544.065	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial							
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	5.399.900	5.399.900	5.399.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							

							Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	510.840.000	543.640.000	243.613.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca							
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	21 Orang	21 Orang	9.079.900	305.022.365	305.022.365	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat							
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	37 Lokus	37 Lokus	13.605.800	236.481.800	236.481.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
160	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-	-	0	12.126.300	12.126.300	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0	12.126.300	12.126.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno							
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-	50 Orang	0	12.126.300	12.126.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				55.988.800	55.632.700	44.170.150	
161	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-	-	-	42.489.400	42.133.300	33.993.000	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	21.499.800	21.143.700	21.143.700	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis							
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	10 Berkas	10 Berkas	11.500.000	11.143.900	7.182.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Laporan	15 Laporan	9.999.800	9.999.800	9.026.900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	8.999.800	8.999.800	8.999.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis							
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	250 Arsip	250 Arsip	8.999.800	8.999.800	8.221.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	11.989.800	11.989.800	11.989.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN							
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna	10 Pengguna	6.000.000	6.000.000	3.884.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	5.989.800	5.989.800	5.678.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
162	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	-	-	13.499.400	13.499.400	10.177.150	
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	-	-	-	7.499.800	7.499.800	7.499.800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana							
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip	100 Arsip	7.499.800	7.499.800	5.564.750	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	-	5.999.600	5.999.600	5.999.600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip							
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan	100 Arsip	100 Arsip	5.999.600	5.999.600	4.612.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

							Ditetapkan					
						DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA				9.040.268.599	12.239.268.248	10.784.234.439	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.123.410.391	9.905.897.640	8.610.863.831	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				7.123.410.391	9.905.897.640	8.610.863.831	
163	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	-	145.000.000	75.354.000	75.350.400	
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	97.000.000	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota							
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20 Orang	20 Orang	77.000.000	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda							
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	800 Orang	800 Orang	0	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota							
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	4 Orang	4 Orang	20.000.000	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	48.000.000	75.354.000	75.354.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota							

							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	10 Organisasi	10 Organisasi	48.000.000	75.354.000	75.350.400	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
164	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-	1.383.000.000	4.263.075.000	2.916.489.500	
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	478.000.000	419.180.000	419.180.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota							
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	5 Unit	5 Unit	478.000.000	419.180.000	419.080.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	245.000.000	335.346.000	335.346.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota							
							Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	175.000.000	221.936.000	435.723.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga							
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	0 Orang	0 Orang	70.000.000	113.410.000	74.140.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	460.000.000	3.302.949.000	3.302.949.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga							
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	150 Orang	150 Orang	175.000.000	185.000.000	185.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota							

							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	150 Orang	150 Orang	285.000.000	3.117.949.000	1.549.746.500	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	-	200.000.000	205.600.000	205.600.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan							
							Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	100.000.000	200.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional							
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	1 Lembaga	0	105.600.000	52.800.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
165	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	-	75.000.000	102.156.200	82.476.200	
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	-	75.000.000	102.156.200	102.156.200	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah							
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	75.000.000	64.142.000	57.639.940	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan							
							Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-	1 Organisasi	0	38.014.200	24.836.260	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
166	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.520.410.391	5.465.312.440	5.536.547.731	
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.280.454.684	3.091.435.608	3.091.435.608	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	100% Orang/ bulan	100% Orang/ bulan	3.280.454.684	3.091.435.608	3.257.881.299	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

							Tunjangan ASN						
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	233.454.100	254.941.620	254.941.620	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	100% Paket	5.010.000	7.232.500	7.232.500	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket	100% Paket	79.452.300	200.748.870	92.885.720	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100% Paket	100% Paket	38.338.000	37.589.000	31.739.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	100% Paket	11.553.800	9.371.250	7.026.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	99.100.000	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.868.102.007	1.971.989.812	1.971.989.812	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	74.973.912	67.267.600	67.267.600	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.793.128.095	1.904.722.212	1.904.722.212	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	138.399.600	146.945.400	146.945.400	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	89.639.600	98.397.400	119.245.400	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	28.760.000	28.720.000	28.720.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	9.828.000	9.828.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3					NON URUSAN				1.916.858.208	2.333.370.608	2.173.370.608	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				1.916.858.208	2.333.370.608	2.173.370.608	
167	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.520.410.391	5.465.312.440	5.536.547.731	
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.280.454.684	3.091.435.608	3.091.435.608	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.916.858.208	2.333.370.608	2.173.370.608	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				1.916.858.208	2.333.370.608	2.173.370.608	
168	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	-	1.423.258.208	1.900.560.608	1.740.560.608	
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	-	0	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota							

							Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	190.000.000	288.480.000	288.480.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit	20.000.000	120.000.000	120.000.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan	170.000.000	168.480.000	168.480.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	1.193.258.208	1.265.260.608	1.265.260.608	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit	0 Unit	1.193.258.208	1.265.260.608	1.265.260.608	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	40.000.000	346.820.000	346.820.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota							
							Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	0 Laporan	0 Laporan	40.000.000	346.820.000	186.820.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
169	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-	443.600.000	403.406.000	403.406.000	

	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	443.600.000	403.406.000	403.406.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri							
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota							
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	4 Kegiatan	400.000.000	366.678.000	366.678.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri							
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi	10 Promosi	43.600.000	36.728.000	36.728.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
170	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	-	-	-	0	0	0	
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-	-	-	0	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
171	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	50.000.000	29.404.000	29.404.000	

	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-	-	30.000.000	29.404.000	29.404.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif							
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	29.404.000	29.404.000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	-	20.000.000	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0 Orang	0 Orang	20.000.000	0	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						SEKRETARIAT DAERAH				34.457.174.994	35.223.186.517	34.056.747.250	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				34.457.174.994	35.223.186.517	34.056.747.250	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH				34.457.174.994	35.223.186.517	34.056.747.250	
172	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah yang Berjalan Lancar dan Tertib (Bidang Sekretariat Daerah)	100 %	100 %	24.712.532.924	24.474.534.648	23.767.296.132	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	4.508.000	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.940.000	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.568.000	0	0	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	11.765.949.042	10.982.791.860	10.982.791.860	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1232 Orang/ bulan	1232 Orang/ bulan	11.744.184.042	10.982.791.860	11.758.649.591	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	17.835.000	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.930.000	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	59.508.000	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	59.508.000	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi	12 bulan	12 bulan	2.391.648.620	3.561.650.470	3.561.650.470	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.188.500	40.188.500	40.188.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	189.033.080	458.161.930	151.366.870	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	313.841.240	309.799.240	309.797.885	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	108.685.800	83.360.800	62.482.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.739.900.000	2.670.140.000	1.382.179.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	2.835.434.700	2.830.826.700	2.830.826.700	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	2.604.608.000	2.600.000.000	2.600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	230.826.700	230.826.700	230.826.700	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	12 bulan	12 bulan	2.257.515.620	2.257.043.296	2.257.043.296	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	707.152.800	707.152.800	707.152.276	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.545.362.820	1.544.890.496	1.620.890.576	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharananya sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	1.761.964.500	1.499.230.000	1.499.230.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	611.594.500	407.300.000	437.282.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Unit	95 Unit	426.300.000	367.860.000	367.860.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit	250 Unit	129.520.000	129.520.000	129.520.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	594.550.000	594.550.000	594.550.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan kepala daerah	12 bulan	12 bulan	1.429.409.760	1.257.203.640	1.257.203.640	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	581.709.760	500.353.640	534.649.952	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	379.700.000	288.850.000	287.972.500	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7 Orang	7 Orang	68.000.000	68.000.000	68.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							

							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kepala daerah dan sekretaris daerah	12 bulan	12 bulan	643.766.932	643.766.932	643.766.932	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah							
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	354.378.552	354.378.552	354.378.552	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah							
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	289.388.380	289.388.380	289.388.380	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan yang mengacu pada aturan terbaru Jumlah Laporan AKIP dan RB yang disusun	27 OPD 2 Laporan	27 OPD 2 Laporan	195.562.000	127.041.000	127.041.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan							
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	24.700.000	22.220.000	22.220.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	90.230.000	68.497.000	61.635.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi							
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	80.632.000	36.324.000	36.324.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya pendokumentasi kegiatan kepala daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.367.265.750	1.314.980.750	1.314.980.750	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan							
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	1.046.257.000	1.023.507.000	1.023.507.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan							
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	150.603.000	150.603.000	150.603.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan							

							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	170.405.750	140.870.750	140.870.750	SEKRETARIAT DAERAH
173	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti Zakat yang Terkumpul pada Baznas Kota Sawahlunto Jumlah Hafidz Al Quran (Orang)	100 6,17 650 % Milyar Rupiah Orang	100 6,17 650 % Milyar Rupiah Orang	9.405.084.600	10.374.687.349	9.936.495.298	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	85 %	85 %	363.750.940	363.750.940	363.750.940	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan							
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	5 Dokumen	41.813.840	41.813.840	41.813.840	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	6 Dokumen	137.447.100	137.447.100	137.431.390	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	184.490.000	184.490.000	148.721.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kerja bidang keagamaan Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan masyarakat Persentase capaian kerja bidang kesejahteraan Sosial	75 % 80 % 85 %	75 % 80 % 85 %	8.714.166.100	9.683.768.849	9.683.768.849	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	6 Dokumen	1.346.768.950	1.810.945.049	1.531.474.208	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial							

							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	6 Dokumen	5.915.357.050	5.858.833.800	5.779.399.300	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	4 Dokumen	1.452.040.100	2.013.990.000	2.003.359.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	85 %	85 %	232.167.560	232.167.560	232.167.560	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah							
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	300 Dokumen	300 Dokumen	27.355.760	27.355.760	15.025.960	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum							
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus	5 Kasus	150.800.000	150.800.000	147.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum							
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	300 Dokumen	300 Dokumen	54.011.800	54.011.800	37.269.800	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian/realisasi Anggaran Fasilitasi Kerjasama Daerah	90 %	90 %	95.000.000	95.000.000	95.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri							

							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000	95.000.000	95.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
174	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan Perekonomian yang Dimonitoring dan dievaluasi (%) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase kegiatan pembangunan yang terserap (%) Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	100 0 66 0,36 94 % % % Rasio %	100 0 66 94 0,36 % % % % Rasio	339.557.470	373.964.520	352.955.820	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD, BLUD dan Lembaga Keuangan yang berkinerja sehat dan menguntungkan Persentase Peningkatan Pengawasa dan Pengendalian Inflasi Daerah	100 %	100 %	114.399.720	107.391.220	107.391.220	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	3 Dokumen	94.091.880	88.382.880	85.782.880	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	3 Laporan	20.307.840	19.008.340	18.674.140	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian fisik kegiatan pembangunan kota yang optimal Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berkualitas Persentase Penyusunan Laporan Kota dan Setdako yang tepat waktu (%)	90 % 98 %	90 % 98 %	24.172.000	19.306.000	19.306.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.988.000	2.388.000	2.388.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	14.884.000	11.896.000	11.896.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	6.300.000	5.022.000	5.022.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Kelembagaan UKPBJ oleh LKPP Jumlah Laporan Pengadaan Barang/Jasa yang difasilitasi secara elektronik Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diproses pada UKPBJ Persentase Nilai Capaian Pemberantasan Korupsi Terintegras Pengadaan Barang/Jasa oleh KPK	100 % 4 Laporan 4 level 625 paket	100 % 4 Laporan 4 level 625 paket	188.582.640	236.479.640	236.479.640	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	625 Dokumen	625 Dokumen	9.880.000	97.240.000	79.560.000	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	87.454.200	87.454.200	87.454.200	SEKRETARIAT DAERAH

	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	95 Orang	95 Orang	91.248.440	51.785.440	51.785.440	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Daerah serta Pengelolaan di Bidang SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan, Energi, LH dan Air	100 %	100 %	12.403.110	10.787.660	10.787.660	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	6.023.100	4.988.900	4.798.400	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	1 Dokumen	3.299.380	2.989.380	2.884.380	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.080.630	2.809.380	2.710.380	SEKRETARIAT DAERAH
						SEKRETARIAT DPRD				21.289.551.233	31.391.819.100	23.871.617.350	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				21.289.551.233	31.391.819.100	23.871.617.350	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD				21.289.551.233	31.391.819.100	23.871.617.350	

175	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	15.905.378.233	14.938.913.100	14.843.333.350	
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	-	100 %	10.750.100.734	2.515.453.694	2.515.453.694	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40/14 Orang/ bulan	40/14 Orang/ bulan	10.750.100.734	2.515.453.694	2.515.453.694	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian perangkat daerah	-	100 %	9.900.000	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	9.900.000	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	-	100 %	657.227.700	514.518.500	514.518.500	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12 Paket	11.687.500	11.687.500	11.687.500	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Paket	30.766.200	28.857.000	24.951.250	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	12 Paket	212.274.000	250.974.000	250.974.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12 Paket	217.500.000	213.000.000	213.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	12 Laporan	175.000.000	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	2.258.910.000	80.274.450	80.274.450	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	2.108.910.000	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	150.000.000	80.274.450	80.274.450	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	957.842.499	1.199.131.076	1.199.131.076	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.150.000	3.150.000	3.150.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	235.000.000	235.000.000	235.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.692.500	127.552.500	35.878.500	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	693.999.999	833.428.576	833.428.576	SEKRETARIAT DPRD

	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketercapaian pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	455.670.000	1.628.668.000	1.628.668.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	339.430.000	313.430.000	313.430.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	12 Unit	8.000.000	3.500.000	3.500.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	16 Unit	22.000.000	22.000.000	22.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	86.240.000	1.289.738.000	1.289.738.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	-	100 %	285.000.000	8.446.947.380	8.446.947.380	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD							
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-	20 Orang/ Bulan	0	8.181.947.380	8.181.947.380	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	225.000.000	205.000.000	205.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	20 Orang	20 Orang	60.000.000	60.000.000	60.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	-	100 %	530.727.300	553.920.000	553.920.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD							
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0 Laporan	12 Laporan	13.920.000	13.920.000	13.920.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD							

							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	120 Laporan	12 Laporan	270.130.000	300.000.000	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD							
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	2 Paket	12 Paket	246.677.300	240.000.000	240.000.000	SEKRETARIAT DPRD
176	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-	5.384.173.000	16.452.906.000	9.028.284.000	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	-	100 %	130.000.000	180.000.000	180.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	110.000.000	160.000.000	160.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya rapat pembahasan	-	5 Dokumen	220.710.000	220.710.000	220.710.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	4 Dokumen	178.100.000	178.100.000	178.100.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD							
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	42.610.000	42.610.000	42.610.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD	-	100 %	1.058.163.000	1.058.163.000	1.058.163.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD							
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	120 Dokumen	900.043.000	900.043.000	885.521.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan	2 Dokumen	4 Dokumen	13.420.000	13.420.000	13.420.000	SEKRETARIAT DPRD

							Masyarakat						
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD							
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	20 Dokumen	12 Dokumen	144.700.000	144.700.000	143.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terhimpunnya aspirasi masyarakat (%)	-	100 %	225.300.000	353.520.000	353.520.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses							
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	60 Dokumen	225.300.000	353.520.000	353.520.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	100 %	3.750.000.000	14.640.513.000	14.640.513.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	432 Dokumen	12 Dokumen	2.249.810.000	11.541.518.000	5.664.409.000	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.190.000	3.098.995.000	1.567.704.000	SEKRETARIAT DPRD
						BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				6.883.214.171	6.482.863.950	6.515.179.977	
	5					NON URUSAN				6.883.214.171	6.482.863.950	6.515.179.977	
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				545.295.010	728.872.440	619.292.290	
177	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.234.885.161	5.701.982.310	5.873.253.987	
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.414.277.445	5.142.507.485	5.142.507.485	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	375.290.940	214.115.545	214.115.545	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	4 Paket	0	0	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.883.214.171	6.482.863.950	6.515.179.977	
	5	01				PERENCANAAN				545.295.010	728.872.440	619.292.290	
178	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.234.885.161	5.701.982.310	5.873.253.987	
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	13.452.000	13.452.000	13.452.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	13.452.000	13.452.000	41.984.500	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
179	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	336.366.100	559.954.630	392.170.960	
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	-	315.961.700	548.634.980	548.634.980	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah							
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	3 Dokumen	63.682.520	5.220.120	5.220.120	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik							

							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	40.501.000	28.206.400	14.490.400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	88.749.960	68.758.380	25.358.380	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	123.028.220	446.450.080	335.062.410	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	7.628.000	4.252.250	4.252.250	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah							
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	27 Orang	27 Orang	7.628.000	4.252.250	4.252.250	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	12.776.400	7.067.400	7.067.400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	12.776.400	7.067.400	7.787.400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
180	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	195.476.910	155.465.810	185.136.830	

	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	54.464.070	44.528.060	44.528.060	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	8.231.480	5.831.480	5.831.480	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	9.466.330	8.066.330	8.066.330	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	10.834.600	7.810.600	14.218.860	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	14.149.910	11.837.900	5.418.400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	7.927.150	7.127.150	7.127.150	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							

							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	3.854.600	3.854.600	3.854.600	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-	69.835.230	54.334.790	54.334.790	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	14.109.550	11.401.400	21.545.400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	2 Laporan	13.476.160	7.881.020	7.608.620	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	4 Laporan	12.915.000	11.472.850	15.072.850	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	11.620.180	10.193.800	26.299.600	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							

							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	2 Laporan	10.457.700	7.688.700	6.386.360	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	4 Laporan	7.256.640	5.697.020	8.497.020	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA							
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	71.177.610	56.602.960	56.602.960	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	17.637.900	11.714.700	11.714.700	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	4 Laporan	20.167.000	14.823.100	11.638.300	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	4 Laporan	10.328.480	9.963.680	10.355.680	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							

							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	7.578.200	6.637.400	6.637.400	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	4 Laporan	9.334.730	7.821.180	7.821.180	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6 Laporan	4 Laporan	6.131.300	5.642.900	7.042.900	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03				KEPEGAWAIAN				6.221.433.161	5.688.530.310	5.831.269.487	
181	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.234.885.161	5.701.982.310	5.873.253.987	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	2.620.000	2.620.000	2.620.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.620.000	2.620.000	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.414.277.445	5.142.507.485	5.142.507.485	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ bulan	47 Orang/ bulan	5.414.277.445	5.142.507.485	5.408.867.372	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	50.000.000	0	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	50.000.000	0	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	375.290.940	214.115.545	214.115.545	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.872.625	9.872.625	9.872.625	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	88.696.515	181.360.120	72.191.410	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	22.882.800	22.882.800	22.882.800	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	0	0	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	253.839.000	0	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	171.480.776	159.563.280	159.563.280	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	49.014.944	49.014.944	45.011.744	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	120.065.832	108.148.336	108.148.336	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	207.764.000	169.724.000	169.724.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	188.500.000	150.460.000	117.283.200	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	4.914.000	4.914.000	27.482.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	40 Unit	14.350.000	14.350.000	17.130.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				116.486.000	65.461.200	64.618.200	
182	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-	116.486.000	65.461.200	64.618.200	
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	-	116.486.000	65.461.200	65.461.200	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif							
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	116.486.000	65.461.200	64.618.200	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				78.152.957.818	81.362.389.129	84.276.126.192	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				78.152.957.818	81.362.389.129	84.276.126.192	
	5	02				KEUANGAN				78.152.957.818	81.362.389.129	84.276.126.192	
183	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.121.129.839	9.242.745.721	11.197.518.579	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	9.435.200	9.435.200	9.435.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.930.200	4.930.200	4.510.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000	2.125.000	2.125.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000	1.260.000	1.108.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.120.000	1.120.000	1.120.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.349.296.144	7.654.319.436	7.654.319.436	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ bulan	61 Orang/ bulan	6.349.296.144	7.654.319.436	9.762.431.232	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5					NON URUSAN				78.152.957.818	81.362.389.129	84.276.126.192	
	5	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				78.152.957.818	81.362.389.129	84.276.126.192	
184	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.121.129.839	9.242.745.721	11.197.518.579	
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.349.296.144	7.654.319.436	7.654.319.436	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				78.152.957.818	81.362.389.129	84.276.126.192	
	5	02				KEUANGAN				78.152.957.818	81.362.389.129	84.276.126.192	
185	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.121.129.839	9.242.745.721	11.197.518.579	
	5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	2.030.000	2.030.000	2.030.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.030.000	2.030.000	1.790.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	144.360.000	39.280.000	39.280.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai							
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	64.360.000	39.280.000	58.277.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	80.000.000	0	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	556.535.600	356.563.600	356.563.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.594.000	13.594.000	13.593.450	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	83.632.400	185.492.400	96.165.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	66.274.000	66.274.000	59.190.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	89.343.200	89.343.200	75.930.375	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	301.832.000	0	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.860.000	1.860.000	1.620.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	5.680.950	14.680.950	14.680.950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	0	0	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	0	0	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	5.680.950	14.680.950	32.073.575	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	833.126.145	873.291.535	873.291.535	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.500.000	5.500.000	5.500.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	82.498.629	82.498.629	66.997.981	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	745.127.516	785.292.906	756.164.066	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	220.665.800	293.145.000	293.145.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	28 Unit	144.675.800	176.945.000	146.931.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	9.910.000	50.120.000	31.700.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	35 Unit	35 Unit	66.080.000	66.080.000	80.290.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
186	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	69.194.437.577	71.078.959.727	72.032.414.632	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	-	873.006.300	954.720.852	954.720.852	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	15.410.400	17.124.952	17.124.952	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	11.029.000	11.029.000	13.189.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	28 Dokumen	15.471.800	15.471.800	15.471.800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD							
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	112 Dokumen	112 Dokumen	11.707.700	11.707.700	11.707.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD							

							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	28 Dokumen	7.812.600	7.812.600	7.812.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD							
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	112 Dokumen	112 Dokumen	16.000.000	16.000.000	16.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	375.964.200	375.964.200	375.964.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen	5 Dokumen	376.264.200	376.264.200	376.264.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	6 Dokumen	9.246.400	89.246.400	89.246.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	240 Orang	210 Orang	34.100.000	34.100.000	31.940.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-	-	154.523.090	139.750.125	139.750.125	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	14.361.730	9.749.625	15.333.625	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	8 Dokumen	8 Dokumen	6.311.200	6.311.125	6.207.125	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya							

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	70 Dokumen	70 Dokumen	27.749.510	10.548.000	7.496.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen	14.646.100	5.546.000	2.746.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)							
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	10.041.750	6.541.625	4.741.625	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait							
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	9.105.550	6.273.000	6.273.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							

							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	8 Dokumen	8 Dokumen	42.000.000	43.223.625	64.523.625	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	108 Orang	30.307.250	51.557.125	22.445.125	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	-	114.632.000	104.828.750	104.828.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 Laporan	2 Laporan	7.677.800	6.023.500	5.773.375	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban							
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	131 Dokumen	131 Dokumen	8.204.000	6.479.375	6.229.250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	28 Laporan	28 Laporan	2.270.000	2.270.000	2.270.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							

							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	42.408.600	41.689.625	40.089.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD							
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.257.000	6.912.750	6.412.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	5.625.800	4.825.500	4.535.250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah							
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	9.380.400	8.379.375	7.729.125	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	60 Orang	30.808.400	28.248.625	27.798.625	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	67.998.976.187	69.826.360.000	69.826.360.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah	2 Laporan	2 Laporan	1.250.000.000	1.250.000.000	1.150.000.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Daerah						
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan							
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	62.101.339.000	62.671.906.000	63.671.906.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	3.430.622.187	4.000.000.000	4.067.430.030	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota							
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1.217.015.000	1.904.454.000	1.904.454.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-	-	53.300.000	53.300.000	53.300.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	53.300.000	53.300.000	53.300.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
187	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	-	409.210.736	359.711.438	349.168.338	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	409.210.736	359.711.438	359.711.438	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga							
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	28.740.700	25.229.107	23.628.982	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah							

							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	22.474.780	19.720.750	18.870.625	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah							
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	23.671.000	20.630.000	17.430.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	6 Laporan	85.685.160	84.943.435	64.467.010	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	199.627.096	165.637.896	175.877.721	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	28 Laporan	28 Laporan	22.944.000	20.480.250	30.824.250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65 Orang	65 Orang	26.068.000	23.070.000	18.069.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
188	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	428.179.666	680.972.243	697.024.643	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	428.179.666	680.972.243	680.972.243	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah							
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.318.340	4.516.750	4.267.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah							

							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.037.930	58.746.475	34.234.475	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	24.560.000	36.720.000	32.972.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	10.863.700	28.375.000	28.375.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	52.410.000	80.440.400	45.215.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	29.925.870	125.905.000	125.258.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)							
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	500 Obyek Pajak	500 Obyek Pajak	24.245.500	23.440.750	14.157.950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah							
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	37 Dokumen	37 Dokumen	39.012.500	39.012.500	45.832.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah							
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	12 Layanan	11.229.400	9.918.750	9.418.750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah							
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	400 Dokumen	400 Dokumen	29.550.000	36.750.000	21.170.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	170.393.196	165.390.368	292.017.568	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah							
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	7.100.590	4.837.500	4.537.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	2 Laporan	6.873.940	60.864.250	33.864.250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	6.658.700	6.054.500	5.704.250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				6.080.946.140	5.801.277.535	5.165.194.735	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.080.946.140	5.801.277.535	5.165.194.735	
	5	03				KEPEGAWAIAN				6.080.946.140	5.801.277.535	5.165.194.735	
189	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.834.559.660	4.503.016.815	4.411.341.815	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.409.645.691	4.059.263.588	4.059.263.588	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	30 Orang/ bulan	4.409.645.691	4.059.263.588	4.059.263.588	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	98.926.400	143.484.400	143.484.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.002.500	1.002.500	1.002.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	20.676.200	122.536.200	20.676.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	12.383.700	12.383.700	12.383.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	7.562.000	7.562.000	7.562.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	57.302.000	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	247.137.969	237.078.827	237.078.827	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	0	500.000	500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5					NON URUSAN				6.080.946.140	5.801.277.535	5.165.194.735	
	5	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				6.080.946.140	5.801.277.535	5.165.194.735	

190	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.834.559.660	4.503.016.815	4.411.341.815	
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	247.137.969	237.078.827	237.078.827	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.080.946.140	5.801.277.535	5.165.194.735	
	5	03				KEPEGAWAIAN				6.080.946.140	5.801.277.535	5.165.194.735	
191	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.834.559.660	4.503.016.815	4.411.341.815	
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	247.137.969	237.078.827	237.078.827	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	39.999.851	39.999.851	39.999.851	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	206.638.118	196.578.976	196.578.976	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	78.849.600	63.190.000	63.190.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	76.649.600	60.990.000	71.175.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	2.200.000	2.200.000	2.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
192	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	-	1.246.386.480	1.298.260.720	753.852.920	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-	-	23.419.000	108.819.520	108.819.520	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian							
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	12 Laporan	23.419.000	108.819.520	99.151.720	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-	-	-	105.960.000	105.960.000	105.960.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	105.960.000	105.960.000	105.960.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-	-	-	1.043.189.080	1.042.913.200	1.042.913.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center							
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	97.660.000	97.660.000	97.660.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN							

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	647.485.080	647.209.200	121.209.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	2 Dokumen	298.044.000	298.044.000	289.304.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-	-	73.818.400	40.568.000	40.568.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2395 Dokumen	2395 Dokumen	38.854.400	26.760.000	26.760.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai							
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	150 Orang	18.224.000	396.000	396.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN							
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	15 Orang	15 Orang	16.740.000	13.412.000	13.412.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT				7.001.430.647	10.522.107.528	9.587.767.137	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7.001.430.647	10.522.107.528	9.587.767.137	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				7.001.430.647	10.522.107.528	9.587.767.137	
193	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.783.074.747	9.089.976.628	8.669.587.477	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.149.185.857	5.275.105.042	5.275.105.042	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ bulan	43 Orang/ bulan	6.149.185.857	5.275.105.042	5.966.857.121	INSPEKTORAT
	6					NON URUSAN				7.001.430.647	10.522.107.528	9.587.767.137	
	6	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				7.001.430.647	10.522.107.528	9.587.767.137	
194	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.783.074.747	9.089.976.628	8.669.587.477	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	6.149.185.857	5.275.105.042	5.275.105.042	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	INSPEKTORAT
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				7.001.430.647	10.522.107.528	9.587.767.137	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH				7.001.430.647	10.522.107.528	9.587.767.137	
195	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.783.074.747	9.089.976.628	8.669.587.477	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	85.000.000	909.598.000	909.598.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	42 Orang	85.000.000	909.598.000	759.414.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	184.073.500	538.741.350	538.741.350	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000	5.000.000	5.000.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	24.931.990	136.793.490	110.051.960	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.032.010	7.698.260	7.698.260	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.088.000	36.888.000	36.888.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.780.500	30.282.600	22.711.700	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	100.241.000	322.079.000	162.754.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	38.300.410	1.914.793.772	1.914.793.772	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	4 Unit	0	1.116.985.230	372.328.410	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	38.300.410	797.808.542	774.145.562	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	146.095.780	194.749.664	194.749.664	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.000.000	1.500.000	1.500.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	44.540.364	51.881.520	51.881.520	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100.555.416	141.368.144	141.368.144	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	180.419.200	256.988.800	256.988.800	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	162.539.200	133.308.800	133.308.800	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	6.980.000	12.380.000	12.380.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	8.000.000	108.400.000	108.400.000	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.900.000	1.900.000	1.900.000	INSPEKTORAT
196	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-	-	-	105.156.100	950.878.650	624.070.830	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-	-	105.156.100	763.945.600	763.945.600	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50 Laporan	50 Laporan	52.541.100	268.881.600	233.991.600	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	-	0 Laporan	0	82.896.450	39.782.000	INSPEKTORAT

	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja							
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	28 Laporan	28 Laporan	52.615.000	187.837.150	114.242.230	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan							
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	-	0 Laporan	0	6.347.000	3.953.950	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	-	0 Laporan	0	106.198.250	54.611.250	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	0 Dokumen	0	111.785.150	67.447.750	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-	-	0	186.933.050	186.933.050	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	0 Laporan	0	186.933.050	110.042.050	INSPEKTORAT
197	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-	-	113.199.800	481.252.250	294.108.830	
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	113.199.800	481.252.250	481.252.250	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	27 PD perangkat daerah	0	57.488.250	33.129.050	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	113.199.800	333.920.000	207.748.280	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							

							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	27 PD perangkat daerah	0	89.844.000	53.231.500	INSPEKTORAT
						KECAMATAN BARANGIN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7	01				KECAMATAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
198	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.507.944.965	5.184.879.297	5.334.646.763	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.954.078.568	4.551.577.552	4.551.577.552	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan	4.954.078.568	4.551.577.552	4.778.312.598	KECAMATAN BARANGIN
	7					NON URUSAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
199	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.507.944.965	5.184.879.297	5.334.646.763	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.954.078.568	4.551.577.552	4.551.577.552	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN BARANGIN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7	01				KECAMATAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
200	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.507.944.965	5.184.879.297	5.334.646.763	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.820.000	3.500.000	3.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	KECAMATAN BARANGIN

	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	7.320.000	0	0	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	69.244.385	134.266.065	134.266.065	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.251.925	1.251.925	1.251.925	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	23.032.460	116.174.140	39.206.560	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	11.140.000	10.600.000	10.600.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.240.000	6.240.000	6.240.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	27.580.000	0	0	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0	0	0	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	0	0	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	421.261.212	447.722.080	447.722.080	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	0	1.300.000	1.300.000	KECAMATAN BARANGIN
	7					NON URUSAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	

	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
201	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.507.944.965	5.184.879.297	5.334.646.763	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	421.261.212	447.722.080	447.722.080	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7	01				KECAMATAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
202	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.507.944.965	5.184.879.297	5.334.646.763	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	421.261.212	447.722.080	447.722.080	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	29.998.300	37.498.300	37.498.300	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	389.962.912	408.923.780	408.923.780	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	52.540.800	47.813.600	47.813.600	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	42.186.800	37.459.600	37.459.600	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	0	1.500.000	1.500.000	KECAMATAN BARANGIN
	7					NON URUSAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	

203	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.507.944.965	5.184.879.297	5.334.646.763	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	52.540.800	47.813.600	47.813.600	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7	01				KECAMATAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
204	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	5.507.944.965	5.184.879.297	5.334.646.763	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	52.540.800	47.813.600	47.813.600	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	3.940.000	3.940.000	3.940.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	4.914.000	4.914.000	4.914.000	KECAMATAN BARANGIN
205	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	412.489.880	308.838.906	282.101.306	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	4.991.600	4.991.600	4.991.600	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	4.991.600	4.991.600	4.991.600	KECAMATAN BARANGIN

	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	407.498.280	303.847.306	303.847.306	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	7.498.400	5.220.000	5.220.000	KECAMATAN BARANGIN
206	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.589.469.030	2.053.754.309	1.820.853.459	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	292.289.600	337.103.600	337.103.600	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	7.495.600	7.309.600	7.309.600	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	284.794.000	329.794.000	96.894.000	KECAMATAN BARANGIN
207	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	9.991.600	9.980.800	9.980.800	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	9.991.600	9.980.800	9.980.800	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	9.991.600	9.980.800	9.980.800	KECAMATAN BARANGIN
208	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	5.890.000	5.890.000	5.890.000	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	5.890.000	5.890.000	5.890.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	2.494.000	2.494.000	2.494.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	3.396.000	3.396.000	3.396.000	KECAMATAN BARANGIN
209	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	14.137.600	4.144.000	4.144.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	14.137.600	4.144.000	4.144.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	2.072.000	2.072.000	2.072.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	2.072.000	2.072.000	2.072.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	9.993.600	0	0	KECAMATAN BARANGIN
						KELURAHAN DURIAN 1				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7	01				KECAMATAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
210	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	412.489.880	308.838.906	282.101.306	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	407.498.280	303.847.306	303.847.306	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	65.208.106	56.129.856	KECAMATAN BARANGIN
211	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.589.469.030	2.053.754.309	1.820.853.459	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.297.179.430	1.716.650.709	1.716.650.709	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	249.820.880	319.171.328	319.171.328	KECAMATAN BARANGIN
						KELURAHAN DURIAN 2				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7	01				KECAMATAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	

212	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	412.489.880	308.838.906	282.101.306	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	407.498.280	303.847.306	303.847.306	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	82.158.440	75.016.640	KECAMATAN BARANGIN
213	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.589.469.030	2.053.754.309	1.820.853.459	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.297.179.430	1.716.650.709	1.716.650.709	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	248.728.460	358.872.540	358.871.890	KECAMATAN BARANGIN
						KELURAHAN LUBANG PANJANG				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7	01				KECAMATAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
214	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	412.489.880	308.838.906	282.101.306	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	407.498.280	303.847.306	303.847.306	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	68.383.080	68.383.080	KECAMATAN BARANGIN

215	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.589.469.030	2.053.754.309	1.820.853.459	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.297.179.430	1.716.650.709	1.716.650.709	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	248.806.730	321.095.456	321.095.256	KECAMATAN BARANGIN
						KELURAHAN SARINGAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
	7	01				KECAMATAN				7.539.923.075	7.567.487.312	7.457.616.328	
216	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	412.489.880	308.838.906	282.101.306	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	407.498.280	303.847.306	303.847.306	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	99.999.880	82.877.680	72.360.130	KECAMATAN BARANGIN
217	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	1.589.469.030	2.053.754.309	1.820.853.459	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.297.179.430	1.716.650.709	1.716.650.709	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	KECAMATAN BARANGIN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	249.823.360	417.511.385	417.511.385	KECAMATAN BARANGIN
						KECAMATAN LEMBAH SEGAR				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7	01				KECAMATAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
218	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.474.006.325	7.042.145.268	6.615.053.071	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.965.501.774	6.360.793.117	6.360.793.117	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ bulan	53 Orang/ bulan	5.965.501.774	6.360.793.117	5.994.796.480	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7					NON URUSAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
219	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.474.006.325	7.042.145.268	6.615.053.071	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	5.965.501.774	6.360.793.117	6.360.793.117	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7	01				KECAMATAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
220	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	6.474.006.325	7.042.145.268	6.615.053.071	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	13.060.000	3.500.000	3.500.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	9.560.000	0	0	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	73.334.355	168.574.755	168.574.755	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	975.375	40.975.375	40.975.375	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	25.806.980	108.914.380	31.344.400	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.628.000	10.465.000	10.465.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.470.000	4.470.000	4.050.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	30.454.000	3.750.000	3.750.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	728.400	728.400	728.400	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	728.400	728.400	728.400	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	346.871.876	444.559.076	444.559.076	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	200.000	200.000	200.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	29.999.796	29.999.796	29.999.796	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	316.672.080	414.359.280	414.359.280	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	74.509.920	63.989.920	63.989.920	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	73.840.000	63.320.000	65.840.400	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	499.200	499.200	499.200	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	70.720	70.720	5.164.740	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000	100.000	9.380.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
221	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	617.419.095	414.735.367	394.161.326	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	9.419.200	8.642.400	8.642.400	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	9.419.200	8.642.400	8.642.400	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	607.999.895	406.092.967	406.092.967	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000	7.299.200	7.299.200	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
222	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.180.931.576	2.301.184.833	2.081.205.440	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	278.037.740	398.291.440	398.291.440	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.750.500	8.750.500	8.750.500	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	269.287.240	389.540.940	169.562.490	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
223	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	13.760.000	12.385.600	12.380.800	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	13.760.000	12.385.600	12.385.600	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	13.760.000	12.385.600	12.380.800	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
224	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	6.998.000	6.642.000	6.639.000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	6.998.000	6.642.000	6.642.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang	80 Orang	2.500.000	2.352.000	2.352.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	75 Orang	75 Orang	4.498.000	4.290.000	4.287.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
225	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	14.406.400	12.969.600	12.968.800	

	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	14.406.400	12.969.600	12.969.600	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	4.816.000	4.333.600	4.332.800	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	2.090.400	1.868.800	1.868.800	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000	6.767.200	6.767.200	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KELURAHAN AIR DINGIN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7	01				KECAMATAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
226	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	617.419.095	414.735.367	394.161.326	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	607.999.895	406.092.967	406.092.967	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	65.831.972	62.344.265	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
227	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.180.931.576	2.301.184.833	2.081.205.440	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.902.893.836	1.902.893.393	1.902.893.393	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	291.777.800	291.777.720	291.777.536	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KELURAHAN AUR MULYO				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7	01				KECAMATAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
228	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	617.419.095	414.735.367	394.161.326	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	607.999.895	406.092.967	406.092.967	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	71.414.000	68.360.021	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
229	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.180.931.576	2.301.184.833	2.081.205.440	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.902.893.836	1.902.893.393	1.902.893.393	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	295.160.100	295.159.956	295.159.956	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7	01				KECAMATAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	

230	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	617.419.095	414.735.367	394.161.326	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	607.999.895	406.092.967	406.092.967	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	64.280.000	61.697.500	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
231	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.180.931.576	2.301.184.833	2.081.205.440	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.902.893.836	1.902.893.393	1.902.893.393	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	288.231.100	288.231.005	288.231.005	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7	01				KECAMATAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
232	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	617.419.095	414.735.367	394.161.326	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	607.999.895	406.092.967	406.092.967	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	66.490.000	60.506.025	KECAMATAN LEMBAH SEGAR

233	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.180.931.576	2.301.184.833	2.081.205.440	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.902.893.836	1.902.893.393	1.902.893.393	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	291.525.700	291.525.700	291.525.625	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KELURAHAN PASAR				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7	01				KECAMATAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
234	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	617.419.095	414.735.367	394.161.326	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	607.999.895	406.092.967	406.092.967	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	99.999.895	71.413.795	68.713.115	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
235	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.180.931.576	2.301.184.833	2.081.205.440	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.902.893.836	1.902.893.393	1.902.893.393	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	294.673.836	294.673.712	294.673.428	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KELURAHAN TANAH LAPANG				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
	7	01				KECAMATAN				9.307.521.396	9.790.062.668	9.122.408.437	
236	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	617.419.095	414.735.367	394.161.326	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	607.999.895	406.092.967	406.092.967	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	59.364.000	56.598.800	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
237	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	2.180.931.576	2.301.184.833	2.081.205.440	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	1.902.893.836	1.902.893.393	1.902.893.393	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	291.525.300	291.525.300	291.524.900	KECAMATAN LEMBAH SEGAR
						KECAMATAN SILUNGKANG				2.566.847.327	2.685.203.457	2.455.387.063	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.566.847.327	2.685.203.457	2.455.387.063	
	7	01				KECAMATAN				2.566.847.327	2.685.203.457	2.455.387.063	
238	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.202.882.067	2.206.647.557	2.128.746.787	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.884.556.144	1.790.152.464	1.790.152.464	KECAMATAN SILUNGKANG

	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/ bulan	266 Orang/ bulan	1.884.556.144	1.790.152.464	1.790.152.464	KECAMATAN SILUNGKANG
	7					NON URUSAN				2.566.847.327	2.685.203.457	2.455.387.063	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				2.566.847.327	2.685.203.457	2.455.387.063	
239	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.202.882.067	2.206.647.557	2.128.746.787	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.884.556.144	1.790.152.464	1.790.152.464	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN SILUNGKANG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.566.847.327	2.685.203.457	2.455.387.063	
	7	01				KECAMATAN				2.566.847.327	2.685.203.457	2.455.387.063	
240	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.202.882.067	2.206.647.557	2.128.746.787	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	9.860.000	3.500.000	3.500.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	6.360.000	0	0	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	65.717.475	131.860.115	131.860.115	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.015.000	1.015.000	1.015.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	29.177.225	112.661.865	34.761.095	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.579.250	11.283.250	11.283.250	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.900.000	6.900.000	6.900.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	17.046.000	0	0	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	205.468.448	252.278.468	252.278.468	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	29.977.200	29.977.200	29.977.200	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	174.991.248	221.801.268	221.801.268	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	37.280.000	28.856.510	28.856.510	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	35.070.000	26.646.510	26.646.510	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	9 Unit	2.210.000	2.210.000	2.210.000	KECAMATAN SILUNGKANG
241	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	16.321.660	15.241.660	15.241.660	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	8.040.000	7.236.000	7.236.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	8.040.000	7.236.000	7.236.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	8.281.660	8.005.660	8.005.660	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	8.281.660	8.005.660	8.005.660	KECAMATAN SILUNGKANG
242	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	309.810.600	426.892.040	274.976.416	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	309.810.600	426.892.040	426.892.040	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	6.600.000	6.220.000	6.220.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	303.210.600	420.672.040	268.756.416	KECAMATAN SILUNGKANG
243	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	6.000.000	5.750.000	5.750.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	6.000.000	5.750.000	5.750.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	6.000.000	5.750.000	5.750.000	KECAMATAN SILUNGKANG
244	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	20.053.000	19.620.200	19.620.200	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	20.053.000	19.620.200	19.620.200	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	250 Orang	20.053.000	19.620.200	19.620.200	KECAMATAN SILUNGKANG

245	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	11.780.000	11.052.000	11.052.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	11.780.000	11.052.000	11.052.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	7.200.000	6.930.000	6.930.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	2.080.000	1.872.000	1.872.000	KECAMATAN SILUNGKANG
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	2.250.000	2.250.000	KECAMATAN SILUNGKANG
						KECAMATAN TALAWI				2.736.380.804	2.484.321.168	2.383.724.468	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.736.380.804	2.484.321.168	2.383.724.468	
	7	01				KECAMATAN				2.736.380.804	2.484.321.168	2.383.724.468	
246	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.422.475.104	2.269.597.039	2.191.992.339	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.060.396.022	1.867.619.937	1.867.619.937	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/ bulan	224 Orang/ bulan	2.060.396.022	1.867.619.937	1.867.619.937	KECAMATAN TALAWI
	7					NON URUSAN				2.736.380.804	2.484.321.168	2.383.724.468	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				2.736.380.804	2.484.321.168	2.383.724.468	
247	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.422.475.104	2.269.597.039	2.191.992.339	

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.060.396.022	1.867.619.937	1.867.619.937	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN TALAWI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.736.380.804	2.484.321.168	2.383.724.468	
	7	01				KECAMATAN				2.736.380.804	2.484.321.168	2.383.724.468	
248	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.422.475.104	2.269.597.039	2.191.992.339	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	15.327.000	3.500.000	3.500.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	3.500.000	3.500.000	3.500.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	11.827.000	0	0	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	62.016.000	134.676.350	134.676.350	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.000.000	1.000.000	1.000.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	25.530.000	118.596.350	40.139.450	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.540.000	8.580.000	8.580.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.500.000	6.500.000	4.857.800	KECAMATAN TALAWI

	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	19.446.000	0	0	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	399.900	0	0	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0	0	0	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	399.900	0	0	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	246.516.182	216.487.952	216.487.952	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33.355.978	35.358.610	35.358.610	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	212.660.204	180.629.342	180.629.342	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	37.820.000	47.312.800	47.312.800	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit	37.320.000	46.812.800	49.307.200	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							

							Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	500.000	500.000	500.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	0	0	KECAMATAN TALAWI
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	0	0	KECAMATAN TALAWI
249	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	12.489.400	12.489.349	12.489.349	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	8.000.000	8.000.000	8.000.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	4.489.400	4.489.349	4.489.349	KECAMATAN TALAWI
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	4.489.400	4.489.349	4.489.349	KECAMATAN TALAWI
250	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	258.916.800	186.195.080	163.203.080	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	258.916.800	186.195.080	186.195.080	KECAMATAN TALAWI

	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	250.916.800	178.195.080	155.203.080	KECAMATAN TALAWI
251	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	10.000.000	1.040.000	1.040.000	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	10.000.000	1.040.000	1.040.000	KECAMATAN TALAWI
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	1.040.000	1.040.000	KECAMATAN TALAWI
252	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	12.499.800	9.999.800	9.999.800	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	12.499.800	9.999.800	9.999.800	KECAMATAN TALAWI
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	100 Orang	4.999.800	4.999.800	4.999.800	KECAMATAN TALAWI
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	7.500.000	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN TALAWI
253	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	19.999.700	4.999.900	4.999.900	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	19.999.700	4.999.900	4.999.900	KECAMATAN TALAWI
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	7.500.000	0	0	KECAMATAN TALAWI
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	4.999.900	4.999.900	4.999.900	KECAMATAN TALAWI
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							

							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	7.499.800	0	0	KECAMATAN TALAWI
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.213.075.482	4.943.805.222	4.775.992.022	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				4.213.075.482	4.943.805.222	4.775.992.022	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.213.075.482	4.943.805.222	4.775.992.022	
254	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.218.291.892	2.489.653.932	2.552.841.732	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.891.915.239	2.119.533.609	2.119.533.609	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18/14 Orang/ bulan	18/14 Orang/ bulan	1.891.915.239	2.119.533.609	2.322.597.309	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8					NON URUSAN				4.213.075.482	4.943.805.222	4.775.992.022	
	8	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.213.075.482	4.943.805.222	4.775.992.022	
255	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.218.291.892	2.489.653.932	2.552.841.732	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1.891.915.239	2.119.533.609	2.119.533.609	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				4.213.075.482	4.943.805.222	4.775.992.022	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.213.075.482	4.943.805.222	4.775.992.022	
256	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.218.291.892	2.489.653.932	2.552.841.732	
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	10.730.000	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	10.730.000	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	142.503.995	217.367.175	217.367.175	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.082.500	7.875.000	3.262.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	40.825.195	156.175.675	54.315.675	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.770.000	25.434.000	8.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.822.500	27.882.500	21.961.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	70.003.800	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	14.881.250	9.600.000	9.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	14.881.250	9.600.000	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	94.321.408	94.153.148	94.153.148	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0	750.000	750.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8					NON URUSAN				4.213.075.482	4.943.805.222	4.775.992.022	
	8	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.213.075.482	4.943.805.222	4.775.992.022	
257	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.218.291.892	2.489.653.932	2.552.841.732	

	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	94.321.408	94.153.148	94.153.148	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				4.213.075.482	4.943.805.222	4.775.992.022	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.213.075.482	4.943.805.222	4.775.992.022	
258	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2.218.291.892	2.489.653.932	2.552.841.732	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	94.321.408	94.153.148	94.153.148	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	41.598.700	41.598.700	21.450.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.472.708	51.804.448	51.804.448	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	63.940.000	49.000.000	49.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	61.670.000	45.670.000	60.670.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel							
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	1.050.000	1.500.000	500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	1.220.000	1.830.000	7.230.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
259	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-	718.511.800	1.104.054.500	966.356.500	

	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	718.511.800	1.104.054.500	1.104.054.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	224.576.000	226.391.000	194.456.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
							Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	18.668.000	18.668.000	17.400.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	100 Orang	475.267.800	858.995.500	754.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
260	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	-	-	644.818.590	644.818.590	621.881.590	

	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-	644.818.590	644.818.590	644.818.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	621.881.590	621.881.590	621.881.590	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30 Orang	30 Orang	22.937.000	22.937.000	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
261	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	-	-	-	27.812.200	69.887.200	51.887.200	

						ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	27.812.200	69.887.200	69.887.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah							
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	27.812.200	69.887.200	51.887.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
262	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-	-	-	59.987.800	91.737.800	90.437.800	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-	59.987.800	91.737.800	91.737.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	81.750.000	80.450.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							

							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	9.987.800	9.987.800	9.987.800	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
263	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	-	-	543.653.200	543.653.200	492.587.200	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	543.653.200	543.653.200	543.653.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	31.900.000	31.900.000	31.900.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota							
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	511.753.200	511.753.200	460.687.200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									J U M L A H	524.507.086.404	639.639.616.571	605.069.587.780	

Sumber Data: Dokumen Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Standar Pelayanan Minimal tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis-jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Nasional, pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk beberapa bidang program pelayanan dasar kepada masyarakat baik tingkat pusat maupun di daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dikemudian dinyatakan dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar yang terdiri dari Bidang :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
f. Sosial

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

a. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9) Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10) Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/20/WAKO_SWL/2023 tentang Penetapan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

b. Kebijakan Umum

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah disusun dengan tujuan mengambarkan keterkaitan bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperoleh berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya yaitu :

1) Kebijakan pada ***perspektif masyarakat/layanan*** adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2) Kebijakan pada ***perspektif proses internal*** adalah kebijakan bagi operasional birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

3) Kebijakan pada ***perspektif kelembagaan*** yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengunkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4) Kebijakan pada ***perspektif keuangan*** yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya menjadi pedoman perencanaan bagi stakeholder pembangunan di daerah. Oleh karenanya penting bagi Pemerintah Daerah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan menyusun arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat pernyataan-pernyataan kebijakan selama lima tahun.

Mengakomodir visi, misi, kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 adalah : **“SAWAHLUNTO KOTA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI”.** Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukan arah pembangunan Kota Sawahlunto yaitu: **Estetik, Futuristik dan Hidup Menghidupi** adalah sebagai berikut:

1) Estetik

Pada tahun 2023, transformasi Sawahlunto Kota wisata dengan segala tatanan keindahannya dapat dirasakan keberadaannya dan menunjukan kesiapannya menuju Kota pariwisata kelas dunia 2045, dimana telah terjadi transformasi atas tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan pelayanan umum pemerintahan. Transformasi atas hal tersebut dapat diketahui dari peningkatan atas indeks penilaian terhitung dari Lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia, sehingga visi estetik dapat dirasakan kemanfaatannya dan terukur kinerjanya dengan penilaian tertetapkan.

2) Futuristik

Pada tahun 2030, telah terbentuk sebuah pola pengembangan program-program kerja yang berbasiskan data (primer dan sekunder) yang di analisis dan disusun oleh Aparatur pelaksana yang telah melalui proses maksimalisasi peningkatan kemampuan personal (melalui diklat dan tinjauan langsung ke Pemerintah Daerah sasaran yang kualitasnya jauh lebih baik) dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan dengan komitmen yang kuat, terintegrasi dan berkelanjutan, dimana dilaksanakan dalam kondisi telah terjadi penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, ketahanan sosial budaya, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Dengan stabilitas ekonomi makro daerah yang telah terbentuk di Kota Sawahlunto, maka pada tahun 2030 masyarakat di Kota Sawahlunto telah dinyatakan siap untuk menyongsong dan mensukseskan tahapan pembentukan kota wisata kelas dunia yang menuju dan berkelanjutan 2045.

3) Hidup Menghidupi

Pada Tahun 2030, telah terwujud sebuah tatanan kota wisata yang telah tertata dengan keindahan berdaya guna, terukur pelaksanaan keinerjanya, kesiapan setiap SDM Aparatur pelaksana pendukung atas perencanaan program dan konsistensinya terhadap penganggarannya, sehingga tercipta sebuah pola tatanan kehidupan dunia kepariwisataan di Kota Sawahlunto yang mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto yang berkeadilan.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut diatas, ditetapkan 7 Misi Pembangunan Daerah untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perekonomian Yang Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian melalui kemandirian desa ekonomi kerakyatan untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing ekonomi dengan meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, hilirisasi industry, aktivitas perdagangan dan meningkatkan kinerja investasi daerah.

2) Mewujudkan Smart Governance Berbasis IT

Mewujudkan smart governance berbasis IT adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata

kelola pemerintahan untuk meningkatkan efesiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Konsep ini berfokus pada penggunaan data dan teknologi digital untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih efektif, dan peningkatan kualitas masyarakat.

3) **Penguatan Infrastruktur Penunjang Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat**

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang vital bagi kehidupan masyarakat, seperti jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan sarana prasarana lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah dalam memperkuat fondasi ekonomi.

4) **Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Pelestarian Budaya Melalui Pengembangan Komunitas Seni Demi Mendukung Terwujudnya Kota Wisata yang Estetik Dan Memiliki Fungsi Ekonomi dan Mensejahterakan**

Memperkuat pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama serta menjadikan seni budaya sebagai daya tarik wisata serta memberdayakan masyarakat melalui komunitas seni.

5) **Meningkatkan Fungsi Ekonomi Sektor Pariwisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Kepariwisataan**

Mengoptimalkan potensi pariwisata (OCHMS dan Geopark Nasional) dan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan dengan pendekatan berbasis infrastruktur, digitalisasi, keberlanjutan lingkungan, serta dukungan pelaku usaha lokal sehingga pertumbuhan sektor wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga melestarikan budaya dan alam.

6) **Kota Sawahlunto Menuju Kota Sehat Dan Destinasi Pendidikan Utama Yang Berkarakter Di Sumatera Barat**

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk menuju Kota sehat dan meningkatkan sarana/prasarana pendidikan, kompetensi tenaga pendidik serta kualitas proses belajar dan mengajar untuk pendidikan yang berkarakter.

7) Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Berdaya Saing Tinggi Atas Pengukuran Indeks Kinerja Yang Ditetapkan Oleh Kementerian dan Lembaga Lainnya.

Tata Kelola Pemerintah yang memegang prinsip good governance dan good government. Tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Tujuan pembangunan Kota Sawahlunto tahun 2025 telah dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dan dokumen RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 serta dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kota Sawahlunto telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator kinerja makro pembangunan daerah.

Pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi seluruh aspek kehidupan baik di wilayah Kota Sawahlunto maupun kondisi regional, nasional dan global. Kondisi makro pembangunan daerah secara umum dapat diidentifikasi melalui indikator kinerja makro pembangunan daerah. Dalam dokumen RPD Kota Sawahlunto 2024-2026 termuat indikator kinerja makro pembangunan daerah sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, meliputi : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi (LPE), Pendapatan (PDRB) Per Kapita, angka kemiskinan (persentase penduduk miskin), angka pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)), dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio).

Kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator kinerja makro tersebut. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian setiap indikator kinerja makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi : pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator kinerja makro, perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian indikator kinerja makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian indikator kinerja makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan.

Sebagai gambaran perkembangan realisasi (pencapaian) indikator kinerja makro, berikut disajikan perkembangan indikator kinerja makro Kota Sawahlunto Tahun 2024-2025 :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Sawahlunto
Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Indeks Pembangunan Manusia	76,68	77,05	0,48
2.	Angka Kemiskinan (%)	2,33	2,72	16,74
3.	Angka Pengangguran (%)	5,55	4,64	(-16,40)
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,02	3,43	(-14,68)
5.	Pendapatan Per Kapita (juta/jiwa)	74,768	78,027	4,36
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,299	0,249	(-16,72)

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026
BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026
BPS, Website Badan Pusat Statistik Kota Padang

Memperhatikan capaian Indikator Kinerja Makro Kota Sawahlunto tahun 2025 di atas, terdapat 2 indikator kinerja yang realisasinya tidak sesuai harapan dan target yang ditetapkan, yaitu Angka Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan yang diharapkan turun malah meningkat dan Pertumbuhan Ekonomi yang diharapkan meningkat justru melambat.

Merujuk pada target indikator kinerja makro Kota Sawahlunto tahun 2025 yang tercantum pada dokumen Perubahan RKPD Kota Sawahlunto tahun 2025 (dokumen perencanaan jangka pendek/tahunan) dan dokumen RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 (dokumen perencanaan jangka menengah), maka realisasi dan capaian indikator kinerja makro Kota Sawahlunto tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Makro Kota Sawahlunto Tahun 2025
Berdasarkan P-RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2025 Dan
RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Makro	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia	77,14	77,05	99,88%
2.	Angka Kemiskinan (%)	2,18	2,72	75,23%
3.	Angka Pengangguran (%)	4,83	4,64	103,93%
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,73	3,43	72,52%
5.	Pendapatan Per Kapita (juta/jiwa)	74,35	78,027	104,95%
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,285	0,249	112,63%
			Rata-Rata Capaian Kinerja	**94,86%**
			Prediket Kinerja	**Sangat Tinggi**

Sumber Data : P_RKPD Kota Sawahlunto 2025, BPS, 20265, Data Diolah 2026

Capaian indikator kinerja makro Kota Sawahlunto tahun 2025 berdasarkan target pada dokumen Perubahan RKPD Kota Sawahlunto tahun 2025 dan dokumen RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 menunjukkan hasil sebagai berikut :

- Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja makro yang capaian kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Angka Pengangguran, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio);

- Terdapat 2 (dua) indikator kinerja makro yang capaian kinerjanya jauh di bawah target, yaitu Angka Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi;
- Terdapat 1 (satu) indikator kinerja makro yang capaian kinerjanya hampir mendekati target, yaitu Indeks Pembangunan Manusia.
- Rata-rata capaian indikator kinerja makro tahun 2025 sebesar 94,68 %, berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja maka tingkat pencapaian kinerja indikator makro Kota Sawahlunto tahun 2025 tergolong pada kategori “Sangat Tinggi”.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk suatu daerah dapat mengakses hasil pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik yang berkorelasi dengan kebijakan ekonomi terhadap pembangunan manusia.

IPM adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS), dimana IPM memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu :

a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);

   Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

b. Pengetahuan (*knowledge*);

   Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

c. Standard hidup layak (*decent standard of living*). Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Berikut formula perhitungan IPM sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$$

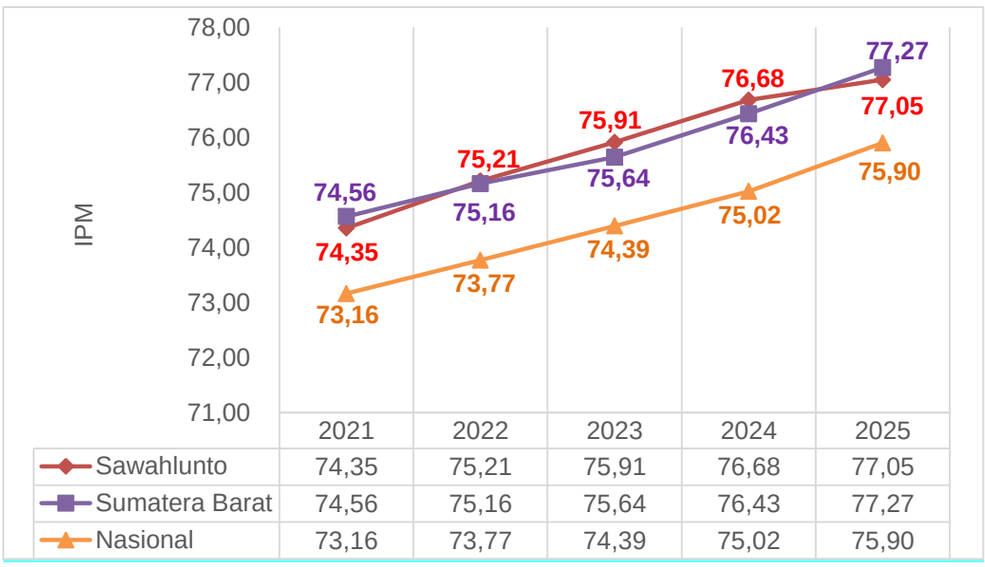
- Indeks Kesehatan diukur dari umur harapan hidup;

- Indeks Pengetahuan (Pendidikan) diukur dari HLS dan RLS;
- Indeks Pengeluaran diukur dari tingkat pengeluaran per kapita setahun yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sawahlunto selama periode 2021-2025 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan status pencapaian tergolong kategori “Tinggi”. Pada tahun 2025, realisasi IPM Kota Sawahlunto sebesar 77,05, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,37 poin atau naik sebesar 0,48 % dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 76,68. Hal ini mengindikasikan terjadinya proses pemulihan dan peningkatan pembangunan manusia di Kota Sawahlunto. Peningkatan IPM Kota Sawahlunto tahun 2025 didorong oleh peningkatan seluruh komponen pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) naik sebesar 0,09 tahun atau 0,12 %, Harapan Lama Sekolah naik sebesar 0,03 tahun atau 0,22 %, Rata-Rata Lama Sekolah naik sebesar 0,01 tahun atau 0,09 % dan Pengeluaran Rill per Kapita per tahun (yang disesuaikan) naik sebesar 314.000 rupiah atau sebesar 2,81 %.

Berikut perkembangan IPM Kota Sawahlunto disandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dan IPM Nasional selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.1
Perkembangan IPM
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2021 – 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Sawahlunto	74,35	75,21	75,91	76,68	77,05
Sumatera Barat	74,56	75,16	75,64	76,43	77,27
Nasional	73,16	73,77	74,39	75,02	75,90

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2026

Berdasarkan grafik di atas, IPM Kota Sawahlunto tahun 2021 dan tahun 2025 lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat, namun lebih tinggi dibandingkan IPM Nasional.

Berikut perkembangan IPM Kota Sawahlunto disandingkan dengan IPM kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.3
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2025

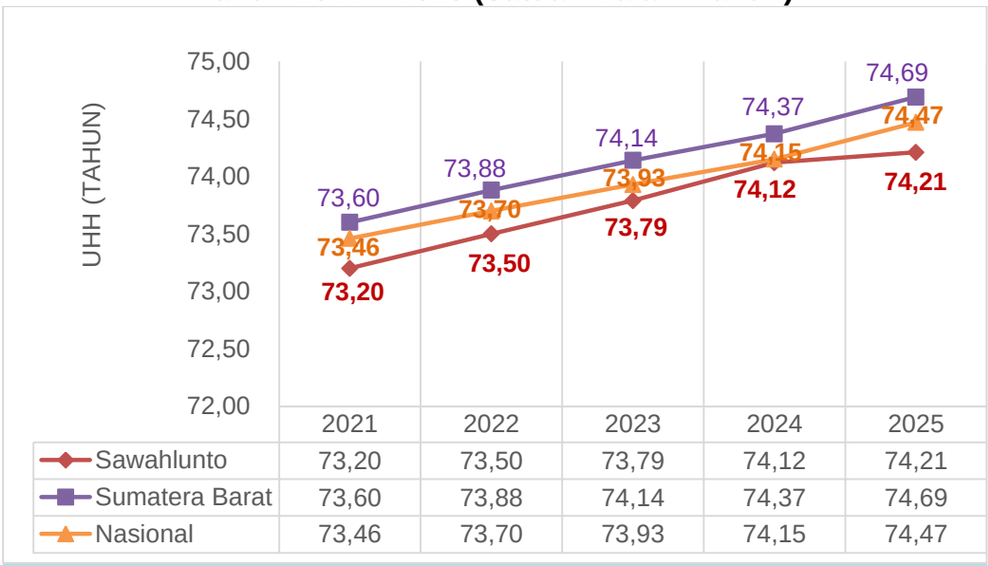
Kabupaten / Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	63,98	64,83	65,79	66,67	67,62
Pesisir Selatan	71,01	71,72	72,24	72,87	73,72
Solok	70,60	71,39	71,92	72,29	73,26
Sijunjung	70,48	71,32	72,30	72,88	73,73
Tanah Datar	74,14	74,87	75,57	76,49	77,04
Padang Pariaman	72,92	73,67	74,54	74,90	75,71
Agam	73,20	73,84	74,44	75,08	76,04
Lima Puluh Kota	71,03	71,64	72,05	72,51	73,43
Pasaman	68,48	69,12	69,85	70,61	71,57
Solok Selatan	70,88	71,36	72,24	73,17	74,01
Dharmasraya	72,65	73,19	73,87	74,82	75,70
Pasaman Barat	70,57	71,39	72,03	72,78	73,69
Kota					
Padang	83,30	83,69	83,98	84,38	84,93
Solok	78,53	79,35	79,66	80,06	80,90
Sawahlunto	***74,35***	***75,21***	***75,91***	***76,68***	***77,05***
Padang Panjang	78,52	79,28	79,76	80,60	81,32
Bukit Tinggi	80,79	81,52	81,88	82,61	83,05
Payakumbuh	79,24	79,70	80,14	80,76	81,62
Pariaman	78,72	79,31	79,76	80,49	81,27
Sumatera Barat	**74,56**	**75,16**	**75,64**	**76,43**	**77,27**

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2026

Pada tabel di atas, meskipun IPM Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun, namun IPM Kota Sawahlunto merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Semakin tinggi Usia Harapan Hidup menunjukkan semakin baik tingkat kesehatan masyarakat, sehingga kesempatan untuk hidup cenderung semakin panjang. Sebaliknya semakin rendah Usia Harapan Hidup menunjukkan semakin buruk tingkat kesehatan.

Grafik 2.2
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2021 – 2025 (Satuan Dalam Tahun)



	2021	2022	2023	2024	2025
Sawahlunto	73,20	73,50	73,79	74,12	74,21
Sumatera Barat	73,60	73,88	74,14	74,37	74,69
Nasional	73,46	73,70	73,93	74,15	74,47

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Usia Harapan Hidup saat lahir Kota Sawahlunto menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2021-2025, yaitu dari 73,20 tahun pada tahun 2021 meningkat menjadi 74,21 tahun pada tahun 2025. UHH Kota Sawahlunto tahun 2025 sebesar 74,21 tahun bermakna rata-rata bayi yang lahir di Kota Sawahlunto pada tahun 2025 memiliki harapan hidup hingga usia 74,21 tahun.

Berikut perkembangan Usia harapan hidup (UHH) Kota Sawahlunto disandingkan dengan Usia harapan hidup (UHH) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat selama tima tahun terakhir.

Tabel 2.4
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	70,33	70,91	71,06	71,21	71,40
Pesisir Selatan	73,12	73,20	73,27	73,44	73,68
Solok	71,72	72,12	72,31	72,52	72,82
Sijunjung	71,93	72,27	72,59	72,89	73,30
Tanah Datar	73,69	73,84	74,19	74,26	74,35
Padang Pariaman	73,58	73,67	73,77	73,88	74,04
Agam	73,91	74,07	74,22	74,39	74,63
Lima Puluh Kota	72,79	73,03	73,25	73,42	73,64
Pasaman	71,34	71,71	72,04	72,36	72,76
Solok Selatan	71,52	71,89	72,72	72,50	72,77
Dharmasraya	73,47	73,84	74,04	74,25	74,34
Pasaman Barat	71,83	72,14	72,44	72,75	73,17
Kota					
Padang	74,47	74,71	74,94	75,20	75,59
Solok	73,98	74,31	74,56	74,85	75,30
Sawahlunto	***73,20***	***73,50***	***73,79***	***74,12***	***74,21***
Padang Panjang	73,93	74,03	74,24	74,48	74,86

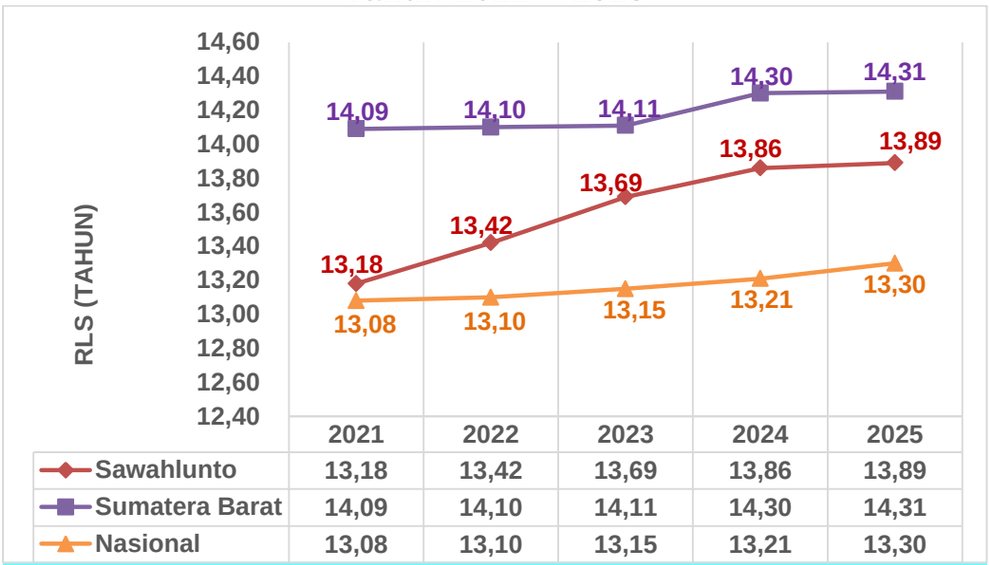
Bukit Tinggi	74,70	75,02	75,33	75,62	76,06
Payakumbuh	74,18	74,48	74,77	75,08	75,54
Pariaman	73,69	73,98	74,20	74,37	74,62
Sumatera Barat	**73,60**	**73,88**	**74,14**	**74,37**	**74,69**

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Pada tabel di atas terlihat Usia harapan hidup (UHH) Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu komponen pembentuk IPM lainnya adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Adapun perkembangan HLS kota Sawahunto pada lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 2.3
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2021 – 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Sawahlunto	13,18	13,42	13,69	13,86	13,89
Sumatera Barat	14,09	14,10	14,11	14,30	14,31
Nasional	13,08	13,10	13,15	13,21	13,30

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Pada grafik di atas, Angka HLS Kota Sawahlunto mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Sawahlunto lebih tinggi dari Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, namun masih jauh di bawah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.5
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025

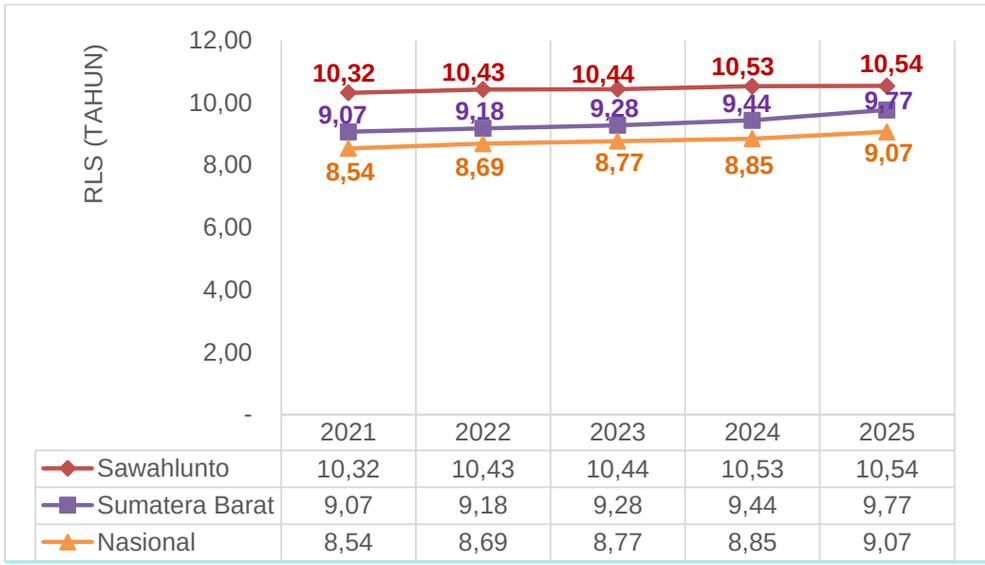
Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	12,89	12,89	12,90	12,91	13,17
Pesisir Selatan	13,33	13,35	13,36	13,37	13,38
Solok	13,05	13,30	13,55	13,56	13,66
Sijunjung	12,38	12,64	12,72	12,76	12,99
Tanah Datar	14,34	14,59	14,78	15,05	15,06
Padang Pariaman	13,68	13,93	14,19	14,20	14,21
Agam	13,88	13,88	13,89	14,16	14,26
Lima Puluh Kota	13,30	13,40	13,41	13,42	13,53
Pasaman	12,81	13,05	13,25	13,52	13,60
Solok Selatan	12,72	12,73	12,80	13,07	13,08
Dharmasraya	12,44	12,51	12,68	12,89	13,02
Pasaman Barat	13,68	13,69	13,70	13,72	13,73
Kota					
Padang	16,53	16,54	16,56	16,57	16,58
Solok	14,33	14,34	14,36	14,37	14,59
Sawahlunto	***13,18***	***13,42***	***13,69***	***13,86***	***13,89***
Padang Panjang	15,07	15,07	15,29	15,47	15,74
Bukit Tinggi	14,98	14,99	15,01	15,28	15,29
Payakumbuh	14,27	14,29	14,30	14,57	14,79
Pariaman	14,55	14,61	14,79	14,80	14,81
Sumatera Barat	**14,09**	**14,10**	**14,11**	**14,30**	**14,31**

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Angka HLS Kota Sawahlunto tahun 2025 sebesar 13,89, yang berarti lamanya waktu sekolah bagi anak usia sekolah di Kota Sawahlunto mencapai 13,89 tahun atau dapat menyelesaikan D1. Dan angka HLS Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Komponen pembentuk IPM lainnya adalah Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka RLS adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Semakin tinggi angka RLS, semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan (diselesaikan) oleh masyarakat suatu daerah. Adapun perkembangan RLS Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 2.4
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2021 – 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Sawahlunto	10,32	10,43	10,44	10,53	10,54
Sumatera Barat	9,07	9,18	9,28	9,44	9,77
Nasional	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Angka capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,53 %. Angka RLS Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berada di atas RLS Provinsi dan Nasional.

Angka RLS Kota Sawahlunto tahun 2025 sebesar 10,54 bermakna rata-rata masa sekolah yang diselesaikan penduduk Kota Sawahlungto usia 25 tahun ke atas pada tahun 2025 selama 10,54 tahun atau telah menyelesaikan SLTA kelas 1 (kelas X) dan telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun.

Berikut perbandingan RLS Kota Sawahlunto dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.6
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	7,20	7,48	7,76	8,03	8,21
Pesisir Selatan	8,27	8,43	8,58	8,81	9,06
Solok	7,87	7,89	7,90	7,91	8,25
Sijunjung	8,12	8,30	8,57	8,62	8,66
Tanah Datar	8,62	8,90	9,02	9,29	9,46
Padang Pariaman	7,88	8,16	8,41	8,42	8,78
Agam	8,97	8,98	9,22	9,23	9,57
Lima Puluh Kota	8,07	8,08	8,12	8,13	8,49
Pasaman	8,10	8,11	8,13	8,14	8,41
Solok Selatan	8,32	8,41	8,69	8,85	9,20
Dharmasraya	8,55	8,56	8,71	8,98	9,31
Pasaman Barat	8,27	8,55	8,81	8,99	9,28
Kota					
Padang	11,59	11,60	11,62	11,63	11,64

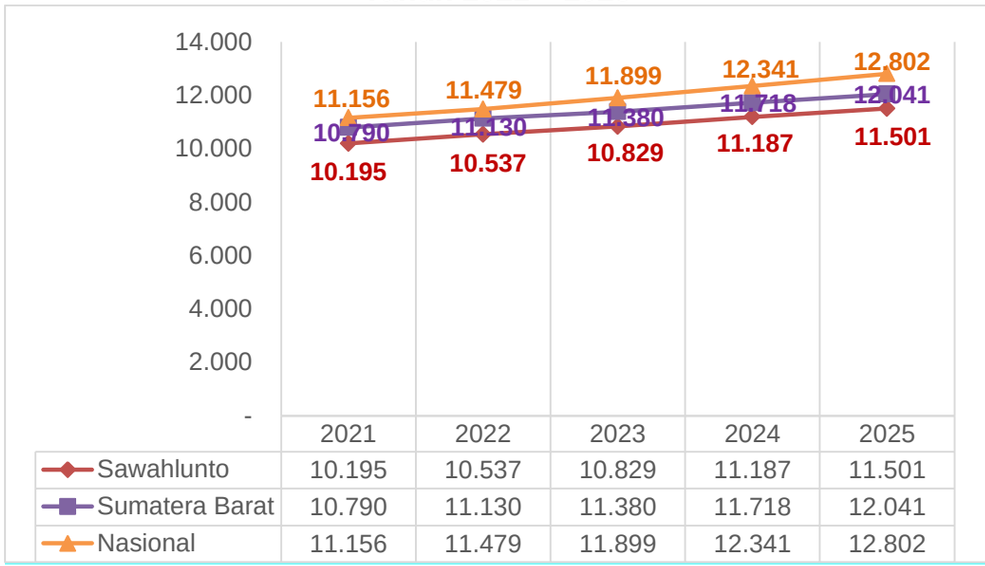
Solok	11,04	11,35	11,36	11,37	11,38
Sawahlunto	***10,32***	***10,43***	***10,44***	***10,53***	***10,54***
Padang Panjang	11,63	11,92	11,94	12,00	12,01
Bukit Tinggi	11,34	11,63	11,64	11,65	11,66
Payakumbuh	10,81	10,82	10,88	10,89	11,08
Pariaman	10,67	10,78	10,79	11,06	11,32
Sumatera Barat	**9,07**	**9,18**	**9,28**	**9,44**	**9,77**

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Pada tabel di atas terlihat bahwa RLS Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Komponen pembentuk IPM terakhir adalah Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity*-PPP). Berikut Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kota Sawahlunto disandingkan dengan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir.

Grafik 2.5
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2021 – 2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Sawahlunto	10.195	10.537	10.829	11.187	11.501
Sumatera Barat	10.790	11.130	11.380	11.718	12.041
Nasional	11.156	11.479	11.899	12.341	12.802

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2025 lebih rendah dari Pengeluaran per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Pengeluaran Per Kapita Nasional.

Berikut Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Sawahlunto dibandingkan dengan delapan belas kabupaten dan kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.7
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Ribu Rupiah)
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2025

Kabupaten / Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	6.321	6.567	6.891	7.192	7.451
Pesisir Selatan	9.270	9.686	9.953	10.211	10.633
Solok	10.215	10.539	10.717	10.988	11.318
Sijunjung	10.389	10.582	11.018	11.395	11.829
Tanah Datar	10.616	10.695	10.905	11.223	11.552
Padang Pariaman	11.050	11.159	11.432	11.756	12.089
Agam	9.662	10.171	10.402	10.686	11.034
Lima Puluh Kota	9.668	10.035	10.285	10.648	10.917
Pasaman	8.440	8.619	8.908	9.194	9.518
Solok Selatan	10.367	10.560	10.884	11.240	11.542
Dharmasraya	11.324	11.650	11.901	12.254	12.604
Pasaman Barat	9.089	9.381	9.538	9.888	10.231
Kota					
Padang	14.540	14.889	15.089	15.458	15.957
Solok	12.168	12.515	12.709	12.995	13.504
Sawahlunto	***10.195***	***10.537***	***10.829***	***11.187***	***11.501***
Padang Panjang	10.754	11.153	11.310	11.840	12.148
Bukit Tinggi	13.331	13.633	13.859	14.297	14.579
Payakumbuh	13.317	13.687	13.978	14.260	14.536
Pariaman	12.818	13.150	13.355	13.784	14.261
Sumatera Barat	**10.790**	**11.130**	**11.380**	**11.718**	**12.041**

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity*-PPP) Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaiannya merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat yang didorong oleh meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kota Sawahlunto.

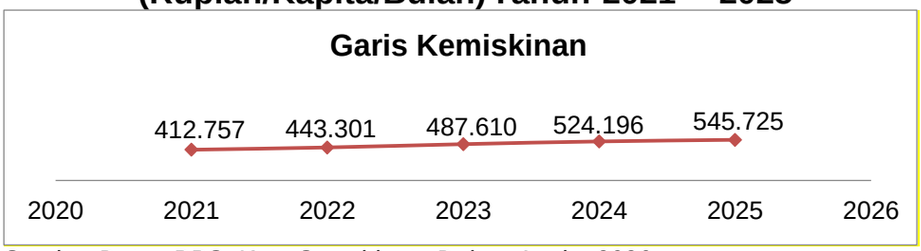
B. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan atau istilah lainnya Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan menurut BPS adalah ambang batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2.100 kalori/hari) dan non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan),

sehingga Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Grafik 2.6
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto
(Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2021 – 2025



Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2026

Berdasarkan grafik 2.2, Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 7,25 %. Peningkatan Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 10 %, sedangkan pada tahun 2025 meningkat sebesar 4,11 %. Peningkatan garis kemiskinan Kota Sawahlunto salah satunya disebabkan meningkatnya rata-rata harga kebutuhan pokok di Kota Sawahlunto tahun 2025, seperti Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Hijau, Beras, dan lain-lain. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil pemantauan Dinas Perindagkop Kota Sawahlunto yang dilakukan setiap hari. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok) Kota Sawahlunto pada tahun 2025 yang mencapai angka 4,31 % sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu
(Persentase Stabilitas Harga Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok) Kota Sawahlunto Tahun 2025

Komoditi	KV=(Sn/P)x100%
Bawang Merah	14,95%
Beras Khusus	2,03%
Beras Medium	2,53%
Beras Premium	1,66%
Beras SPHP Bulog	4,02%
Cabai Merah Keriting	28,52%
Cabai Rawit Hijau	19,05%
Daging Ayam Kampung	0,00%
Daging Ayam Ras	2,78%
Daging Sapi Paha Belakang	0,22%
Daging Sapi Tetelan	0,00%
Gula Pasir Curah	2,60%
Gula Pasir Kemasan	0,67%
Ikan Tongkol	6,07%
Kedelai Lokal	0,00%
Minyak Goreng Curah	0,84%
Minyak Goreng Kemasan	0,00%
Minyakita	1,59%
Telur Ayam Kampung	0,00%
Telur Ayam Ras	1,58%

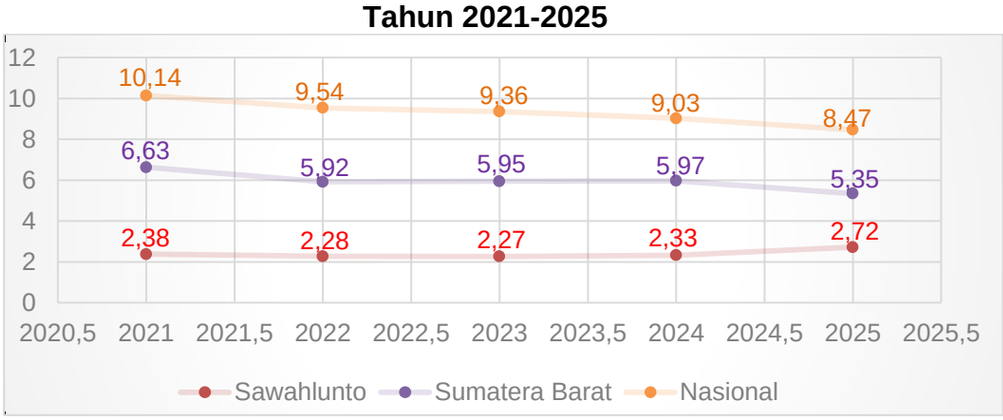
Tepung Terigu	1,39%
Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	**4,31 %**

Sumber Data : Dinas Perindagkop Kota Sawahlunto Tahun 2025

Disamping terlihat pada nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu, peningkatan Garis kemiskinan juga terlihat pada Laju Indeks Implisit Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga PDRB Kota Sawahlunto menurut Pengeluaran yang terealisasi sebesar 2,94 % pada tahun 2025. Laju Indeks Implisit (deflator PDB) menurut BPS adalah indikator inflasi yang mengukur perubahan harga rata-rata seluruh barang dan jasa dalam PDRB, termasuk harga non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan) yang dihitung dengan membandingkan nilai PDRB harga berlaku dan konstan.

Meningkatnya Garis Kemiskinan bermakna standar nilai rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (makanan dan non makanan) naik. Hal ini seringkali mencerminkan penurunan daya beli masyarakat jika pendapatan masyarakat tidak mengikuti kenaikan tersebut, sehingga lebih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan menyebabkan Angka Kemiskinan meningkat. Berikut disajikan perkembangan Angka Kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir.

Grafik 2.7
Perkembangan Angka Kemiskinan
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2021-2025



Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Perkembangan angka kemiskinan Kota Sawahlunto dari tahun 2021 hingga tahun 2025 cenderung fluktuatif, dimana terjadi penurunan dan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Sawahlunto dengan interval angka 2,27 % sampai 2,72 %. Persentase penduduk miskin di Kota Sawahlunto pada tahun 2025 mencapai 2,72 %, angka ini mengalami peningkatan sebesar 16,74 % dari tahun 2024 yang terealisasi sebesar 2,33 %. Berdasarkan grafik di atas terlihat angka kemiskinan Kota Sawahlunto jauh di bawah angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Berikutnya angka kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan angka kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Angka Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2025

Kabupaten / Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	14,84	13,97	13,72	13,89	13,22
Pesisir Selatan	7,92	7,11	7,34	7,49	6,52
Solok	8,01	7,12	7,13	7,31	6,52
Sijunjung	6,80	6,00	5,88	5,78	5,15
Tanah Datar	4,54	4,26	4,16	4,28	3,59
Padang Pariaman	7,22	6,25	6,34	6,27	5,86
Agam	6,85	6,22	6,60	6,83	5,97
Lima Puluh Kota	7,29	6,59	6,80	6,92	6,10
Pasaman	7,48	6,85	6,80	6,74	6,02
Solok Selatan	7,52	6,51	6,45	6,56	6,00
Dharmasraya	6,67	5,56	5,56	5,32	4,61
Pasaman Barat	7,51	6,93	6,92	7,00	6,30
Kota					
Padang	4,94	4,26	4,17	4,06	3,63
Solok	3,12	3,02	3,05	3,07	2,91
Sawahlunto	***2,38***	***2,28***	***2,27***	***2,33***	***2,72***
Padang Panjang	5,92	5,14	5,24	5,31	4,97
Bukittinggi	5,14	4,46	4,11	4,08	3,78
Payakumbuh	6,16	5,66	5,44	5,19	4,95
Pariaman	4,38	4,13	4,20	4,26	3,83
Sumatera Barat	**6,63**	**5,92**	**5,95**	**5.97**	**5,35**

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2026

Pada tabel di atas terlihat bahwa angka kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir (Tahun 2021-2025).

Tabel 2.10
Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota
Dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional
Tahun 2021-2025

Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1. **Kota Sawahlunto 2,38**	1. **Kota Sawahlunto 2,28**	1. **Kota Sawahlunto 2,27**	1. Kota Balikpapan 2,23	1. Kabupaten Badung 1,90
2. Kota Tangerang Selatan 2,57	2. Kota Balikpapan 2,45	2. Kota Balikpapan 2,31	2. **Kota Sawahlunto 2,33**	2. Kota Balikpapan 1,97
3. Kota Depok 2,58	3. Kabupaten Bangka Barat 2,46	3. Kota Depok 2,38	3. Kota Depok 2.34	3. Kota Denpasar 2,16
4. Kabupaten Badung 2,62	4. Kota Tangerang Selatan 2,50	4. Kota Tangerang Selatan 2,57	4. Kota Tangerang Selatan 2,36	4. Kota Depok 2,31
5. Kabupaten Bangka Barat 2,75	5. Kota Depok 2,53	5. Kota Denpasar 2,68	5. Kota Denpasar 2,59	5. Kota Tangerang Selatan 2,39
6. Kota Pekanbaru 2,83	6. Kabupaten Badung 2,53	6. Kota Sungai Penuh 3,00	6. Kota Sungai Penuh 2,92	6. **Kota Sawahlunto 2,72**

7. Kota Balikpapan 2,89 8. Kota Denpasar 2,96 9. Kabupaten Banjar 3,04 10. Kota Solok 3,12	7. Kabupaten Banjar 2,79 8. Kota Denpasar 2,97 9. Kota Sungai Penuh 2,97 10. Kota Solok 3,02	7. Kota Solok 3,05 8. Kota Jakarta Selatan 3,10 9. Kota Pekanbaru 3,16 10. Kota Dumai 3,21	7. Kota Jakarta Selatan 3,03 8. Kota Batu 3.06 9. Kota Solok 3,07 10. Kota Dumai 3,14	7. Kabupaten Banjar 2,74 8. Kota Batu 2,86 9. Kota Solok 2,91 10. Kabupaten Tapin 2,91

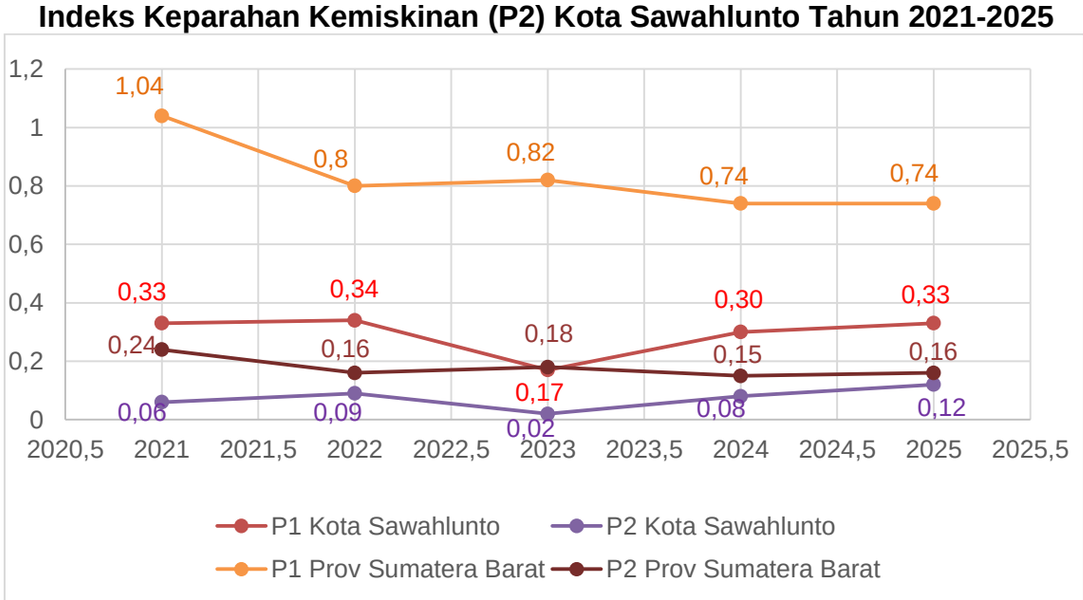
Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik, 2026

Pada tabel di atas terlihat bahwa Kota Sawahlunto selama tahun 2021-2025 masuk dalam 10 kabupaten/kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional. Bahkan selama tiga tahun (tahun 2021-2023), angka kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Indonesia.

Selain Persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan suatu daerah juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, https://www.bps.go.id).

Berikut perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2021 – 2025) :

Grafik 2.8
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto Tahun 2021-2025



Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2022-2026

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto selama tahun 2021-2025 berkisar antara 0,17- 0,34 dan tergolong rendah, hal ini mengandung makna rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota

Sawahlunto berada dekat dengan garis kemiskinan atau berada di sekitar garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Barat yang berkisar antara 0,74 – 1,04, berada jauh di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto, mengandung makna bahwa rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Kota Sawahlunto lebih tinggi (lebih baik) dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2021-2025 berada pada kisaran 0,02 – 0,12 dan tergolong rendah. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat berkisar antara 0,15 – 0,24, angka ini jauh berada di atas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto, hal ini mengandung makna penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan dengan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat.

Meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto tahun 2025 sejalan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan. Meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Sawahlunto menjauh dari garis kemiskinan. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan meningkatnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Sawahlunto.

C. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran adalah kata lain dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Penganggur adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi berharap mendapat pekerjaan, yang terdiri dari : (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. TPT dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan TPT menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan

tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan tenaga kerja di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto pada tahun 2025 sebesar 4,64 %, turun sebesar 16,4 % dari realisasi TPT tahun 2024 dengan capaian sebesar 5,55 %. Berikut perkembangan TPT Kota Sawahlunto disandingkan dengan TPT kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.11
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2025

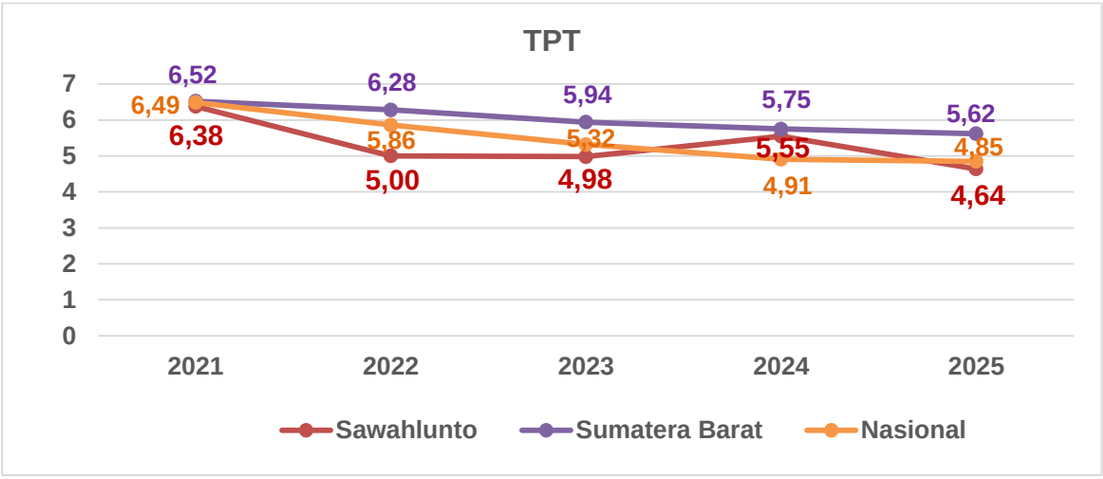
Kabupaten / Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	2,79	1,39	1,33	1,44	1,55
Pesisir Selatan	5,97	4,61	4,75	5,06	5,10
Solok	4,67	5,89	4,99	4,91	4,70
Sijunjung	3,57	4,87	4,71	4,73	4,59
Tanah Datar	4,63	5,91	5,35	5,30	5,26
Padang Pariaman	8,41	6,60	6,69	6,59	6,48
Agam	5,06	4,93	4,96	4,73	4,71
Lima Puluh Kota	2,25	3,72	3,95	3,68	3,78
Pasaman	4,92	5,38	5,09	5,25	5,29
Solok Selatan	4,84	3,71	2,57	2,30	2,13
Dharmasraya	5,00	6,23	6,22	6,02	5,51
Pasaman Barat	5,02	6,33	6,01	6,34	5,95
Kota					
Padang	13,37	11,69	10,86	9,88	9,70
Solok	5,15	3,90	3,72	3,62	3,87
Sawahlunto	***6,38***	***5,00***	***4,98***	***5,55***	***4,64***
Padang Panjang	4,90	4,84	5,49	4,94	5,07
Bukittinggi	6,09	4,90	4,99	4,72	4,41
Payakumbuh	6,47	5,16	4,84	4,87	4,96
Pariaman	6,09	5,19	5,68	5,32	5,16
Sumatera Barat	**6,52**	**6,28**	**5,94**	**5,75**	**5,62**

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2026

Berdasarkan tabel di atas terlihat, TPT Kota Sawahlunto berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, TPT Kota Sawahlunto adalah yang terendah ke tiga diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Solok dan Kota Bukittinggi. Sedangkan untuk level kabupaten/kota berada pada posisi keenam terendah setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Solok dan Kabupaten Sijunjung.

Berikut perkembangan TPT Kota Sawahlunto disandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama tahun 2021-2025 :

Grafik 2.9
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2021 – 2025



Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Dari grafik di atas terlihat bahwa TPT Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. TPT tertinggi Kota Sawahlunto terjadi pada tahun 2021 saat Covid 19 mulai mereda, namun angka tersebut lebih rendah dari TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada tahun 2022-2023, seiring dengan usainya Covid 19 dan pulihnya perekonomian, TPT Kota Sawahlunto menurun, bahkan TPT Kota Sawahlunto lebih rendah dari TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun pada tahun 2024 TPT Kota Sawahlunto kembali meningkat menjadi 5,55% karena tidak diselenggarakan kegiatan *Job Fair* di Kota Sawahlunto dan berkurangnya kegiatan pelatihan tenaga kerja pada BLK Kota Sawahlunto pada tahun 2024 tersebut. Dan pada tahun 2025 TPT Kota Sawahlunto kembali menurun dengan realisasi sebesar 4,64 %, angka ini lebih rendah dari TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Penurunan TPT Kota Sawahlunto tahun 2025 merupakan dampak dari upaya pemerintah Kota Sawahlunto yang dilakukan dalam bidang ketenagakerjaan berupa strategi kolaborasi penempatan tenaga kerja (pemagangan) antara Perusahaan dengan penyelenggara pelatihan berbasis kompetensi di Kota Sawahlunto (Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sawahlunto dan UPTD BLK Sawahlunto). Di samping itu juga ada pelatihan dengan metode *Project Basic Learning* (PBL), *Tailor Mact Training* (TMT) dan PBK dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dalam berwirausaha. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBN dan APBD Provinsi Sumbar tahun 2025 yang terdiri dari : Pelatihan Operator Excavator, Pelatihan Agroferesty Budidaya Madu Galo-Galo, Pelatihan Agroferesty

Budidaya Kaliandra, Pelatihan Membatik, Pelatihan Pengelasan, Pelatihan Tata Rias Kecantikan, Pelatihan Anyaman Bambu, Pelatihan Pembuatan Konten Visual Untuk Sosial Media.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kinerja ekonomi suatu daerah atau negara selama periode tertentu. Indikator laju pertumbuhan ekonomi (LPE) digunakan untuk : (1) mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional/wilayah; (2) sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional; dan (3) sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis.

Pertumbuhan ekonomi diistilahkan dengan *economic growth* yang mengandung pengertian proses kenaikan output dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi, dapat didekati dengan menghitung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) jenis PDRB :

a. Atas dasar harga berlaku

   Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

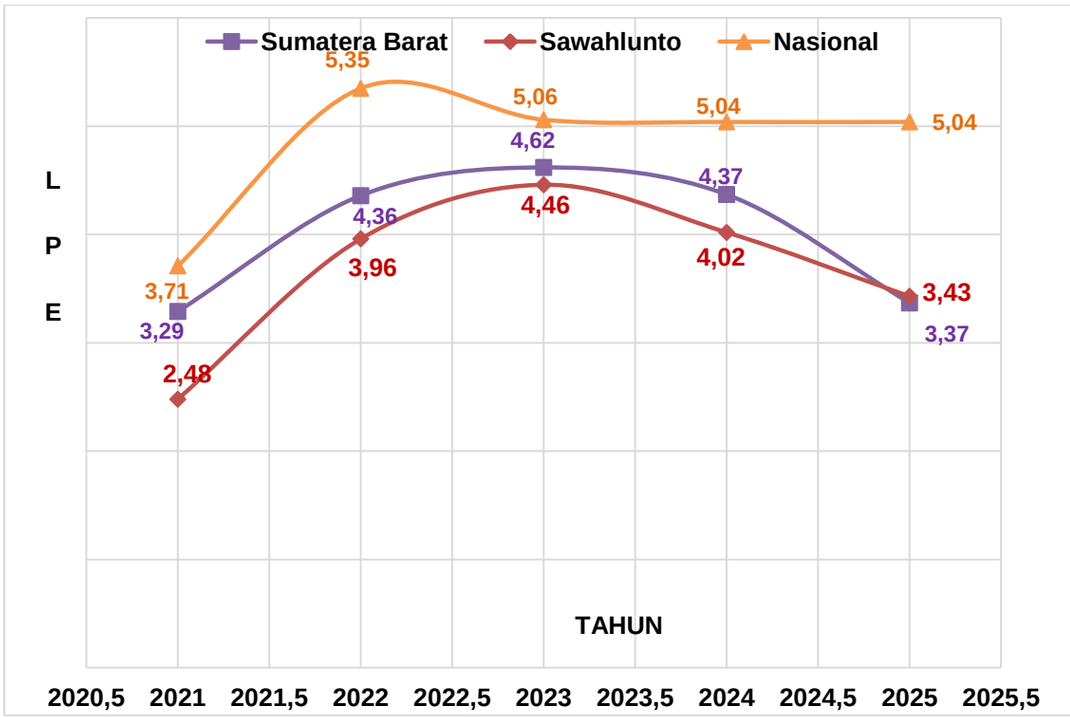
b. Atas dasar harga konstan

   Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun.

Pada periode tahun 2021-2025, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sawahlunto sebesar 3,43 %, angka ini menurun sebesar 14,68 % dari tahun 2024 yang terealisasi sebesar 4,02%. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2025 ini disebabkan melambatnya pertumbuhan produksi sebagian besar lapangan usaha dominan. Disamping itu terjadi penurunan pengeluaran investasi (PMTB) sebesar 2,47 % dari tahun sebelumnya dan penurunan pengeluaran Pemerintah sebesar 0,11 % sebagai akibat kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2021-2025) disandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Grafik 2.10
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2021 – 2025



Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto pada tahun 2021 hinggai tahun 2024 lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Sedangkan pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat namun tetap lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah tersebut. Semakin tinggi pertumbuhan lapangan usaha dominan atau jenis pengeluaran dominan yang ada pada daerah tersebut, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Berikut 5 lapangan usaha (*Supply Side*) dominan Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.11
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto
Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2025 (Dalam persen)

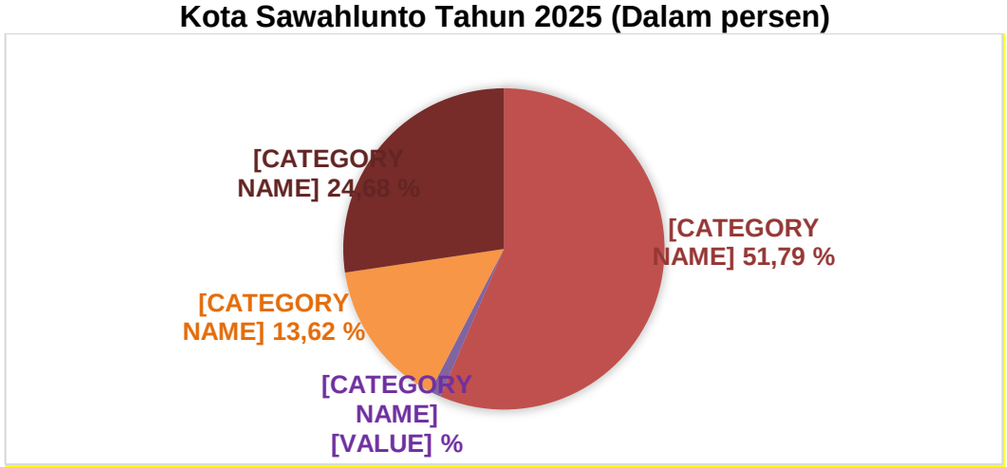


Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2026

Memperhatikan grafik di atas terlihat lapangan usaha yang paling berperan dalam perekonomian Kota Sawahlunto adalah Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Industri Pengolahan, Konstruksi dan Informasi & Komunikasi. Semakin tinggi pertumbuhan lapangan usaha tersebut, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto, dan sebaliknya.

Berikut 4 jenis pengeluaran (*Demand Side*) dominan Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.12
Kontribusi Jenis Pengeluaran
Kota Sawahlunto Tahun 2025 (Dalam persen)



Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2026

Pada grafik di atas terlihat jenis pengeluaran yang paling berperan dalam perekonomian Kota Sawahlunto adalah Konsumsi Rumah Tangga, PMTB dan Konsumsi Pemerintah.

Berikut disajikan secara lengkap pertumbuhan lapangan usaha dan jenis pengeluaran selama lima tahun terakhir pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Menurut Lapangan Usaha (*Supply Side*)
Dan Jenis Pengeluaran (Demand Side)
Tahun 2021 – 2025

NO	Lapangan Usaha (*Supply Side*)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,07	4,93	2,47	1,53	2,18
2	Pertambangan dan Penggalian	-28,23	-3,04	-0,87	-6,13	3,21
3	Industri Pengolahan	4,91	2,56	5,07	3,13	6,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,11	1,98	3,93	4,18	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,35	-0,70	3,61	2,14	1,11
6	Konstruksi	3,18	3,19	5,83	3,59	-1,30
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	4,17	5,08	4,86	5,07	4,46
8	Transportasi dan Pergudangan	4,35	3,53	5,60	5,37	1,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,38	11,63	5,92	6,44	3,77
10	Informasi dan Komunikasi	7,08	5,77	7,69	4,63	5,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,49	5,55	3,63	4,58	7,07
12	Real Estat	4,94	5,94	6,27	4,95	5,24
13	Jasa Perusahaan	3,43	5,14	5,10	5,11	5,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	2,05	1,01	5,54	2,11
15	Jasa Pendidikan	4,85	4,00	1,94	2,94	4,26
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,35	4,48	7,15	5,03	-0,47
17	Jasa Lainnya	6,83	9,32	7,48	8,80	7,64
NO	**Jenis Pengeluaran (*Demand Side*)**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Konsumsi Rumah Tangga	2,2	3,56	2,81	3,64	1,08
2	Konsumsi LNPRT	2,12	-0,27	5,19	4,32	4,62
3	Konsumsi Pemerintah	2,60	-3,07	0,01	1,70	-0,11
4	PMTB	2,11	4,40	7,22	3,08	-2,47
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		**2,48**	**3,96**	**4,46**	**4,02**	**3,43**

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2026

Pada tahun 2025, beberapa lapangan usaha (*supply side*) dominan mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto melambat, seperti : lapangan usaha Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor, pertumbuhannya turun dari 5,07 % menjadi 4,46 %; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, pertumbuhannya turun dari 5,54% menjadi 2,11 %. Bahkan lapangan usaha Konstruksi pertumbuhannya minus 1,30 % pada tahun 2025, dari 3,59 % pada tahun 2024. Dari jenis pengeluaran (*Demand Side*), pengeluaran PMTB tumbuh minus 2,47 % pada tahun 2025, turun sangat signifikan dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,08 %. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga tumbuh minus 0,11 %, jauh dari tahun 2024 yang tumbuh sebesar 1,7 %.

Berikut disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat selama lima terakhir (tahun 2020-2024), sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2025

Kabupaten / Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	2,87	4,94	4,04	3,97	2,93
Pesisir Selatan	3,35	4,01	4,19	3,84	3,62
Solok	3,28	4,28	4,36	3,91	3,01
Sijunjung	3,14	3,93	4,26	3,89	3,26
Tanah Datar	3,27	4,16	4,44	3,85	2,66
Padang Pariaman	2,15	6,83	5,46	4,57	1,74
Agam	3,70	4,21	4,52	4,12	2,99
Lima Puluh Kota	3,33	4,02	4,55	4,03	3,40
Pasaman	3,35	4,08	4,41	3,95	3,49
Solok Selatan	3,32	4,01	4,57	4,09	3,65
Dharmasraya	3,40	4,27	4,35	3,86	3,79
Pasaman Barat	3,71	4,13	4,33	4,08	3,87
Kota					
Padang	3,65	4,31	4,54	4,65	3,63
Solok	3,55	4,60	4,81	4,55	3,61
Sawahlunto	***2,48***	***3,96***	***4,46***	***4,02***	***3,43***
Padang Panjang	3,46	4,39	4,84	4,52	3,61
Bukittinggi	3,61	4,67	4,79	4,52	3,51
Payakumbuh	3,58	4,51	4,70	4,53	3,55
Pariaman	3,51	4,53	4,79	4,51	3,46
Sumatera Barat	**3,29**	**4,36**	**4,62**	**4,37**	**3,37**

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Pada tabel di atas terlihat melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2025 juga terjadi pada level Provinsi Sumatera Barat dan semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2025 juga disebabkan oleh faktor eksternal. Di samping menurun, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto juga berada di posisi terendah pada tingkat kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

E. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Per Kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk atau per jiwa atau satu orang penduduk selama satu

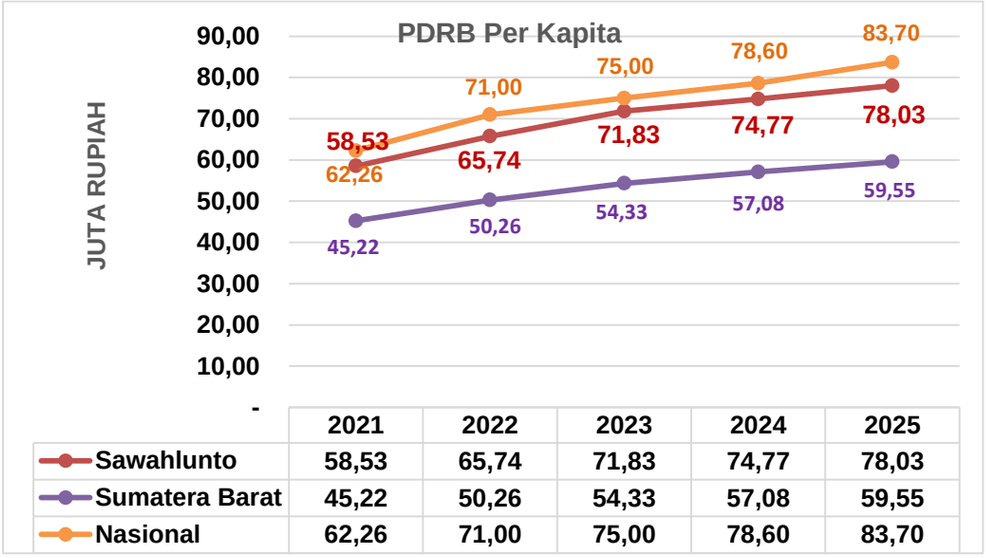
tahun di suatu wilayah/daerah. Pendapatan Per Kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah bersangkutan. Oleh karena itu, meningkat atau menurunnya Pendapatan Per Kapita ditentukan oleh meningkat atau menurunnya PDRB dan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Pendapatan Per Kapita biasanya dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, namun juga dapat dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan Pendapatan per kapita biasanya dianggap sebagai tanda ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, Pendapatan per kapita tidak dapat mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.

Pada periode tahun 2021-2025 Pendapatan Per Kapita Kota Sawahlunto mengalami peningkatan setiap tahunnya dan selalu lebih tinggi dari Pendapatan Per Kapita Provinsi Sumatera Barat. Meningkatnya Pendapatan Per Kapita Kota Sawahlunto disebabkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduknya.

Pada tahun 2025 pendapatan per kapita (PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto mencapai 78,027 juta/jiwa. Realisasi pendapatan per kapita tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 3,26 juta/jiwa atau 4,36 % dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 74,77 juta/jiwa. Peningkatan Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto tahun 2025 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,08 %.

Berikut disajikan perkembangan Pendapatan Per Kapita Kota Sawahlunto pada periode tahun 2021-2025 disandingkan dengan Pendapatan Per Kapita Provinsi Sumatera Barat dan Pendapatan Per Kapita Nasional :

Grafik 2.13
Perkembangan Pendapatan Per Kapita (ADHB)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Sawahlunto	58,53	65,74	71,83	74,77	78,03
Sumatera Barat	45,22	50,26	54,33	57,08	59,55
Nasional	62,26	71,00	75,00	78,60	83,70

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Pada grafik di atas terlihat pada periode tahun 2021-2025 Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan Pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dibandingkan Pendapatan per kapita Nasional.. Peningkatan Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2021 – 2025 sejalan dengan peningkatan Pendapatan per kapita Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Berikut perkembangan Pendapatan Per Kapita ADHB Kota Sawahlunto tahun 2021-2025, disandingkan dengan Pendapatan Per Kapita ADHB kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.14
Perkembangan Pendapatan Per Kapita ADHB
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2025 (Juta rupiah/jiwa)

Kabupaten / Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	54,603	60,449	64,784	67,574	70,082
Pesisir Selatan	29,268	32,077	34,216	35,865	37,672
Solok	35,879	39,424	42,584	44,727	46,722
Sijunjung	40,299	44,343	48,172	50,993	54,113
Tanah Datar	36,286	39,722	43,131	45,268	47,033
Padang Pariaman	42,314	50,019	55,715	58,687	59,490
Agam	39,911	43,937	47,495	49,994	52,211
Lima Puluh Kota	41,810	45,693	49,456	52,107	55,389
Pasaman	31,090	33,702	36,141	38,136	39,953
Solok Selatan	31,309	34,199	36,917	39,130	40,985
Dharmasraya	46,450	51,886	55,653	58,908	62,048
Pasaman Barat	36,472	40,306	43,338	46,114	49,724
Kota					
Padang	70,884	78,356	84,376	88,030	92,099
Solok	57,010	62,882	67,819	70,365	72,531
Sawahlunto	***58,530***	***65,737***	***71,834***	***74,768***	***78,027***
Padang Panjang	64,124	70,732	77,304	81,129	84,091
Bukittinggi	74,001	82,854	90,281	94,538	98,585
Payakumbuh	51,809	57,734	61,663	63,820	66,037
Pariaman	55,412	61,228	66,250	69,308	73,255
Sumatera Barat	**45,218**	**50,263**	**54,333**	**57,083**	**59,548**

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2026

Pada tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan per kapita Kota Sawahlunto lima tahun terakhir berada di posisi keempat tertinggi dibandingkan kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

F. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio yang semakin

mendekati 0 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Gini Ratio yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio yang bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk (bps.go.id).

Pada periode tahun 2021-2025, Gini ratio Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2025 Gini Ratio Kota Sawahlunto sebesar 0,249, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,05 poin atau 16,72 % dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar 0,299. Jika dibandingkan dengan target Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2025 pada RPD Kota Sawahlunto 2024-2026 sebesar 0,285, maka capaian tahun 2025 ini sudah melampaui target dengan capaian sebesar 112,63% dengan prediket capaian “sangat tinggi”.

Penurunan Gini Ratio tahun 2025 ini disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dan sosial masyarakat Kota Sawahlunto yang ditandai dengan meningkatnya PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, meningkatnya IPM Kota Sawahlunto beserta semua komponen pembentuknya serta rendahnya laju inflasi. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah kota khususnya terkait pelayanan dasar, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, perluasan lapangan kerja, bantuan sosial dan subsidi yang diterapkan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.15
Perkembangan Gini Rasio
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 – 2025

Kabupaten / Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	0,321	0,233	0,259	0,267	0,291
Pesisir Selatan	0,253	0,246	0,259	0,224	0,238
Solok	0,246	0,243	0,235	0,241	0,219
Sijunjung	0,270	0,243	0,263	0,239	0,246
Tanah Datar	0,250	0,251	0,260	0,258	0,218
Padang Pariaman	0,269	0,245	0,257	0,253	0,258
Agam	0,272	0,298	0,255	0,249	0,232
Lima Puluh Kota	0,244	0,208	0,194	0,220	0,218
Pasaman	0,248	0,230	0,243	0,217	0,207
Solok Selatan	0,277	0,253	0,271	0,313	0,256
Dharmasraya	0,268	0,287	0,291	0,233	0,234
Pasaman Barat	0,261	0,277	0,238	0,240	0,257
Kota					
Padang	0,343	0,354	0,312	0,324	0,348
Solok	0,277	0,288	0,256	0,251	0,302
Sawahlunto	***0,295***	***0,314***	***0,308***	***0,299***	**0,249**
Padang Panjang	0,306	0,296	0,273	0,266	0,275
Bukittinggi	0,286	0,317	0,255	0,272	0,267
Payakumbuh	0,316	0,311	0,316	0,313	0,271

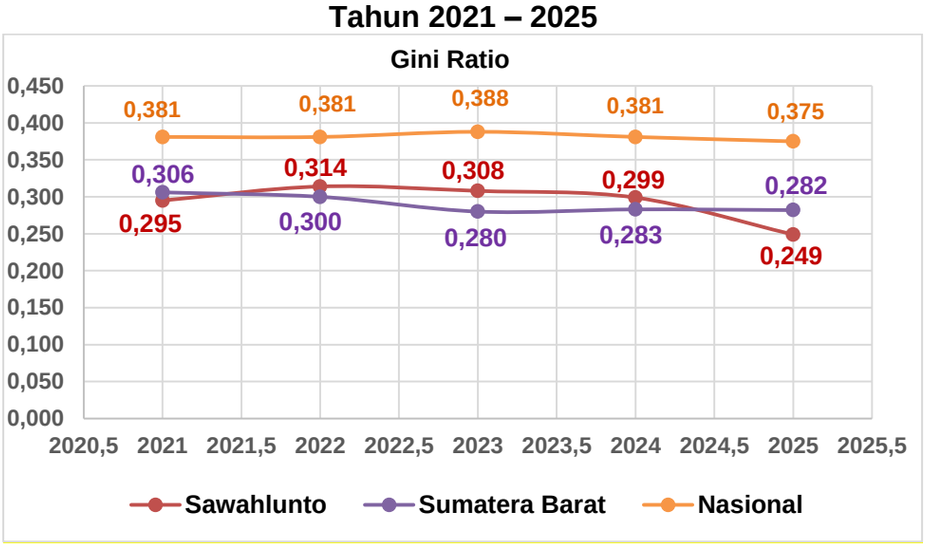
Pariaman	0,301	0,272	0,289	0,281	0,302
Sumatera Barat	**0,306**	**0,300**	**0,280**	**0,283**	**0,282**

Sumber Data : BPS, Website Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2026

Capaian Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2025 ini merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir dan juga yang terendah dari 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Gini Ratio Kabupaten Pasaman (0,207) adalah yang terendah di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dan yang tertinggi adalah Kota Padang (0,348).

Berikut perkembangan Gini Ratio Kota Sawahlunto Tahun 2021-2025, disandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional :

Grafik 2.14
Perkembangan Gini Ratio
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2021 – 2025



Sumber Data : BPS, Website Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2026

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Gini Ratio Kota Sawahlunto pada tahun 2021-2025 lebih rendah dibandingkan dari Gini Ratio Nasional, yang bermakna pendapatan antar penduduk di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan pendapatan antar penduduk di tingkat Nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat, Gini Ratio Kota Sawahlunto lebih rendah pada tahun 2021 dan tahun 2025.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Capaian kinerja kinerja urusan pemerintahan sebagai berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

2.2.1.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENDIDIKAN

1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5- 6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{1344}{2188} \times 100\% = 61.42\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
1.	Pendidikan	1) Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (negeri dan swasta)	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2) Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
3) Jumlah peserta didik PAUD (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (negeri dan swasta)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
1.	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar x 100%	6669x 100% = 96.96% 6878	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan	7083	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Pendidikan	1) Jumlah SD Negeri Terakreditasi	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		5) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
		7) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama / Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang x 100%	3314 / 3664 x 100% = 90.44%	

		Berpartisipasi dalam Pendidikan Mene-ngah Pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Pendidikan	1) Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel

				basah)
		7) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat Pendidik	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
		9) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/sederajat	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang / … x 100%	82 / … x 100% = 0.65%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

		Belum Menyelesai- kan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi	sudah tamat atau yang sedang belajar di pendidikan kesetaraan Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	12493	ditandatangani kepala dan distempel basah)

		dalam Pendidikan Kesetaraan	dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan		

b. **Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Pendidikan	1)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditas (Negeri dan Swasta)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2024	Keterangan
		6)	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7)	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	…	(tidak perlu diisi)
		8)	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KESEHATAN

1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

a. **Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Outcome*)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{100}{68.599} \times 100\% = 0.4578\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

b. **Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Output*)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi

a. **Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Outcome*)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase RS Ruju-	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi x 100%	1 x 100% = 100%	Dibuktikan dengan dokumen

		kan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi	Jumlah RS di kab/kota	1	pendukung (yg ditandata-ngani kepala dan distempel basah)

b. **Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pela- yanan Kesehatan Ibu Hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kota}} \times 100\%$	$\frac{750}{1.202} \times 100\% = 62{,}39\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

b. **Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2024	Keterangan

	Kesehatan	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase Ibu Ber- salin Mendapatkan Pelayanan Persalin- an	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kota}} \times 100\%$	$\frac{747}{1202} \times 100\% = 62{,}15\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

5. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan

2.	Kesehatan	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah bayi baru lahir di kota x 100%	750 / 1.102 x 100% = 68.06%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

***b.* Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar x 100%	4.023 x 100% =89,779%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan

		sesuai standar	Jumlah balita di kota	4.481	distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase anak usiapendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasaryang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasardi kota}} \times 100\%$	$\frac{9.675}{9.675} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun dikota}} \times 100\%$	$\frac{41.450}{35.286} \times 100\% = 117{,}469\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)- Tes Strip Gula Darah Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

9. Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus		Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atass yang mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar	x 100%	7.510 x 100% = 99,181%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

		sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	7.572	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan		$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kota}} \times 100\%$	$\frac{7.659}{16.324} \times 100\% = 46{,}918\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel

				basah)

		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase penderitaDM yang mendapat- kan pelayanan kese- hatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita DM di kota x 100%	1.160 / 1.160 x 100% = 100%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan

2.	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yg mendapat-kan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita ODGJ di kota	x 100%	191 191	x 100% = 100%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata-ngani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase orangterduga TBC	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di kota}} \times 100\%$	$\frac{1.599}{1.599} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
2.	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terin-feksi HIV mendapat-kan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV di kota / Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kota x 100%	1.953 / 1.988 x 100% = 98,239%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata-ngani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kesehatan	1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus		Capaian Kinerja 2024		Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kota (ha) / Luas kawasan pemukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha)	x 100%	0 / 0	x 100% = 0%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
3.		5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Rasio Luas Kawasan Pemukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi,	Luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh		Tidak Ada Pantai

		erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota (m) / Luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi diWS kewenangan kab/kota (m)	x 100%	0 / 0	x 100% = 0%	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kab/kota yg dilayani oleh jaringan irigasi ygdibangun, ditingkatkan, direha-bilitasi, dioperasi & dipelihara (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota (ha)}} \times 100\%$	$\frac{28{,}9854}{67{,}0974} \times 100\% = 43{,}199\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	1) Persentase panjang jaringan irigasi	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primerdalam kondisi}}{\text{}} \times 100\%$	$\frac{}{} \times 100\% =$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yan g

		primer dalam kondisi baik	baik (m) Panjang jaringan irigasi primer (m)		ditandata- ngani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase panjang jaringan irigasi sekun- der dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) / Panjang jaringan irigasi sekunder (m) x 100%	x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

		3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) / Panjang jaringan irigasi tersier (m) x 100%	x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata-ngani kepala dan distempel basah)

4. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	Jumlah kumulatif masyarakat (rumah tangga) yg mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam kota / Jumlah total proyeksi rumahtangga di seluruh kota x 100%	x 100% = 14.517 / 20.135 72,098%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Pekerjaan Umum	1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaran SPAM	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

5. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpurtinjanya dioleh di PLT + x 100%	x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

			jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	**13.679**	90,679%	
			Jumlah rumah di kab/kota	**15.085**		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Pekerjaan Umum	1)	Jumlah rumah dengan akses unitpengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		2)	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dandistempel basah)
		3)	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dandistempel basah)
		6)	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dandistempel basah)

7)	Kinerja penyediaan pelayananSPALD S akses dasar	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septic / Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		8)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Jumlah rumah yang lumpur tinja nya telah dioleh di IPLT / Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9)	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbah nya diolah di IPALD / Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata-ngani kepala dan distempel basah)
		10)	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat / Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		11)	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia / Jumlah sarana pengang-kutan yang dibutuhkan x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan

				dikab/kota		distempel basah)
		12)	Kinerja penyediaan prasaranapengolahan lumpur	Jumlah kapasitas pengolahanlumpur tinja		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

	tinja	yang tersedia / Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	x 100%	…	ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		13)	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD / Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		14)	Kinerja penyediaan jasapenyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot / Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangu-nan SPALD-S x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

6. Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya / Jumlah IMB yang berlaku x 100%	**8.480** / **13.518** x 100% = 62,73%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Pekerjaan Umum	1) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata-ngani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			Jumlah seluruh bangunan gedung (kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana)		
		2) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata-nganikepala dan distempel basah)
		3) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		4) Penetapan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada/Tidak	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah bangunan gedung	Cukup	…	Dibuktikan dengan dokumen

		negara milik Pemerintah Kab/Kota	jelas		pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

7. Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota `	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap / Panjang jalan keseluruhan di wilayah kota x 100%	**249,29** / **441,42** x 100% = 56,47%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Pekerjaan Umum	1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Panjang jalan yang dibangun	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Panjang jembatan yg dibangun	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		5) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		7) Panjang jembatan yang direhabilitasi	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Panjang jalan yang dipelihara	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Panjang jembatan yang dipelihara	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

8. Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
3.	Pekerjaan Umum	Rasio tenaga operator/ teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan x 100%	x 100% **47** = 27,011 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditanda-tanganikepala dan distempel basah)

			teknisi/analis		
			Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknisi/analis di wilayah kota	**174**	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Pekerjaan Umum	1) Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		2) Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

10) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		11) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		13) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		14) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		15) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		16) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		17) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

18) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
19) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
20) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
21) Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		22) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		23) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		24) Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		25) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat,klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

9. Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan

3.	Pekerjaan Umum	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi x 100%	0 x 100% = 0%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencanakabupaten/ kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumahkorban bencana yang ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

			ditandatangani kepala dan distempel basah)

4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

4.	Perumahan Rakyat	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	Jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan	x 100%	1	x 100% =100%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

		kabupaten/kota	rumah layak huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerahyang memenuhi criteria penerima pelayanan	1	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Perumahan Rakyat	1) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huniberdasarkan rencana pemenuhan SPM	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		5) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kab/Kota yang Ditangani

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kotayang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) / Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100%	**40,73** / **40,73** x 100% = 100%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
3	Perumahan Rakyat	1) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	… .	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	… .	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	… .	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus		Capaian Kinerja 2024	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya dioleh	x 100%	x 100% = 8,940%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan

			di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	**1.308**	distempel basah)
			Jumlah rumah di kab/kota	**14.630**	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Perumahan Rakyat	1)	Jumlah rumah di kab/kota	Cukup jelas	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Cukup jelas	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Jumlah rumah tidak layak huni	Cukup jelas	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Cukup jelas	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah Total Unit Rumah}}$	… .	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6)	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Cukup jelas	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
4.	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{\mathbf{442}}{\mathbf{526}} \times 100\% = 84{,}03\ \%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata-

					ngani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Perumahan Rakyat	1) Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel

				basah)
		6) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah pengembang yang tersertifikasi	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah pengembang yang teregistrasi	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		9) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.5. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Deskripsi	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasirawan bencana	Kegiatan pemberian informasi rawan bencana, meliputi: - Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana - Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia - Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	**56.918** Orang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	1)	Persentase penyelesaian	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun		Dibuktikan dengan dokumen

			dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	x 100%	…	pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		2)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

			sesuai jenis ancamanbencana	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenisancaman bencana		

2. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Deskripsi	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga yang di kawasanrawan bencana yang memperoleh pelatihan, layanan pusdalops dan peralatan perlindungan sesuai jenis ancanaman bencana - Data yang diambil adalah data tahun 2024 berdasarkan program dan anggaran	**6.062** Orang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	1) Persentase penyelesaian dokumen RPB (Rencana	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun / ... x 100%		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

		Penanggulangan Bencana) sampai dinyatakan sah/legal	Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan	…	ditandatangani kepala dan distempel basah)
	2)	Persentase penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan}}$ x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		3)	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan (pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana)	Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan / Jumlah aparatur dan warga Negara di kawasan bencana	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga Negara yang ikut pelatihan / Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Persentase warga negara yang mendapat layanan pus- dalops penanggulangan ben- cana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops / Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6)	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga Negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan / Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	x 100%	...	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

a. **Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Deskripsi	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- 'Yang dimaksud dengan jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga Negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana	**2.233** Orang	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

			- Apabila tidak terdapat bencana, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi korban bencana		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	1)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB / Jumlah seluruh penetapan status KLB x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana / Jumlah status penetapan status darurat bencana x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalampenanganan darurat bencana / Jumlah keseluruhan petugas dalampenangangan darurat bencana x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	Jumlah korban yang berhasil dicari,ditolong dan dievakuasi x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani

			terhadap			kepala
			kejadian bencana	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		dan distempel basah)

4. Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

***a.* Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah / Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota x 100%	32 / 31 x 100% = 103,22%	Seluruh kasus kebakaranyang masuk padad tahun2021 dapat terselesaikan dengan baik dan dibuktikan dengan dokumen dan dokumentasi/foto

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

5.	Trantibum Linmas	1) Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	…	Seluruh kasus kebakaran yang masuk padad tahu 2021 dapat terselesaikan dengan baik dan dibuktikan dengan dokumen dan dokumentasi/foto

		2) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor Kecamatan	…	Dibuktikan dengan dokumentasi/foto
		3) Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	…	Dibuktikan dengan dokumentasi/foto dan buku ganti shift
		4) Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	…	Pos damkar yang tersedia hanya di MAKO dan dua Kecamatan yaitu Kecamatan Silungkang dan Talawi
		5) Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	…	Dibuktikan dengan dokumentasi/ foto dan daftar sarana prasarana pemadam kebakaran
		6) Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	…	Dibuktikan dengan personil damkar yang mengikuti pelatihan dan bintalsik pemadam kebakaran yang memiliki sertifikat beserta dokumentasi/foto
		7) Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		8) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	…	Dibuktikan dengan personil damkar yang mengikuti pelatihan dan bintalsik pemadaman kebakaran yang memiliki sertifikat beserta dokumentasi/foto

5. Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Deskripsi	Capaian Kinerja 2024	Keterangan

5.	Trantibum Linmas	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	- Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan timdan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran - Yang dimaksud dengan rata-rata waktu tanggap adalah jumlahtotal waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran	± 4,88 Menit	Dibuktikan SOP dan administrasi pencatatanterjadinya kebakaran

6. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Keterangan

				2021	
5.	Trantibum Linmas	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		4)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6)	Tersedianya sarana prasarana minimal	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

7. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
5.	Trantibum Linmas	1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan perda danperkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{25}{25} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.6. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN SOSIAL

1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
6.	Sosial	persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	$\frac{\mathbf{863}}{\mathbf{1.244}} \times 100\% = 69{,}37\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
6.	Sosial	1) Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

				ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masukdalam data terpadu FM dan OTM	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paketsandang	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10) Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

				ditandatangani kepala dan distempel basah)
		11) Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	paketperbekalan kesehatan		
13)	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		14) Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		16) Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		17) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		18) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		19) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		20) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		21) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
6.	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota x 100%	56 / 56 x 100%=100%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
6.	Sosial	1) Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		5) Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan Psikososial	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	…	Dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.7. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN TENAGA KERJA

1. Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yag mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK (rencana tenaga kerja) yang telah disusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenagakerja	Menghitung selisih 6 indikator ketenagakerjaan dengan rumus : $\frac{\text{Realisasi indicator} - \text{target indicator}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		3)	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerjabersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}}$ x 100%	$\frac{206}{224}$ x 100% = 91,964%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	1)	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi}}{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster}}$ x 100%		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		2)	Persentase instruktur	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi}}{}$ x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

		bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur seluruhnya		ditandatanganikepala dan distempel basah)
	3)	Rasio jumlah instruktur terhadappeserta pelatihan	Jumlah instruktur / Jumlah peserta pelatihan x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatnganikepala dan
					distempel basah)
4)	Persentase LPK yang terakreditasi		Jumlah LPK yang terakreditasi / Jumlah seluruh LPK x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun		Capaian Kinerja	Keterangan
		5)	Persentase LPK yang memilikiperizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan / Jumlah LPK yang terdata	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		6)	Jumlah penganggur yang dilatih	Cukup jelas		…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		7)	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikasi pelatihan / Jumlah orang yang dilatih	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		8)	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja / Jumlah lulusan	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		9)	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan bersertifikat kompetensi / Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon TenagaKerja Indonesia yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih / Jumlah CPMI terdaftar	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

		11)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (ADHK)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$ x 100%	$\frac{3.195,86}{2.322}$ x100 % =137,634%	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	1) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas}}{\text{Jumlah perusahaan}}$ x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		2) Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi – (pertumbuhan modal + pertumbuhan tenaga kerja)	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

4. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	$\frac{21}{24} \times 100\% = 87{,}5\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
7.	Tenaga Kerja	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenga kerja 10 orang atau lebih}} \times 100\%$	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB}}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB}} \times 100\%$	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3)	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)		Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan				
		4)	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skalaupah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah / Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebatai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan / Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		6)	Persentase jumlah perusahaanyang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisihJumlah perusahaan	x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7)	Jumlah mogok kerja	Cukup jelas		…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

	8)	Jumlah penutupan perusahaan	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
9)	Jumlah perselisihan kepentingan		Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		10)	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh(SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		11)	Jumlah perselisihan PHK	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		13)	Jumlah perselisihan yangdiselesaikan melalui perundingan bipartite	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		14)	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada/Tidak	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		15)	Persentase perselisihan	Jumlah perjanjian bersama	…	Dibuktikan dengan dokumen

			hubungan industrial yang diselesaikan melalui PerjanjianBersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}}$ x 100%		pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

5. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) nelalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	Jumlah pencaker yang ditempatkan / Jumlah pencaker yang terdaftar x 100%	9 4 / 217 x 100% = 43,318%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Tenaga Kerja	1)	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Cukup jelas	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah pencari kerja yang terdaftardi kab/kota	Cukup jelas	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3)	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
4)	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		5)	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		7)	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		8)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan ____ x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

			TenagaKerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	sosialisasi / Jumlah CPMI/CTKI		ditandatanganikepala dan distempel basah)
		10)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon TenagaKerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		11)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia(PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan / Jumlah PMI yang pulang x 100 %	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		12)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia(PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\text{Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\text{Jumlah PMI/TKI}} \times 100\%$	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		13)	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/TenagaKerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\text{Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		14)	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	$\frac{\text{Jumlah LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

2.2.1.8. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung di APBD x 100%	17.359.306.251 / 204.348.488.430 x 100% = 8,495%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel

		kabupaten/kota		basah)

2. Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	Jumlah anak (penduduk usia < 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kab/kota yang didampingi / Jumlah anak (penduduk usia < 18tahun) x 100%	11 kasus / 25.139 x 100% = 0,044%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2020)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2020)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3)	Persentase korban kekerasananak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani / Jumlah korban kekerasan anakdi kab/kota x 100%	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan

8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	$\frac{11}{25.139}$ x 100% = 43,757%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
8.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1)	Jumlah organisasi kemasyarakatanyang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		4)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dkumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		5)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

			terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi			ditandatanganikepala dan distempel basah)

		6)	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7)	Persentase korban kekerasanperempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan x 100%	…	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
				Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.8. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN

1. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
9.	Pangan	Persentase ketersediaan pangan(tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} x\ 100\%$	$\frac{21.195}{20.800} \times 100\% = 101{,}899\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
9.	Pangan	1) Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		4) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	…	-Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)/Pekarangan Pangan lestari (P2L) -Kegiatan Desa Mandiri Pangan (DMP)
		5) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	…	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Sawahlunto

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		6) Tertanganinya kerawanan pangan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.10. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN

1. Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
10.	Pertanahan	1) SK Izin Lokasi Yang DiterbitkanOleh Bupati/Wali kota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2) SK Bupati/Wali kota tentangPenetapan Tanah Obyek Landreform yang	Jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari Tanah	x 100%	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala
bersumberdari Tanah Kelebihan Maksimum/ *Absentee* dan Daftar Subyek	kelebihan maksimum *absentee* Jumlah permohonan yang diusulkan pertimbangan landreform			dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee / Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek x 100%	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak / Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun x 100%	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik / Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun x 100%	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
10.	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
10.	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuaidengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
10.	Pertanahan	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

5. Tersedianya tanah untuk masyarakat

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
10.	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

10.	Pertanahan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}}$ x 100%	$\frac{1}{1}$ x 100% = 100%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan

					distempel basah)

2.2.1.11. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKU 30%) + (IKTH 40%) IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara IKTH = Indeksi Kualitas Tutupan Hutan	60,89	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
11.	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsiterhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeksi Kualitas Udara	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi sekunderdalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi sekunder (m)}}$ x 100%	_____ x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel

		(IKU) c. Indeks Kualitas			basah)

		Tutupan Hutan (IKTH)			

2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
11.	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaansampah di wilayah kab/kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{timbunan sampah 100% kab/kota}} \text{ Total } x$	$\frac{6.943,97}{6.988,4} \times 100\% = 99,364\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
11.	Lingkungan hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

				TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan		

3. Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
11.	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota / Usaha dan/atau kegaitan dilakukan pemeriksaan x 100 %	5 / 23 x 100% = 21,739%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
11.	Lingkungan hidup	1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota x 100%	x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala

			Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi		dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada / Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota x 100%	_____ x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)
		3) Penetapan hak MHA (Masyarakat Hokum Adat) terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	Jumlah MHA yang diakui / Jumlah usulan MHA x 100%	_____ x 100 = % _____	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)
		4) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukumadat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan / Jumlah MHA yang ada x 100%	x 100 = %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana / Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat x 100%	_____x 100 = %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

		6) Penanganan Pengaduan masya- rakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbit-kan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupa-ten/kota yang ditangani	Pengadaan masyarakat yang ditangani / Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi x 100%	_____x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

2.2.1.12. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Perekaman KTP elektronik

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
12.	Dukcapil	Perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}}$ x 100%	$\frac{49.765}{50.097}$ x 100% =99,337%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
12.	Dukcapil	1)	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan}}{\text{peristiwa perkawinan yang dilaporkan}}$ x 100%	_____ x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Penerbitan akta perceraian	$\frac{\text{Jumlah akta perceraian yang diterbitkan}}{\text{Peristiwa perceraian yangdilaporkan}}$ x 100%	_____ x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		3)	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	x 100%	x 100% =	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
				Peristiwa kematian yangdilaporkan		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		4)	Penyajian data kependudukan	Data 2 tahun (2020 dan 2021)	x 100% = _____	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

2. Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
12.	Dukcapil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}}$ x 100%	$\frac{14.027}{18.462}$ x 100% = 75,978%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Kepemilikan akta kelahiran

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
12.	Dukcapil	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}}$ x 100%	$\frac{19.613}{19.705}$ x 100% = 99,533%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
12.	Dukcapil	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}}$ x 100%	$\frac{24}{26}$ x 100% =92,307%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.13. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi criteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)}}$ x 100%	$\frac{0}{0}$ x 100% = 0%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriterua desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)}}$ x 100%	$\frac{5}{6}$ x 100% =83,33%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

2.2.1.14. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
14.	Pengendalian Penduduk & KB	TFR (Angka KelahiranTotal)	$\text{TFR} = 5\sum_{i=1}^{7} ASFR\ i$ $\text{ASFRi} = \frac{b_i}{p_i^f} \times k$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,1=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49 K = Bilangan Konstanta biasanya 1000	1,49	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
14.	Pengendalian Penduduk & KB	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-perda-kan	Cukup Jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagaiusia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia	…	Median usia kawin pertama wanita usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompokumur sudah melakukan perkawinan. Tren usia kawinpertama penting untuk menentukan pola fertilitas di indonesia.
		3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFRi = \frac{b_i}{p_i^f} \times k$	10,68	ASFR adalah angka kelahiran dikelompok usia 15-19 tahun.
		4)	Persentase masyarakat yang	Jumlah masyarakat		

		terpapar isi pesan Program KKBPK(advokasi dan KIE)	yang terpapar isi pesan programKKBPK (advokasi dan KIE)	x 100%	_____ x 100%	
			Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)		=85,92	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		5)	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Cukup jelas	12	

2. Persentase Pemakaian Konstrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
14.	Pengendalian Penduduk & KB	Persentase pemakaian konstrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$	$\frac{7.709}{7.726} \times 100\% = 99{,}779\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
14.	Pengendalian	1)	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang	Jumlah faskes yang siap melayani		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

	Penduduk & KB		siapmelayani KB MKJP	KB MKJP / Jumlah faskes x 100%	x 100% = 100%	ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
		2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif / Jumlah PUS x 100%	7.709 / 7.726 x 100% =99,779 %	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	4	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern / Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan x 100%	x 100% = 28	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
				KB pasca persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari		

3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)

a. **Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
14.	Pengendalian Penduduk & KB	1) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah	58,15	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		2) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{Jumlah keluarga PBI}} \times 100\%$ Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah	——— x 100%= 72,92	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.15. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERHUBUNGAN

1. Rasio Konektivitas Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
15.	Perhubungan	Rasio Konektivitas Kab/Kota	Rasio konektvitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) ▪ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP ▪ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) ▪ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil ▪ Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu	0,44	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
15.	Perhubungan	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia / Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan x 100%	_____ x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun / Jumlah kendaraan wajib uji x 100%	_____ x 100% =	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan x 100%	_____	

_____

			perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah lintas penyeberangan dalam kab/kota			x 100% =	
		4)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota Target kebutuhan perlengkapanjalan kab/kota	x 100%		x 100% =	

2. V/C Ratio di Jalan Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
15.	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab/kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{}{} \times 100\% = 45$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dandistempel basah)

2.2.1.15. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
15.	Kominfo	Persentase OrganisasiPerangkat Daerah (OPD) yang terhubungdengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	$\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
15.	Kominfo	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{} \times 100\%$	$\frac{}{} \times 100\% =$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan

		yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah seluruh OPD		distempel basah)
		2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang x 100%	x 100% =	Dibuat dalam bentuk daftar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		akses internet yang berkualitas yang disediakanDinas Kominfo	berkualitas yang disediakan DinasKominfo Jumlah OPD	———	(yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
15.		3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakanDinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Cukup jelas	…	

2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan

15.	Kominfo	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan public diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah layanan publik	x 100%	21 / 21 x 100% = 100%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
15.	Kominfo	1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No 5/2015 / Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar / Jumlah perangkat daerah x 100%	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Persentase perangkat	Jumlah perangkat daerah yang		Dibuat dalam bentuk daftar

	daerah yang mengimple-mentasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan / Jumlah perangkat daerah x 100%	x 100%=	(yang ditandatangani kepala da n distempel basah)
4) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik / Jumlah layanan x 100%		x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala da n distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		telah diimplementasikan secara elektronik			
		5) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik / Jumlah layanan x 100%	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala da n distempel basah)
		6) Persentase sistem elektronikyang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah system elektronik yang terdaftarsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / Jumlah system elektronik x 100%	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan system penghubung layanan pemerintah / Jumlah layanan public dan layanan administrasi x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah / _____ x 100%	_____ x 100%= _____	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	Jumlah perangkat daerah			
9) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat / Jumlah perangkat darah	x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
10) Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai dengan siklus jenis datanya	x 100%	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		data (sesuai renstra kominfo)			
		11) Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai / Jumlah data yang dimiliki pemda x 100%	____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimpelementasikan inovasi yang mendukung smart city / Jumlah perangkat daerah x 100%	____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		13) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo / Jumlah ASN pengelola TIK x 100%	____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		14) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Cukup jelas	Ada/Tidak	

3. Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kominfo	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kab/kota / Jumlah penduduk x 100%	573 / 67.007 x 100% = 0,855%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Kominfo	1) Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsiyang menyebarkan informasi dan kebijakan dan pemerintahprovinsi	Jumlah komunitas masyarakat ataumitra strategis pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah x 100%	x 100%=	Dibuat dalam bentuk Daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)

				Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah provinsi			

2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) / Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	x 100%	x 100%=	Dibuat dalam bentuk Daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi(STARKOM) dan SOP yangtelah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP / Jumlah diseminasi dan layananinformasi public x 100%	x 100%= _____	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.17. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1. Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
17.	KUKM	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}}$ x 100%	$\frac{5}{68}$ x 100%= 7,353%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
17.	KUKM	1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mem-punyai izin usaha simpan pinjam}}$ x 100%	————x 100%=	Diskoperindag tidak mempunyai wewenang untuk menertibka izin usaha
		2) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan x 100%	————x 100%=	Diskoperindag tidak mempunyai wewenang untuk menertibka izin usaha

		koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan ldalam daerah kabupaten/kota	Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjampada tahun yang dilaporkan		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi / Jumlah koperasi yang ada x 100%	_____x 100%=	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya / Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada x 100%	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / Jumlah koperasi yang ada x 100%	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		6) Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan

_____

		perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah anggota koperasi yang ada			distempel basah)
		7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan / Jumlah koperasi yang ada	x 100%	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		dalam daerah kabupaten/kota				
		8) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	(tidak perlu diisi)		(tidak perlu diisi)	-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		9) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasi (NIK) / Jumlah koperasi yang ada x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		10) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan / Jumlah koperasi yang ada x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		11) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran / Jumlah koperasi yang ada x 100%	_____x 100%= _____	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		12) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha x 100%	x 100%= _____	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

		fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang ada			
		13) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan / Jumlah koperasi yang ada	x 100%	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
17.	KUKM	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	24 / 4.699 x 100% = 0,511%	▪ Usaha Mikro Adalah Usaha Produktif Milik Orang Perorangan Dan/Atau Badan Usaha Perorangan Yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro ▪ Dokumen Pendukung

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
17.	KUKM	1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yangberskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru / Jumlah wirausaha yang ada x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system data online (ODS) / Jumlah usaha mikro yang ada x 100%	_____x 100%= _____	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda tangani kepala dan distempel basah)
		3) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra / Jumlah usaha mikro yang ada x 100%	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

		4) Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	x 100%= x 100%	Dibuat dalam bentuk daftar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		standarisasi dan sertifikasiproduk usaha	Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standard dan sertifikasi produk		(yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran / Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran x 100%	_____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		6) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan / Jumlah usaha mikro yang ada x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		7) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha / Jumlah usaha mikro yang ada x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.18. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL

1. Persentase Peningkatan Investasi Di Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
18.	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	$\frac{\text{(Jumlah investasi 2021 – Jumlah investasi 2020)}}{\text{Jumlah investasi 2020}}$ x 100%	$\frac{39,86}{212,79}$ x 100% = 18,732%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
18.	KUKM	1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Standar operasional prosedur pelaksanaan	Tersedianya dokumen SOP pelaksana-an Pemberian fasilitas/Insentif penana-man modal	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		pemberian fasili-tas/insentif penanaman modal			
		3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		4) Kegiatan seminar bisnis, forum,one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/busi-ness forum, one on one meeting	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		5) Kegiatan pameran penanaman Modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8) Penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9) Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksa- naan kegiatan penanaman modal	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

2.2.1.19. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota / Jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di kab/kota x 100%	76 / 3800 x 100% = 2%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Cukup jelas	76.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata- ngani kepala dan distempel basah)

		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Cukup jelas	31.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandata-ngani kepala dan

					distempelbasah)

2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota}}{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) dikab/kota}} \times 100\%$	$\frac{0}{3800} \times 100\% = 0\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1) Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Cukup jelas	31	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen	Cukup jelas	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		organisasi kepemudaan			distempel basah)

3. Peningkatan Prestasi Olahraga

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan PrestasiOlahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	178	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

19.	Kepemudaan dan Olahraga	1)	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	▪ Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. ▪ Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
				pelatih olahraga		
		2)	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Cukup jelas	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.20. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistic Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah seluruh OPD}}$ x 100%	$\frac{27}{27}$ x 100% = 100%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Statistik	1)	Tersedianya buku profil daerah	Ada/Tidak	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	2)	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Cukup jelas	13	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Cukup jelas	2	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4)	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Cukup jelas	1	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Cukup jelas	1	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	x 100%= 66,67%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dandistempel basah)
		7)	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	x 100%= 66,67%	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dandistempel basah)

2. Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
	Statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	$\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.21. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN

1. Tingkat keamanan informasi pemerintah

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
21.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$ ▪ Yang dimaksud dengan tingkat keamanan informasipemerintah dilihat dari Indeks KAMI ▪ Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkatkesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi ▪ Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu (a)tata kelola keamanan informasi, (b) pengelolaan resiko keamanan informasi, (c) kerangka kerja keamanan informasi, (d) pengelolaan asset informasi dan (e) teknologidan keamanan informasi ▪ Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan	247	Dibuat dalam bentukdaftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
21.	Persandian	1) Persentase kegiatan strategisyang telah	Jumlah kegiatan strategis x 100%	x 100%=	Dibuktikan dengan dokumen pendukung

		diamankan melalui	teramankan		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis yg ada ▪ Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain ▪ Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis ▪ Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan		(yang ditandatangani kepala da n distempel basah)

		2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip-prinsip manajemen keamanan	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian / umlah SE yang ada x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentukdaftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	▪ Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e- perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll ▪ Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan ▪ Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan,		

			tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu		
			organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah / Jumlah SE yang ada x 100%	____ x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			▪ Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya Kerawanan	____	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan / Jumlah titik pada PHKS x 100%	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

			▪ Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup terntu dengan tujuan mengangkan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi ▪ PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS.		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			▪ JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi		

2.2.1.22. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN

1. Terlestarikannya Cagar Budaya

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
22.	Kebudayaan	Terlestarikannyacagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata x 100%	163 / 163 x 100% = 100 %	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
22.	Persandian	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek Pemajuan Kebudayaan yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	482	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)
		2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek Pemajuan Kebudayaan (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	16	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)

3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan	Jumlah objek dimanfaatkan	2	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)
	kesejahteraan masyarakat)			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi + Jumlahlembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	71	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah Cagar Budaya ditetapkan –Jumlah Cagar Budaya dihapuskan	144	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6)	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah Cagar Budaya (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	85	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7)	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah Cagar Budaya diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

8)	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah Cagar Budaya (diteliti +direvitalisasi + diadaptasi)	29	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)
9)	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah Cagar Budaya dimanfaatkan	144	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)
10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	671	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	17420	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12)	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalampengelolaan museum	0	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)
		13)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		671	(tidak perlu diisi)
		14)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CagarBudaya yang dibentuk	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		15)	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CagarBudaya	1	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dandistempel basah)
		16)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli Cagar Budaya yangdisertifikasi	1	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)

	17)	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM Cagar Budaya + jumlah SDM Museum	33	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
18)	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman		Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (Cagar Budaya + Museum)	35	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		19)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya danpermuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (Cagar Budaya + Museum)	18	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		20)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	5	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)

2.2.1.23. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
23.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakatyang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	67,45	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
23.	Perpustakaan	1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) / Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase ketermanfaatan perpustakaan	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan

		oleh masyarakat	online maupun onsite / Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		distempel basah)
		3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perputakaan di wilayahnya / Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) x 100%	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4) Persentase perpustakaan sesuaistandar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan / Jumlah perpustakaan dari berbagai jenisyang terdapat di wilayahnya x 100% Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)
		5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di Masyarakat		Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan

23.	Pekerjaan Umum	Indeks Pembangunan LiterasiMasyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakatyang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangu- nan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	94,81	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{UPLM}{ALM} x100$	_____	

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

23.	Pekerjaan Umum	1) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdafta r yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	…	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50	…	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	…	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.24. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEARSIPAN

1. Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 Dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
24.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	**T = (a + i + s + j) / 4** T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsipi = Persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsips = Persentase arsip statis yg telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	79	Dibuat dalam bentukdaftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

24.	Kearsipan	1) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100\%$	_____ x 100%= 953	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda- tangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip x 100%	x 100%= 1212	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditanda-

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar Arsip	Jumlah seluruh arsip inaktif		tangani kepala dandistempel basah)
		3) Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik / Jumlah seluruh arsip statis x 100%	——— x 100%= 83994	Dibuat dalam bentukdaftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)
		4) Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN / Jumlah seluruh arsip dinamis dan statispemerintahan daerah x 100 %	———x 100%= 0	Dibuat dalam bentukdaftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

2. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepetingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
24.	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk	**T = (m + b + g + a + c + i) / 6** T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	40	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
24.	Kearsipan	1) Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	40	Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya penghapusan anggaran akibat Covid-19

2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		3) Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	50,3..	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	80,66	Kegiatan ini tidak terlaksana karena adanya penghapusan anggaran akibat Covid- 19
		5) Pencarian arsip statis yg penge-lolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	5	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		yang sesuai NSPK			
		6) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	1	Tidak terlaksana karenatidak ada dalam DPA kegiatan

2.2.1.25. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
25.	Kelautan dan perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi(sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkapdan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	114,8	Dibuktikan dengan doku- men pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
25.	Kelautan dan perikanan	1) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha(RTP)	Cukup jelas	…	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepaladan distempel basah)
		2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada}} \times 100\%$	———x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang

		di wilayah kab/kota		ditandatangani kepaladan distempel basah)
3)	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yangusahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		4) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberda-yaan (pendidikan dan pelatihan/-penyuluhan dan pendam-pingan/kemitraan usaha/ kemuda-han akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Cukup jelas	…	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Cukup jelas	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.26. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PARIWISATA

1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
26.	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{(Jumlah wisatawan tahun 2021 – Jumlah wisatawan tahun 2020)}}{\text{Jumlah wisatawan tahun 2020}} \times 100\%$	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
26.	Pariwisata	1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Cukup jelas	7	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas	Cukup jelas	7	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		pariwisata			

		3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota	Cukup jelas	117	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah wisatawan mancanegara per	Cukup jelas	7	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		kebangsaan			distempel basah)
		5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Cukup jelas	11	▪ Pameran/city expo rakerwil I Apeksi Tahun 2020 ▪ Sales Mmission ke Bengkulu ▪ Lomba Fotografi dalam event SISSCa Tahun 2020 ▪ Sales Mission ke Pekanbaru
		6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	Cukup jelas	0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Cukup jelas	1 _____	Perwakilan Asosiasi Homestay Kota Sawahlunto
		8) Persentase tenaga kerja di sektor	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala

		parwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata	x 100%	42,1%	dan distempel basah)
		9) Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan / Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	x 100%	x 100%= 100%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)
		10) Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan	Cukup jelas		16	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		kemitraan usaha masyarakat			

2. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
26.	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	(Jumlah wisatawan tahun 2021 – Jumlah wisatawan tahun 2020) / Jumlah wisatawan tahun 2020 x 100%	-4936 / 95988 x 100%= -5,142%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Tingkat hunian akomodasi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

26.	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}}$ x 100%	$\frac{9532}{285}$ x 100%= 3344,561%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
26.	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Cukup jelas	225474,834	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

5. Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD

b. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
26.	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Cukup jelas	309491,741	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2.2.1.27. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANIAN

1. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
27.	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}}$ x 100%	$\frac{26,795,65}{3.461,76}$ x 100%= 774%	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatanganikepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
27.	Pertanian	1) Jumlah Sarana dan prasaranapertanian yang diberikan	Cukup jelas	…	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan	…	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		3) Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usahapertanian	…	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan / Jumlah prasarana yang dibangun x 100%		Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Jumlah usulan yang difasilitasi x 100%	…	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan usaha pertanian		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
27.	Pertanian	Mengukur tingkat penurunan kejadianpenyakit hewan menular	(Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun 2021 - Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun 2020) / Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun 2020 x 100%	-2 / 100% x 100%= -2	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

27.	Pertanian	1) Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (kejadian/kasus penyakit hewan menular)	Jumlah area yang dapat ditanggulangi / Luas area terkena bencana x 100%	x 100%=	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.28. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN

a. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
28.	Kehutanan	1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	….	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.1.29. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERDAGANGAN

1. Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
29.	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{7}{17} \times 100\% = 41{,}176$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan dis+-tempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
29.	Perdagangan	1) Persentase perizinan yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan < 5 hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}} \times 100\%$	——— x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala

		sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja / Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar x 100%	_____ x 100%=	dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		2) Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG < 5 hari kerja / Jumlah permohonan penerbitan TDG x 100%	——— x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempelbasah)
		3) Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG / Jumlah gudang yang ada di kab/kota	——— x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit < 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar / Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri x 100%	——— x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit < 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar x 100%	——— x 100%=	

		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri			
			Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit < 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan/atau benar	x 100%	x 100%=	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralabaluar negeri		
		4) Persentase pemeriksa- an fasilitas penyim- panan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat kab/kota x 100% / Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	_____x 100%=	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit < 1 hari kerja (1x24 jam) / Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar x 100%		Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		6) Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	K = (a + b) x 100% - K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya - a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) - b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	…	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7) Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	…	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempelbasah)

2. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
29.	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{. Realisasi}}{\text{RDKK}}$ x 100%	$\frac{648}{1.493,1}$ x 100%= 43,399	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manualystem u melalui ystem elektronik		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
29.	Perdagangan	1)		a x 100%	x 100%=	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	b x c		Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)		

3. Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
29.	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)bertanda tera	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera 100% dan tera ulang di wilayah kab/kota x	**31** / **1653** x 100% = 1,875	

		sah yang berlaku	▪ Yang dimaksud dengan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU 2/1981 tentang Metrologi Legal ▪ Yang dimaksud dengan Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlakuatau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan	…	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempelbasah)

			pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai ▪ Yang dimaksud dengan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atautera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera ▪ Data yang dimasukkan seluruh data tera sah masih berlaku pada tahun pelaporan.		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
29.	Perdagangan	1) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{\text{Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di kab/kota}} \times 100\%$	_____x 100%=	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

		2) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yangberlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku / Total sampel BDKT yang diawasi dalamtahun berjalan x 100%	_____ x 100%=	

2.2.1.30. INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
30.	Perindustrian	Pertambahan jumlah 513ndustry kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	(Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021 – Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020) / Jumlah industri kecil dan menengahtahun 2020 x 100% Klasifikasi Usaha Industri berdasarkan BesaranJumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin 64/2016)	87 / 1.755 x 100%= 4,957	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempelbasah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan / Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%	x 100%=	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIK

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
30.	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaranpembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	▪ Jika terdapat N indikator pembangunan industridalam RPIK maka nilai masing - masing bobot indikator adalah (100/N)% ▪ Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% ▪ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikatortersebut	0	Dibuat dalam bentukdaftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

30.	Perindustrian	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)	…	Dibuat dalam bentukdaftar (yang ditanda-tangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
				e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK		

3. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
30.	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	$\frac{908}{908} \times 100\% = 100$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	1)	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI)	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{}$ x 100%	———x 100%=	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang

			kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah permohonan atau pengajuan izinyang masuk		ditandatangani kepala dan distempelábasah)

4. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dkeluarkan x 100%	0 / 0 x 100%= 100	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempelbasah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	1) Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan / Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk x 100%	——— x 100%=	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

5. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis laporan hasil pemantauan / Jumlah Izin Yang Dkeluarkan x 100%	0 / 0 x 100%= 0	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

6. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan

30.	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	1	Informasi industri adalah hasil pengolahan data industri dan data kawasasn industri ke dalam bentuk tabel,grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
			- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2021	Keterangan
30.	Perindustrian	2) Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusa-haan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota di SIINas Total populasi perusahaan industrikecil menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota x 100	——— x 100%=	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

2.2.2. IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	sio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	mlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas / Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah 100%	877 / 206 100%= 425,7282%	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	sio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) / eluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%	352 / 1078 100%= 32,65%	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	asio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi / Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100%	50 / 352 100%= 14,20455 %	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.2. IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	viasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari (Total belanja dalam realisasi − total belanja APBD dikurangi satu) / Total belanja dalam realisasi × 100% • Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus • Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD sebelum perubahan	5.347.371.26 / 9.237.924.585 × 100% = 11,041% 5	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	viasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	ilai absolut dari Total PAD dalam 100% bagi total PAD dalam APBD dikurangi satu • Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus • Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahan	.943.839.17 100% = 10,2409% .783.021.09 7	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Assets Management

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	sets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	uktikan dengan dokumen pendukung terkait

4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	sio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai Realisasi SILPA / otal belanja anggaran tahun sebelumnya 100%	997.512.9 06,02 / 2.809.902 .738 100%= 1,32%	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			• Yang digunakan SiLPA dan total belanja APBD tahun sebelumnya • Angka yang diambil adalah angka realisasi		

2.2.2. IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

1. Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	rsentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	umlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n / Jumlah kontrak keseluruhan tahun n 100%	0 / 329 100% = 0%	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			ng dimaksud dengan kontrak ▪ infrastruktur adalah kontrak proyek konstruksi infrastruktur ▪ Yang dimaksud dengan proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah proyek konstruksi yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari- Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai pembangunannya ▪ Kontrak konstruksi dengan nilai besar adalah kontrak konstruksi dengan nilai di atas 50 Milyar Rupiah		

2. Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus		Capaian Kinerja 2024		Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan	rsentase Jumlah Pengadaan yang	umlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100%	33	100% = 1,027%	uktikan dengan dokumen pendukung

	(Pengadaan)	Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan	3.213	(yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	rusan Pemerintahan	dikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	sio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan / Total belanja langsung 100%	50,10 / 43.446.5 49.651 100% = 0%	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			▪ Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal ▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dengan metode kompetitif maupun non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada ▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi		

4. Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan

	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	ningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	umlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) umlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil Koperasi Tahun (n-1)	41.431.310.600 04.724.523.736 100% = 230,5394% 100%	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.2.4. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)

1. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	sio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah APBD 100%	8.135.737.157 / 9.237.850.902 100%= 72,57%	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Rasio PAD

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	sio PAD	Jumlah PAD / umlah PDRB Non Migas 100%	.920.994. 265,62 / 490.598, 3 0 100%= 1.490.247%	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	sio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	umlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures) / Jumlah belanja APBD 100% • Yang dimaksud dengan transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga • Yang dimaksud dengan belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal • Angka yang diambil adalah angka realisasi	99.219.8 69.624 100%= 77,56% 43.653.4 14.741	uktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Opini Laporan Keuangan

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2024	Keterangan

		Keluaran			
	ngsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	bini Laporan Keuangan	bini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	(2016-2024 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)) 2 (2013-2014 WDP (Wajar Dengan Pengecualian))	uktikan dengan dokumen pendukung terkait

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media laporan. Bab Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.

Dalam bab ini disajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran Kota Sawahlunto Tahun 2025 juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2025 yang dibiayai dari dana APBD Kota Sawahlunto.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasayarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan), selanjutnya pada akhir tahun 2025 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap). Selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang (Performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan menggunakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA
1.	91 ≤	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka ditetapkanlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 berdasarkan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. adapun dalam RPD hanya memuat tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Sawahlunto periode 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam Rencana Pembangunan Daeah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga tiga tahun kedepan. Dengan tetap mengacu pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah maka rumusan tujuan sasaran untuk tahun 2024-2026 terdiri dari empat tujuan dan 18 sasaran, yaitu :

Tujuan 1 : Terwujudya SDM yang berkualitas dan berkarakter.

Tujuan pertama ini memiliki dua sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,
2) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.

Tujuan 2 : Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Tujuan kedua ini memiliki empat sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1) Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi baik,

2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup,

3) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang,

4) Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman.

Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian

Tujuan ketiga ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1) Menurunnya tingkat pengganggguran,

2) Meningkatnya kontribusi pariwisata,

3) Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan,

4) Terwujudnya ketahanan pangan,

5) Meningkatnya produksi pertanian,

6) Meningkatnya nilai investasi.

Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif Tujuan keempat ini memiliki enam sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas,

2) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan,

3) meningkatnya indeks inovasi daerah,

4) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat,

5) meningkatnya kualitas ASN,

6) meningkatnya kualitas sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan Pj. Kepala Daerah tahun 2024-2026. Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
1	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter**			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Pengukuran indek pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia**	**73,73**	**74,74**	**75,24**	**75,74**	**75,74**
		1	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,40	70,69	70,75	70,89	70,89
				Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	13,7	13,00	12,50	10,60	10,60
		2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	13,42	13,55	13,75	14,01	14,01
				Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,43	10,57	10,64	10,72	10,72
2	**Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**			**Indeks infrastruktur Wilayah**	**[40 %{50%(50 % kualitas jalan + 50 % kualitas jembatan)} + {40 % (50 % kualitas SDA + 50 % kualitas drainase kondisi baik)} + (10 % bangunan Gedung Pemerintah kondisi baik)] + 20 % {60 %(50 % Pengurangan sampah + 50 % Pungutan sampah) + (40 % IKLH)] + [20 %{70%PSU+ 30% persentase rumah layak huni [20 %{70%PSU+ 30%**	**69,67**	**72,35**	**74,00**	**75,22**	**75,22**

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
					persentase rumah layak huni)] + [10 % {(50 % kinerja Lalu lintas + (50 % kinerja PJU)} + [10 % {(50 % kampung +20 % rehabilitasi rekonstruksi tangguh bencana + 30 % evakuasi korban bencana + {30 % ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30 % edukasi proteksi kebakaran + 40 % Response Time}]/2					
		1	Meningkatnya Infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	(Jumlah persentase kondisi Sumber Daya Air, , Drainase, Bangunan sesuai standar, Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik/5	67,83	70,72	71,74	72,65	72,65
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 37,6 % IKA, 40,5% IKU, 21,9% IKTL)	62,89	64,74	65,52	66,57	66,57
				Indeks Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang masuk ke TPA/jumlah timbulan sampah	0	68,46	68,66	68,90	68,90
		3	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	84,15	86,23	87,20	88,32	88,32
		4	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi	75,00	84,00	86,00	87,00	87,00
				PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	PSU / jumlah unit rumah x 100 %					
				Persentase RTLH (%)	(Jumah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7,38	7,16	7,05	7,00	7,00
3	**Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian**			**Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)**	**((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%**	**3,98**	**4,48**	**4,73**	**4,98**	**4,98**
				PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	**PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)**	**66,10**	**71,6**	**74,35**	**77,11**	**77,11**
				Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	**(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%**	**2,28**	**2,19**	**2,18**	**2,17**	**2,17**
				Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	**Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)**	**10,54**	**11,15**	**11,37**	**11,47**	**11,47**
		1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	5	4,92	4,83	4,75	4,75
		2	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata	Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,22	2,26	2,30	2,34	2,34
		3	Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan	Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	10,80	11,50	11,78	12,06	12,06

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Kondisi Awal 2022	Target (Tahun)			Kondisi Akhir
							2024	2025	2026	
				Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,92	14,94	14,96	14,98	14,98
		4	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (%)	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	73,85	73,85	73,88	73,90	73,90
		5	Meningkatnya produksi pertanian	Nilai PDRB sektor Pertanian (juta)	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	383.196,89	398.524,76	414.465,75	431.044,38	431.044,38
		6	Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	9,68	8,63	8,83	9,03	9,03
4	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB**	**55,68**	**56,50**	**57,32**	**58,14**	**58,14**
		1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP Kemenpan RB	61,92	62,19	62,50	62,81	62,81
		2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	58,23	76,00	77,00	78,00	78,00
		3	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)	58,98	60,01	63,01	66,01	66,01
		4	Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik	83,40	84,61	85,82	87,03	87,03
		5	Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	63	78,00	80,00	82,00	82,00
		6	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,84	3,10	3,15	3,20	3,20

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam konteks Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dikelompokkan menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang. Sesuai dengan kebutuhan di Pemerintah Kota Sawahlunto, urusan-urusan Pemerintahan tersebut dikelompokkan lagi sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026. Berdasarkan pengelompokkan tersebut disusunlah target tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIYANDA PUTRA, S.IP**
Jabatan : WALI KOTA SAWAHLUNTO

berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sawahlunto, 27 Oktober 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

RIYANDA PUTRA, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
WALI KOTA SAWAHLUNTO

Berdasarkan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,24
	Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur Wilayah	74
	Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian	- Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	4,73
		- PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	74,35
		- Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	2,18
		- Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	11,37
.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	65

o	Program	Anggaran (Rp)	Ket
	2	3	4
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.973.346.813	Sekretariat Daerah
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	9.379.412.458	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	352.955.220	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.843.090.124	Sekretariat DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.148.942.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.048.478.883	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	507.641.930	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	275.622.970	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.451.317.379	BKPSDM
)	Program Kepegawaian Daerah	744.177.120	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.359.766.957	BPKAD
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	66.088.594.882	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	356.849.163	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.159.386.893	
	Program Pembiayaan	1.666.666.669	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.825.852.913	Barenlitbangda
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	292.384.350	

	Program	Anggaran (Rp)	Ket
	2	3	4
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	91.968.830	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	34.114.200	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.569.659.422	
	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	822.805.000	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	621.309.900	Bakesbangpol
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	45.137.200	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya	85.350.000	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik	451.309.900	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.134.281.243	BPBD
	Program Penanggulan Bencana	504.878.195	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.712.354.348	DinsosPMDPPA
	Program Pemberdayaan Sosial	205.269.500	
	Program Rehabilitas Sosial	891.204.260	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	21.941.400	
	Program Penanganan Bencana	51.354.000	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	34.987.140	
	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	402.476.600	
	Program Perlindungan Perempuan	87.104.200	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	42.119.800	
	Program Pemenuhan Hak Anak	8.216.000	
	Program Perlindungan Khusus Anak	427.112.800	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	487.406.256	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	469.649.135	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.880.315.789	DPUPR
	Program Penyelenggaraan Jalan	11.749.556.590	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.395.177.400	
	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	2.493.360.000	
	Program Penataan Bangunan Gedung	2.510.520.300	

	Program	Anggaran (Rp)	Ket
	2	3	4
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	942.717.000	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.065.116.850	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.650.802.500	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	91.311.870	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	12.071.800	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	109.164.806.096	
	Program Pengelolaan Pendidikan	16.759.619.338	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.934.800	Dinas Pendidikan
	Program Pengembang Kurikulum	-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.741.162.786	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.979.103.055	Dinas Perhubungan
	Pengelolaan Perkeretaapian	100.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.468.044.822	
	Program Pengembangan Kebudayaan	20.000.000	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	467.887.000	Dinas Kebudayaan
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	30.000.000	
	Program Pengelolaan Permuseuman	2.309.290.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.046.542.356	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.200.000	
	Program Hubungan Industrial	435.999.600	DPMPTSPNaker
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	58.696.560	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	254.965.400	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.370.104.040	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	75.350.400	
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	4.314.795.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	82.476.200	Disparpora
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.750.560.608	
	Program Pemasaran Pariwisata	403.406.000	

o	Program	Anggaran (Rp)	Ket
	2	3	4
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	29.404.000	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.981.243.438	DPK
6	Program Pembinaan Perpustakaan	1.097.606.523	
7	Program Pengelolaan Arsip	21.253.800	
8	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	12.126.300	
9	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	908.400	
0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	120.667.584.197	DinkesdaldukKB
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	22.473.544.553	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.087.023.975	
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	403.983.680	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	109.706.800	
5	Program Pengendalian Penduduk	128.698.950	
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	862.686.900	
7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	496.624.000	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.980.480.086	DPKP2LH
9	Program Pengembangan Perumahan	492.228.425	
0	Program Kawasan Pemukiman	1.097.056.500	
1	Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	70.000.000	
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana&Utilitas Umum(PSU)	2.088.560.000	
3	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimun dan Tanah Absentee	32.157.600	
4	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	12.000.000	
5	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	108.486.706	
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	697.263.985	
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	37.337.400	
8	Program Pengelolaan Persampahan	1.249.467.500	
9	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	4.564.000	
0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.397.792.047	
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-	

o	Program	Anggaran (Rp)	Ket
	2	3	4
2	Program Penilaian Kesehatan ksp/usp Koperasi	19.940.000	
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	765.214.000	
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	58.990.500	Diskoperindag
5	Program Pengembangan Ekspor	216.800.000	
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	348.412.575	
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	-	
8	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	107.116.800	
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.970.340.008	
0	Program Pendaftaran Penduduk	135.078.000	Disdukcapil
1	Program Pencatatan Sipil	8.118.100	
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.572.800	
3	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	15.770.000	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.898.535.809	
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.439.800	
6	Program Peningkatan Diversivikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	521.495.800	
7	Program Penanganan Kerawanan Pangan	15.551.000	DKP3
8	Program Pengawasan Keamanan Pangan	17.477.900	
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	25.382.400	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	19.636.000	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	767.176.750	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	949.607.630	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	206.576.430	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	12.381.600	
	Program Penyuluhan Pertanian	178.720.700	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.049.870.866	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	115.524.000	Satpol PP Damkar
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	420.790.371	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.693.163.020	

o	Program	Anggaran (Rp)	Ket
	2	3	4
0	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	525.439.590	
1	Program Aplikasi Informatika	1.331.820.530	Diskominfo
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29.507.250	
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	7.859.450	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.148.055.205	
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	15.241.660	
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	258.976.416	Kec. Silungkang
7	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.750.000	
8	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	19.620.200	
9	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.902.930	
0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.696.478.121	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	10.224.800	Kec. Lembah Segar
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	112.424.100	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.340.800	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.752.000	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.575.200	
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (6 Kelurahan)	356.404.971	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (6 Kelurahan)	1.888.644.984	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.260.450.993	
9	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	114.415.200	
0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Kelurahan)	271.889.706	
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.980.000	Kec. Barangin
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.890.000	
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.144.000	
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (4 Kelurahan)	1.641.649.559	
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Kecamatan)	90.382.851	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.199.928.979	
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	9.203.200	

o	Program	Anggaran (Rp)	Ket
	2	3	4
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	163.206.440	Kec. Talawi
9	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	
0	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.999.800	
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.360.000	

Sawahlunto, 27 Oktober 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

RIYANDA PUTRA, S.IP

A. PENGUKURAN PENCAPAIAN DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Capaian kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada table berikut ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,24	77,05	102,40
2.	Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur Wilayah	74	72,94	98,56
3.	Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian	- Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	4,73	3,43	72,51
		- PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	74,35	78,03	104,94
		- Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	2,18	2,72	80,14
		- Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	11,37	11,50	101,14

4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	65	79,29	121,98

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Berikut disampaikan capaian kinerja berdasarkan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026 untuk tahun anggaran 2025 dengan membandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2025, yaitu :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025			TAHUN 2024
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI
1.	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,24	77,05	102,40	76,68
2.	Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur Wilayah	74	72,94	98,56	72,13
3.	Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian	- Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	4,73	3,43	72,51	4,02

		- PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	74,35	78,03	104,94	73,59
		- Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	2,18	2,72	80,14	2,33
		- Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	11,37	11,50	101,14	11,18
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	65	79,29	121,98	75,04

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	SKOR
1.	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter	- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,24	77,05	102,40	Sangat Tinggi
2.	Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Indeks infrastruktur Wilayah	74	72,94	98,56	Sangat Tinggi
3.	Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata, pertanian dan perindustrian	- Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	4,73	3,43	72,51	Sedang
		- PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	74,35	78,03	104,94	Sangat Tinggi
		- Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	2,18	2,72	80,14	Tinggi
		- Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	11,37	11,50	101,14	Sangat Tinggi

4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	65	79,29	121,98	Sangat Tinggi

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left\{ \frac{\textit{Realisasi Biaya}}{\textit{Terget Biaya}} \times 100\% \right\}$$

Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 dianggarkan Rp.610.026.422.904 dengan realisasi Rp.562.910.010.607,28 atau 92,3 % yang terdiri dari Belanja Operasi dianggarkan Rp.523.139.013.276 terealisasi Rp.482.193.499.633.88 atau 92,2 %. Belanja Modal dianggarkan Rp.23.281.159.098.- dengan realisasi Rp.22.109.067.014.40 atau 95 %. Belanja Tidak Terduga dengan anggaran Rp.1.967.435.630.-tidak terealisasi. Belanja Transfer dengan anggaran Rp.61.638.814.900.- terealisasi Rp.58.607.443.959.00 atau 95 %.

Pencapaian kinerja keuangan APBD Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan baik menurut aspek jumlah realisasi anggaran walaupun jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024 sedikit menurun yaitu sebesar 99,84%. Hal tersebut terlihat dalam ikhtisar pendapatan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	APBD 2025	
		Anggaran (Rp)	***Realisasi (Rp)***
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	**PENDAPATAN**	**584.143.521.912,20**	**586.868.481.637,71**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	***72.126.034.897,00***	***72.439.372.835,71***
	Pendapatan Pajak Daerah	15.641.347.548,00	18.234.622.786,00
	PendapatanRetribusi Daerah	34.810.753.253,00	32.278.093.418,00
	Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.289.759.395,00	17.289.759.395,00
	Lain-lain PAD yang Sah	4.384.174.701,00	4.636.897.236,71
	PENDAPATAN TRANSFER	***511.867.637.015,20***	***514.279.258.802,00***
	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	28.359.234.000,00	27.720.770.000,00
	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum (DAU)	382.035.642.000,00	380.638.530.103,00
	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.355.359.000,00	6.316.876.346,00
	Dana Transfer khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	49.596.483.000,00	45.248.864.616,00
	Dana Desa	21.612.927.000,00	19.355.965.928,00

No	URAIAN	APBD 2025	
		Anggaran (Rp)	*Realisasi (Rp)*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	InsentifFiskal	8.752.114.000,00	8.752.114.000,00
	PendapatanTransfer Antar Daerah	15.155.878.015,20	26.246.137.809,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	149.850.000,00	149.850.000,00
	Pendapatan Hibah	149.850.000,00	149.850.000,00
	Dana Darurat	0.00	0.00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00
2	**BELANJA**	**610.026.422.904,00**	**562.910.010.607,28**
	BELANJA OPERASI	**523.139.013.276,00**	**482.193.499.633,88**
	BelanjaPegawai	315.314.578.922,00	296.864.707.300,00
	Belanja Barang dan Jasa	196.685.170.464,00	174.717.529.772,88

No	URAIAN	APBD 2025	
		Anggaran (Rp)	*Realisasi (Rp)*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	Belanja Bunga	1.150.000.000,00	821.173.862,00
	Belanja Hibah	7.300.118.890,00	7.110.638.699,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.689.145.000,00	2.679.450.000,00
	BELANJA MODAL	**23.281.159.098,00**	**22.109.067.014,40**
	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.561.572.402,00	4.865.927.682,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.048.650.000,00	1.021.739.850,00
	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi	15.048.022.630,00	14.608.431.816,40
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.238.914.066,00	1.238.897.666,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.967.435.630,00**	**0**
	Belanja Tidak Terduga	1.967.435.630,00	0

No	URAIAN	APBD 2025	
		Anggaran (Rp)	*Realisasi (Rp)*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	BELANJA TRANSFER	**61.638.814.900,00**	**58.607.443.959,00**
	Belanja Bagi Hasil	1.892.817.000,00	1.118.407.131,00
	BelanjaBantuanKeuangan	59.745.997.900,00	57.489.036.828,00
	SURPLUS / DEFISIT	**(25.882.900.991,80)**	**23.958.471.030,43**
3	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**27.549.567.660,80**	**26.308.258.370,96**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.308.138.370,96	26.308.138.370,96
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.241.429.289,84	120.000,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**1.666.666.669,00**	**1.166.666.668,00**
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	1.166.666.669,00	1.166.666.668,00

No	URAIAN	APBD 2025	
		Anggaran (Rp)	*Realisasi (Rp)*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	PemberianPinjaman Daerah	500.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**25.882.900.991,80**	**25.141.591.702,96**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	**49.100.062.733,39**

Namun yang menjadi paradoksnya adalah terdapat penurunan capaian target kinerja pada Perjanjian Kinerja Wali Kota Sawahlunto tahun 2025 yaitu indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang ditargetkan sebesar 4,73 namun hanya tercapai 3,43 dengan porsentase sebesar 72,51 (Sedang) dan indikator Tingkat Kemiskinan yang ditargetkan sebesar 2,18 dan capaiannya melonjak sebesar 2,72.

Pada Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Hal ini terjadi karena beberapa faktor eksternal antara lain : adanya efisiensi anggaran pada APBD Kota Sawahlunto Tahun 2025, tingkat investasi yang relatif menurun dan secara regional, penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi ini juga berdampak hampir diseluruh wilayah kab/kota khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

Adapun pada indikator Tingkat Kemiskinan yang tidak mencapai target yang ditetapkan disebabkan oleh beberapa hal yaitu : meningkatnya indikator garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS dan juga kenaikan kebutuhan pokok akibat inflasi.

E. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

berikut disajikan data terkait seluruh realisasi fisik dan keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2025

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) APBD PERUBAHAN
KOTA SAWAH LUNTO
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2025

No	SKPD	Pagu					Realisasi												
							Keuangan										Fisik		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Total	Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		Total		Bobot	Realisasi	Tertimbang
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9=8/3*100	10	11=10/4*100	12	13=12/5*100	14	15=14/6*100	16	17=16/7*100	18=7/PT*100	19	20=19*18/100
1	DINAS PENDIDIKAN	123,500,253,766	2,307,406,468	0	0	125,807,660,234	114,230,590,815	92.49	2,117,703,218	91.78	-	-	-	-	116,348,294,033	92.48	12.82	97.49	12.5
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	146,177,404,160	1,052,448,895	0	0	147,229,853,055	134,193,834,892	91.8	914,668,314	86.91	-	-	-	-	135,108,503,206	91.77	15	91.77	13.77
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22,750,085,594	13,040,864,505	0	0	35,790,950,099	21,041,891,432	92.49	12,588,410,633	96.53	-	-	-	-	33,630,302,065	93.96	3.65	93.96	3.43
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	14,950,006,402	2,019,590,000	0	0	16,969,596,402	13,807,543,677	92.36	1,995,372,500	98.8	-	-	-	-	15,802,916,177	93.12	1.73	93.12	1.61
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	10,457,902,215	128,283,022	0	0	10,586,185,237	10,384,769,800	99.3	124,843,999	97.32	-	-	-	-	10,509,613,799	99.28	1.08	99.28	1.07
6	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8,829,058,439	12,128,000	0	0	8,841,186,439	8,008,847,249	90.71	12,110,390	99.85	-	-	-	-	8,020,957,639	90.72	0.9	90.72	0.82
7	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	14,575,962,839	48,138,980	0	0	14,624,101,819	14,239,333,776	97.69	47,557,300	98.79	-	-	-	-	14,286,891,076	97.69	1.49	97.69	1.46
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4,082,732,508	50,146,400	0	0	4,132,878,908	3,812,191,878	93.37	48,750,480	97.22	-	-	-	-	3,860,942,358	93.42	0.42	96.23	0.41
9	DINAS PERHUBUNGAN	9,941,865,841	778,500,000	0	0	10,720,365,841	9,296,989,863	93.51	775,519,370	99.62	-	-	-	-	10,072,509,233	93.96	1.09	93.96	1.03
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	8,849,068,922	65,197,000	0	0	8,914,265,922	8,609,843,665	97.3	65,150,000	99.93	-	-	-	-	8,674,993,665	97.32	0.91	97.32	0.88
11	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	5,797,403,916	0	0	0	5,797,403,916	5,355,654,655	92.38	-	-	-	-	-	-	5,355,654,655	92.38	0.59	92.38	0.55
12	DINAS KEBUDAYAAN	7,230,838,822	64,383,000	0	0	7,295,221,822	6,522,907,830	90.21	54,702,500	84.96	-	-	-	-	6,577,610,330	90.16	0.74	90.16	0.67
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5,103,138,461	10,000,000	0	0	5,113,138,461	4,187,492,670	82.06	0	0	-	-	-	-	4,187,492,670	81.9	0.52	81.90	0.43
14	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	11,290,399,799	18,998,750	0	0	11,309,398,549	10,646,112,037	94.29	17,649,000	92.9	-	-	-	-	10,663,761,037	94.29	1.15	94.29	1.09
15	SEKRETARIAT DAERAH	32,758,786,142	1,946,928,349	0	0	34,705,714,491	30,199,472,171	92.19	1,806,970,588	92.81	-	-	-	-	32,006,442,759	92.22	3.54	92.22	3.26
16	INSPEKTORAT	8,199,472,309	632,271,474	0	0	8,831,743,783	6,791,453,894	82.83	523,914,950	82.86	-	-	-	-	7,315,368,844	82.83	0.9	82.83	0.75
17	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6,230,868,293	13,452,000	0	0	6,244,320,293	5,909,739,551	94.85	12,900,000	95.9	-	-	-	-	5,922,639,551	94.85	0.64	96.64	0.61
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12,808,514,390	449,848,575	1,967,435,630	61,638,814,900	76,864,613,495	10,641,061,200	83.08	423,762,431	94.2	0	0	58,607,443,959	95.08	69,672,267,590	90.64	7.83	90.64	7.1
19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5,195,494,499	0	0	0	5,195,494,499	4,478,050,419	86.19	-	-	-	-	-	-	4,478,050,419	86.19	0.53	86.19	0.46
20	SEKRETARIAT DPRD	28,919,182,674	72,849,450	0	0	28,992,032,124	25,828,793,073	89.31	0	0	-	-	-	-	25,828,793,073	89.09	2.95	89.09	2.63
21	KECAMATAN BARANGIN	7,144,599,009	150,000,000	0	0	7,294,599,009	6,743,939,466	94.39	149,942,445	99.96	-	-	-	-	6,893,881,911	94.51	0.74	94.51	0.7
22	KECAMATAN LEMBAH SEGAR	9,080,844,976	0	0	0	9,080,844,976	8,296,482,002	91.36	-	-	-	-	-	-	8,296,482,002	91.36	0.93	91.36	0.85

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) APBD PERUBAHAN
KOTA SAWAH LUNTO
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2025

No	SKPD	Pagu					Realisasi												
							Keuangan										Fisik		
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Total	Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		Total		Bobot	Realisasi	Tertimbang
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9=8/3*100	10	11=10/4*100	12	13=12/5*100	14	15=14/6*100	16	17=16/7*100	18=7/PT*100	19	20=19*18/100
23	KECAMATAN SILUNGKANG	2,503,546,411	0	0	0	2,503,546,411	2,236,861,276	89.35	-	-	-	-	-	-	2,236,861,276	89.35	0.26	89.35	0.23
24	KECAMATAN TALAWI	2,379,298,419	5,400,000	0	0	2,384,698,419	2,058,039,688	86.5	5,383,500	99.69	-	-	-	-	2,063,423,188	86.53	0.24	86.53	0.21
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4,569,659,422	0	0	0	4,569,659,422	4,213,712,714	92.21	-	-	-	-	-	-	4,213,712,714	92.21	0.47	95.63	0.45
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,532,365,193	106,794,245	0	0	4,639,159,438	4,133,601,777	91.2	87,162,850	81.62	-	-	-	-	4,220,764,627	90.98	0.47	90.98	0.43
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5,328,343,080	259,446,760	0	0	5,587,789,840	5,055,016,617	94.87	250,983,700	96.74	-	-	-	-	5,306,000,317	94.96	0.57	100.00	0.57
Total		523,187,096,501	23,233,075,873	1,967,435,630	61,638,814,900	610,026,422,904	480,924,228,087	2468.3	22,023,458,168	1888.39	0	0	58,607,443,959	95.08	561,555,130,214	2478.17	62.16	92.45	57.93
Pencapaian		-	-	-	-	-	91.92		94.79		0		95.08		92.05		-		

Berdasarkan data diatas, rata – rata capaian seluruh perangkat daerah untuk realisisasi keuangan mencapai 92.05 persen dan realisasi fisik mencapai 92.45 persen yang dapat dikategorikan sangat tinggi untuk serapan anggarannya. Dengan capaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Wali Kota yang rata – rata juga sangat tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa capaian program dan kegiatan mengintervensi secara langsung target dan capaian Kinerja Wali Kota Sawahlunto tahun 2025.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Maksud dilaksanakannya Tugas Pembantuan ini adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dan atau pemerintahan provinsi dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, Pemerintah Pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing–masing Kementerian/Lembaga/Departemen/Direktorat Jenderal (Ditjen) melalui Kementerian Keuangan (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/ Kota yang ada di Daerah, demikian pula Pemerintah Daerah.

1. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Pada Tahun 2025 ini, Kota Sawahlunto tidak menerima Tugas Pembantuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pada Tahun 2025 ini, Kota Sawahlunto tidak menerima Tugas Pembantuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan meliputi:

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan untuk kabupaten/kota terdiri dari:

1) Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Pendidikan Dasar;
3) Pendidikan Kesetaraan/Non Formal.

Adapun penerima pelayanan dasar SPM pada pendidikan anak usia dini peserta didik yang berusia 5 sampai 6 tahun, pendidikan dasar adalah peserta didik yang berusia 7 sampai 15 tahun dan pendidikan kesetaraan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

4.1.2. Target Pencapaian

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022, ditetapkan target dan indikator penerima layanan standar pelayanan minimal urusan pendidikan untuk kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT
1	*2*	*3*	*4*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**		**Target 100% (SPM)**
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) ***Tidak Masuk Kedalam Perhitungan**	Persentase	76.7
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS	Orang	913

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT
1	*2*	*3*	*4*
	DILAYANI :		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	48.63
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	83
2 .	**Pendidikan Dasar**		
			Target 100% (SPM)
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99.06
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	97.06
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
			Jumlah Total **Yang Harus Dilayani**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8514
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	SD (2025)		
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	69.39
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	60.16
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	79.58
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74.42

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT
1	*2*	*3*	*4*
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	63.84
	SMP (2025)		
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	74.72
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	65
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73.92
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.42
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.82
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**		
			Target 100% (SPM)
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	37.3
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		
			Jumlah Total
			Yang Harus Dilayani
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	244
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)		
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	37.3

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

4.1.3. Realisasi

Realisasi penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan tahun 2025 sudah mencapai 100% hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT		TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA		98.00 %
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**				**98.84 %**
			APS Tahun N-1	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	75.53	**1.17**	**98.47 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Total Yang Terlayani	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	913	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			**-20%**	**18.84 %**
			Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				94.18 %
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	46.67	**19.600**	**95.97 %**
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	76.68	**63.200**	**92.39 %**
2 .	**Pendidikan Dasar**				**99.56 %**
			APS	**Selisih Yang**	

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT		TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
			Tahun N-1	**Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD ***Tidak Masuk Kedalam Perhitungan**	Persentase	99.58	**-0.52**	**100.52 %**
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP ***Tidak Masuk Kedalam Perhitungan**	Persentase	96.94	**0.12**	**99.88 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			**-80%**	**80.00 %**
			Jumlah Total **Yang Terlayani**	**Yang Belum** **Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8514	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			**-20%**	**19.56 %**
			Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				97.80 %
	SD (2025)				97.03 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	66.86	**25.300**	**96.35 %**
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	57.25	**29.100**	**95.16 %**
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	78.68	**0.9000**	**98.87 %**
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.42	**10.000**	**98.66 %**
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.34	**25.000**	**96.08 %**
	SMP (2025)				98.58 %
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	73.62	**11.000**	**98.53 %**
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	63.5	**15.000**	**97.69 %**

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT		TOTAL PENCAPAIAN
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	73	**0.9200**	**98.76 %**
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	71.56	**-0.1400**	**100.00 %**
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59.56	**12.600**	**97.93 %**
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**				**95.61 %**
			APS Tahun N-1	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	36.45	**0.85**	**97.72 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			**-80%**	**76.07 %**
			Jumlah Total Yang Terlayani	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	232	**12**	**95.08 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)			**-20%**	**19.54 %**
			Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI				97.72 %
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	36.45	**0.8500**	**97.72 %**

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Jika diperhatikan secara angka-angka realisasi capaian SPM Urusan pendidikan tahun 2025 sudah mencapai 100%.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah.

Target SPM Urusan Pendidikan yang telah dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto selama Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran SPM Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	URAIAN			PAGU	REALISASI	SERAPAN
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A. SPM Urusan Pendidikan						
1	**Pendidikan Dasar**	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	955.958.209	937.925.984	98,1137
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	362.125.600	333.243.000	92,0241
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	226.222.000	225.289.940	99,588
			Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan	13.781.100	10.396.300	75,4388
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.762.000	45.202.000	90,8364
			penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik	14.640.000	14.600.000	99,7268
		Total SPM Pendidikan Dasar		**1.622.488.909**	**1.566.657.224**	**96,5589**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	570.437.771	565.086.920	99,062

NO	URAIAN			PAGU	REALISASI	SERAPAN
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	277.027.120	221.192.000	79,8449
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.155.700	18.666.500	92,6115
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	74.168.500	30.985.000	41,7765
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	122.963.980	117.358.005	95,441
		Total SPM Pendidikan Menengah		**1.064.753.071**	**953.288.425**	**89,5314**
	Total Pendidikan Dasar			**2.687.241.980**	**2.519.945.649**	**93,7744**
2	**Pendidikan Kesetaraan**	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal	105361010	92833581	88,11
			Penyelenggara Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	67.315.412	63.538.547	94,3893
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	120.580.000	38.850.000	32,2193
	Total Pendidikan Kesetaraan			**293.256.422**	**195.222.128**	**66,5705**
3	**Pendidikan Anak Usia Dini**	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelengaraan Proses Belajar PAUD	38.858.200	38.098.200	98,0442

NO	URAIAN			PAGU	REALISASI	SERAPAN
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD	546.770.191	332.021.867	60,7242
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	99.590.375	37.097.496	37,2501
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	318.934.000	289.754.000	90,8508
	Total Pendidikan Anak Usia Dini			**1.004.152.766**	**696.971.563**	**69,4089**
	Total SPM Urusan Pendidikan			**3.984.651.168**	**3.412.139.340**	**85,6321**

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

4.1.5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto per Januari tahun 2026 sebanyak 58 orang. Terdiri dari ASN sebanyak 58 orang.

Tabel 4.4
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV.e	-
2	Pembina Utama Madya	IV.d	-
3	Pembina Utama Muda	IV.c	1 Orang
4	Pembina Utama TK I	IV.b	4 Orang
5	Pembina	IV.a	7 Orang
6	Penata TK.I	III.d	15 Orang
7	Penata	III.c	3Orang
8	Penata Muda TK.I	III.b	5 Orang
9	Penata Muda	III.a	3 Orang
10	Pengatur TK.I	II.d	-
11	Pengatur	II.c	2 Orang

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
12	Pengatur Muda TK.I	II.b	-
13	Pengatur Muda/ PPPK Gol.V	II.a	-
14	Juru TK I	I.d	-
15	Juru	I.c	-
16	Juru Muda TK I	I.b	-
17	Juru Muda	I.a	-
18	Ahli Pertama	IX	12 Orang
19	Pengelola	VII	4 Orang
20	Operator	V	2 Orang
	JUMLAH		**58 Orang**

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.5
Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Permasalahan
1	Data yang diambil dari dapodik tidak sesuai dengan jumlah penduduk usia tertentu yang harus dilayani sesuai dengan SPM
2	Masih adanya kecendrungan sebagian masyarakat dalam memberikan data yang tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan SPM
3	Belum Optimalnya Sebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4	Masih terbatasnya anggaran daerah untuk pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan
5	Masih terbatasnya anggaran Daerah untuk pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan
6	Masih Kurang optimalnya pelaksanaan pemenuhan layanan SPM
	SOLUSI
1	Melakukan gerakan jemput bola sehingga semua penerima layanan bisa terlayani
2	Satu Sumber Data Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar
3	Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4	Penyusun skala prioritas dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Monitoring dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Sekolah yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan Rencana Kerja Tahunan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
5	Penyusun skala prioritas dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
6	Perlunnya pembuatan inovasi untuk pencapain SPM Urusan pendidikan

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

4.2. Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan. Permenkes No 4 Tahun 2019 ini diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68 oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2019 di Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, setelah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2019.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan ini dilatarbelakangi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan. Pemerintah Kota Sawahlunto perlu menerapkan SPM Urusan Kesehatan, karena kesehatan adalah hak azasi manusia yang harus dipenuhi agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Masyarakat yang sehat merupakan modal ketangguhan suatu bangsa. Keterlibatan seluruh komponen bangsa, mencakup pemerintah, swasta, dan masyarakat dibutuhkan baik di pusat maupun daerah. Dengan menerapkan SPM Urusan Kesehatan maka masyarakat terpenuhi kebutuhan kesehatannya, masyarakat diedukasi supaya pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan meningkat sehingga dengan kesadaran, kemauan dan

kemampuan sendiri, masyarakat dapat berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten /Kota dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai standar pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Kabupaten /Kota dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100%
4	Pelayanan Kesehatan	Sesuai standar	Balita	Setiap balita mendapatkan	Cakupan pelayanan	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan

NO	JENIS LAYANAN	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	balita	pelayanan Kesehatan balita		pelayanan Kesehatan sesuai standar	Kesehatan balita sesuai standar	pelayanan Kesehatan sesuai standar [1] + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar [2] + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar [3] Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama X 100%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Sesuai standar skrining Kesehatan usia Pendidikan dasar	Anak pada usia Pendidikan dasar	Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada diwilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran Jumlah semua anak usia pendidkan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama X 100%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar Kesehatan usia produktif	Warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 Tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatran sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/ kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining Kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonrsia usia 60 tahun ke atas	Setiap warga negara uisa 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun keatas yang ada di wilayah kabupaten,kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan X 100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Sesuai standar pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Penderita Hipertensi	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia yang ≥ 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama X 100%
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan Kesehatan penderita Diabetes	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatka	Jumlah penyandang DM usia ≥ 15 tahun didalam wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun aktu satu tahun Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 X 100%

NO	JENIS LAYANAN	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN STANDAR	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Melitus		Kesehatan sesuai standar	n pelayanan kesehatan sesuai standar	tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan Kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100%
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Sesuai standar pelayanan kesehatan TBC	Orang terduga TBC	Setiap orang terduga TB mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakat)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun / Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100%

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

4.2.2. Target Pencapaian

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak

manapun. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk masyarakatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.. Berikut rincian target pencapaian SPM Urusan Kesehatan:

Tabel 4.7
Target Pencapaian SPM urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

4.2.3. Realisasi

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan sesuai standar sesuai dengan Permenkes Nomor 6 tahun 2024 dengan memberikan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dengan indikator sebagai berikut:

a. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa
Dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Dukungan Logistik Kesehatan Ibu Hamil Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	2	3	4
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Sejumlah Sasaran ibu hamil x 80%	Pencegahan tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2.	Tablet tambah darah	180 tablet x jumlah ibu hamil	Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3.	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. Tes kehamilan	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui hamil

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	2	3	4
			atau tidak
	b. Pemeriksaan HB	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui anemia atau tidak
	c. Pemeriksaan Golongan Darah	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah ibu hamil x 15%	Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
	e. Skrining triple eliminasi dengan tes cepat : ➢ Hepatitis B ➢ HIV ➢ Sifilis	Sejumlah ibu hamil	Deteksi dini hepatitis B, HIV, sifilis pada ibu hamil untuk tatalaksana pencegahan dan penularan dari ibu ke bayi
4.	Kartu ibu/ rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
5.	Buku KIA	Sesuai kebutuhan	a) Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun b) Media KIE bagi ibu, anak dan keluarga
6.	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Informasi kesehatan KIA untuk ibu, anak dan keluarga
7.	Gel USG (Untuk Puskesmas yang memiliki USG)	Sesuai kebutuhan (umumnya gel USG ukuran 250 ml untuk 15-20 pasien) 1/15 x sasaran ibu hamil	a) Membantu mendeteksi gelombang suara yang bergerak b) Mencegah terjadinya gesekan antara

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	2	3	4
			kulit dan transducer

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:
   a) Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
   b) Bidan;
   c) Perawat;
   d) Tenaga kefarmasian;
   e) Tenaga Gizi.

c. Petunjuk Teknis atau tata Cara Pemenuhan Standar
   a) Pernyataan Standar

      Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

   b) Pengertian

      Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi:
      (1) Standar kuantitas.
      (2) Standar kualitas.

   c) Mekanisme Pelaksanaan
      (1) Penetapan sasaran ibu hamil dan ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
      (2) Standar kuantitas adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan:
         (a) Satu kali pada trimester pertama
         (b) Dua kali pada trimester kedua
         (c) Tiga kali pada trimester ketiga

      Pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertamadan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah. Puskesmas yang belum melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T dan pelayanan ultrasonografi. Adapun 10 T meliputi:
   (a) Pengukuran berat badan dan tinggi badan;
   (b) Pengukuran tekanan darah;
   (c) Pengukuran lingkar lengan atas (LILA);
   (d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
   (e) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
   (f) Skrinign status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan;
   (g) Pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan;
   (h) Tes laboratorium;
   (i) Tatalaksana/penanganan kasus;
   (j) Temu wicara (konseling).

   Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil K6 sesuai standar tahun 2025 adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama.
   Capain cakupan pelayanan di dukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut:

Tabel 4.9
Pemenuhan Perlengkapan Pendukung Kesehatan Ibu Hamil Kota Sawahlunto
Tahun 2025

No	Perelengkapan Pendukung	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Terpakai	Persentase Pemakaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Vaksin tetanus difteri (Td)	92	92	100
2	Tablet Tambah Darah	132.480	132.480	100
3	Alat deteksi resiko ibu hamil : Test Kehamilan	736	736	100
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	736	736	100
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	84	84	100
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	110	110	100
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	736	736	100
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	736	736	100
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	736	736	100
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12	12	100
11	Gel USG	49	49	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Tabel 4.10
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kota Sawahlunto
Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN IBU HAMIL DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA TERSEBUT DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN PELAYANAN ANTENATAL SESUAI STANDAR DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA TERSEBUT DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Talawi	279	268	96.06
2	Kolok	94	87	92.55
3	Sei. Durian	138	135	97.83
4	K. Teleng	66	69	104.55
5	Lunto	59	43	72.88
6	Silungkang	129	134	103.88
Jumlah		**765**	**736**	**96.21**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil Kota sawahlunto tahun ini meningkat sebanyak 96.21% naik sekitar 33.81% pada tahun 2025. Adapun permasalahan yang dihadapi tahun ini adalah masih ada ibu hamil yang tidak rutin melakukan ANC sesuai jadwal, sehingga akan dilakukan tindak lanjut berupa penjaringan/ pendataan ibu hamil melalui kelas ibu hamil, pendampingan ibu hamil risti (risiko tinggi), dan sweeping ibu hamil oleh kader kesehatan. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai target SPM tersebut adalah:

a. Pendataan ibu hamil Yaitu dengan cara menjaring semua fasilitas swasta baik Rumah Sakit, Klinik, maupun Bidan Praktek Mandiri untuk dapat mengirimkan laporan sesuai yang di tentukan Dinas Kesehatan.
b. Pemeriksaan kehamilan Pemeriksaan Kehamilan di berlakukan bahwa setiap ibu hamil di Kota Blitar harus mendapatkan pelayanan ANC terpadu minimal 1 kali selama kehamilan. Selain itu Ibu hamil juga disarankan untuk dapat mengikuti program kelas ibu hamil sehingga dapat menjaring atau menskrining deteksi faktor risiko pada ibu hamil. Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto sudah melakukan komitmen bersama dengan semua faskes yang ada baik swasta

maupun pelayanan pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan ANC terpadu dan pedoman manual rujukan untuk setiap ibu hamil.

c. Pemberian Buku KIA Ibu hamil berhak mendapatkan buku KIA sebagai bahan untuk memantau perkembangan dan kesehatan janinnya sesuai dengan PMK no 97 tahun 2014. Buku KIA diberikan oleh Dinas Kesehatan.
d. Pencatatan dan pelaporan Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui Kohort, Data online.
e. Rujukan ANC jika diperlukan Rujukan ANC diberikan sesuai dengan Pedoman Manual Rujukan.
f. Kegiatan inovasi dan kegiatan pendukung:
    a) Supervisi fasilitatif dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan;
    b) Kelas ibu hamil;
    c) PMT pemulihan ibu KEK;
    d) Peningkatan kualitas kader kesehatan pendamping ibu hamil;
    e) Monitoring dan evaluasi.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan.

a. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa

    Dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.11
Dukungan Logistik Kesehatan Ibu Bersalin Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	Formulir partograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	Instrumen pemantauan persalinan
2.	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
3.	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	• Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun • Media KIE bagi ibu dan keluarganya
4.	Media KIE	Sesuaikan media dan sasaran	Pesan informasi kepada ibu, anak dan keluarga

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:
   a) Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
   b) Bidan;
   c) Perawat;
   d) Tenaga kefarmasian;
   e) Tenaga Gizi.

c. Petunjuk teknis atat tata cara pemenuhan standar
   a) Pernyataan Standar

      Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

   b) Pengertian

      Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi:
      (1) Persalinan normal;
      (2) Persalinan komplikasi

   c) Mekanisme Pelaksanaan
      (1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah Kabupaten/ Kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi

BPS ata data riil yang diyakini benar, denganmempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Standar persalinan normal adalah acuan persalinan normal (APN) sesuai standar.
   (a) Persalinan dilakukan di fasyankes
   (b) Persalinan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang terdiri dari:
      - Dokter, bidan dan perawat atau;
      - Dokter, dan 2 bidan.
   (c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan fasyankes sebagaiman dimaksud diatas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) tenaga kesehatan yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan.
   (d) Keterbatasan akses senagaimana dimaksud meliputi :
      - Kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena jarak dan / atau kondisi geografis;
      - Tidak ada tenaga medis.

(3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku pelayanan kesehatan ibu di fasyankes dasar dan rujukan.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut :

Tabel 4.12
Pemenuhan Perlengkapan Pendukung Kesehatan Ibu Bersalin Kota Sawahluntotahun 2025

NO	PERELENGKAPAN PENDUKUNG	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH TERPAKAI	PERSENTASE PEMAKAIAN (%)
1	Formulir Partograf	735	735	100
2	Kartu Ibu /rekam medis ibu	735	735	100
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	735	735	100
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12	12	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Tabel 4.13
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN IBU BERSALIN DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA TERSEBUT DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	JUMLAH IBU BERSALIN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PERSALINAN SESUAI STANDAR DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN
1	Talawi	279	267	95.70
2	Kolok	91	87	95.60
3	Sei. Durian	138	135	97.83
4	K. Teleng	66	69	104.55
5	Lunto	59	59	72.88
6	Silungkang	129	129	103.88
Jumlah		**762**	**735**	**96.46**

Sumber data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin Kota Sawahlunto tahun ini meningkat sebanyak 34.31% dari tahun lalu menjadi 96.46%. Adapun permasalahan yang dihadapi tahun ini adalah masih adanya kasus maternal abortus (keguguran), sehingga akan dilakukan tindak lanjut berupa:

a. Pendampingan oleh tim ahli (Sp.OG) dalam Pelayanan KIA (kesehatan ibu dan anak).

b. Kegawatdaruratan dan sistem rujukan, pendampingan bumil risti, bulin dan bufas oleh kader pendamping.
c. Rapat pembentukan dan evaluasi jejaring skrining layak hamil dan ANC.

Untuk mencapai target SPM tersebut sudah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

a. Pendataan ibu bersalin
b. Pelayanan persalinan
c. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA
d. Pencatatan dan pelaporan
e. Rujukan pertolongan persalinan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin:

a. Pendampingan persalinan oleh kader kesehatan
b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan
c. Penyuluhan KB pasca salin
d. Monitoring dan evaluasi

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, tempat praktek tenaga kesehatan (Praktek Bidan, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan), klinik pratama, klinik utama dan rumah sakit pemerintah maupun swasta), dan atau kunjungan rumah.

a. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa

   Dalam melakukan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, memerlukan dukungan logistic kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.14
Dukungan Logistik Kesehatan Ibu Bersalin Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (*prefilled syringe*)	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan infeksi hepatitis B
2.	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan perdarahan
3.	Salep/ tetes mata antibiotic	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan infeksi mata
4.	Formulir bayi baru baru lahir	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik bayi baru lahir
5.	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Sejumlah 3 x sasaran bayi baru lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan bayi baru lahir dengan menggunakan pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit
6.	Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)	Terintegrasi dengan ibu hamil	• Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun • Media KIE bagi ibu dan keluarganya
7.	Media promosi komunikasi informasi dan Edukasi (KIE)	Pesan kesehatan : bayi baru lahir	KIE bagi Ibu dan keluarganya

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:
   a) Dokter/ dokter spesialis Anak;
   b) Bidan;
   c) Perawat;
   d) Tenaga kefarmasian;
   e) Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku
   f) Tenaga Gizi.
   g) Kader kesehatan
c. Petunjuk teknis atat tata cara pemenuhan standar
   a) Pernyataan Standar

      Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan

bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b) Pengertian

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar, yang mencakup:

(1) Standar kuantitas
(2) Standar kualitas

c) Mekanisme Pelaksanaan

(1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah Kabupaten/Kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkanestimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
    (a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam.
    (b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari.
    (c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.
(3) Standar kualitas:
    (a) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
        i. Pemotongan dan perawatan tali pusat.
        ii. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
        iii. Injeksi vitamin K1.
        iv. Pemberian salep/tetes mata antibiotik.
        v. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0).
    (b) Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
        i. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
        ii. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
        iii. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
        iv. Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan.
        v. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut:

Tabel 4.15
Pemenuhan Perlengkapan Pendukung Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Sawahluntotahun 2025

No	Perelengkapan Pendukung	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Terpakai	Persentase Pemakaian (%)
1	Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	728	728	100
2	Vitamin K1 injeksi	728	728	100
3	Salep/tetes mata antibiotik	728	728	100
4	Formulir bayi baru lahir	728	728	100
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2.184	2.184	100
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	728	728	100
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12	12	100

Sumber data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Tabel 4.16
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN BAYI BARU LAHIR DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA TERSEBUT DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	JUMLAH BAYI BARU LAHIR USIA 0-28 HARI YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR SESUAI DENGAN STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Talawi	278	266	95.68
2	Kolok	87	85	97.70
3	Sei. Durian	138	8	95.65
4	K. Teleng	67	69	102.99
5	Lunto	55	43	78.18
6	Silungkang	130	133	102.31
Jumlah		**755**	**728**	**96.42**

Sumber data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Kota Sawahlunto tahun ini meningkat sebanyak 23.58% dari tahun lalu menjadi 96.42%. Adapun permasalahan yang dihadapi tahun ini adalah belum optimalnya pemanfaatan alat kesehatan pertolongan kegawatdaruratan pada Bayi Baru Lahir (BBL) dan masih adanya kasus abortus (keguguran) dan lahir mati, sehingga akan dilakukan tindak lanjut berupa:

1) Sosialisasi alat skrining penyakit jantung bawaan (PJB).
2) Monev Pelayanan MTBM dan MTBS di Puskesmas.
3) PSR (Pediatrician Social Responsibility)/Pendampingan Tim Ahli (Sp.A) dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Perinatal.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai target SPM tersebut adalah:

a. Pendataan bayi baru lahir.
b. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
c. Pengisian dan pemanfaatan Buku KIA
d. Pencatatan dan pelaporan.
e. Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir jika diperlukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

a. Kegiatan rutin Posyandu.
b. Kerjasama antar pekayanan faskes pemerintah dengan faskes swasta.
c. Adanya SDIDTK bayi di PAUD, TK, dan TPA meskipun masih terbatas hanya di beberapa PAUD, TK dan TPA.
d. Program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang sudah dilakukan mulai dari posyandu dan terbagi kepada PWS ILP.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

a. Monitoring dan evaluasi.
b. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 12-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan

pemerintah maupun swasta, dan UKBM upaya kesehatan bersumber daya manusia (posyandu).

a. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa

Dalam melakukan pelayanan kesehatan Balita, memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.17
Dukungan Logistik Kesehatan Balita Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Sesuai kebutuhan	Pemeriksaan perkembangan balita
2.	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan hasil pelayanan
3.	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	Media informasi dan pencatatan KIA sampai dengan umur 6 tahun
4.	Vitamin A biru	Sesuai standar 6-11 bulan	Fungsi Vitamin A: Meningkatkan daya tahan tubuh (mencegah kesakitan berulang) dan mencapai perkembangan optimal, Baik Untuk Kesehatan mata, mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan.
5.	Vitamin A merah	12-59 bulan	
6.	Vaksin imunisasi dasar: • BCG • Polio tetes • IPV (Polio suntik) • DPT-HB-Hib • Campak Rubela *) Untuk pemberian vaksin pada Bayi, Baduta dan Balita sesuai dengan jadwal	12 – 59 bulan Sesuai standar	Fungsi Vaksinasi imunisasi: Meningkatkan kekebalan tubuh.

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
	Imunisasi pada buku KIA		
7.	Vaksin imunisasi Lanjutan : anak Bawah Dua Tahun (Baduta) DPT-HB-Hib, Campak Rubela *) Untuk pemberian vaksin pada Bayi, Baduta dan Balita sesuai dengan jadwal Imunisasi pada buku KIA		
8.	Jarum suntik dan BHP		Mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan Balita.
9.	Peralatan anafilaktik		Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyuntikan.
10.	Formula terapi gizi buruk		Pengobatan bila terjadi kasus gizi buruk pada balita.

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

a) Dokter;
b) Bidan;
c) Perawat;
d) Tenaga Gizi.

Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

a) Guru PAUD;
b) Kader Kesehatan.

c. Petunjuk Teknis atau tata Cara Pemenuhan Standar

a) Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b) Pengertian

Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi:

(1) Pelayanan kesehatan balita sehat.
(2) Pelayanan kesehatan balita sakit.

c) Mekanisme Pelaksanaan

(1) Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak, meliputi:

Pelayanan Kesehatan balita usia 0-11 bulan:

(a) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
(b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
(c) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
(d) Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun.
(e) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
(f) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Pelayanan Kesehatan balita usia 12-23 bulan:

(a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
(b) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
(c) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
(d) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
(e) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
(f) Pemberian imunisasi lanjutan anak Baduta.

Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan:

(a) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).

(b) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
(c) Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun.
(d) Pemantauan perkembangan minimal 1 kali/ tahun.
(e) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
(f) Edukasi dan informasi.

(3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut:

Tabel 4.18
Pemenuhan Perlengkapan Pendukung Kesehatan Balita Kota Sawahlunto tahun 2025

NO	PERELENGKAPAN PENDUKUNG	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH TERPAKAI	PERSENTASE PEMAKAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	18.635	18.635	100
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	11.181	11.181	100
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	3.727	3.727	100
4	Vitamin A Biru	586	586	100
5	Vitamin A Merah	3.141	3.141	100
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	195	195	100
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio tetes	98	98	100
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	147	147	100
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hib	147	147	100
10	Vaksin imunisasi dasar: CampakRubella	147	147	100
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT-HB-Hib lanjutan	587	587	100
12	Vaksin imunisasi lanjutan :	587	587	100

NO	PERELENGKAPAN PENDUKUNG	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH TERPAKAI	PERSENTASE PEMAKAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	CampakRubella lanjutan			
13	Jarum Suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	3.800	3.800	100
14	Peralatan Anafilaktik	12	12	100
15	Formula terapi gizi buruk	1	1	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Tabel 4.19
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN BALITA USIA 12-59 BULAN DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA TERSEBUT PADA KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	JUMLAH BALITA USIA 12-23 BULAN YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR 1 + JUMLAH BALITA USIA 24-35 BULAN MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR 2 + BALITA USIA 36-59 BULAN MENDAPAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Talawi	1.403	1.296	92.37
2	Kolok	488	474	97.13
3	Sei. Durian	754	650	86.21
4	K. Teleng	415	399	96.14
5	Lunto	267	254	95.13
6	Silungkang	749	654	87.32
Jumlah		**4.076**	**3.727**	**91.44**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Cakupan pelayanan kesehatan balita Kota Sawahlunto tahun ini meningkat 1.66% menjadi 91.44%. Adapun permasalahan yang dihadapi tahun ini adalah belum rutinnya pelaporan dari lembaga PAUD dan TK/RA, sehingga akan dilakukan tindak lanjut berupa advokasi dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan selaku leading di Urusan pendidikan, agar menerbitkan kebijakan terkait pelaporan SDIDTK.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

a. Integrasi Layanan Primer
b. Kelas Ibu balita
c. Kegiatan rutin posyandu
d. Kunjungan UKS untuk anak prasekolah yang masih berusia balita.

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.

a. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa
b. Dalam melakukan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.20
Dukungan Logistik Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kota Sawahlunto Tahun 2025

No	Barang	Jumlah	Fungsi
1.	Form pencatatan/ buku rapor kesehatanku	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/ pesantren	• Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan; dan • Media KIE
2.	Form Pencatatan/ buku pemantauan kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/ LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja	• Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dan • Media KIE
3.	Kuesioner skrining kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	• Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar
4.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/	• Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan ke sekolah/ madrasah/ pesantren • pencatatan dan pelaporan

No	Barang	Jumlah	Fungsi
		madrasah/ pesantren	
5.	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas	• Umpan balik hasil skrining/penjaringan kesehatan di panti/ LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja • Pencatatan dan pelaporan
6.	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota	Pencegahan anemia pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah
7.	• Alat pemeriksaan Hb • Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat	• Untuk mengetahui status anemia pada remaja putri kelas 7, dilakukan pada saat penjaringan • Bila ditemukan anemia, dilakukan rujukan ke fasyankes untuk intervensi sesuai dengan tata laksana.
8.	Media promosi kesehatan	Media khusus remaja sehat	Pesan: kesehatan remaja
9.	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara.	Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit Campak, Rubela, Difteri dan Tetanus

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto

c. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

a) Dokter/ dokter gigi;
b) Bidan;
c) Perawat;
d) Tenaga Gizi.
e) Tenaga Kefarmasian;
f) Tenaga Kesehatan Masyarakat.

Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

a) Guru;
b) Kader Kesehatan/ dokter kecil/ *peer conselor*

d. Petunjuk Teknis atau tata Cara Pemenuhan Standar

a) Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 hingga Mei 2024).

b) Pengertian

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi pelayanan:

(1) Skrining kesehatan.
(2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan.
Keterangan: Dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.
(3) Pemberian imunisasi Campak Rubela, DT, Td pada BIAS sesuai jadwal dan tingkat pendidikan siswa atau usia yang setara.

c) Mekanisme Pelaksanaan

(1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA,

Posyandu remaja dan lainnya di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Skrining kesehatan

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

(a) Penilaian status gizi.
(b) Penilaian tanda vital.
(c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
(d) Penilaian ketajaman indera.
(e) Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7.

(3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

(a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan.
(b) Melakukan rujukan jika diperlukan.
(c) Memberikan penyuluhan kesehatan.

(4) Pemberian imunisasi pada pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) meliputi:

(a) Pemberian imunisasi Campak Rubela untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara.
(b) Pemberian imunisasi DT untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara.
(c) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 2 SD atau usia yang setara.
(d) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 5 SD atau usia yang setara.

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut:

Tabel 4.21
Pemenuhan Perlengkapan Pendukung Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	PERELENGKAPAN PENDUKUNG	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH TERPAKAI	PERSENTASE PEMAKAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	9.990	9.990	100
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	9.990	9.990	100
3	Kuesioner skrining kesehatan	9.990	9.990	100
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	45	45	100
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	45	45	100
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	83.920	83.920	100
7	Alat pemeriksaan Hb	18	18	100
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	21	21	100
9	Media promosi kesehatan	8	8	100
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	536	536	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Tabel 4.22
Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN SEMUA ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR YANG ADA DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA TERSEBUT DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN AJARAN YANG SAMA	JUMLAH ANAK USIA PENDIDIKAN DASAR YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR YANG ADA DI WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN AJARAN	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Talawi	3.138	3.138	100
2	Kolok	856	856	100
3	Sei. Durian	2.357	2.357	100
4	K. Teleng	1.212	1.212	100
5	Lunto	719	719	100
6	Silungkang	1.708	1.708	100
Jumlah		**9.990**	**9.990**	**100**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sudah dilakukan sesuai standar dimana pencapaian tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kota adalah semua peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 9 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kota. Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjaringan kesehatan terhadap murid yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter kecil. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu;

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

a. Adanya Komitmen pemerintah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal

b. Pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan beserta Dinas terkait lainya (Dinas Pendidikan dan Kemenag).
c. Adanya SKB 4 Menteri, yaitu Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan, Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Agama untuk pelaksanaan koordinasi lintas sektor.
d. Adanya dukungan pendanaan yang mencukupi untuk pelaksanaan dan monev kegiatan screening.

6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

a. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa dalam melakukan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif, memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.23
Dukungan Logistik Kesehatan Pada Usia Produktif Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	Pedoman dan media KIE	Minimal 5 jenis di setiap fasyankes dan UKBM dan minimal terdiri dari: a. 1 (satu) pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. b. 1 (satu) media KIE tentang penyakit menular. c. 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular. d. 1 (satu) media KIE tentang pelayanan kesehatan catin/Pasangan Usia Subur (PUS) dan Keluarga Berencana (KB).	Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar dan sebagai media untuk memberikan edukasi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
		e. 1 (satu) Pedoman Pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	
2.	a. Alat dalam melakukan skrining: - alat ukur berat badan; - alat ukur tinggi badan; - alat ukur lingkar perut; - tensimeter; - glukometer; - alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA); - alat pemeriksaan Hb; - kit opthalmologi komunitas; - kuesioner PUMA (Deteksi Dini PPOK); - alat IVA tes terdiri dari • spekulum cocor bebek; • korentang/ tampon tang dalam tempat; • pinset anatomis; • lampu sorot; b. Alat Pelayanan KB: - set pemasangan dan pencabutan AKDR;	Sesuai dengan jumlah tempat pelaksanaan kegiatan skrining dan atau sesuai dengan kebutuhan	Melakukan skrining kesehatan, pelayanan KB

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
	- set pemasangan dan pencabutan implan; - vasektomi set.		
3.	Bahan medis habis pakai 1) dalam melakukan skrining: - tes strip gula darah, - lancet, - kapas alkohol - strip Hb dan reagen Hb 2) untuk pemeriksaan IVA: - lidi kapas dalam wadah, - desinfektan (alkohol 70%), - larutan asam cuka (asam asetat) dengan kepekatan 3 5%. 3) untuk 3) Pelayanan KB: - alat kontrasepsi (kondom, pil, suntik, alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implan	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan skrining kesehatan
4.	Formulir pencatatan dan pelaporan/matrik laporan Aplikasi	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
	Sehat Indonesiaku (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif		
5.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 vial x sejumlah sasaran Wanita Usia Subur (WUS) 15-39 tahun/8 x 80% status imunisasi T WUS / 8	Pencegahan Tetanus pada WUS

Sumber data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

a) Dokter;
b) Bidan;
c) Perawat;
d) Tenaga Gizi;
e) Tenaga Kesehatan Masyarakat.

Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu.

c. Petunjuk Teknis atau tata Cara Pemenuhan Standar

a) Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining serta pelayanan kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun, di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b) Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi:

(1) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
(2) skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin;

(3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan

(4) pelayanan KB.

c) Mekanisme Pelaksanaan

(1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di fasyankes, UKBM, dan/atau KUA/lembaga agama/rumah ibadah.

(3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan calon pengantin meliputi:

(a) Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut.

(b) Skrining PPOK untuk usia ≥40 tahun.

(c) Pengukuran tekanan darah.

(d) Pemeriksaan gula darah untuk:

i. usia 40 tahun ke atas;

ii. usia 15 tahun sampai <40 tahun dengan masalah obesitas dan/ atau tekanan darah tinggi dan/ atau dengan riwayat keluarga DM

iii. calon pengantin, jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

(e) Pengukuran LILA (tambahan bagi calon pengantin).

(f) Pemeriksaan Hb (tambahan bagi calon pengantin).

(g) Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

(h) Anamnesa perilaku berisiko.

(i) Pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran.

(j) Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran perempuan usia 30-50 tahun yang sudah kontak

seksual dilakukan 3 tahun sekali atau kurang dari 3 tahun bila dirasakan ataupun ditemukan keluhan dan kelainan).

(k) Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa.

(l) Status imunisasi TT bagi calon pengantin.

(m) Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining. Status imunisasi Tetanus adalah kegiatan skrining yang ditujukan pada WUS minimal 1 kali dalam setahun untuk menentukan status T dan memberikan imunisasi Td (bila diperlukan) kepada WUS tersebut berdasarkan hasil skrining status imunisasi T nya

(n) Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T.

(o) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi:

i. Melakukan rujukan jika diperlukan.

ii. Memberikan penyuluhan/konseling kesehatan. Keterangan:

- Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.
- PUS 4T adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang istrinya berusia antara 15 49 tahun dan mempunyai kondisi 4T (usia 35 tahun).

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut:

Tabel 4.24
Pemenuhan Perlengkapan Pendukung Kesehatan Pada Usia Produktif
Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	PERELENGKAPAN PENDUKUNG	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH TERPAKAI	PERSENTASE PEMAKAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Media promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	14	14	100
2	Alat :Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LiLA)	20	20	100
3	Alat : Tensimeter	47	47	100
4	Alat : Glukometer	22	22	100
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	17	17	100
6	Alat : Tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol	489	489	100
7	Alat : KIT IVA Tes	6	6	100
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	733	733	100
9	Kit Opthalmologi Komunitas	6	6	100
10	Kuosioner PUMA	73.238	73.238	100
11	Alat Pelayanan KB			100
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	7	7	100
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	60	60	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Tabel 4.25
Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia produktif
Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN ORANG USIA 15-59 TAHUN DI KAB/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	JUMLAH ORANG USIA 15-59 TAHUN DI KAB/KOTA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SKRINING KESEHATANSESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Talawi	12.556	11.805	94.02
2	Kolok	4.514	4.514	100
3	Sei. Durian	7.727	7.187	93.01
4	K. Teleng	2.564	4.202	163.88
5	Lunto	2.588	2.562	99.00
6	Silungkang	6.670	6.349	95.19
Jumlah		**36.619**	**36.619**	**100**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif meningkat dari tahun 2024 sebesar 14.87% menjadi 100%. Adapun peningkatan ini didukung dengan kegiatan gerakan masyarakat yang dilakukan melalui event-event kota serta kegiatan BUMN untuk melakukan penjaringan kesehatan pada usia produktif ini.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai target SPM tersebut adalah:

a. Skrining faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku
b. Konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku
c. Pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana (kader) Posbindu PTM
d. Penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM)
e. Pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web
f. Pelayanan rujukan kasus ke Faskes Tingkat Pertama
g. Pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM
h. Koordinasi dan bimbingan teknis petugas PTM

i. Monitoring dan evaluasi

Rencana tindak lanjut untuk mencapai target pelayanan kesehatan pada usia produktif adalah peningkatan skrining kesehatan usia produktif melalui kegiatan Posbindu di wilayah maupun di perkantoran.

7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

a. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa dalam melakukan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut, memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.26
Dukungan Logistik Kesehatan Pada Usia Lanjut Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	Alat pemeriksaan dini: a. alat ukur berat badan b. alat ukur tinggi badan c. alat ukur lingkar perut dan lingkar lengan atas d. Tensimeter e. alat pemeriksaan gula darah f. alat pemeriksaan kolesterol	Sesuai jumlah tempat pelaksanaan atau sesuai kebutuhan	Melakukan skrining kesehatan usia lanjut
	Bahan medis habis pakai		
	a. Strip uji pemeriksaan: • Gula darah • Kolesterol b. Lancet c. Kapas alkohol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Melakukan skrining kesehatan usia lanjut
2.	Instrumen Skrining Sederhana •	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut	Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥60 tahun)

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
	Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Lansia Activity Daily Living (ADL) Barthel	(≥ 60 tahun)	meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif, tingkat kemandirian, nutrisi, mobilitas, gangguan pendengaran, dan penglihatan pada usia lanjut
3.	Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya (ASIK, e kohort)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) yang belum mendapatkan buku kesehatan Lansia	Media informasi dan pencatatan hasil pemeriksaan kesehtan usia lanjut (≥ 60 tahun)
4.	Media KIE	Sesuai media dan sasaran	Informasi kesehatan lanjut

Sumber data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

a) Dokter;
b) Bidan;
c) Perawat;
d) Tenaga Gizi;
e) Tenaga Kesehatan Masyarakat.

Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu.

c. Petunjuk Teknis atau tata Cara Pemenuhan Standar

a) Pernyataan Standar

Usia Setiap warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b) Pengertian Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi:
   (1) edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan
   (2) skrining faktor risiko pada usia lanjut.

c) Mekanisme Pelaksanaan:

(1) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di fasyankes dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.

(3) Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun meliputi:

Pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lingkar lengan atas;

(a) Pengukuran tekanan darah;
(b) Pemeriksaan gula darah;
(c) Pemeriksaan kolesterol;
(d) Pemeriksaan Skrining Lansia Sederhana;
(e) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan
(f) Anamnesis perilaku berisiko.

(4) Tindaklanjut hasil skrining faktor risiko pada usia lanjut meliputi:

(a) Melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hasil pemeriksaan asuhan terpadu lansia;
(b) Melakukan rujukan jika diperlukan; dan
(c) Memberikan penyuluhan kesehatan.

Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut:

Tabel 4.27
Pemenuhan Perlengkapan Pendukung Kesehatan Pada Usia Lanjut
Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	PERELENGKAPAN PENDUKUNG	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH TERPAKAI	PERSENTASE PEMAKAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	50	50	100
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	22	22	100

NO	PERELENGKAPAN PENDUKUNG	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH TERPAKAI	PERSENTASE PEMAKAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
3	Alat pemeriksaan kolesterol	22	22	100
4	Bahan medis habis pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	103	103	100
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	23.019	23.019	100
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	7.673	7.673	100
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	12	12	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Tabel 4.28
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN SEMUA WARGA NEGARA BERUSIA 60 TAHUN ATAU LEBIH YANG ADA DISUATU WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	JUMLAH WARGA NEGARA BERUSIA 60 TAHUN ATAU LEBIH YANG MENDAPATKAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR MINIMAL 1 KALI YANG ADA DISUATU WILAYAH KERJA KAB/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Talawi	2.298	2298	100
2	Kolok	1.150	1.117	97.13
3	Sei. Durian	1.631	1.631	100
4	K. Teleng	971	971	100
5	Lunto	591	591	100
6	Silungkang	1.032	1.065	103.20

Jumlah	**7.673**	**7.673**	**100**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Kota Sawahlunto tahun ini meningkat sebanyak 0.82 % dari tahun lalu menjadi 100%.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk pencapaian indikator SPM ini adalah:

a. Posyandu lansia;
b. Penyuluhan tentang kesehatan pada usia lanjut;
c. Monitoring dan evaluasi.

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

a. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa dalam melakukan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi, memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.29
Dukungan Logistik Kesehatan Pada Penderita Hipertensi Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE	Minimal 2	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2.	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah
3.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
4.	Media promosi kesehatan	Sesuai kebutuhan	Peningkatan pengetahuan masyarakat

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:
   a) Dokter;

b) Bidan;
c) Perawat;
d) Tenaga gizi;
e) Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
f) Tenaga kefarmasian;
g) Tenaga kesehatan masyarakat.

c. Petunjuk Teknis atau tata Cara Pemenuhan Standar

a) Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b) Pengertian

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi:

(1) Pengukuran tekanan darah
(2) Pelayanan edukasi non farmakologi Pelayanan farmakologi Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan
(3) Pelayanan farmakologi

c) Mekanisme Pelaksanaan

(1) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
(2) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
    (a) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.
    (b) Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi.
    (c) Melakukan rujukan jika diperlukan.

    Keterangan: Tekanan Darah Sistolik (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi non farmakologi dan farmakologi.

Tabel 4.30
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI USIA ≥ 15 TAHUN YANG BERADA DIDALAM WILAYAH KERJANYA BERDASARKAN ANGKA PREVALENSI KAB/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	JUMLAH PENDERITA HIPERTENSI USIA ≥ 15 TAHUN YANG BERADA DIDALAM WILAYAH KERJANYA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Talawi	2.815	2.636	93.64
2	Kolok	1.183	1.085	91.72
3	Sei. Durian	1.568	1.364	86.99
4	K. Teleng	692	811	117.19
5	Lunto	500	470	94.00
6	Silungkang	1.070	1.053	98.41
Jumlah		**7.828**	**7.419**	**94.84**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi mengalami peningkatan sebesar 47.92% menjadi 94.84%. Adapun permasalahan yang dihadapi tahun ini adalah pelaporan jejaring belum rutin sehingga pelaporan PTM harus terus dipantau dan diingatkan, sehingga akan dilakukan tindak lanjut berupa meningkatkan koordinasi jejaring pengendalian PTM (penyakit tidak menular) dengan lintas sektor dan lintas program, kegiatan Pembinaan pencatatan dan pelaporan PTM, dan optimalisasi RME (rekam medik elektronik) dalam pengisian data sesuai Definisi Operasional (DO) Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai target SPM tersebut adalah:

a. Pendataan penderita hipertensi menurut wilayah kerja FKTP
b. Melakukan skrining faktor risiko hipertensi untuk seluruh pasien di FKTP
c. Melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar, berupa edukasi tentang diet makanan dan aktivitas fisik, serta terapi farmakologi
d. Melakukan rujukan ke FKRTL untuk pencegahan komplikasi

e. Penyediaan peralatan kesehatan hipertensi
f. Penyediaan obat hipertensi
g. Pencatatan dan pelaporan
h. Monitoring dan evaluasi

Rencana tindak lanjut untuk mencapai target pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi adalah:

a. Memperkuat kegiatan deteksi dini hipertensi secara aktif dengan melakukan skrining pada kegiatan Posbindu baik di wilayah maupun di perkantoran
b. Peningkatan program pengobatan hipertensi dengan program prolanis di Puskesmas
c. Peningkatan Program Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa dalam melakukan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus, memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.31
Dukungan Logistik Kesehatan Pada Penderita Hipertensi Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	a. Alat pemantau kadar gula dalam darah • Fotometer; atau • Glukometer b. BMHP gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah • Reagen glukosa; atau • Strip tes gula darah • Kapas alkohol	Minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan Sesuai jumlah sasaran	Melakukan pemeriksaan gula darah

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
	• Lancet		
2.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM, ASIK, Simpus	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
3.	Pedoman dan media KIE	Minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: a. 1 (satu) Panduan Praktik Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; b. 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan c. 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

a. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:
   a) Dokter;
   b) Bidan;
   c) Perawat;
   d) Tenaga kefarmasian;
   e) Tenaga kesehatan masyarakat;
   f) Tenaga Gizi;
   g) Teknisi Medis (ATLM).

b. Petunjuk Teknis atau tata Cara Pemenuhan Standar
   a) Pernyataan Standar

      Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan

kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b) Pengertian Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes melitus sesuai standar yang meliputi:
   (1) Pemeriksaan klinis;
   (2) Pemeriksaan penunjang;
   (3) Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat);
   (4) Terapi farmakologi.
c) Mekanisme Pelaksanaan
   (1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
   (2) Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
      (a) Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.
      (b) Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes.
      (c) Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat).
      (d) Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien.
      (e) Melakukan rujukan jika diperlukan.

      Capaian cakupan pelayanan didukung dengan pemenuhan perlengkapan pendukung sebagai berikut:

Tabel 4.32
Pemenuhan Perlengkapan Pendukung Kesehatan Pada Penderita Hipertensi Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	PERELENGKAPAN PENDUKUNG	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH TERPAKAI	PERSENTASE PEMAKAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Obat Diabetes Melitus	11.270	11.270	100
2	Fotometer atau Glukometer	6	6	100
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	16	16	100
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	7	7	100
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	18	18	100

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Tabel 4.33
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN ESTIMASI PENDERITA DIABETES MELLITUS USIA ≥ 15 TAHUN YANG BERADA DIDALAM WILAYAH KERJANYA BERDASARKAN ANGKA PREVALENSI KAB/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	JUMLAH PENDERITA DIABETES MELLITUS USIA ≥ 15 TAHUN DI DALAM WILAYAH KERJANYA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELLITUS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Talawi	370	370	100
2	Kolok	119	123	103.36
3	Sei. Durian	278	278	100
4	K. Teleng	136	136	100
5	Lunto	132	131	99.24
6	Silungkang	157	154	98.09
Jumlah		**1.192**	**1.192**	**100**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus (DM) Kota Sawahlunto tahun 2025 mencapai target. Adapun permasalahan yang dihadapi tahun ini adalah pelaporan jejaring belum rutin sehingga pelaporan PTM harus terus dipantau dan diingatkan, sehingga akan dilakukan tindak lanjut berupa Meningkatkan koordinasi jejaring pengendalian PTM (penyakit tidak menular) dengan lintas sektor dan lintas program, Perbaikan format pelaporan sesuai kemenkes agar data yang dibutuhkan tersedia di SIMRS berupa kegiatan pembinaan pencatatan dan pelaporan PTM dan optimalisasi RME (rekam medik elektronik) dalam pengisian data sesuai Definisi Operasional (DO) Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes melitus. Rencana aksi yang dibuat secara bertahap untuk bisa menjangkau seluruh penyandang DM di wilayahnya dan mengupayakan agar semua penyandang DM tersebut memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar adalah:

a. Melakukan pendataan penderita DM menurut wilayah kerja FKTP.
b. Melakukan skrining faktor risiko DM untuk seluruh pasien di FKTP dan melalui Posbindu di wilayah kerja maupun di perkantoran.

10) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

a. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa dalam melakukan pelayanan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai jiwa standar, memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.34
Dukungan Logistik Kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai jiwa standar Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik	Pedoman penggolongan gejala klinis untuk menentukan diagnosis gangguan jiwa berat (psikotik akut dan skizofrenia)
2.	Penyediaan psikofarmaka	Sesuai kebutuhan	pengobatan/ medikasi
3.	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau melalui aplikasi	Sesuai kebutuhan	Instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver
4.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media komunikasi, informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:
   a) Tenaga Medis;
   b) Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di Urusan kesehatan jiwa (contoh; psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih);
   c) Tenaga profesional lainnya;
   d) Tenaga lain yang terlatih di Urusan kesehatan jiwa.
c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar.
   a) Pernyataan Standar

      Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya (contoh : pemasungan) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
   b) Pengertian

      Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi:
      (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa;
      (2) Edukasi; dan Tata laksana;.
      (3) Mekanisme Pelaksanaan.
   c) Mekanisme Pelaksanaan
      (1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Jika pada 2 (dua) tahun berturut-turut telah dilakukan upaya maksimal dan tidak ditemukan ODGJ berat sejumlah sasaran berdasarkan data RISKESDAS 2018 maka dengan justifikasi yang kuat dan didukung dengan data epidemiologis yang sahih kepala daerah dapat menetapkan target capaian melalui surat ketetapan.
      (2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:

(a) Pemeriksaan status mental
(b) Wawancara

(3) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluargacaregiver.
(4) Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi.
(5) Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat.

Tabel 4.35
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN ODGJ BERAT BERDASARKAN PROYEKSI DI WILAYAH KERJA KAB/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	JUMLAH ODGJ BERAT DI WILAYAH KERJA KAB/KOTA YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA SESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Talawi	60	60	100
2	Kolok	18	18	100
3	Sei. Durian	38	38	100
4	K. Teleng	21	21	100
5	Lunto	19	19	100
6	Silungkang	45	45	100
Jumlah		**201**	**201**	**100**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Pencapaian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat Kota Sawahlunto tahun ini mencapai target, tetapi Kota Sawahlunto masih menghadapi permasalahan yaitu pencatatan dan pelaporan di web SIMKESWA belum optimal, belum optimalnya dukungan keluarga dan lingkungan terhadap penderita ODGJ, sehingga akan dilakukan tindak lanjut berupa:

a. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan skrining SRQ pada usia ≥15 tahun dalam aplikasi SIMKESWA.
b. Orientasi Kesehatan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan.
c. Pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa.

d. Optimalisasi kerjasama tim TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat).
e. Adanya tindak lanjut dari pemeriksaan SRQ untuk deteksi dini masalah kesehatan jiwa.
f. Layanan Kesehatan Jiwa oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mencapai target SPM tersebut adalah:

a. Pos Kesehatan Jiwa
b. Peningkatan kualitas kader jiwa
c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan jiwa.
d. Monitoring dan evaluasi.

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Setiap orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.

a. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa dalam melakukan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis, memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.36
Dukungan Logistik Kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai jiwa standar Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang Tuberkulosis (TBC)
2.	Reagen Ziehl Neelsen (ZN) TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC
3.	Masker bedah dan masker N95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC dan jumlah SDMK	Pencegahan penularan TBC
4.	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil Emersi, Ether Alkohol)	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
5.	Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
6.	Kartrid tes cepat molekuler	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC
7.	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan
8.	Pedoman/standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar
9.	Tuberkulin	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

a) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru;
b) Perawat;
c) Tenaga kefarmasian;
d) Tenaga kesehatan masyarakat;
e) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)**;**
f) Ragiografer**.**

Kader kesehatan

c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a) Pernyataan Standar

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b) Pengertian

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar, yang meliputi:

(1) Pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda;
(2) Pemeriksaan penunjang; dan
(3) Edukasi.

c) Mekanisme Pelaksanaan

(1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan kontak erat maupun kontak serumah dengan penderita TBC yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target (perkiraan) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

(2) Pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya serta penemuan secara aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan kontak skrining secara masal terutama pada kelompok rentan dan berisiko dan skrining pada kondisi situasi khusus.

(3) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yaitu dengan pemeriksaan gejala dan tanda.

(4) Pemeriksaan penunjang terduga TBC diantaranya menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis, atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku.

(5) Pemeriksaan penunjang diutamakan menggunakan pemeriksaan TCM.

(6) Bagi fasyankes yang belum atau tidak memiliki alat TCM, harus merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke fasyankes yang mempunyai alat TCM melalui transportasi spesimen sesuai dengan pengaturan jejaring laboratorium TCM oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

(7) Jika terdapat kesulitan mengakses layanan TCM, pemeriksaan terduga TBC dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan mikroskopis.

(8) Pemeriksaan radiologis dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan jika hasil pemeriksaan TCM negatif.

(9) Biaya transportasi spesimen dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau bersumber dari anggaran lain yang sah.

(10) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.

(11) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Tabel 4.37
Cakupam Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis
Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN ORANG YANG TERDUGA TBC DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	JUMLAH ORANG TERDUGA TBC YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN	PELAYANAN KESEHATAN DENGAN TUBERKULOSIS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Talawi	575	575	100
2	Kolok	232	210	90.52
3	Sei. Durian	292	292	100
4	K. Teleng	177	182	102.82
5	Lunto	105	105	100
6	Silungkang	205	267	106.8
Jumlah		**1.631**	**1.631**	**100**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Capaian pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis Kota Sawahlunto tahun 2025 sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan yang dihadapi tahun ini adalah pencatatan dan pelaporan di SITB oleh Faskes sering terlambat dan tidak semua dicatat, belum semua Faskes (DPM) yang berjejaring dengan layanan TBC, sehingga akan dilakukan tindak lanjut berupa monev capor TBC untuk memastikan seluruh petugas Faskes melakukan pelaporan di SITB secara ontime dan Melakukan koordinasi dengan faskes jejaring wilayah DPM untuk menjangkau pelayanan TBC.

12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

a. Standar Jumlah barang dan Kualitas Barang dan / atau Jasa dalam melakukan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV), memerlukan dukungan logistik kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.38
Dukungan Logistik Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	*2*	*3*	*4*
1.	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV/AIDS
2.	Tes Cepat HIV (RDT) pertama)	Sesuai kebutuhan	Deteksi dini (Skrining) HIV
3.	Bahan medis habis pakai - Handschoen - Alkohol swab - Plester - Lancet/jarum steril - Jarum+spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai.	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena
4.	- Alat tulis - Rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasyankes pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

Tenaga Kesehatan :

a) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin;
b) Perawat;
c) Bidan;
d) Ahli Teknologi LABORATORIUM MEDIK (ATLM);
e) Tenaga kesehatan masyarakat.

Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu**:**

a) Pendamping

b) Penjangkauan

c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a) Pernyataan standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b) Pengertian

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar, yang meliputi:

(1) edukasi perilaku berisiko
(2) skrining

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

(1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
(2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC.
(3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS.
(4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.
(5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual).
(6) Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.

(7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.

(8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

d. Mekanisme Pelaksanaan

a) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, penasun, WBP, dan ibu hamil).

b) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.

c) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.

d) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Tabel 4.39
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH SASARAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV DI KAB/KOTA DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN YANG SAMA	JUMLAH ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR DALAM KURUN WAKTU SATU TAHUN	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Talawi	619	306	49.43
2	Kolok	486	423	87.04
3	Sei. Durian	359	285	79.39
4	K. Teleng	161	85	52.80
5	Lunto	83	60	72.29
6	Silungkang	288	127	44.10
Jumlah		**1.996**	**1.286**	**64.43**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

Capaian cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 33.81% menjadi 64.43%.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk mendukung penerapan SPM Urusan kesehatan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.40
Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2025

NO	INDIKATOR SPM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	377.967.000	350.962.000	92.86
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	2.803.880	0	0
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	3.860.000	1.220.820	31.63
4	Pelayanan kesehatan balita	9.099.780	2.440.890	26.82
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	96.734.000	68.900.000	71.23
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	7.669.980	3.055.800	39.84
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	30.669.980	30.469.340	99.35
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	7.219.800	0	0
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	3.605.740	2.757.240	76.47
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	101.727.880	71.730.000	70.51
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	108.309.100	76.524.150	70.65
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	34.549.200	3.599.760	70.42

NO	INDIKATOR SPM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
13	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	38.600.000	38.600.000	100
14	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	231.399.977	211.456.000	91.38
	Total	**1.054.216.204**	**861.716.000**	**81.74**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

4.2.5 Dukungan Personil

Tabel 4.41
Dukungan Personil Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH TENAGA
1	*2*	*3*
A.	Pejabat struktural 1. Eselon II,III,IV	11 orang
B.	Pejabat Fungsional	
	1. Dokter	27 orang
	2. Dokter Gigi	11 orang
	3. Bidan	133 orang
	4. Perawat	112 orang
	5. Perawat Gigi	5 orang
	6. Apoteker	7 orang
	7. Asisten Apoteker	16 orang
	8. Nutrisionis	10 orang
	9. Pranata Laboratorium	7 orang
	10. Sanitarian	11 orang
	11. Perekam medis	8 orang
	12. Penyuluh Kesehatan Masyarakat	19 orang
	13. Administrator Kesehatan	23 orang

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH TENAGA
1	*2*	*3*
	14. Epidemiologi Kesehatan	1 orang
	15. Pembimbing Kesehatan Kerja 16. Fisioterapi	2 orang 5 orang
C.	Kontrak Daerah/SKPD/ Nusantara Sehat/Fungsional Umum/Outsourcing	
	1. Dokter	1 orang
	2. Pranata Laboratorium	1 orang
	3. Terapis gigi Mulut	2 orang
	4. Operator Layanan Operasional	28 orang
	5. Penata Layanan Operasional	1 orang
	6. Pengelola Layanan Operasional	1 orang
	7. Pranata Komputer	7 orang
JUMLAH		**449 Orang**

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.42
Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Permasalahan
1	Pengumpulan data untuk mengevaluasi kegiatan masih belum optimal terutama sumber data yang berasal dari pelayanan kesehatan swasta maupun pelayanan kesehatan lain yang berada di Kota Sawahlunto dalam ketepatan waktu laporan.
2	Kesadaran ibu hamil memeriksakan ANC masih kurang, dan data bumil yang melakukan ANC di dokter praktek swasta belum bisa terakses oleh bidan wilayah.
3	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan rutin penyakit tidak menular pada usia produktif.
4	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan gejala yang muncul terkait penyakit hipertensi dan diabetes melitus.
5	Kesadaran masyarakat khususnya orang tua dalam

No	Permasalahan
	melakukan pemeriksaan bayi serta tumbuh-kembang balita yang masih kurang.
6	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang gejala TBC sehingga cenderung tidak berobat dan menganggapnya hal yang biasa sehingga akan berdampak pada hasil capaian.
7	Kurangnya koordinasi antar wilayah terkait pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang berdomisili di luar wilayah kerja Kota Sawahlunto.
	SOLUSI
1	Untuk mengoptimalkan pengumpulan data perlu adanya peningkatan koordinasi antar sarana pelayanan kesehatan dalam mengumpulkan hasil kegiatan pelayanannya melalui laporan tepat waktu serta meningkatkan pemahaman indikator SPM Urusan kesehatan di semua sarana kesehatan yang ada di Kota Sawahlunto. Membangun Sistem Informasi Kesehatan dengan pendekatan teknologi (bukan manusia) agar data diperoleh secara “Real Time”.
2	Meningkatkan penyuluhan kesehatan pada masyarakat secara berkesinambungan
3	Memonitor pelaksanaan kegiatan yang berkesinambungan
4	Membenahi metode dan sarana pengarsipan yang memudahkan pihak internal dan eksternal memperoleh data dan informasi didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan.
5	Mengoptimalkan koordinasi antar wilayah dan lintas sektor

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.4.4. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Pekerjaan Umum

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto terdiri dari:

1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4.4.5. Target Pencapaian

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Urusan lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

1) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/ cuci/mandi/ dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Air minum dalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.Pengukuran SPM Sub Urusan Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kab/Kota}} \text{ X } 100$$

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. SPALD Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk Atau Tangki Septik Dengan Kepadatan Penduduk Pada Wil. Terbangun <25 jiwa/Ha}}{\text{Jumlah Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDS}} \times 100$$

Adapun jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 4.43
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYAN	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air	12	Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYAN	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
1	*2*	*3*	*4*	*5*
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air	45	Tahun 2025

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto

4.4.6. Realisasi

Capaian SPM Pekerjaan Umum di Kota Sawahlunto Tahun 2024 terealisasi sebanyak 100% dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.44
Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO.	JENIS PELAYAN	INDIKATOR PELAYANAN	PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minuman Sehari-hari	(57/57) x 100	100
2	Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh layanan limbah domestic	(217/217) x 100	100

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto

4.4.7. Alokasi Anggaran

Selama tahun 2025 sampai dengan semester 3 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja dan SPM yang ingin dicapai Dinas PUPR Kota Sawahlunto dianggarkan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 701,570,000.00 yang bersumber dari APBD (Dana Alokasi Daerah). Anggaran tersebut diperuntukan untuk:

1) Urusan Keciptakaryaan sebesar Rp 1,194,040,000.00 untuk menunjang kegiatan-kegiatan Urusan pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub Urusan air bersih.
2) Urusan Keciptakaryaan sebesar Rp 4,063,946,850.00 untuk menunjang kegiatan-kegiatan Urusan pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub Urusan sanitasi lingkungan. Untuk rincian anggaran dan realisasi perprogram kerja dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 4.45
Rincian Anggaran dan Realisasi Program Sub Urusan Sistem Penyediaan Air Minum
Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	ANGGARA (RP)	REALISASI (RP)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
a. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangun Sarana dan Prasarana	Rp 634,040,000	Rp 634,040,000
b. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangun Sarana dan Prasarana Air Bersih	Rp 560,000,000	Rp 560,000,000
Jumlah		**Rp 1,194,040,000**	**Rp 1,194,040,000**

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto

Tabel 4.45
Rincian Anggaran dan Realisasi Program Sub Urusan Sanitasi Lingkungan Tahun 2025

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			
a. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Terbangun Sarana dan Prasarana	Rp 4,063,946,850	Rp 4,063,946,850
Jumlah		**Rp 4,063,946,850**	**Rp 4,063,946,850**

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto

4.4.8. Dukungan Personil

Tabel 4.46
Dukungan Personil Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH TENAGA
1	*2*	*3*
A.	Pejabat struktural Eselon II,III,IV	10 orang
B.	Pejabat Pelaksna	121 Orang
JUMLAH		**131 Orang**

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto

4.4.9. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.47
Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	PERMASALAHAN
1	Sumber daya aparatur Urusan teknis yang masih kurang dan perlu ditingkatkan keahliannya
2	Belum lengkapnya data base pada masing-masing Urusan.
3	Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.
4	Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan kegiatan
5	Keterbatasan sumber dana.
6	Perbaikan dan peningkatan penyelengaraan infrastruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
7	Mempertahankan ketersediaan air baku dampak berkurangnya area terbuka hijau;
8	Ketidaktertarikan sebagian warga untuk mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik
	SOLUSI
1	Peningkatan sumber daya aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas
2	Pembuatan basis data yang terintegrasi dari masing- masing Urusan
3	Penyusunan master plan dan kebijakan umum pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dari semua aspek dan Urusan
4	Peningkatan pengelolaan SPAM dan Sanitasi masyarakat
5	Bekerja sama dengan dinas terkait mengenai sosialisasi pentingnya pengolahan air limbah domestik

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.5.4. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

Ada dua jenis pelayanan dasar urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman yang ada di Kota Sawahlunto, yakni:

1) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
   a. Pada saat masa pasca bencana;
   b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
   c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.
2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
   a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
   b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Tabel 4.48
Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kota Sawahlunto	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Sawahlunto	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100 % (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sumber data : Dinas DPKP2LH Kota Sawahlunto

4.5.5. Target Pencapaian

Target Pencapaian SPM oleh Daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Target yang direncanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto di Tahun Anggaran 2025 Perubahan sebagai OPD pelaksana SPM urusan perumahan rakyat dan permukiman untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut.

Tabel 4.49

Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Sawahlunto Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET 2025	PENERIMA LAYANAN DASAR	ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kota Sawahlunto	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	10 Unit Rumah RTLH Bencana	**Rp. 219,935,630**.-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang	100 %	-	Tidak ada Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah

	program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni			Daerah

Sumber data : Dinas DPKP2LH Kota Sawahlunto

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

1) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
2) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
3) Tidak memiliki asset bangunan lain;
4) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

4.5.6. Realisasi Pencapaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto selama 1(satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Hasil capaian SPM urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.50
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET		REALISASI		KET
		ANGGARAN	PENERIMA LAYANAN	ANGGARAN	PENERIMA LAYANAN	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kota Sawahlunto	**Rp. 219,935,630**.-	10 Unit	**Rp. 212,807,030.-** **(96,03%)**	10 Unit (100 %)	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	-	-	-	- (100%)	Tidak ada Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah

Sumber data : Dinas DPKP2LH Kota Sawahlunto

4.5.7. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber dana lain yang sah. Alokasi Anggaran Tahun 2025 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto untuk pencapaian penerapan SPM adalah sebagai barikut:

Tabel 4.51
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kota Sawahlunto	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp. 9,423,430.- Rp. 8,130,000.- Rp.202,096,000.- Rp. 286,200.-	 APBD APBD APBD APBD
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto		Rp. 0.-	Tidak ada Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah

Sumber data : Dinas DPKP2LH Kota Sawahlunto

4.5.8. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah personil yang terlibat untuk proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 4.52
Dukungan Personil di Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas PKP2LH Tahun 2025

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH TENAGA
1	*2*	*3*
A.	Pejabat struktural Eselon II,III,IV	2 orang
B.	Pejabat Fungsional	5 Orang
B.	Staf Urusan	3 Orang
C.	Tenaga Teknis	3 Orang
JUMLAH		**13 Orang**

Sumber data : Dinas DPKP2LH Kota Sawahlunto

4.5.9. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.53
Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	PERMASALAHAN
1	Dengan kondisi alam Sawahlunto berbukit, dan tingkat bencana tinggi
2	Rumah terdampak bencana berada diluar SK kawasan bencana
3	Belum tersedia lahan relokasi program pemerintah, karena kondisi geografis Sawahlunto yang berada pada daerah berkontur
	SOLUSI
1	Urusan perumahan, dan Kawasan Permukiman terlibat aktif dalam tanggap bencana
2	Perlu petimbangan RTLH bencana diluar SK Kawasan

	bencana sehingga dapat diakomodir dalam SPM
3	Perlu adanya kebijakan untuk penentuan lahan pemerintah untuk relokasi

Sumber data : Dinas DPKP2LH Kota Sawahlunto

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

A. Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat meliputi:

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian

Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran dapat dilihat dalam tabel indikator serta nilai SPM sebagai berikut:

Tabel 4.54
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda/perkada	100 %	Setiap Tahun

Sumber data : Satpol PP & Damkar dan BPBD Kota Sawahlunto

Pada tahun 2025 Penerapan Standar Pelayanan Minimal padang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja & Damkar Kota Sawahlunto dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto. Adapun rumus capaian penerapan SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 3.57
Rumus Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Ketrentaman dan Ketertiban Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Rumus Perhitungan
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda/perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada / Jumlah Penegakan Perda dan Perkada x 100

Sumber data : Satpol PP & Damkar dan BPBD Kota Sawahlunto

4.5.3. Realisasi

Realisasi terhadap penerapan dan pencapaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.55
Realisasi Penerapan SPM Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN DASAR	PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN (%)	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda/perkada	328 / 328 x 100	100 %	12.715.000	11.796.000	92,77 %

Sumber data : Satpol PP & Damkar dan BPBD Kota Sawahlunto

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto tahun 2025 untuk mendukung penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut :

Tabel 4.56
Alokasi Anggaran Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan SPM Urusan	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**49.465.000**	**48.415.000**
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	**33.060.000**	**32.760.000**
		Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	27.220.000	27.200.000
		Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	5.840.000	5.560.000
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	**16.405.000**	**15.655.000**
		Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	8.135.000	8.135.000

		Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	8.270.000	7.520.000

Sumber data : Satpol PP & Damkar dan BPBD Kota Sawahlunto

4.5.5. Dukungan Personil

Tabel 4.57
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pembina Utama	IV.e	-
2	Pembina Utama Madya	IV.d	-
3	Pembina Utama Muda	IV.c	-
4	Pembina Utama TK I	IV.b	2 Orang
5	Pembina	IV.a	-
6	Penata TK.I	III.d	4 Orang
7	Penata	III.c	4 Orang
8	Penata Muda TK.I	III.b	4 Orang
9	Penata Muda	III.a	3 Orang
10	Pengatur TK.I	II.d	13 Orang
11	Pengatur	II.c	3 Orang
12	Pengatur Muda TK.I	II.b	1 Orang
13	Pengatur Muda/ PPPK Gol.V	II.a	-
14	Juru TK I	I.d	-
15	Juru	I.c	-
16	Juru Muda TK I	I.b	-
17	Juru Muda	I.a	-
JUMLAH			**34 Orang**

Sumber data : Satpol PP & Damkar Kota Sawahlunto

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan dan solusi dalam penerapan SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.58
Kendala, Permasalahan dan Solusi Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

NO	PERMASALAHAN
1	Sulitnya meminta by name by addres pada saat pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada pada radius 0-50 M di lokasi Penegakan Perda dan Perkada
2	Terbatasnya anggaran untuk mencapai target program kegiatan dalam rangka penerapan percepatan SPM
3	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah sehingga dengan mudah mereka melanggarnya.
4	Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/instansi terkait
	SOLUSI
1	Berkoordinasi dengan OPD Disdukcapil untuk meminta data masyarakat yang terkena dampak akibat penegakan perda dan perkada di lokasi penegakan perda dan perkada yang berada pada radius 0-50 M
2	Mencoba mengajukan tambahan anggaran dari APBD untuk pelaksanaan kegiatan di Urusan Program Kegiatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Urusan Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
3	Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat yang melanggar Perda, Peraturan Walikota dan Produk Hukum Lainnya agar mereka mematuhi setiap aturan yang ada dan memberikan sanksi kepada pelanggar Perda.
4	Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sumber data : Satpol PP & Damkar Kota Sawahlunto

B. Sub Urusan Kebakaran

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Sub Urusan Kebakaran mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**.**

4.5.2. Target Pencapaian

Penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran dapat dilihat dalam tabel indikator sebagai berikut:

Tabel 4.59
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun

Sumber data : Satpol PP & Damkar Kota Sawahlunto

Adapun rumus capaian penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.60
Rumus Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	RUMUS PERHITUNGAN
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (respon time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran/Perangkat Daerah)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada tahun x}} \times 100$

Sumber data : Satpol PP & Damkar Kota Sawahlunto

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota, teknis penghitungan capaian SPM sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM. Secara kuantitatif teknis perhitungan sebagai berikut:

1) Indikator utama layanan SPM sub urusan kebakaran

a. Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

i. Rumus:

$$\frac{\text{(Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x}} \textbf{ x100}$$

ii. Pembilang:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan /Perangkat Daerah

iii. Penyebut :

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x

iv. Satuan Indikator :

Persentase (%)

b. Layanan pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk an/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah

i. Rumus:

$$\frac{\text{(Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x}} \textbf{ x 100}$$

ii. Pembilang:

Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan /Perangkat Daerah

iii. Penyebut:

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun x

iv. Satuan Indikator :

Persentase (%)

4.5.3. Realisasi

Pada tahun 2025 di Kota Sawahlunto terjadi 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) kasus kebakaran. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto memberikan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam rentang waktu tanggap (response time) 15 menit sejumlah 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) kejadian kebakaran, dengan data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 4.61
Realisasi Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran di Kota Sawahlunto	133 Kejadian
2	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sawahlunto dalam waktu tanggap (response time) 15 menit	133 Kejadian
3	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran dalam waktu tanggap (response time) 15 menit	133 Kejadian
4	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani di luar waktu tanggap (response time) 15 menit oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sawahlunto dan Relawan Kebakaran	0 Kejadian
5	Jumlah keseluruhan korban jiwa kebakaran dan terdampak kebakaran	0 Orang
6	Jumlah keseluruhan korban jiwa kebakaran dan terdampak kebakaran yang berhasil dilakukan pertolongan dan penyelamatan oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sawahlunto	0 Orang
7	Jumlah korban meninggal dunia	0
8	Jumlah korban yang mengalami luka bakar dan/atau luka fisik lainnya	0
9	Jumlah taksiran kerugian harta benda akibat kebakaran	Rp. 3.500.000.000

10	Jumlah taksiran aset yang bisa diselamatkan sebagai akibat tidak menjalarnya kejadian kebakaran	Rp. -
11	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran)	323 Kasus

Sumber data : Satpol PP & Damkar Kota Sawahlunto

Tabel 4.62
Capaian Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di Kota Sawahlunto Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Capaian (%)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	133 / 133 x 100	100 %

Sumber data : Satpol PP & Damkar Kota Sawahlunto

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto tahun 2025 untuk mendukung penerapan da pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran sebagai berikut :

Tabel 4.63
Alokasi Anggaran Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN SPM BIDANG	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**	**420.790.000**	**410.181.979**
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	402.298.872	394.281.979

NO	JENIS PELAYANAN SPM BIDANG	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
		Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	28.500.000	28.037.000
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	14.700.000	11.229.000
		Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	132.746.000	132.641.979
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	226.352.872	222.374.000
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	1.500.000	880.000
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	1.500.000	880.000
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	2.800.000	1.680.000
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialiasi dan Edukasi Masyarakat	2.800.000	1.680.000
		Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	14.191,499	13.340.000
		Sub Kegiatan Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	14.191.499	13.340.000

Sumber data : Satpol PP & Damkar Kota Sawahlunto

4.5.5. Dukungan Personil

Tabel 4.64
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pembina Utama	IV.e	-
2	Pembina Utama Madya	IV.d	-
3	Pembina Utama Muda	IV.c	-
4	Pembina Utama TK I	IV.b	2 Orang
5	Pembina	IV.a	-
6	Penata TK.I	III.d	4 Orang
7	Penata	III.c	4 Orang
8	Penata Muda TK.I	III.b	4 Orang
9	Penata Muda	III.a	3 Orang
10	Pengatur TK.I	II.d	13 Orang
11	Pengatur	II.c	3 Orang
12	Pengatur Muda TK.I	II.b	1 Orang
13	Pengatur Muda/ PPPK Gol.V	II.a	-
14	Juru TK I	I.d	-
15	Juru	I.c	-
16	Juru Muda TK I	I.b	-
17	Juru Muda	I.a	-
JUMLAH			**34 Orang**

Sumber data : Satpol PP & Damkar Kota Sawahlunto

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.65
Kendala, Permasalahan dan Solusi Sub Urusan KebakaranTahun 2025

NO	PERMASALAHAN
1	Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana
2	Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana
3	Terbatasnya sarana prasarana penyelamatan korban bencana
4	Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Sawahlunto sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK.
	SOLUSI
1	Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian.
2	Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
3	Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembelian sarana prasarana penyelamatan.
4	Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar WMK untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.

C. Sub Urusan Kebencanaan

4.6.4. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Jenis Pelayanan dasar Sub Urusan Bencana, meliputi:

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Sedangkan penerima pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana adalah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.6.5. Target Pencapaian

Penyelenggaraan Sub Urusan Kebencanaan dapat dilihat dalam tabel indikator sebagai berikut:

Tabel 4.66
Target dan Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	CAPAIAN 2025 (%)	TARGET 2025		REALISASI 2025		
				PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN (%)	PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN (%)	
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	47.793 / 47.793 x 100	100	47.793 / 47.793 x 100	100	(Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	150 / 150 x 100	100	150 / 150 x 100	100	(jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti pelatihan
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	850 / 850 x 100	100	850 / 850 x 100	100	(Jumlah korban bencana yang berhasil ditolong dan dievakuasi)/(Perkiraan

Sumber data : BPBD Kota Sawahlunto

Indikator dan Target Pencapaian SPM

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh informasi rawan bencana. Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kota Sawahlunto yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah.

Indikator: Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

$$\text{Persentase (\%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Target Capaian : 100% paling lama satu tahun

b. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.

Indikator: Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh infomasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.

$$\text{Persentase (\%)jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh infomasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana} = \frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana}} \text{x100\%}$$

Target Capaian : 100% paling lama satu tahun

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh layanan pencegahan kesiapsiagaan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah melalui serangkaian upaya kegiatan pra bencana.

Penerima Layanan : Setiap Warga Negara Indonesia di Kota Sawahlunto yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi.

Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

$$\text{Persentase (\%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan}} \text{x100\%}$$

Target : 100% paling lama satu tahun

b. Sub Kegiatan Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :
Sasaran: Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijens dalam bentuk dokumen resmi.
Indikator: Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan selesai dan sah/legal.

$$\text{Persentase (\%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

c. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:
Sasaran: Terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana.
Indikator : Persentase (%) jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan

$$\text{Persentase (\%) jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan} = \frac{\text{Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga Negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

d. Sub Kegiatan Galdi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:
Sasaran: Terlatihnya warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana.
Indikator: Persentase (%) jumlah warga Negara yang ikut pelatihan.

$$\text{Persentase (\%) jumlah warga Negara yang ikut pelatihan} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

e. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM :

Sasaran: Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator:. Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana

Persentase (%) jumlah warga Negara yang. Mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	=	$\frac{\textit{Jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\textit{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$x100%

Target : 100% paling lama satu tahun

f. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM

Sasaran: Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana.

Indikator: Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan.

Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	=	$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}}$x100%

Target : 100% paling lama satu tahun

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kota Sawahlunto.

a. Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

   Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

   Sasaran: Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam.

   Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%).

$$\text{Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (\%)} = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status KLB}} \times 100\%$$

   Target : 100% paling lama satu tahun

b. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana

   Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

   Sasaran: Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.

   Indikator: Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%).

$$\text{Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (\%)} = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$$

   Target : 100% paling lama satu tahun

c. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

   Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

   Sasaran : Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas darurat bencana.

   Indikator: Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.

Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana = $\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}}$ x100%

Target : 100% paling lama satu tahun

d. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Sasaran / Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran: Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Indikator:. Persentase (%) jumlah korban berhasil, dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.

Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana = $\frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}}$ x100%

Target : 100% paling lama satu tahun

4.6.6. Realisasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana sebagaimana dimaksud dibedakan atas bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

1) Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
2) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) telah dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2022.
3) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.

Tabel 4.67
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh infomasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
1	2	3 = ½ x 100%
Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi di lokasi kegiatan:	Jumlah penduduk di lokasi kegiatan 47.493 jiwa	100 %
Jumlah 47.793 jiwa	47.793 jiwa	100 %

Sumber data : BPBD Kota Sawahlunto

Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana yakni jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyebarluasan informasi baik berupa penyampaian informasi pencegahan maupun kesiapsiagaan bencana. Sosialisasi dilakukan melalui tatap muka, melalui media sosial dan wahana multimedia, penyediaan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik, dengan lokasi di 27 Desa dan 10 Kelurahan pada 4 Kecamatan sebagaimana data berikut ini:

Tabel 4.68
penyediaan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik, dengan lokasi di 27 Desa dan 10 Kelurahan pada 4 Kecamatan

NO	LOKASI		JUMLAH PESERTA	JUMLAH PENDUDUK DAERAH	CAPAIAN (%)
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN			
1.	Barangin	Desa. Kolok Nan Tuo	716	716	100%
		Desa. Kolok Mudik	868	868	100%
		Desa. Santur	2811	2811	100%
		Desa. Talago Gunung	1486	1486	100%
		Kel. Durian Ii	1842	1842	100%
		Kel. Durian I	1903	1903	100%
		Kel. Lubang Panjang	1008	1008	100%
		Kel. Saringan	1502	1502	100%
		Desa. Balai Batu Sandaran	755	755	100%
		Desa. Lumindai	2682	2682	100%

2.	Lembah Segar	Kel. Air Dingin	1031	1031	**100%**
		Kel. Tanah Lapang	1283	1283	**100%**
		Kel. Aur Mulyo	1136	1136	**100%**
		Kel. Kubang Sirakuak Selatan	986	986	**100%**
		Kel. Kubang Sirakuak Utara	768	768	**100%**
		Kel. Pasar	994	994	**100%**
		Desa. Kubang Utara Sikabu	1169	1169	**100%**
		Desa. Kubang Tangah	1429	1429	**100%**
		Desa. Pasar Kubang	1042	1042	**100%**
		Desa. Lunto Timur	1279	1279	**100%**
		Desa. Lunto Barat	1179	1179	**100%**
3.	Silungkang	Desa. Silungkang Duo	1125	1125	**100%**
		Desa. Silungkang Tigo	1626	1626	**100%**
		Desa. Muaro Kalaban	3421	3421	**100%**
		Desa. Taratak Bancah	700	700	**100%**
		Desa. Silungkang Oso	1491	1491	**100%**
4.	Talawi	Desa. Tumpuak Tangah	1830	1830	**100%**
		Desa. Datar Mansiang	228	228	**100%**
		Desa. Batu Tanjung	1466	1466	**100%**
		Desa. Bukik Gadang	887	887	**100%**
		Desa. Talawi Hilir	1411	1411	**100%**
		Desa. Sijantang Koto	560	560	**100%**
		Desa. Salak	911	911	**100%**
		Desa. Rantih	517	517	**100%**
		Desa. Sikalang	1337	1337	**100%**
		Desa. Talawi Mudik	1170	1170	**100%**
		Desa. Kumbayau	1244	1244	**100%**
	Jumlah		**47.793**	**47.793**	**100%**

Sumber data : BPBD Kota Sawahlunto

a. Realisasi Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dilaksanakan pada tahun 2022, dan akan dibuat dokumen baru pada tahun 2027.

b) Sub Kegiatan Pembuatan Rencana Kontijensi, Dokumen Renkon yang telah dibuat yakni Renkon Gempa Bumi dan Renkon Tanah Longsor, yang mana dokumen tersebut telah expire atau habis masa berlakunya.

c) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Tabel 4.69
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan
1	2	3 = ½ x 100%
1,402 jiwa	Jumlah penduduk di lokasi kegiatan	2,08 %
Jumlah 1.402 jiwa	47.493 jiwa	2,08 %

Sumber data : BPBD Kota Sawahlunto

Dilakukan baik di dalam ruang maupun luar ruang dengan menggunakan sarana prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan, dengan lokasi di 37 Desa/kelurahan pada 4 Kecamatan, sebagaimana data berikut ini:

Tabel 4.70
sarana prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan, dengan lokasi di 37 Desa/kelurahan pada 4 Kecamatan

NO	LOKASI		JUMLAH PESERTA	JUMLAH PENDUDUK	CAPAIAN (%)
	KECAMATAN	DESA			
1.	Barangin	SARINGAN	27	716	1,45
		LUBANG	29	868	2,04
		DURIAN I	42	2811	1,65
		DURIAN II	42	1486	1,72
		SANTUA	27	1842	0,63
		KOLOK MUDIAK	43	1903	1,57
		KOLOK NAN TUO	43	1008	0,99
		TALAGO	33	1502	1,80
		LUMINDAI	43	755	2,40
		BALAI BATU SADARAN	43	2682	5,98
2.	Lembah Segar	AUR MULIO	24	1031	2,40
		KUBANG	26	1283	2,41
		KUBANG S. SELATAN	26	1136	2,35
		PASAR	28	986	3,07
		TANAH LAPANG	42	768	2,88
		AIA DINGIN	42	994	3,66
		LUNTO TIMUR	42	1169	3,07
		LUNTO BARAT	41	1429	2,68
		KUBANG	28	1042	2,00
		KUBANG UTARA SIKABU	27	1279	2,59
		PASA KUBANG	28	1179	2,03
3.	Silungkang	SILUNGKANG DUO	44	1125	0,80
		SILUNGKANG OSO	41	1626	2,83

		SILUNGKANG TIGO	45	3421	2,97
		MUARO KALABAN	42	700	1,81
		TARATAK BONCAH	39	1491	5,95
4.	Talawi	TALAWI HILIE	42	1830	2,03
		TALAWI MUDIAK	40	228	2,77
		BUKIT GADANG	44	1466	2,55
		BATU TANJUNG	40	887	5,97
		KUMBAYAU	41	1411	2,89
		TUMPUK TANGAH	42	560	3,30
		DATA MANSIANG	42	911	2,43
		SIJANTANG KOTO	45	517	1,04
		SALAK	45	1337	1,43
		SIKALANG	45	1170	2,07
		RANTIH	39	1244	21,42
Jumlah			**1,402**	**47.793**	**2,15**

Sumber data : BPBD Kota Sawahlunto

d) Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Jumlah Warga Negara yang ikut Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100% selama satu tahun
1	2	3 = ½ x 100%
..... orang	Jumlah penduduk di lokasi kegiatan ..... orang	....
Jumlah ..... jiwa	..... jiwa	.....

e) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Jumlah Warga Negara yang yang mendapat layanan pusdalops Tahun2025	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100% selama satu tahun
1	**2**	**3 = ½ x 100%**
Hasil *assisment*: 47.793	47.793 jiwa	100 %
Jumlah 47.793	47.793 jiwa	100%

Catatan : Jumlah Warga Negara di Daerah Rawan Bencana untuk 2 Jenis Ancaman Bencana yaitu Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrim

f) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Jumlah Warga Negara yang yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100% selama satu tahun
1	***2***	***3 = ½ x 100%***
…….. orang	……. Orang	…..
Jumlah ….. jiwa	…….. jiwa	….

b. Realisasi Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana

a) Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis.

Jumlah kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap penetapan KLB	Jumlah seluruh penetapan status KLB	100% selama satu tahun
1	***2***	***3 = ½ x 100%***
1 kali	1 kali	100%
Jumlah 1 kali	1 kali	100%

b) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana.

Jumlah kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap penetapan	Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	100% selama satu tahun
1	***2***	***3 = ½ x 100%***
2 kali	2 kali	100%
Jumlah 2 kali	2 kali	100%

c) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah seluruh petugas dalam penangaan darurat bencana	100% selama satu tahun
1	***2***	***3 = ½ x 100%***
120	120 orang	100%
Jumlah 120	120 orang	100%

d) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.

Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan	Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari	100% selama satu tahun
1	***2***	***3 = ½ x 100%***
850	850	100 %
Jumlah : 850 jiwa	850	100 %

Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana selama kurun waktu tahun 2025 dilaksanakan kepada penduduk di 37 Desa/Kelurahan pada 4 Kecamatan sebagaimana data berikut ini:

Tabel 4.71
Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana selama kurun waktu tahun 2025 dilaksanakan kepada penduduk di 37 Desa/Kelurahan pada 4 Kecamatan

NO	LOKASI		JUMLAH KORBAN YANG BERHASIL DICARI DAN DITOLONG	JUMLAH KORBAN MENINGGAL	PERKIRAAN JUMLAH KORBAN KESELURUHAN TERDAMPAK (MENGUNGSI)	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA					
			850	1	-	100	Korban Bencana Tanah Longsor
Jumlah			**850**	**1**	**-**	**100**	

Sumber data : BPBD Kota Sawahlunto

Dengan demikian, maka Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.72
Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN (%)
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	47.793 / 47.793 x100	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	150 / 150 x 100	100 %

3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{850}{850}$ x 100	100

4.6.7. Alokasi Anggaran

Rincian anggaran dan realisasi kegiatan yang mendukung jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.73
Alokasi Anggaran Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN SPM SUB URUSAN BENCANA	PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2025	JUMLAH ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)
1.	Sosialisasi,Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (perjenis Kegiatan)	**Pogram Penanggulangan Benana**		
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Benana Kabupaten/Kota (perjenis Bencana)	8.210.000,-	8.154.105,-
2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	32.432.500,-	30.221.400,-
3.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kab/Kota	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	63.157.500,-	62.92b7.237,-
4.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	9.737.500,-	9.384.180,-
5.	Penanganan Pascabencana Kab/Kota	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	28.691.650,-	14.608.950,-
6.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	50.000.000,-	11.754.128,-
7.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	***Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	206.375.900,-	123.107.655,-
8.	Penyedian Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	***Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	17.915.000,-	0,-
Jumlah Total			**374.270.050**	**220.137.655,-**

Sumber data : BPBD Kota Sawahlunto

4.6.8. Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana di Kota Sawahlunto tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan personil pada BPBD Kota Sawahlunto.

Jumlah pegawai BPBD Kota Sawahlunto sebanyak 63 orang, terdiri dari:

ASN : 23 orang
Non ASN : 32 orang
Jumlah : 55 orang

4.6.9. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.74
Kendala, Permasalahan dan Solusi Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2025

NO	PERMASALAHAN
1	Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana termasuk di dalamnya anggaran, karena dalam PB anggaran termasuk faktor yang sangat penting.
2	Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Permasalahan ini dikarenakan : a. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; b. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam
	SOLUSI
1	Melakukan penguatan kelembagaan BPBD secara internal melalui koordinasi ke Propinsi maupun pusat, mengikuti pelatihan istema PB. Meningkatkan upaya pemenuhan pengadaan sarana prasarana dan dukungan anggaran

2	Melakukan peningkatan kapasitas Pusdalops PB dan Satgas TRC serta pembentukan fórum pengurangan risiko bencana di desa.
3	Melakukan upaya penguatan anggaran melalui Tim SPM Kota

Sumber data : BPBD Kota Sawahlunto

4.6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Urusan Sosial di Daerah Kabupaten / Kota. Pemerintah Kota Sawahlunto telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Urusan Urusan Sosial meliputi:

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Urusan sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang diperoleh setiap peyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal.

Jenis Pelayanan Minimal Urusan Sosial adalah untuk pemenuhan kebutuhan jenis layanan kebutuhan dasar.

1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial
3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.
5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota.

Dalam penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran – ukuran yang di tetapkan oleh pemerintah melalui Kementrian terkait oleh karena itu wajib memperhatikan prinsip prinsip SPM yaitu sederhana Kongkrit mudah di ukur, terbuka, terjangkau dan dapat di pertanggung jawabkan, serta mempuyai batas waktu pencapaian. Kriteria penerima pelayanan dasar tersebut di atas, antara lain:

1) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar dengan kriteria :
   a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya;
   b. Tidak terpelihara;
   c. Tidak terawat dan tidak terurus.
2) Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat per satu kali kejadian bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dengan kriteria :
   a. Jumlah pengungis/penyitas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
   b. Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan atau
   c. Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

4.6.2. Target Pencapaian

Target penerapan dan pencapaian SPM Urusan Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.75
Target Penerapan SPM Sosial Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	0 %	tidak ada nya sasaran
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap tahun

Sumber data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto

4.6.3. Realisasi

Realisasi penerapan dan pencapaian SPM Urusan Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.76
Pencapaian Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN 2025			BATAS WAKTU CAPAIAN
				S	R	%	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	170	170	100 %	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	240	240	100 %	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	472	472	100 %	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	-	-	0 %	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara Korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	18 jiwa	18 jiwa KK	100 %	Setiap tahun

Sumber data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto

Berdasarkan tabel di atas capaian SPM Bidang Sosial berdasarkan Peraturan mentri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di daerah Kabupaten/ Kota, dapat di Uraikan sebagai berikut :

a. Jumlah rehabilitasi dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terfasilitasi tahun 2025 adalah 170 orang, target capaian kenerja pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti adalah 100 %.
b. Jumlah rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti yang terfasilitasi tahun 2024 adalah 240 orang dari sasaran jumlah rehabilitasi target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota

Sawahlunto dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti adalah 100 %.

c. Jumlah rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti yang terfasilitasi adalah dari sasaran rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti tahun 2025 adalah 472 orang, target capaian kenerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti adalah 100 %.
d. Jumlah rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandang dan pengemis di luar panti tahun 2025 tidak ada sasaran, target capaian kenerja pemerintah daerah Kota Sawahlunto dalam pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti adalah 100%.
e. Jumlah perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota yang terfasilitasi tahun 2025 adalah 4 KK dengan 18 orang. Target perlindungan dan jaminan sosial pada saat capaian Pemerintah Daerah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota adalah 100 %.

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Sosial di Kota Sawahlunto pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.77
Alokasi Anggaran SPM Bidang Sosial dana APBD Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	
					APBD	APBN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial			
				Penyediaan Alat Bantu	Rp. 10.400.000	
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	Rp. 159.210.660	-

				Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 198.397.600	-
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial		RP. 159.001.763	Rp. 283.200.000
				Penyediaan Permakanan		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial			
				Pemberian Layanan Kedaduratan	Rp. 271.400.000	-
				Penyediaan Permakanan Lansia	Rp. 231.796.000	Rp. 377.456.000
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
				Penyediaan Permakanan	Rp. 20.000.000	Rp. 216.976.000
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	-	-	-	-	-

5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Koordinasi Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp. 36.387.100.	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kab/Kota	Penyediaan Permakanan	Rp. 14.142.700	-

Sumber data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah dana yang di alokasikan untuk kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada urusan Sosial kota Sawahlunto Tahun 2025 adalah:

1) Disabilitas terlantar Jenis Pelayanan Dasar Penyandang di luar panti, program Rehabilitasi Sosial, ada 2 kegiatan :
   a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan sub kegiatan penyediaan alat bantu ini terlaksana berupa fasilitasi penyediaan alat bantu bagi penyandanag disabilitas berupa kursi roda, alat bantu dengar, kruk ketiak, dan tripot dana yang dianggarkan dari dana APBD sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah). Sub kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti, kegiatan yang terfasilitasi adalah pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas, serta memfasilitasi kegiatan Home Visit kepada penderita ex gangguan jiwa, serta peringatan Hari Disabilitas Internasional yang ke 32 tahun 2025, yang di hadiri oleh 150 orang anak berkebutuhan khusus di dampingi orang tua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dihadiri oleh Bapak Pj Wali Kota Sawahlunto, Forkopimda, OPD terkait, Guru SLB dengan kegiatan yang dilakukan senam bersama, jalan santai, penampilan bakat dari anak-anak hebat, serta pameran hasil karya anak Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Sawahlunto, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada anak yatim, yatim piatu, piatu diberikan kepada 240 orang yang masih mengikuti bangku pendidikan. Dana yang dianggarkan sebesar Rp.159.210.660,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus

sepuluh ribu enam ratus enam puluh rupiah). Sub kegiatan Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, kegiatan yang difasilitasi adalah pemberian transportasi kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ke Sekolah yang diberikan kepada 110 orang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yang bersekolah di 6 SLB yang ada di Kota Sawahlunto dengan rincian sebagai berikut : SLB Rumah Tia 17 orang, SLB Al Kausar 8 orang, SLB Tunas Harapan Silungkang 14 orang, SLB Negeri 1 Sawahlunto 14 orang, SLB Negeri 2 Sawahlunto 15 orang, SLB YKB Talawi 17 orang. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 198.397.600,- (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial dengan sub kegiatan penyedian, penyedian permakanan kegiatan yang di fasilitasi pemberian paket sembako bagi penyandang disabilitas dan Anak Berkebutuhan Khusus sebanyak 40 paket sembako. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

   Dengan adanya bantuan yang diberikan untuk penyandang disabilitas dapat mengurangi kesenjangan disabilitas dalam peningkatan kemampuan individu, keluarga, untuk memiliki kekuatan kapasitas terus belajar dan tumbuh dan berubah komprehensif, holistic, dan terstandar melalui penghormatan, pemenuhan terhadap hak-hak disabilitas.

   Dengan adanya kegiatan ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan akibat gangguan kejiwaan dikarenakan ketiadaan biaya dan dengan kegiatan Home visit ex penderita gangguan jiwa dapat untuk memotivasi keluarga dan penderita untuk dapat bisa berinteraksi dan diterima di tengah keluarga, lingkungan dan masyarakat.

2) Jenis Pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di luar panti, program Rehabilitasi Sosial, kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial kegiatan ini tergabung dalam sub kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti, kegiatan ini terfasilitasi bantuan uang tunai kepada anak

Yatim, Yatim Piatu dan piatu pada anak kurang mampu sebanyak 240 anak bantuan yang diberikan Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 130.900.00,- (seratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

3) Jenis Pelayanan Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial dengan sub kegiatan Penyediaan Layanan Kedaruratan. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 271.400.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Kegiatan ini terealisasi berupa fasilitasi bantuan uang tunai yang diberikan kepada lansia kurang mampu non produktif sebanyak 120 orang. Sub kegiatan penyediaan permakanan bagi lansia kurang mampu yang diberikan kepada 472 orang lansia, dengan pemberian paket sembako. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 231.796.260,- (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah). Dengan adanya bantuan uang tunai dan penyediaan permakanan bagi Lanjut usia kurang mampu / Non Produktif di Kota Sawahlunto Tahun 2025, maka dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dan mewujudkan lansia sehat dan berdaya.
4) Jenis layanan Rehabilitasi Sosial khusus gelandangan dan pengemis untuk tahun 2025 tidak ada data sasaran di Kota Sawahlunto.
5) Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota, Program Penanganan Bencana dengan 2 kegiatan:
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana daerah Kabupaten/Kota, dengan jumlah anggota Taruna Siaga Bencana sebanyak 25 orang. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 36.387.100,- (tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah). Kegiatan ini terealisasi berupa fasilitasi operasional taruna siaga bencana dalam penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
    b. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan,

kegiatan yang terfasilitasi adalah pemberian bantuan sembako kepada korban bencana alam dan sosial, pada tahun 2025 tenpenuhinya kebutuhan pangan korban bencana alam sebanyak 4 KK dengan 18 jiwa. Dana yang dianggarkan sebesar Rp. 14.142.700,- (empat belas juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Tabel 4.78
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dana APBN Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
				APBN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Rp. 675.376.000
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Rp. 283.200.000
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Rp. 2.743.200.000
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	-	-	
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota.	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kab/Kota	

Sumber data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah dana yang di alokasikan untuk kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada urusan sosial kota Sawahlunto Tahun 2025 anggaran APBN adalah :

1) Jenis layanan disabilitas terlantar, jenis pelayanan dasar penyandang di luar panti, program rehabilitasi sosial anggaran yang di fasilitasi dari APBN adalah Kegiatan Asistensi Rehabilitasi

Sosial (ATENSI). Bantuan ATENSI Pemberian makanan bagi penyandang disabilias, pemberian makakanan tersebut makanan yang sudah di masak dan di antarkan kepada KPM penerima yang di kelola oleh kelompak masyrakat di Kota Sawahlunto. Jumlah sasaran penerima sebanyak 19 orang, dengan rincian biaya sebesar Rp. 216.976.000,- dan program keluarga harapan jumlan KPM 191 orang dengan rincian biaya Rp. 458.400.000,-

2) Jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti, bantuan Atensi kepada anak YAPI, sebanyak 118 orang dengan rinician biaya sebesar Rp. 283.200.000.
3) Jenis pelayanan dasar lanjut usia terlantar di luar panti program mendukung program rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar kementerian sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH komponen penerima PKH adalah Pendidikan (SD, SMP, SMA/sederajat, kesehatan (ibu hamil, menyusui dan balita, kessos keluarga yang mempuyai lansia dan disabilitas berat). Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lansia penerima bantuan berjumlah 1.143 orang dengan besaran Bantuan yang di terima Rp.2.400.000 setahun, total bantuan yang di terima sebesar Rp.2.743.200.000,- serta bantuan ATENSI pemberian makanan bagi lanjut usia, pemberian makanan tersebut makanan yang sudah di masak dan di antarkan kepada KPM penerima yang di kelola oleh kelompok masyarakat di Kota Sawahlunto. Jumlah sasaran penerima sebanyak 46 orang, dengan rincian anggaran sebesar Rp. 458.400.000,-

Tabel 4.79
Realisasi Pencapaian Anggaran APBD Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial				
				Penyediaan Alat Bantu	100%	Rp. 10.400.000	Rp. 9.850.000 (94,74 %)
				Masyarakat Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	100%	Rp. 159.210.660	Rp. 159.001.763 (99,86 %)
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100%	Rp. 198.397.600-	Rp. 195. 900.000- (98,8 %)
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	Penyedian permakanan	100 %	Rp.20.000.000.	Rp. 19.760.000 (99,9 %)

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Dan	100%	Rp.132.000.000	Rp. 130.900.000 (99,7 %)
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial				
				Pemberian Layanan Kedaduratan	100%	Rp.271.400.000	Rp. 269.400.000 (99,26 %)
				Penyediaan Permakanan	100%	Rp. 231.796.000	Rp. 230.796.000 (99,30 %)
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti		-	-	-	-	-
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	Koordinasai Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100 %	Rp. 36.387.100	Rp. 14.142.700 (39 %)
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	Penyediaan Permakanan	100%	Rp. 14.966.900	Rp. 1.782.800 (12 %)

Sumber data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah dana yang di alokasikan untuk kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada urusan Sosial Kota Sawahlunto adalah :

1) Jenis Pelayanan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti, program Rehabilitasi Sosial, ada 2 kegiatan:
   a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu dana yang di anggarkan sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan realisasi Rp. 9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), (94,74%), sub kegiatan emberian bpimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dana yang di anggarkan sebesar Rp. 159.210.763,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), dengan realisasi anggaran Rp. 159.001.763,- (98, 87 %) sub kegiatan pemberian akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, dana yang di anggarkan sebesar Rp. 198.397.600,- (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 195.900.000,- (seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) (98,8 %).
   b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti dengan sub kegiatan penyediaan permakanan dana yang di anggarkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) realisasi anggaran Rp. 19.760.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) (99,%).
2) Jenis Pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di luar panti, program Rehabilitasi Sosial, kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan sub kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat dana yang di anggarkan sebesar 132.000.000,- (Seratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan realisasi anggaran Rp. 130.900.000 (Seratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) (99,2 %).

3) Jenis pelayanan dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti program Rehabilitasi Sosial, kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial dengan sub kegiatan Penyediaan Layanan Kedaduratan dana yang di anggarkan sebesar Rp. 271.400.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) realisasi anggaran sebesar Rp. 269.400.000,- (Dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) (99,28 %) dan Sub Kegiatan penyediaan permakanan lansia dana yang di anggarkan sebesar Rp. 231.796.000,- (Dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) realisasi anggaran Rp. 230.183.840,- (Dua ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) (99,30%).
4) Jenis layanan Rehabilitasi Sosial khusus gelandangan dan pengemis untuk tahun 2025 tidak ada data sasaran di Kota Sawahlunto.
5) Jenis Pelayanan Dasar Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota, Program penanggulangan Bencana dalam program penanggulangan bencana ada dua kegiatan yaitu :
   a. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten / Kota, Sub Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Jumlah dana ya ng tersedia untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 36.387.100,- (Tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah), realisasi anggaran adalah Rp. 14.966.900,- (Empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) (38,86%), realisasi anggaran hanya mencapai 38,86 % di sebabkan karena keadaan penanggulangan bencana sesuai dengan kasus kejadian bencana yang terjadi, kegiatan yang di fasilitasi dalam kegiatan ini adalah Taruna siaga bencana melaksanakan evakuasi korban bencana alam dan sosial di Kota Sawahlunto maupun diluar Kota Sawahlunto. Dalam menunjang kegiatan ke lapangan TAGANA diberikan uang transpor sebesar Rp 100.000,- /orang untuk 1 hari, dan memfasilitasi makan minum Tagana yang turun ke lapangan.
   b. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penyediaan Permakanan kegiatan ini pemberian paket sembako yang diberikan kepada korban bencana alam dan sosial dana yang di angggarkan sebesar Rp. 14.966.900,- (Empat belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) realissai anggaran Rp. 1.782.800,- (Satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (11,91%) dengan pemberian bantuan permakanan kepada korban bencana alam dan sosial di Kota Sawahlunto dapat terbantunya pemenuhan kebutuhan dasar pangan korban bencana Alam dan bencana sosial pemenuhan kebutuhan makanan hanya difasilitasi 1 paket Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000. Jumlah bantuan paket sembako yang diberikan sebanyak 2 KK dengan jiwa 9 jiwa yang di fasilitasi pemberian paket sembako 2 KK dengan 9 jiwa yang tertangani tanggap darurat Pasca kejadian bencana pada tahun 2025.

Tabel 4.80
Realisasi Pencapaian Anggaran APBN Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	
				APBN	JUMLAH ANGGARAN REALISASI
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial 1.Penyedian Permakanan 2. Program Keluarga Harapan	Rp. 216.976.000 Rp. 458.400.000	100 % 100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Rp. 283.200.000	100 %

3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial 1.Penyedian Permakanan 2. PKH	Rp. 377.456.000 Rp. 2.743.200.000	100% 100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	-	-	-	
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana K Ab/Kota	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota.		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kab/Kota		

Sumber data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto

4.6.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Sosial, 2 orang pejabat fungsional di bidang sosial dan 6 orang staf dengan Mitra kerja baik dari Kementerian Sosial maupun dari Masyarakat seperti SDM PKH 6 orang, TKSK 4 orang, TAGANA 28 orang, PSM 38 orang dan Karang Taruna 37 orang.

Tabel 4.81
Tabel Dukungan Personil Tahun 2025

NO.	URAIAN	NAMA PEJABAT
1	*2*	*3*
1.	Kepala Dinas	ADRI YUSMAN, S,Sos.MM
2.	Sekretaris Dinas	YENNY HALIL, S.Pt.MM
	2.1 Kepala Subbag. Administrasi Umum dan Kepegawaian	RENI RUSLI, S.Sos.MM
3.	Kepala Bidang Sosial	IRWAN JUNAIDI, SE

	3.1 Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Sosial	ASTUTI SURYA NINGSIH, S.ST.
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	ADRIUS SKM,M.Kes
	4.1 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat	YUL EFRINA, SKM
	4.2 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat	REGINA DIASKA VELLA, SSTP.MM
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Desa	TRI SYAHPUTRI, SSTP.MM
	5.2 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Desa	EFRIDA, SE
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RINA NASRI, SKM
	6.1 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPA dan PP	EVRA QOMARIAH, SKM.MM
	6.2 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat	NIA PRIMA SHARTIKA, SKM.M.Kes

Sumber data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.82
Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Sosial Tahun 2025

NO	PERMASALAHAN
1	Belum maksimalnya jumlah bantuan yang diberikan kepada pemerlu pelayanan sosial
2	Masih adanya Penyandang Disabilitas yang belum tersentuh bantuan, hal ini dikarenakan tidak memiliki identitas kependudukan, belum melakukan sidik jari sehingga memakai identitas yang lama dengan NIK yang belum padan dengan DUKCAPIL.
3	Masih adanya lansia yang belum tersentuh oleh bantuan, hal ini di karenakan tidak memiliki indentitas kependudukan
4	Belum melakukan sidik jari sehingga memakai identitas yang lama dengan NIK yang belum padan dengan DUKCAPIL.
	SOLUSI
1	Sudah di sampaikan ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tentang belum adanya identitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia

2	Walaupun masih adanya keterbatasan Anggaran bukan menjadikan kita tidak melaksanakan kegiatan / melakukan pelayanan Reahabilitasi Sosial yang di syaratkan oleh SPM tetapi kita harus mampu memcarikan solusi yang terbaik tehadap kendala-kendala terutama masalah anggran, yakni melalui proposal, lobi-lobi CSR Perusahaan maupun koordinasi dengan UPTD-UPTD yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maupun Kemensos RI.
3	Untuk memenuhi kebutuhan anggaran penerapan dan pencapaian SPM tahun 2025 telah di alokasikan pada APBD perubahan tahun 2025.

Sumber data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto

4.7 Program dan Kegiatan

4.6.1. Urusan Pendidikan

Dalam mempercepat dan meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenlaktur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah RPD Kota Sawahlunto. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.83
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

NO	URAIAN		
	SPM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
A. SPM Bidang Pendidikan			
1	**Pendidikan Dasar**	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

NO	URAIAN		
	SPM	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**
1	2	3	4
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
			penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik
		Total SPM Pendidikan Dasar	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		Total SPM Pendidikan Menengah	
	Total Pendidikan Dasar		
2	**Pendidikan Kesetaraan**	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan non formal
			Penyelenggara Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
	Total Pendidikan Kesetaraan		

NO	URAIAN		
	SPM	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**
1	2	3	4
3	**Pendidikan Anak Usia Dini**	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelengaraan Proses Belajar PAUD
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

4.6.2. Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan Perencanaan SPM berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, program dan kegiatan yang tercakup adalah sebagai berikut :

Tabel 4.84

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SPM
1	*2*	*3*	*4*
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
1.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daearah Kabupaten/Kota	1. Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	1. Pelayanan kesehatan Ibu Hamil
		2. Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		3. Pengelolaan Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	3. Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SPM
1	*2*	*3*	*4*
		4. Pengelolaan Pelayanan kesehatan Balita	4. Pelayanan Kesehatan Balita
		5. Pengelolaan Pelaynan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	5. Pelayanan Kesehatan orang pada usia pendidikan dasar
		6. Pengelolaan Pelayanan kesehatan Pada usia Produktif	6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
		7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia lanjut	7. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus	9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
		10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
		11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11. Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis
		12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinveksi HIV	12. Pelayanan kesehatan orang denga risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)

Sumber data: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto

4.6.3. Urusan Pekerjaan Umum

Program Kegiatan Bidang Keciptakaryaan yang Menunjang Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.85
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUMBER DANA
1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DAK TA. 2025
2	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	APBD TA. 2025
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	APBD TA. 2025

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto

4.6.4. Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian standar Pelayanan Minimal pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.86
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	2	3
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kota Sawhlunto	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto	

Sumber data: Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto

4.6.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sawahlunto telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.87
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
				Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa
				Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM
			Penegakan Peraturan	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

			Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
				Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Mitigasi Bencana	Peningkatan Pencegaha dan Kesiapsiagaan di Lokasi Bencana/Rawan Bencana	
3	Pelayanan Pencagahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyebaraluasan Informasi Kebencanaan dan Penguatan Peran Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam 2. Pembentukan Desa Tangguh 3. Peningkatan Kapasitas F-PRB	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penanganan Darurat dan Evakuasi Korban Bencana	Penanganan Kedaruratan Bencana/Rawan Bencana	
		Pengelolaan Logistik dan Peralatan Penunjang	Pengelolaan Logistik dan Peralatan/Perlengkapan bagi korban bencana	

		Penanganan Bencana		
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
			Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi da Edukasi Masyarakat

Sumber data: Satpol PP Damkar dan BPBD Kota Sawahlunto

4.6.6. Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian standar Pelayanan Minimal pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait SPM Urusan Sosial Tahun 2025

NO	SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	PROGRAM REHABILITASI	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,

NO	SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*
	Terlantar di Luar Panti	SOSIAL	gelandangan, pengemis, di luar panti
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, di luar panti
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, di luar panti
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/kota	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota

Sumber data: Dinas SosialPMDPPA

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Sawahlunto Tahun 2025, dalam konteks tatanan manajemen pemerintahan daerah merupakan pengaktualisasian prinsip konsepsi pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan suatu siklus dari proses komitmen dan *politicall will* yaitu kemampuan dan keberanian Pimpinan Pemerintahan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengaktualisasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjembatani terciptanya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah antar *stakeholder* terkait guna mewujudkan *Good Local Governance* dan secara hukum tertulis yang dibuat dan disahkan oleh Pemerintah (*yuridis formil)* didasarkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kerangka pemahaman tersebut, Pemerintah Kota Sawahlunto yang telah melaksanakan program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2025 wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto pada Tahun Anggaran 2025 dan pada gilirannya akan memberikan timbal balik secara simultan dan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), pada hakekatnya merupakan wujud nyata adanya hubungan antara penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan secara penerapannya menjadi media dan sarana bagi Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota

Sawahlunto pada Tahun 2025. Dan pada gilirannya dapat meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam kerangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto tersebut, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Kota Sawahlunto mulai dari proses perumusan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada dalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Sawahlunto yang Lebih Baik.

Dalam penjelasan pelaksanaan kegiatan dan beberapa hal selama tahun 2025 yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa catatan yang perlu kami sampaikan yakni sebagai berikut :

1. Walaupun terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang disebabkan berbagai hal, namun secara umum seluruh Arah Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas pembangunan selama tahun 2025, telah dapat dituangkan dan direalisir melalui berbagai program dan kegiatan sebagaimana terakomodir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025.
2. Melalui keberhasilan melaksanakan berbagai program dan kegiatan tersebut, maka roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kota Sawahlunto selama tahun 2025 telah dapat berjalan dengan baik. Pelayanan kepada masyarakat secara bertahap telah dapat ditingkatkan, kehidupan masyarakat telah berlangsung dalam suasana kondusif, aman tanpa gejolak yang berarti. Kehidupan ekonomi masyarakat dirasakan sudah agak membaik, tingkat kesejahteraan masyarakat dalam arti luas menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Semua itu berkat berbagai upaya yang telah dilakukan secara bersama dan berkesinambungan.
3. Kita semua berharap semoga berbagai keberhasilan yang dicapai dapat dijadikan modal dan motivasi untuk melanjutkan berbagai upaya yang telah dirintis dan kita laksanakan untuk membawa masyarakat kearah yang dicita-citakan yaitu

Sawahlunto yang Lebih Baik. Sementara berbagai kelemahan dan kekurangan harus diperbaiki dan dijadikan pengalaman serta pelajaran yang berharga untuk tidak terulang kembali.

4. Perubahan *paradigma* penyelenggaraan Pemerintahan telah membuka mata dan membuat kita makin menyadari bahwa peranan dan partisipasi masyarakat untuk masa mendatang akan sangat penting dan dominan
5. dalam menentukan arah dan jalannya roda pemerintahan. Berbagai mekanisme yang telah berjalan dengan baik dalam upaya mewujudkan *Good Governance* serta pelaksanaan Otonomi Daerah seperti pola Perencanaan Partisipatif, mekanisme pengambilan keputusan/ penetapan kebijakan publik melalui *duduak basamo* dan *public hearing* pengawasan masyarakat, mekanisme pembangunan sarana dan prasarana desa, anggaran berbasis kinerja penatausahaan keuangan berbasis akuntansi, dan lain sebagainya perlu ditingkatkan dan dijaga kesinambungannya, sehingga arah yang ditempuh dalam menyikapi Otonomi Daerah benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pemerintah Kota Sawahlunto dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya tetap memfokuskan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kebijakan dan program yang direalisasikan pada tahun 2025 dapat terlihat dengan nyata, menyentuh hingga tingkat *grassroot* dan dapat dipertanggungjawabkan. Terlepas dari kekurangan dan keberhasilan terhadap realisasi kegiatan, hal ini merupakan wujud nyata hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, DPRD, Pihak Ketiga dan Masyarakat Kota Sawahlunto. Kekurangan perlu dilengkapi bersama dengan segala kewenangan yang dimiliki, sedangkan keberhasilan patut dipertahankan bahkan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan penjelasan terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanahkan dalam APBD tahun 2025. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang berpartisipasi sehingga tersusunnya laporan ini dengan baik, dan semoga dengan laporan ini dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada seluruh *stakeholder* kota secara umum dan Menteri Dalam Negeri secara khusus dengan harapan dapat memberikan

umpan balik dan masukan demi kesempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Jl. Soekarno - Hatta Lubang Panjang
Kota Sawahlunto, Sumatera Barat 27424

Telp/Fax (0754) 61062/61011

https://sawahluntokota.go.id

informasi@sawahluntokota.go.id